

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA

**AKHIR TAHUN ANGGARAN
2023**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat terus menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya termasuk dalam hal penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2023 berikut penyampaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam Rapat Paripurna dilakukan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2023 menyajikan rangkuman dari pelaksanaan, hasil, dan pencapaian berbagai tugas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dokumen ini mencakup kegiatan dan program yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2023, termasuk visi, misi, kebijakan, strategi, serta target program dan proyek pembangunan selama tahun 2023. LKPJ ini bertujuan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dapat menerima informasi yang komprehensif untuk evaluasi pelaksanaan tugas dan efektivitas Pemerintah Kota Surabaya sepanjang tahun 2023.

Sejak tahun 2022, kita berusaha untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak dengan terjadinya Pandemi Covid-19. Sejak tahun 2022 pula tema dan prioritas kita ditekankan pada transformasi ekonomi dengan dititikberatkan pada ekonomi kerakyatan. Segala upaya kita kerahkan termasuk dalam memfokuskan perencanaan dan penganggaran agar memberikan dampak langsung bagi pemulihan kondisi perekonomian masyarakat.

Usaha-usaha yang kita lakukan dengan semangat gotong royong tersebut tidak mengkhianati hasil yang kita dapatkan sehingga tahun 2023 ini tingkat pengangguran kita ada pada angka 6,76% jauh berkurang dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 9,79%, hal ini sejalan dengan semakin turunnya angka kemiskinan dari tahun 2020 yang naik menjadi 5,02%, sudah semakin menurun jumlahnya menjadi 4,65%. Demikian juga pada pertumbuhan ekonomi kita yang terus bergerak positif sehingga di 2023 ini kita tumbuh 5,7% setelah di 2020 kita berkontraksi di -4,85%.

Pada pembangunan manusia kita terus membaik pada angka 83,99 dengan kategori ***"sangat tinggi"***, dengan Umur Harapan Hidup tertinggi di Jawa Timur pada angka 75,82, yang artinya perjuangan kita dalam memberikan akses pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan berbagai intervensi terpadu yang dilakukan mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, seluruh Perangkat Daerah dan dengan berkolaborasi dengan seluruh pihak baik lembaga non pemerintah, perusahaan, forkopimda, DPRD telah berada di koridor yang tepat. Selain upaya pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial pasca pandemi covid-19, kita tetap berupaya menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada di Kota Surabaya, mulai dari sistem drainase, pengolahan sampah, transportasi publik, dandan omah yang kita lakukan agar kualitas kehidupan warga Surabaya semakin meningkat.

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak dapat diraih oleh kerja Pemerintah Kota Surabaya saja, melainkan juga berkat kolaborasi dengan DPRD Kota Surabaya, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan terkait. Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya di masa mendatang.

Demikian LKPJ Walikota Tahun 2023 disampaikan. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dokumen menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan proses pembangunan di Surabaya di masa mendatang, dan mendorong Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan melalui gotong royong dan sinergi kuat untuk Surabaya hebat. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Salam sejahtera

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya



Surabaya, 13 Maret 2024
Walikota Surabaya

[Signature]
ERI CAHYADI, ST, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 DASAR HUKUM	I-2
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	I-6
1.3 DATA UMUM DAERAH.....	I-9
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II-1
2.1 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	II-2
2.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	II-5
2.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	II-7
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III-1
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	III-486
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	III-498
3.4 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	III-537
3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2023	III-547
 BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV-1
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN.....	IV-1
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	IV-2
 BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perumusan Penjelasan Visi – Misi	I-8
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023	I-13
Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin	I-15
Tabel 1.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin.....	I-15
Tabel 1.5 Jumlah PNS berdasarkan Golongan.....	I-16
Tabel 1.6 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	I-16
Tabel 1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022-2023* (dalam miliar Rupiah).....	I-21
Tabel 1.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2023* (dalam miliar Rupiah).....	I-22
Tabel 1.9 10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya Selama Tahun 2023.....	I-26
Tabel 1.10 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2023	I-27
Tabel 1.11 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	I-27
Tabel 1.12 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2023.....	I-29
Tabel 1.13 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2023.....	I-32
Tabel 1.14 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.....	I-34
Tabel 1.15 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.....	I-36
Tabel 1.16 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.....	I-37
Tabel 1.17 Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2023	I-41
Tabel 1.18 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023	I-42
Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023	II-4
Tabel 2.2 Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2023	II-6
Tabel 2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023.....	II-8
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pembangunan Utama	III-4
Tabel 3.2 Indeks Gini Tahun 2019 – 2023	III-5
Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 2019 – 2023	III-7
Tabel 3.4 Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023	III-7
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 – 2023.....	III-11
Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023	III-14
Tabel 3.7 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota di Indonesia Tahun 2023.....	III-15
Tabel 3.8 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023	III-16
Tabel 3.9 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Indonesia Tahun 2023.....	III-17
Tabel 3.10 Indeks Budaya Lokal Tahun 2019 – 2023	III-19
Tabel 3.11 Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2023	III-20
Tabel 3.12 Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2023.....	III-23
Tabel 3.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021 – 2023	III-26
Tabel 3.14 Indeks Penyusun IKLH Tahun 2021 – 2023	III-26
Tabel 3.15 Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2019 – 2023.....	III-27
Tabel 3.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2019 – 2023	III-28
Tabel 3.17 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023	III-30

Tabel 3.18 Penilaian RB General Kota Surabaya Tahun 2023	III-31
Tabel 3.19 Penilaian RB Tematik Kota Surabaya Tahun 2023	III-32
Tabel 3.20 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2023.....	III-32
Tabel 3.21 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023	III-35
Tabel 3.22 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2023	III-35
Tabel 3.23 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023.....	III-38
Tabel 3.24 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023.....	III-48
Tabel 3.25 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023.....	III-138
Tabel 3.26 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023	III-231
Tabel 3.27 Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023	III-250
Tabel 3.28 Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023	III-280
Tabel 3.29 Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023.....	III-314
Tabel 3.30 Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2023	III-322
Tabel 3.31 Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023	III-475
Tabel 3.32 Kebijakan Strategis Tahun 2023	III-487
Tabel 3.33 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2022.....	III-499
Tabel 3.34 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023	III-537
Tabel 3.35 Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023.....	III-547

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2023.....	I-11
Gambar 1.2 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia.....	I-12
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	I-13
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023.....	I-17
Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kota Surabaya Tahun 2023*.....	I-20
Gambar 1.6 Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023.....	I-23
Gambar 1.7 Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023.....	I-24
Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023	III-2
Gambar 3.2 Indeks Gini Tahun 2019 – 2023	III-5
Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 – 2023	III-7
Gambar 3.4 TPT Menurut Pendidikan Tahun 2021 – 2023	III-8
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 – 2023.....	III-11
Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 – 2023.....	III-14
Gambar 3.7 Indeks Budaya Lokal Tahun 2019 – 2023	III-19
Gambar 3.8 Indeks Harmoni Sosial 2022 - 2023	III-20
Gambar 3.9 Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2022 – 2023	III-23
Gambar 3.10 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2019 – 2021	III-34
Gambar 3.11 Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Tahun 2022 - 2023.....	III-36
Gambar 3.12 Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya.....	III-482
Gambar 3.13 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III-483
Gambar 3.14 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III-484
Gambar 3.15 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan	III-485
Gambar 3.16 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	III-485
Gambar 3.17 Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	III-486

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Kondisi ekonomi di tahun 2023 pasca pandemi Covid-19 mulai pulih meningkat selaras dengan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 “Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan” yang dilaksanakan pada RKPD Tahun 2023 dengan tema pembangunan “Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”, maka program dan kegiatan tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi, pengurangan pengangguran terbuka dan peningkatan aspek pembangunan manusia.

Penyusunan kebijakan pada tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sedangkan penyusunan penganggaran berpedoman Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, memuat capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya Tahun 2023 didasarkan atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 6);
31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 55);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 78).

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

***“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang
Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”***

Makna dalam visi tersebut adalah:

1. **Gotong Royong** Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat

diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.

2. **Maju** yaitu Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.
3. **Humanis** dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.
4. **Kota Dunia Berkelanjutan** Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya-.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Tabel 1.1
Perumusan Penjelasan Visi – Misi

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan	Maju	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
	Humanis	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
		Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan
	Berkelanjutan	Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
		infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
		Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

1.3 DATA UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah Kota Surabaya disajikan berdasarkan kondisi geografis dan demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Surabaya secara geografis terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77% dan sebelah selatan sebesar 6,52%. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas ± 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas wilayah Kota Surabaya seluas 335,925 km² (± 33.592,5 Ha).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;

3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

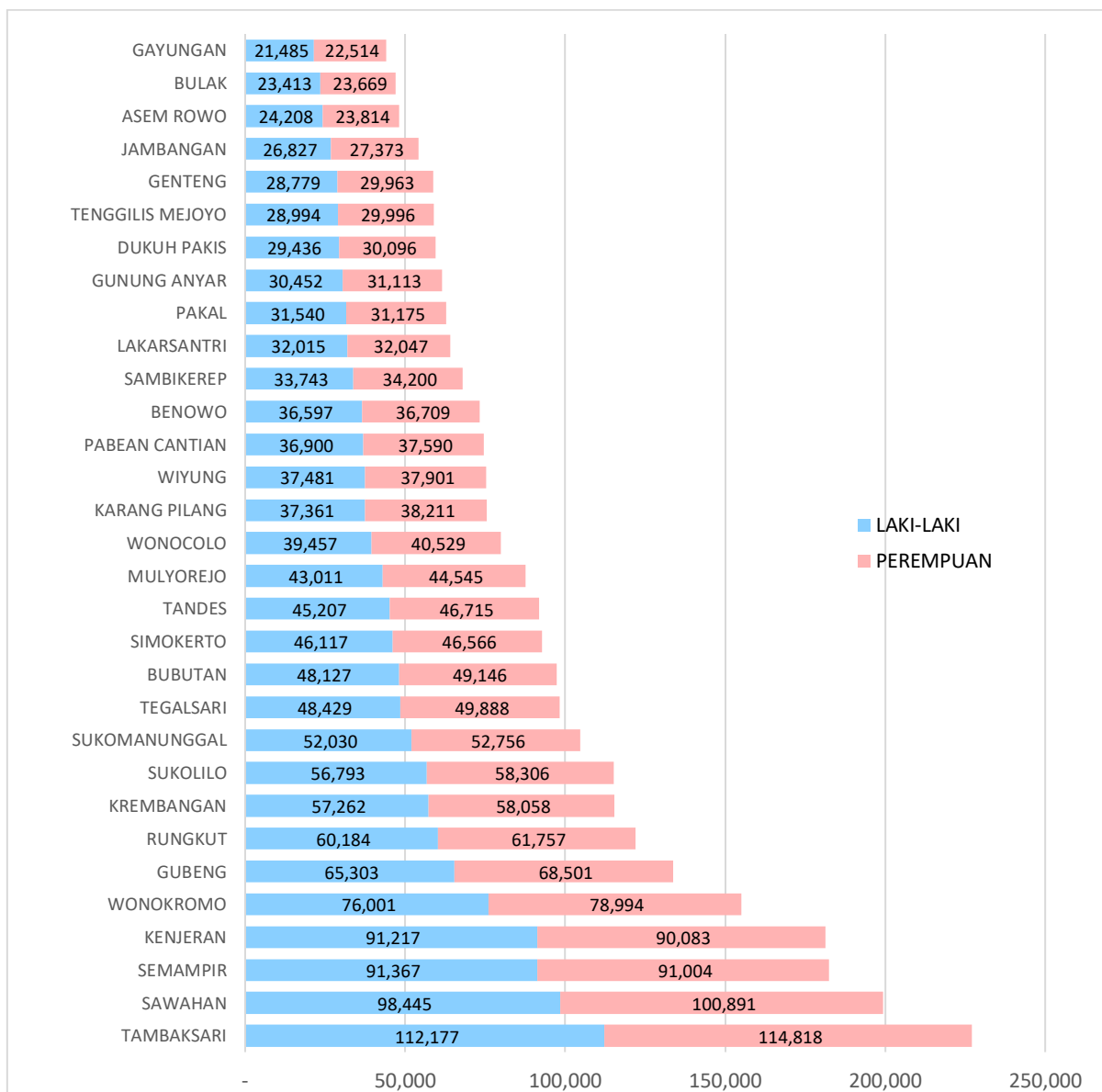
1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Surabaya yang memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) pada tahun 2023 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebesar 3.009.286 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.518.928 jiwa atau 50,47% penduduk perempuan dan 1.490.358 jiwa atau 49,53% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 226.995 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Gayungan yaitu 43.999 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2023

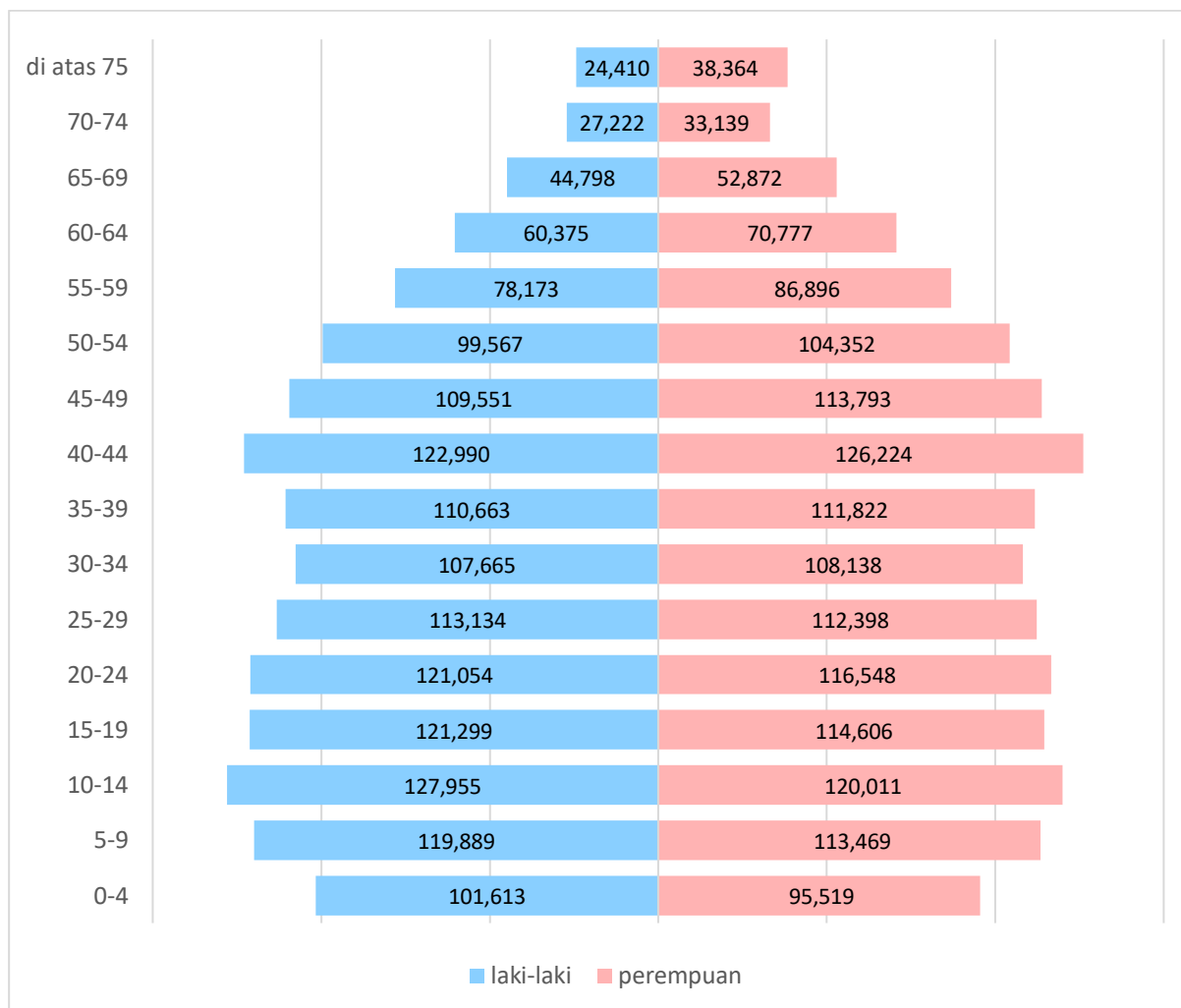


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2023

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.110.025 jiwa atau 70,12%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 678.456 jiwa atau 22,55% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 220.805 jiwa atau 7,34%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (*stasioner*). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Surabaya memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil.

Gambar 1.2
Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia

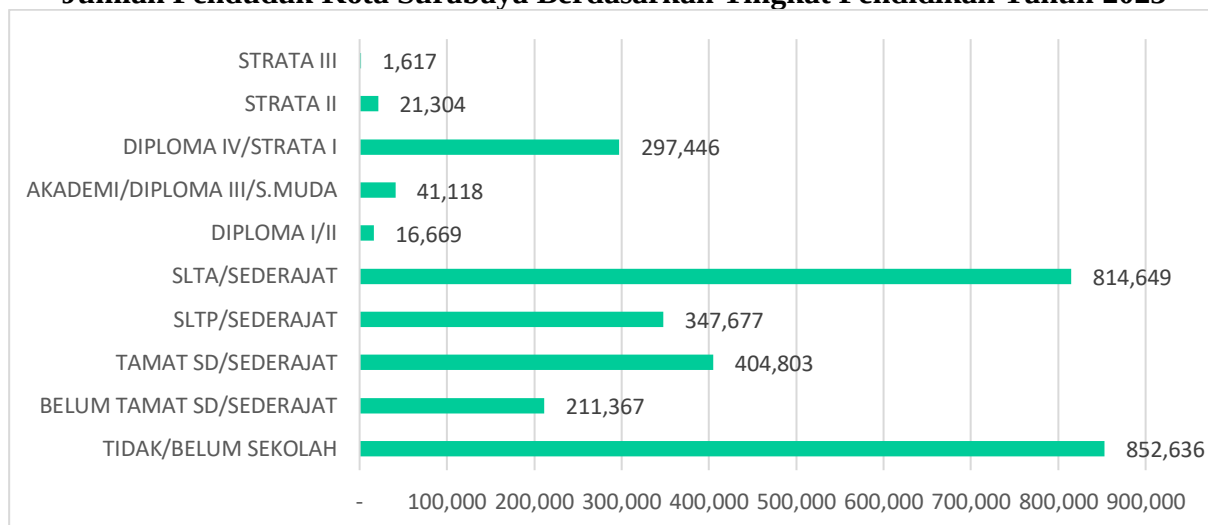


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2023

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Strata), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I sebanyak 297.446 jiwa. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 814.649 orang dan untuk yang tidak/belum sekolah sebanyak 852.636 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2023

d. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2019-2023 relatif stabil. Pergerakan jumlah penduduk, selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk perkecamatan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No.	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
1	Karang Pilang	77.557	74.281	74.341	74.931	75.572	0,86%
2	Wonocolo	85.284	79.361	79.260	79.559	79.986	0,54%
3	Rungkut	121.247	117.287	117.983	120.067	121.941	1,56%
4	Wonokromo	169.994	159.138	157.126	155.559	154.995	-0,36%
5	Tegalsari	108.097	98.904	98.288	98.484	98.317	-0,17%
6	Sawahan	216.414	201.743	200.341	199.548	199.336	-0,11%
7	Genteng	63.165	58.450	58.114	58.601	58.742	0,24%
8	Gubeng	143.874	135.817	134.467	133.900	133.804	-0,07%
9	Sukolilo	116.915	110.705	111.762	113.876	115.099	1,07%
10	Tambaksari	239.272	225.507	225.180	226.136	226.995	0,38%
11	Simokerto	104.143	94.619	93.793	92.832	92.683	-0,16%

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No.	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
12	Pabean Cantian	85.856	75.346	74.820	74.810	74.490	-0,43%
13	Bubutan	107.835	98.762	97.573	97.707	97.273	-0,44%
14	Tandes	96.590	91.827	91.462	91.784	91.922	0,15%
15	Krembangan	126.743	114.807	114.618	114.674	115.320	0,56%
16	Semampir	206.449	183.158	183.344	181.226	182.371	0,63%
17	Kenjeran	179.198	172.452	174.180	177.561	181.300	2,11%
18	Lakarsantri	61.907	60.770	61.422	63.017	64.062	1,66%
19	Benowo	68.351	67.828	68.643	71.033	73.306	3,20%
20	Wiyung	74.024	72.522	73.223	74.224	75.382	1,56%
21	Dukuh Pakis	62.846	59.740	59.564	59.293	59.532	0,40%
22	Gayungan	47.827	43.553	43.336	43.617	43.999	0,88%
23	Jambangan	54.105	52.249	52.851	53.639	54.200	1,05%
24	Tenggilis Mejoyo	60.274	58.239	58.329	58.695	58.990	0,50%
25	Gunung Anyar	60.505	59.048	59.673	60.535	61.565	1,70%
26	Mulyorejo	91.339	86.407	86.469	86.824	87.556	0,84%
27	Sukomanunggal	108.264	103.814	103.831	104.271	104.786	0,49%
28	Asemrowo	49.808	46.563	47.036	47.437	48.022	1,23%
29	Bulak	46.166	44.975	45.420	46.350	47.082	1,58%
30	Pakal	58.599	57.805	58.865	60.877	62.715	3,02%
31	Sambikerep	66.833	65.053	65.638	66.796	67.943	1,72%
JUMLAH		3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863	3.009.286	0,72%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Pada Tahun 2020, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya -5,97%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan penyesuaian data dengan Satu Data Kementerian Dalam Negeri yang disebut dengan Data Kementerian Bersih (DKB). Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya berada di bawah 1%, yakni 0,01% di tahun 2021, 0,57% di tahun 2022 dan 0,72% di tahun 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Benowo sebesar 3,20% diikuti Kecamatan Pakal sebesar 3,02% dan Kecamatan Kenjeran sebesar 2,11%.

1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS agar dapat mewujudkan pelayanan prima. Di tahun 2023, jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Jumlah PNS Laki-laki	4.177
2.	Jumlah PNS Perempuan	6.410
Jumlah seluruh PNS		10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan pemegang jabatan struktural karena komposisi pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki yang lebih besar daripada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel 1.4. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan melalui penerapan manajemen talenta sehingga baik PNS Laki-laki maupun Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural.

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Jumlah PNS Pejabat Struktural	1.167
	Laki-laki	613
	Perempuan	554
2.	Jumlah PNS Staf dan Tenaga Fungsional	9.420
	Laki-laki	3.564
	Perempuan	5.856
Total		10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disampaikan dalam Tabel 1.5. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Surabaya.

Tabel 1.5
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Jumlah PNS Golongan I	107
2.	Jumlah PNS Golongan II	1.720
3.	Jumlah PNS Golongan III	6.810
4.	Jumlah PNS Golongan IV	1.950
Jumlah seluruh PNS		10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Jumlah PNS dengan tingkat golongan golongan III dan IV, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.6. menunjukkan bahwa golongan III dan IV tersebut banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan diploma III, strata I dan strata II.

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	SD	147
2.	SMP	254
3.	SLTA	1.967
4.	Diploma I	10
5.	Diploma II	96
6.	Diploma III	996
7.	Diploma IV	93
8.	Strata I	6.047
9.	Strata II	970
10.	Strata III	7
Jumlah seluruh PNS		10.587

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

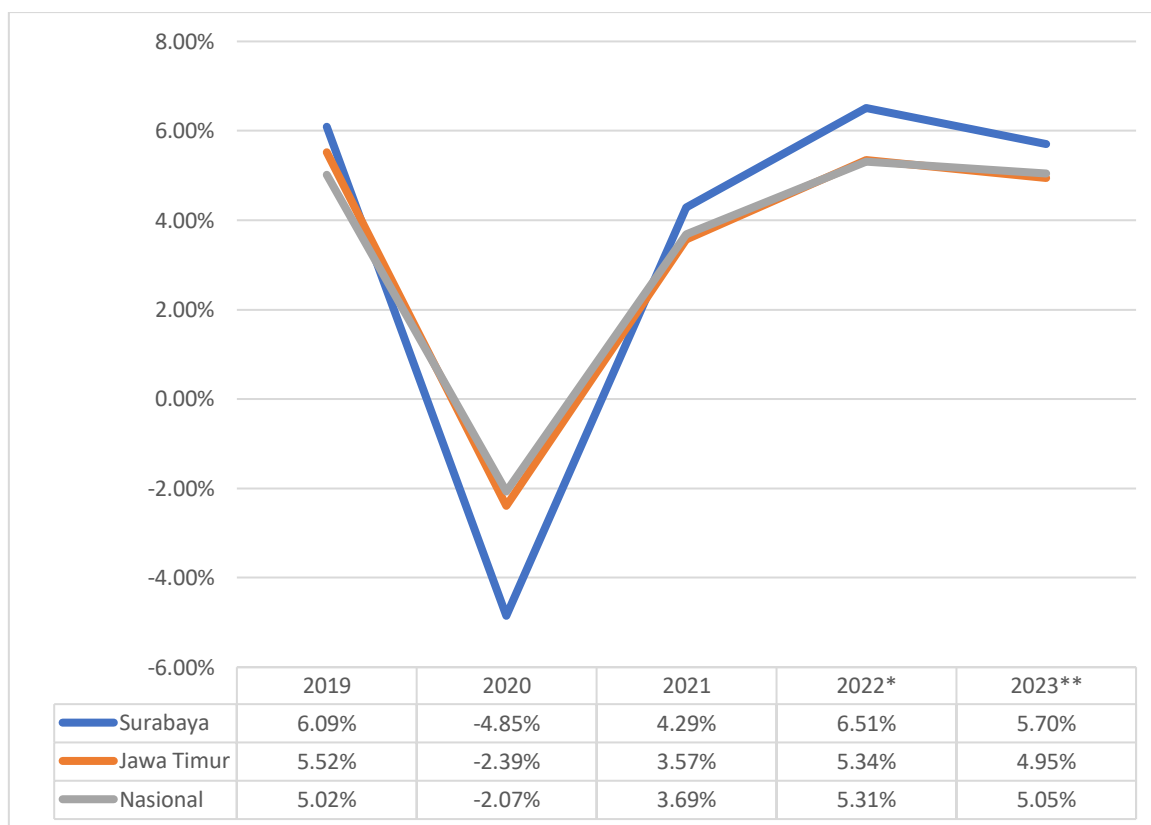
1.3.4 Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023 perekonomian Kota Surabaya tumbuh positif sebesar sebesar 5,70 persen. Meskipun capaian pada tahun ini lebih lamban dibanding tahun 2022 yang mencapai angka yang lebih tinggi yakni sebesar 6,51 persen namun ekonomi Kota Surabaya terjaga tumbuh stabil di atas angka 5 persen. Dapat dilihat dalam grafik, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan selaras dengan kinerja ekonomi pusat maupun provinsi yang mengalami pertumbuhan dengan kondisi yang sama. Kinerja ekonomi Kota Surabaya patut diapresiasi karena masih tumbuh cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi fluktuatif yang terjadi selama tahun 2023. Kondisi ekonomi global saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari aksi geopolitik

ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia, perlambatan ekonomi negara-negara maju seperti Tiongkok, ketidakstabilan harga baik karena permintaan ataupun ketersediaan, serta volatilitas harga komoditas. Perlambatan ekonomi pada tahun 2023 merupakan bagian keberlanjutan dari pemulihan pasca pandemi Covid-19, yakni perekonomian secara umum mencari keseimbangan baru pasca pandemi.

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah

Catatan :*)Data sementara

**)Data sangat sementara

Selama tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Dari sisi konsumsi, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat Kota Surabaya tetap tinggi. Hal itu diwujudkan melalui pengendalian inflasi untuk meningkatkan konsumsi dengan menjaga harga barang dan jasa di Kota Surabaya stabil rendah. Seperti yang ditunjukkan data BPS Kota Surabaya, dari sisi PDRB pengeluaran, proporsi konsumsi berkontribusi sebesar 60,39 persen terhadap perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023. Pengendalian tersebut diwujudkan melalui monitoring dan pemantauan harga secara masif untuk

komoditi-komoditi strategis pemicu utama inflasi di Kota Surabaya. Tidak sampai di situ, terjaminnya ketersediaan pangan dan terjaganya rantai distribusi juga menjadi fokus pemerintah agar tidak menimbulkan kelangkaan di pasaran yang akhirnya memicu terjadinya inflasi. Pemerintah juga melakukan intervensi untuk menjaga daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat Kota Surabaya dengan pemberdayaan usaha padat karya yang melibatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Intervensi pendorong pertumbuhan Kota Surabaya dilakukan melalui perbaikan iklim investasi. Peningkatan investasi diwujudkan melalui kemudahan-kemudahan perizinan investasi. Kemudahan perizinan dan inovasi-inovasi pelayanan investasi yang telah dilakukan saat ini di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti Surabaya Single Window Alfa (SSWALFA), klinik investasi. Inovasi Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya) dan lainnya. Inovasi-inovasi tersebut dilakukan selain bermanfaat untuk membantu pelaku usaha mendapatkan informasi terkait potensi investasi di Kota Surabaya, juga memberikan pendampingan pengurusan perizinan dan menyelesaikan permasalahan dalam investasi. Upaya mendorong perekonomian dari aspek investasi berhasil dilakukan ditunjukkan dari nilai capaian realisasi investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya selama tahun 2023 mencapai hingga 37 triliun. Dengan capaian tersebut, investasi di Kota Surabaya dapat memberikan efek sampingan (*multiplier effect*) seperti menurunkan tingkat kemiskinan melalui banyaknya penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya mengalami penurunan, yakni pada tahun 2022 TPT Kota Surabaya sebesar 7,62 persen menurun menjadi sebesar 6,76 persen.

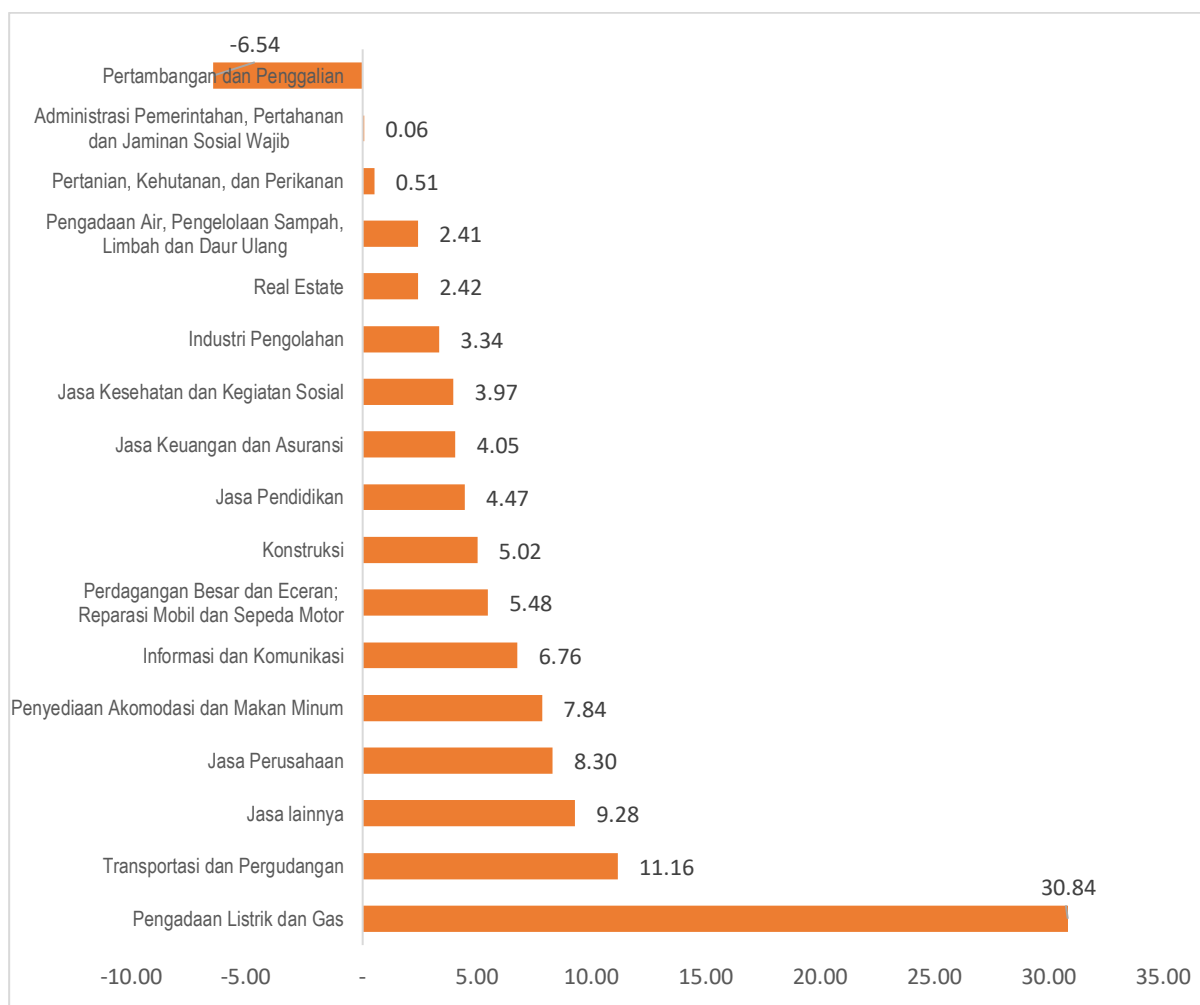
Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga didorong melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 melalui pemberian keringanan atas kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Kebijakan tersebut difokuskan kepada peningkatan produktivitas usaha bisnis melalui pemberian keringanan pajak maupun retribusi. Program insentif pajak tersebut tertuang dalam beberapa regulasi Peraturan Walikota di tahun 2023 meliputi pembebasan bumi bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Regulasi-regulasi tersebut antara lain, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2023, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2023 dan regulasi lainnya. Karakteristik kota Surabaya sebagai kota bisnis dan dagang, adanya penetapan insentif pajak tersebut turut berkontribusi dalam kemudahan bisnis di Kota Surabaya.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi juga dikontribusi oleh berbagai sektor. Kecepatan laju pertumbuhan lapangan usaha berbeda antar lapangan usaha satu dengan yang lainnya. Kecepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar peranan lapangan usaha berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan serta kendala dari masing-masing lapangan usaha untuk terus tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran, pada tahun 2023 terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih berkontraksi yakni lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pengadaan listrik dan gas sebesar 30,84 persen. Lapangan usaha ini tumbuh pesat dikarenakan tingginya kebutuhan akan listrik dan gas untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat di Kota Surabaya sehingga permintaan akan komoditas tersebut sangat tinggi.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yakni transportasi dan pergudangan sebesar 11,16 persen. Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi dikarenakan peran sektor transportasi merupakan sarana penting dalam aktivitas perekonomian. Sebagai moda mobilitas dan aktivitas masyarakat, tingkat mobilitas yang tinggi mengindikasikan semakin produktif suatu perekonomian.

Lapangan usaha tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 5 hingga 10 persen, secara berurutan yakni jasa lainnya (9,28 persen), jasa perusahaan (8,30 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,84 persen), informasi dan komunikasi (6,76 persen), diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan sepeda motor (5,48 persen), konstruksi (5,02 persen). Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2023 yakni pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar -6,54 persen.

Gambar 1.5
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2023*



Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah
Catatan :*)Data sementara

Jasa lainnya pada tahun ini tumbuh cukup tinggi. Jasa lainnya yang dimaksud salah satunya berkontribusi oleh komponen jasa hiburan (sektor pariwisata). Capaian pertumbuhan yang tinggi pada jasa lainnya mengindikasikan salah satunya bahwa sektor pariwisata pada tahun 2023 tumbuh menggeliat. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2023 melakukan revitalisasi wisata dengan sejumlah penataan pusat kawasan-kawasan wisata yang ada di Kota Surabaya. Pergerakan sektor pariwisata ini juga berdampak terhadap kinerja sektor kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh tinggi ketiga yang mencapai 7,84 persen di tahun 2023.

Sektor-sektor produktif dominan Kota Surabaya seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan selama tahun 2022 menghasilkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen. Bahkan

lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2023 tumbuh hanya sebesar 3,34 persen. Tekanan yang besar membuat sektor-sektor ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Hal tersebut juga dikontribusi oleh faktor perlambatan perekonomian global sehingga menyebabkan terganggunya permintaan dan penawaran (aktivitas perdagangan) yang merupakan bagian komponen sektor-sektor dominan Kota Surabaya tersebut.

b. Potensi Unggulan Daerah

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023 juga ditunjukkan oleh peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat pada nilai tambah PDRB Kota Surabaya baik PDRB Atas Dasar Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan tabel 1.7 dan tabel 1.8 nilai tambah dari seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan namun dengan variasi peningkatan yang berbeda-beda.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022-2023* (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2022	2023*
		Miliar (Rp)	Miliar (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	982,82	1.026,19
B	Pertambangan dan Penggalian	33,39	32,51
C	Industri Pengolahan	126.030,90	135.434,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.742,05	3.728,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	932,75	968,11
F	Konstruksi	61.408,50	64.940,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	184.610,47	201.432,93
H	Transportasi dan Pergudangan	36.260,42	42.834,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102.248,70	114.627,56
J	Informasi dan Komunikasi	36.541,72	39.290,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	33.950,42	35.852,30
L	Real Estate	16.599,14	17.213,53
M,N	Jasa Perusahaan	15.772,59	17.530,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.486,03	8.533,02
P	Jasa Pendidikan	14.866,08	15.784,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.508,12	5.958,22
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.642,13	10.106,27
	PDRB	655.616,22	715.294,71

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Catatan : *) Data Sementara

Tabel 1.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2022-2023* (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2022	2023*
		Miliar (Rp)	Miliar (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	573,24	576,18
B	Pertambangan dan Penggalian	19,09	17,84
C	Industri Pengolahan	84.567,58	87.392,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.661,67	2.174,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	680,00	696,39
F	Konstruksi	42.633,58	44.772,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	122.122,63	128.814,59
H	Transportasi dan Pergudangan	22.684,94	25.517,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.076,39	66.946,11
J	Informasi dan Komunikasi	32.264,42	34.446,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.648,80	20.445,33
L	Real Estate	11.634,82	11.916,34
M,N	Jasa Perusahaan	9.490,09	10.278,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.756,35	4.759,41
P	Jasa Pendidikan	10.001,20	10.447,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.782,45	3.923,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.671,10	6.197,31
	PDRB	434.268,71	459.030,71

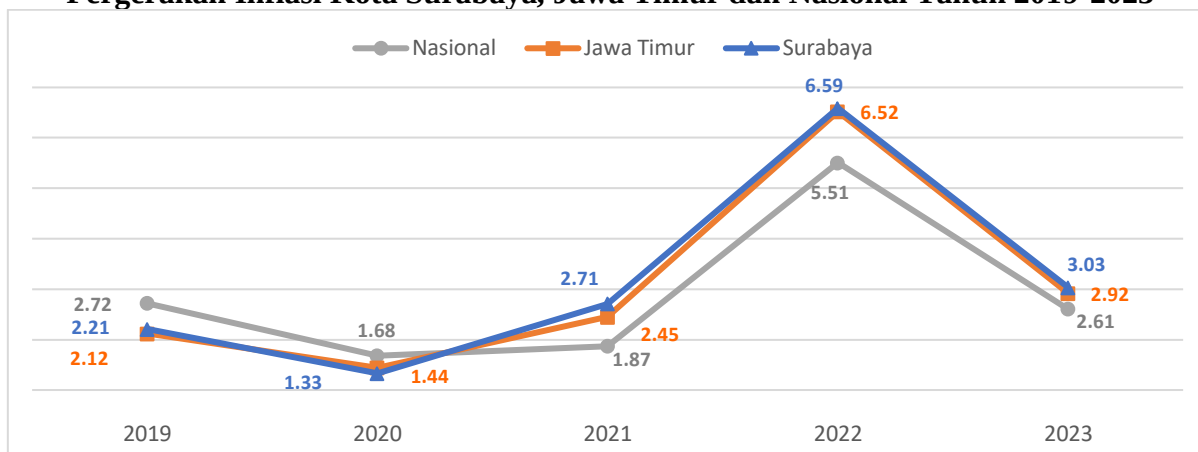
Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Catatan : *) Data Sementara

c. Inflasi Kota Surabaya

Nilai Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 terjaga dalam kisaran sasaran. Pada awal tahun 2023 Kota Surabaya menetapkan target inflasi pada kisaran 2,5 +/- 1%, selaras dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan pada desember 2023 menunjukkan inflasi Kota Surabaya year on year sebesar 3,03%. Inflasi yang terjaga dalam nilai kisarannya merupakan wujud keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2023. Nilai inflasi pada tahun 2023 capaiannya lebih rendah dibanding nilai inflasi pada tahun 2022 yang mencapai sebesar 6,59%.

Gambar 1.6
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya, 2024

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi sisanya 1 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 secara berurutan yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,36%), perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,43%), pakaian dan alas kaki (3,41%) dan penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,34%).

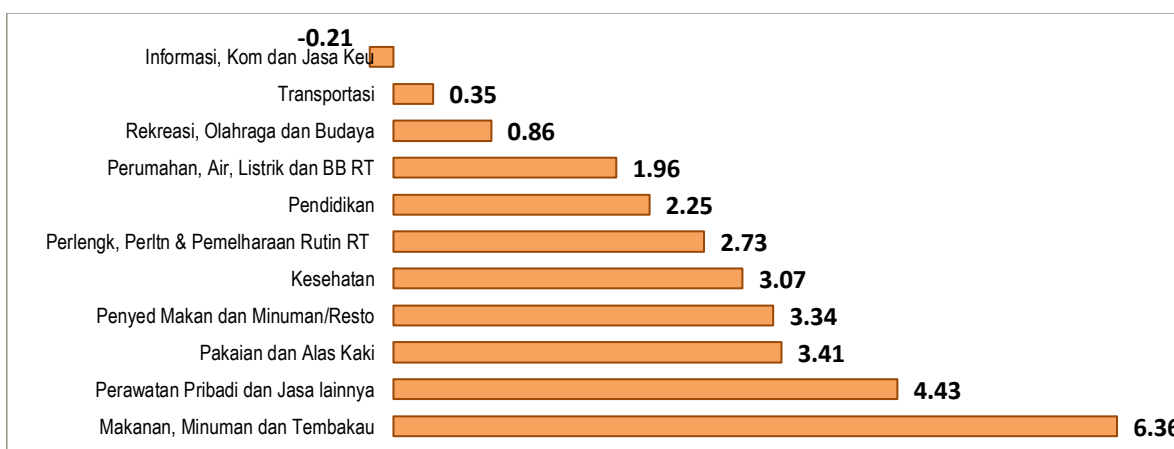
Kelompok Makanan, Minuman dan tembakau menjadi kelompok tertinggi yang menyumbang inflasi tahun 2023. Hal itu disebabkan karena ketiga sub pembentuknya menyumbang inflasi, tertinggi pada Sub kelompok rokok dan tembakau menyumbang sebesar 6,89% diikuti subkelompok makanan sebesar 6,67% dan minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51%. Sub kelompok makanan dikontribusi oleh komoditi-komoditi bahan pangan yang disebabkan selain karena periode musiman yang menyebabkan ketersediaan stok dipasaran terbatas, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan. Untuk Sub kelompok rokok dan tembakau dikontribusi oleh tren peningkatan harga pada rokok kretek filter yang merupakan dampak dari peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% pada awal tahun 2023.

Kelompok yang berperan tinggi selanjutnya yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada tahun 2023 kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 4,43%, atau tertinggi kedua setelah kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Selain karena permintaan yang tinggi akan perawatan pribadi, peningkatan harga komoditi emas yang meningkat selaras dengan kondisi ekonomi yang cukup berfluktuasi selama ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan emas sebagai aset aman, peningkatan permintaan tersebut berdampak pada kenaikan harga emas secara umum di pasaran.

Kelompok pakaian dan alas kaki memberikan kontribusi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar 3,41%. Dari 2 (dua) kelompok pembentuknya, inflasi pada sub kelompok alas kaki mengalami inflasi sebesar 7,28%, sementara subkelompok pakaian mengalami inflasi yang lebih rendah yakni 2,57%. Tekanan inflasi pada kelompok ini umumnya terjadi pada periode pertengahan tahun, di mana permintaan meningkat sejalan dengan pola tahunan di saat persiapan masuknya tahun ajaran baru sekolah pada bulan Juli pertengahan tahun.

Inflasi Kelompok Makanan dan Minuman/Restoran menjadi urutan keempat yang mengalami inflasi tinggi yakni sebesar 3,34%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini diktribusi oleh 3 kelompok sub pembentuknya. Secara berurutan, sub kelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 6,89% selanjutnya sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 6,67% dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51%. Untuk sub kelompok makanan didorong oleh beberapa komoditas bahan makanan yang mengalami peningkatan harga baik karena terganggunya persediaan, anomali cuaca, pola musiman maupun faktor lainnya.

Gambar 1.7
Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah

Jika dilihat dari jenis komoditinya, 10 (sepuluh) komoditi tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya selama tahun 2023 antara lain beras, cabai rawit, tarif air minum PAM, cabai merah, emas perhiasan, kontrak rumah, akademi perguruan tinggi, rokok kretek filter, sewa rumah dan bawang putih. Sementara 10 (sepuluh) komoditi yang menjadi penahan laju inflasi pada tahun 2023 antara lain telur ayam ras, bensin, minyak goreng, bawang merah, tomat, telepon selular, semangka, daging sapi, sawi hijau dan melon.

Selama pada tahun 2023 komoditi beras menjadi komoditi yang berkontribusi cukup signifikan terhadap inflasi di Kota Surabaya. Peningkatan harga beras di Peningkatan harga beras didorong oleh semakin menipisnya pasokan akibat penurunan produksi padi. Penurunan produksi padi di Jawa Timur disebabkan oleh rendahnya curah hujan akibat fenomena anomali cuaca *El Nino*. Selanjutnya penurunan produksi berdampak terhadap peningkatan harga gabah kering dan giling sehingga mendorong peningkatan harga beras dipasaran Selain itu, permintaan yang tinggi juga disebabkan oleh percepatan pelaksanaan bantuan sosial sehingga mengakibatkan persediaan dipasaran menjadi terbaas.

Komoditi yang juga tergolong penyumbang inflasi tertinggi pada subkelompok pangan yakni bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang putih. Cabai rawit dan cabai merah yang merupakan tergolong hortikultura memiliki volatilitas yang cukup tinggi, dimana sering kali menjadi penyumbang inflasi akibat penurunan produktivitas, daya simpan yang pendek dan sangat bergantung dengan anomali cuaca dan faktor lainnya. Seiring dengan tingginya permintaan baik kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga (hotel restoran dan catering) menjadikan semakin tinggi juga kontribusi komoditi terhadap inflasi. Sementara untuk komoditas bawang putih mengalamai inflasi disebabkan oleh produksi yang menurun akibat cuaca *el Nino* sementara permintaan tetap tinggi dan realisasi impor yang kurang optimal karena produksi di daerah asal impor juga mengalami penurunan produksi.

Untuk kontrak rumah dan sewa rumah masih menjadi faktor tertinggi penyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 sama seperti pola di tahun sebelum-sebelumnya. Sampai saat ini, permintaan akan hunian sementara seperti sewa maupun kontrak rumah di Kota Surabaya masih cukup tinggi. Selain dikarenakan harga rumah di Surabaya sudah tidak terjangkau lagi, meningkatnya inflasi pada sewa rumah dan kontrak rumah untuk tahun 2023 juga didorong oleh peningkatan tarif air minum PAM. Di awal tahun 2023 perusahaan air minum PAM Kota Surabaya melakukan penyesuaian tarif air minum PAM seiring meningkatnya biaya operasional perusahaan. Selain tarif listrik, tarif air minum PAM merupakan komponen dari penentuan penetapan biaya sewa rumah sehingga meningkatnya tarif air minum PAM otomatis membuat para pemilik hunian sewa/kontrak memutuskan untuk menaikkan biaya sewa bulannya.

Tabel 1.9
10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi
di Kota Surabaya Selama Tahun 2023

No	Inflasi		Deflasi	
	Komoditas	Sumbangan	Komoditas	Sumbangan
1	Beras	0,8449	Telur Ayam Ras	0,0591
2	Cabai Rawit	0,1605	Bensin	0,0440
3	Tarif Air Minum PAM	0,1236	Minyak Goreng	0,0407
4	Cabai Merah	0,1094	Bawang Merah	0,0358
5	Emas Perhiasan	0,1061	Tomat	0,0299
6	Kontrak Rumah	0,0991	Telepon Selular	0,0294
7	Akademi/Perguruan Tinggi	0,0935	Semangka	0,0240
8	Rokok Kretek Filter	0,0876	Daging Sapi	0,0150
9	Sewa Rumah	0,0612	Sawi Hijau	0,0142
10	Bawang Putih	0,0605	Melon	0,0122

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, maka Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2023 terealisasi sebesar Rp9.604.857.948.205,- atau 89,57% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi* (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	6.592.424.318.658	5.771.896.714.252	87,55%
2	Pendapatan Transfer	4.131.400.527.491	3.832.961.233.953	92,78%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		10.723.824.846.149	9.604.857.948.205	89,57%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp4.562.879.779.487,- atau 89,26%; retribusi daerah sebesar Rp289.419.854.469,- atau 70,45%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp152.380.733.841,- atau 68,48%; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp767.216.346.456,- atau 90,58% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	5.112.148.614.656	4.562.879.779.487	89,26%
2	Retribusi Daerah	410.802.472.144	289.419.854.469	70,45%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	222.512.698.894	152.380.733.841	68,48%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	846.960.532.964	767.216.346.456	90,58%
Jumlah		6.592.424.318.658	5.771.896.714.253	87,55%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.562.879.779.487,- atau 89,26%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2023 namun sudah lebih baik dari tahun 2022. Tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor perekonomian segera pulih, dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
2. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke- 730;
3. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke- 78;
4. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78;
5. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78;
6. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78;
7. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
9. Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Memperingati Hari Ibu;
10. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Memperingati Hari Ibu.

Selain kelonggaran memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Pajak Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah:

1. Masih ada pihak penyelenggara *event* yang mengajukan resitusi, dimana realisasi event hiburan insidentil bergantung pada jumlah pengunjung;
2. Masih adanya titik lokasi yang masih belum terpasang alat perekam online untuk pengawasan transaksi parkir dan sebagai pendukung integrasi laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
3. Masih adanya piutang pajak bumi dan bangunan yang belum terbayarkan. Dikarenakan adanya data wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang datanya tidak jelas/tidak ditemukan;
4. Penentuan tarif Pajak Penerangan Jalan yang akan dioptimalkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Belum tersedianya data pendukung potensi pajak Pajak Penerangan Jalan;
6. Minat masyarakat dalam melakukan pengiklanan tidak lagi menggunakan reklame tapi lebih banyak menggunakan media social.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel			
a.	Pajak Hotel	401.148.064.133	361.303.955.430	90,07%
b.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	4.256.750.554	3.956.822.857	92,95%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Jumlah Pajak Hotel	405.404.814.687	365.260.778.287	90,10%
2	Pajak Restoran			
a.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	596.884.798.355	588.575.046.905	98,61%
b.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	44.926.812.779	24.176.860.433	53,81%
	Jumlah Pajak Restoran	641.811.611.134	612.751.907.338	95,47%
3	Pajak Hiburan			
a.	Pajak Tontonan Film	47.990.285.080	21.483.606.655	44,77%
b.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.251.810.412	10.029.915.416	190,98%
c.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	61.677.169.546	45.244.784.366	73,36%
	Jumlah Pajak Hiburan	114.919.265.038	76.758.306.437	66,79%
4	Pajak Reklame			
a.	Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	163.296.792.896	124.401.919.750	76,18%
b.	Pajak Reklame Kain	22.015.046.522	18.230.982.300	82,81%
	Jumlah Pajak Reklame	185.311.839.418	142.632.902.050	76,97%
5	Pajak Penerangan Jalan			
a.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	582.419.270	445.618.587	76,51%
b.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	528.889.645.405	459.683.286.668	86,91%
	Jumlah Pajak Penerangan Jalan	529.472.064.675	460.128.905.255	86,90%
6	Pajak Parkir			
a.	Pajak Parkir	140.680.904.378	96.008.121.793	68,25%
	Jumlah Pajak Parkir	140.680.904.378	96.008.121.793	68,25%
7	Pajak Air Tanah			
a.	Pajak Air Tanah	1.368.359.434	1.273.753.880	93,09%
	Jumlah Pajak Air Tanah	1.368.359.434	1.273.753.880	93,09%
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)			
a.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.650.643.170.116	1.395.441.035.500	84,54%
	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.650.643.170.116	1.395.441.035.500	84,54%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
a.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.409.756.487	1.287.488.289.763	93,95%
b.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	72.126.829.289	125.135.779.184	173,49%
	Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.442.536.585.776	1.412.624.068.947	97,93%
Jumlah Pajak Daerah		5.112.148.614.656	4.562.879.779.487	89,26%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp289.419.854.468,- atau 70,45% dari target Rp410.802.472.144,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar

Rp110.178.603.087,- atau 67,88%; retribusi jasa usaha sebesar Rp101.522.324.293,- atau 78,14%; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp77.718.927.089,- atau 65,55%.

Pada tahun 2023, selain kebijakan pengurangan pajak daerah, Pemerintah Kota juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
3. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730;
4. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Administratif Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun;
5. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78;
6. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78;
7. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
8. Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila;
9. Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan;

10. Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Di Lapangan Pada Saat Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan;
11. Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Ibu.

Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.020.614.700	1.380.638.900	135,28%
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	73.286.987.400	64.874.231.285	88,52%
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.986.016.245	3.984.448.800	99,96%
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	60.441.279.426	23.165.172.202	38,33%
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.417.878.007	13.415.835.000	65,71%
f.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	917.808.588	928.555.500	101,17%
g.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.252.114.100	2.429.721.400	107,89%
Jumlah Retribusi Jasa Umum		162.322.698.466	110.178.603.087	67,88%
2	Retribusi Jasa Usaha			
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	102.112.561.858	83.511.109.860	81,78%
	Retribusi Penyewaan Tanah	95.262.155.266	75.232.426.579	78,97%
	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.950.012.780	5.612.055.631	113,37%
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.282.393.812	1.980.227.650	154,42%
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	618.000.000	686.400.000	111,07%
b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	553.584.000	584.502.000	105,59%
c.	Retribusi Terminal	1.740.962.517	2.053.086.514	117,93%
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.138.588.884	1.202.435.000	105,61%
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	602.373.633	850.651.514	141,22%
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.958.043.183	6.019.706.508	31,75%
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.550.790.000	9.353.919.411	142,79%
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		129.915.941.558	101.522.324.293	78,14%
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	111.479.733.649	70.750.765.489	63,47%
b.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	125.168.871	245.346.000	196,01%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	c.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	6.958.929.600	6.722.815.600	96,61%
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu			118.563.832.120	77.718.927.089	65,55%
Jumlah Retribusi Daerah			410.802.472.144	289.419.854.469	70,45%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Retribusi Daerah, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan tercapai 38,33% dikarenakan adanya pembangunan gorong-gorong yang mengurangi potensi pengguna parkir tepi jalan umum dan beberapa usaha yang tutup sehingga mengurangi titik parkir tepi jalan umum;
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai 65,71%. Atas hal tersebut telah dilakukan upaya operasi gabungan di lapangan dan mengirimkan surat kepada wajib retribusi yang telah habis masa berlaku uji kendaraannya untuk melakukan uji kendaraan;
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai 31,75% dikarenakan untuk meringankan beban Masyarakat maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk tidak memungut parkir pada halaman kantor pelayanan seperti Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas, titik parkir tersebut yang semula 129 lokasi menjadi 44 lokasi;
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercapai 63,47% dikarenakan adanya regulasi terkait pengurangan pembebasan atau pengurangan denda antara lain Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730. Selain itu, berkurangnya pembangunan bangunan tinggi sehingga mengurangi permohonan IMB untuk bangunan tinggi, hal mana mengurangi pendapatan dari retribusi IMB. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan IMB sebelum membangun rumah tinggal juga turut mengurangi pendapatan dari IMB.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp152.380.733.841,13,- atau 68,48%. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan *output* pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2023. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN			
	a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.127.976.955	12.127.976.955	100,00%
	Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.127.976.955	12.127.976.955	100,00%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD			
	a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	18.966.141.282	18.966.141.282	100,00%
	b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.897.299.123	1.413.733.096	36,27%
	c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	169.997.629.868	102.349.230.842	60,21%
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	192.861.070.273	122.729.105.220	63,64%
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
	a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	17.523.651.666	17.523.651.666	100,00%
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	17.523.651.666	17.523.651.666	100,00%
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		222.512.698.894	152.380.733.841	68,48%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Secara rinci Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) tercapai Rp12.127.976.955,- atau 100% dari target;
2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercapai Rp122.729.105.220,- atau 63,64% dari target Rp122.729.105.220,- meliputi :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp18.966.141.282,- atau 100% dari target terdiri dari :
 - BPR BPR SAU tercapai Rp2.011.991.150,- atau 100% dari target
 - PT. Bank Jatim tercapai Rp16.948.635.132,- atau 100% dari target
 - PT. BPR Jatim tercapai Rp5.515.000,- atau 100% dari target
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp1.413.733.096,- atau 36,27% dari target Rp3.897.299.123,- terdiri dari :
 - Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak ada realisasi dikarenakan memprioritaskan untuk pembayaran hutang. Target Dividen sebesar Rp214.564.102,-, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/228/2023 tentang Pengesahan laporan Keuangan Audited Tahun 2022 Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 3 Agustus 2023;
 - Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan tercapai sebesar Rp68.562.040,- atau 27,78% dari target Rp246.800.714,-, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/382/436.1.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2022 Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, tidak menetapkan dividen atas kinerja PD RPH Tahun 2022 karena PD RPH mengalami kerugian sebesar Rp830.527.229,- di tahun 2022;
 - PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Karsa Utama tercapai sebesar Rp150.000.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan;
 - Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tercapai sebesar Rp1.195.171.056,- atau 36,37% dari target Rp3.285.934.307,- berdasarkan :
 - 1) Surat Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/315/436.1.2/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya ;

- 2) Surat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor 122/Ext/PDTS-KBS/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023, Perihal : Permohonan Pembayaran Deviden melalui Angsuran;
 - 3) Surat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Nomor 002/EXT/PDTS-KBS/I/2024 tanggal 8 Januari 2024, Perihal : Pembayaran Angsuran ke-2 Deviden PD. Taman Satwa KBS Tahun 2022.
- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai Rp102.349.230.842,- atau 60,21% dari target Rp169.997.629.868,- berdasarkan :
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/147/436.1.2/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Tahun 2022 tanggal 16 Mei 2023, dividen yang ditetapkan atas kinerja PDAM Surya Sembada tahun 2022 yang seharusnya disetorkan di Tahun 2023 sebesar Rp92.349.230.842,-, telah disetorkan pada Tahun 2022 sebesar Rp90.000.000.000,-, sehingga sisanya sebesar Rp2.349.230.842,- disetorkan pada Tahun 2023;
 - Dividen atas kinerja PDAM Surya Sembada Tahun 2023 yang seharusnya disetorkan di Tahun 2024 telah disetorkan sebesar Rp100.000.000.000,- pada Tahun 2023.
3. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu dari PT. YEKAPE Surabaya tercapai Rp17.523.651.666,- atau 100% dari target.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2023 sebesar Rp767.216.346.456,- atau 90,58% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.578.170.948	2.327.356.105	65,04%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	16.686.607.276	35.014.964.213	209,84%
3	Jasa Giro	7.587.019.456	1.612.829.119	21,26%
4	Pendapatan Bunga	19.910.445.845	15.639.726.027	78,55%
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	886.689.287	259.919.130	29,31%
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	144.491.690.555	53.398.765.527	36,96%
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.627.198.617	882.085.680	15,68%
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	10.882.187.215	0,00%
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.337.651.746	2.902.722.652	66,92%
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	606.490.005	0,00%
11	Pendapatan dari Pengembalian	1.430.882.032	994.452.883	69,50%
12	Pendapatan BLUD	613.615.142.515	605.470.222.866	98,67%
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	28.809.034.687	37.224.625.035	129,21%
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		846.960.532.964	767.216.346.456	90,58%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp3.832.961.233.953,- atau 92,78% dari target yang telah ditetapkan. Capaian komponen Pendapatan Transfer selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.16
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Transfer				
1	Pendapatan Transfer dari Pusat			
1.1	Dana Perimbangan			
1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			
a.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.817.641.000	5.811.901.925	120,64%
b.	DBH PPh Pasal 21	429.432.888.000	383.247.847.623	89,25%
c.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	90.217.058.647	0,00%
d.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	44.288.933.000	50.100.212.673	113,12%
e.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	31.393.864.000	34.016.612.005	108,35%
f.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	2.578.444.246	0,00%

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	g.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.728.000	12.974.320	133,37%
	h.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	687.558.000	938.550.591	136,50%
	i.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	147.486.000	162.600.768	110,25%
	j.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	-	22.122.900	0,00%
	k.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.358.729.000	1.570.482.211	115,58%
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		512.136.827.000	568.678.807.909	111,04%
1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	a.	Dana Alokasi Umum	1.231.362.911.000	1.231.078.009.543	99,98%
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.231.362.911.000	1.231.078.009.543	99,98%
1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
	a.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Penurunan AKI dan AKB	29.867.047.000	20.032.600.000	67,07%
	b.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.952.681.000	2.635.000.000	89,24%
	c.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.601.036.000	1.601.035.998	100,00%
	d.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	832.955.000	667.080.000	80,09%
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		35.253.719.000	24.935.715.998	70,73%
1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
	a.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	333.572.060.000	334.582.652.896	100,30%
	b.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	9.365.000.000	4.412.500.000	47,12%
	c.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	222.003.642.000	222.003.640.000	100,00%
	d.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.004.000.000	3.661.893.222	73,18%
	e.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	62.196.440.000	61.508.579.432	98,89%
	f.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.661.850.000	4.537.839.773	97,34%
	g.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000	1.373.345.758	91,56%
	h.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	39.058.647.000	10.132.187.171	25,94%

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	i.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	65.827.750.000	62.003.009.320	94,19%
	j.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	292.100.000	170.951.200	58,52%
	k.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	22.792.473.000	14.575.701.700	63,95%
	l.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian	130.000.000	17.124.240	13,17%
	m.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	21.104.923.100	0,00%
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		766.403.962.000	740.084.347.812	96,57%
	Jumlah Dana Perimbangan		2.545.157.419.000	2.564.776.881.262	100,77%
1.2	Dana Insentif Daerah (DID)				
	a.	DID	30.523.723.000	30.523.723.000	100,00%
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)		30.523.723.000	30.523.723.000	100,00%
	Jumlah Pendapatan Transfer dari Pusat		2.575.681.142.000	2.595.300.604.262	100,76%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
2.1	Pendapatan Bagi Hasil				
	a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	588.630.465.318	465.787.631.053	79,13%
	b.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	405.981.285.105	327.120.844.100	80,58%
	c.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	350.183.896.196	301.961.860.136	86,23%
	d.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.942.225.555	1.578.570.378	81,28%
	e.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	195.878.113.317	128.143.324.024	65,42%
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil		1.542.615.985.491	1.224.592.229.691	79,38%
2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
	a.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	13.103.400.000	13.068.400.000	99,73%
	Jumlah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		13.103.400.000	13.068.400.000	99,73%
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		1.555.719.385.491	1.237.660.629.691	79,56%
	Jumlah Pendapatan Transfer		4.131.400.527.491	3.832.961.233.953	92,78%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Pendapatan transfer Tahun 2023 meliputi:

1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai Rp24.935.715.998,- (70,73%) dari target Rp35.253.719.000,- dikarenakan DAK fisik penyalurannya memperhitungkan nilai kontrak pekerjaan masing-masing bidang.
2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercapai

- Rp740.084.347.812,- (96,57%) dari target Rp766.403.962.000,- dikarenakan penyalurannya memperhitungkan Silpa tahun sebelumnya
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi tercapai Rp1.224.592.229.691,- (79,38%) dari target Rp1.542.615.985.491,- berdasarkan :
- a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1004/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/293/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/894/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023
 - d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/181/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
 - e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/688/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2023
4. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi tercapai Rp13.068.400.000,- (99,73%) dari target Rp13.103.400.000,- berdasarkan :
- a. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/2654/201.4/2023, Perihal : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar Rp9.543.560.903.121,- atau terealisasi 88,19%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.17
Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	2.799.741.287.457	2.540.673.580.810	90,75%
	Belanja Barang dan Jasa	5.464.590.553.831	4.835.929.170.988	88,50%
	Belanja Hibah	408.434.969.634	404.050.361.625	98,93%
	Belanja Bantuan Sosial	87.792.929.400	78.223.729.100	89,10%
	Jumlah Belanja Operasi	8.760.559.740.322	7.858.876.842.523	89,71 %
2	Belanja Modal			
	Belanja Modal Tanah	104.249.096.893	90.286.694.348	86,61%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.264.287.984	285.817.812.076	81,60%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	518.801.235.730	365.424.112.763	70,44%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.043.306.238.140	921.720.212.895	88,35%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.764.774.360	1.503.771.830	85,21%
	Belanja aset lainnya	7.689.579.166	7.115.680.388	92,54%
	Jumlah Belanja Modal	2.026.075.212.273	1.671.868.284.300	82,52 %
3	Belanja Tidak Terduga			
	Belanja Tidak Terduga	33.449.300.000	12.815.776.299	38,31%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	33.449.300.000	12.815.776.299	38,31 %
4	Belanja Transfer			
	Bagi hasil retribusi	750.000.000	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000	-	-
	Jumlah Belanja Transfer	1.250.000.000	-	-
	Jumlah Belanja Daerah	10.821.334.252.595	9.543.560.903.122	88,19%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah meliputi:

- a. Pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 yang tercapai kurang dari target. Meskipun mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2022, Pendapatan

Daerah Kota Surabaya yang ditargetkan sebesar 10.723 Miliar terealisasi sebesar 9.604 Miliar atau sebesar 89,57%, sehingga perlu adanya penyesuaian ulang terkait prioritas belanja Perangkat Daerah;

- b. Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan proyek prioritas pada pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan belanja sebagai berikut:

- a. Penentuan skala prioritas belanja dengan didukung oleh proses penganggaran yang adaptif terhadap penyesuaian realisasi pendapatan;
- b. Penguatan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa agar dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2023 penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp157.509.406.446,- dengan surplus Belanja Rp61.297.045.084,- dan realisasi Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000.000,- maka realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp208.806.451.530,- secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.18
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	157.509.406.446	157.509.406.446	100,00%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	157.509.406.446	157.509.406.446	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000	10.000.000.000	16,67%
	Penyertaan Modal	60.000.000.000	10.000.000.000	16,67%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,- atau 16,67% dari target Rp60.000.000.000,- karena investasi atau penyertaan modal dilakukan berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah (Pemerintah Kota Surabaya).

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kinerja ekonomi nasional terus menunjukkan perbaikan positif hingga saat ini. Hal itu ditunjukkan oleh capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang terupdate mencapai 5,05% ada tahun 2023. Kendati lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen namun mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini, keberlanjutan ekonomi masih diperkirakan terus menguat meskipun masih dihadapkan pada tantangan eksternal. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen. Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (c-to-c) sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen (c-to-c).

Arah kebijakan nasional tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Di tahun 2023 akselerasi pertumbuhan ekonomi terjadi untuk mendorong transformasi ekonomi. Kapasitas produksi perekonomian kembali ditingkatkan melalui sasaran pembangunan yang telah ditetapkan yakni mengembalikan momentum pertumbuhan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Langkah tersebut pada akhirnya juga diharapkan akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Disamping itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh investasi serta aktivitas perdagangan yang didorong lebih tinggi untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi, dikelompokkan dalam fokus kebijakan makro dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional agar tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023 kondisi ekonomi Kota Surabaya tetap tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2023 sasaran target pembangunan ekonomi yang tercermin dari target indikator makro Kota Surabaya, yakni

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 pada RKPD Tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,21% dengan melihat capaian tahun 2022 sebesar 6,51% maka pada perubahan RKPD Tahun 2023 ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,90% yang terealisasi pada 5,70%.
2. Indeks Gini Kota Surabaya pada RKPD Tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 0,323 dan ditargetkan tetap pada 0,323 yang terealisasi pada 0,423;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,26%, dengan melihat capaian tahun 2022 sebesar 7,62% maka pada perubahan RKPD Tahun 2023 ditargetkan 5% yang terealisasi 6,76%;
4. Persentase penduduk miskin Kota Surabaya pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,31% yang terealisasi 4,65%;
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Surabaya pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 82,50 yang terealisasi 83,99.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi guna menjaga produktivitas ekonomi di Kota Surabaya tetap terjaga tinggi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara lain: 1) pemulihan sektor usaha mikro; 2) pemulihan sektor perdagangan; 3) penguatan ketahanan dan keamanan pangan; 4) pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 5) pemulihan sektor tenaga kerja. Program-program tersebut selanjutnya diwujudkan dalam program maupun kegiatan yang harapannya dapat menstimulus perekonomian Kota Surabaya sesuai yang ditargetkan.

2.1. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2023 terdapat perubahan pendapatan di Kota Surabaya, dasar perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2023 adalah:

1. Mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian komposisi pendapatan untuk pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pendapatan dari dana transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan pendapatan tersebut maka disusun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2023 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi :

a. Pajak Daerah yaitu :

- 1) mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
- 2) mengembangkan layanan pajak on line untuk mempermudah pembayaran pajak

b. Retribusi daerah yaitu Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD

d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- 1) peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya.
- 2) koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

e. Untuk optimalisasi PAD, Pemerintah Kota Surabaya telah mempunyai SDM yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan pemungutan PAD sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah telah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan untuk mengetahui realisasi capaian pendapatan setiap bulan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Terhadap pendapatan transfer ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah BOS yang semula pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2021-2026 ada pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka berdasarkan peraturan tersebut masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan daerah Perubahan APBD 2023, mengalami perubahan semula sebesar Rp10.604.933.564.199,- menjadi Rp10.723.824.846.149,- mengalami peningkatan sebesar Rp118.891.281.950,- atau 1,12% yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp6.595.913.464.686,- menjadi Rp6.592.424.318.658,- mengalami penurunan sebesar Rp3.489.146.028,- atau -0,05%;
2. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari Rp4.009.020.099.513,- menjadi Rp4.131.400.527.491,- mengalami peningkatan sebesar Rp122.380.427.978,- atau 3,05%;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 tidak teralokasikan.

Rincian perubahan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Uraian	APBD 2023		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah	5.125.303.235.634	5.112.148.614.656	-13.154.620.978	-0,26%
	Retribusi Daerah	437.737.274.643	410.802.472.144	-26.934.802.499	-6,15%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	222.512.698.894	222.512.698.894	0	0,00%
	Lain-lain PAD yang sah	810.360.255.515	846.960.532.964	36.600.277.449	4,52%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.595.913.464.686	6.592.424.318.658	-3.489.146.028	-0,05%
2	Pendapatan Transfer				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD 2023		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.568.523.030.000	2.575.681.142.000	7.158.112.000	0,28%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.440.497.069.513	1.555.719.385.491	115.222.315.978	8,00%
	Jumlah Pendapatan Transfer	4.009.020.099.513	4.131.400.527.491	122.380.427.978	3,05%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0,00%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0,00%
	Jumlah Pendapatan Daerah	10.604.933.564.199	10.723.824.846.149	118.891.281.950	1,12%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan tema pembangunan pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu *“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”* diprioritaskan untuk:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;

4. Penguatan nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi kreatif;
5. Peningkatan ketahanan pangan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023, mengalami perubahan dari Rp11.304.891.467.475,- menjadi Rp10.821.334.252.595,- berkurang sebesar Rp491.246.794.046,- atau -4,35%, yang meliputi:

1. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp8.674.586.113.431,- menjadi Rp8.760.559.740.322,- bertambah sebesar Rp85.973.626.891,- atau 0,99%;
2. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp2.592.055.354.044,- menjadi Rp2.026.075.212.273,- berkurang sebesar Rp573.669.720.937,- atau -22,13%;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari Rp37.000.000.000,- menjadi Rp33.449.300.000,- berkurang sebesar Rp3.550.700.000,- atau -9,60%;
4. Belanja Transfer tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp1.250.000.000,-.

Rincian perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Uraian	APBD 2023		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	2.786.458.797.519	2.799.741.287.457	13.282.489.938	0,48%
	Belanja Barang dan Jasa	5.444.798.389.433	5.464.590.553.831	19.792.164.398	0,36%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD 2023		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Hibah	340.141.820.479	408.434.969.634	68.293.149.155	20,08%
	Belanja Bantuan Sosial	103.187.106.000	87.792.929.400	-15.394.176.600	-14,92%
	Jumlah Belanja Operasi	8.674.586.113.431	8.760.559.740.322	85.973.626.891	0,99%
2	Belanja Modal				
	Belanja Modal Tanah	310.666.443.965	104.249.096.893	-206.417.347.072	-66,44%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.128.352.500	350.264.287.984	-47.864.064.516	-12,02%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	719.377.979.408	518.801.235.730	-200.576.743.678	-27,88%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.151.846.187.540	1.043.306.238.140	-108.539.949.400	-9,42%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.036.390.631	9.454.353.526	-2.582.037.105	-21,45%
	Jumlah Belanja Modal	2.592.055.354.044	2.026.075.212.273	-565.980.141.771	-21,84%
3	Belanja Tidak Terduga				
	Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000	33.449.300.000	-3.550.700.000	-9,60%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	37.000.000.000	33.449.300.000	-3.550.700.000	-9,60%
4	Belanja Transfer				
	Belanja Bagi Hasil	750.000.000	750.000.000	0	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000	500.000.000	0	0,00%
	Jumlah Belanja Transfer	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0,00%
	Jumlah Belanja Daerah	11.304.891.467.475	10.821.334.252.595	-483.557.214.880	-4,28%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2024

2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2023 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal/ penyertaan modal bagi badan usaha milik negara/ daerah dan/ atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

Sisa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada BUMD (sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan di tahun 2023) berdasarkan : 1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama melalui Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya; 3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

**Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023**

Uraian	APBD 2023		Bertambah/Berkurang	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Penerimaan Pembiayaan	759.957.903.276	157.509.406.446	-602.448.496.830	-79,27%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	759.957.903.276	157.509.406.446	-602.448.496.830	-79,27%
Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0,00%
Penyertaan Modal	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0,00%
Pembiayaan Daerah Neto	699.957.903.276	97.509.406.446	-602.448.496.830	-86,07%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan. Capaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan, terbagi dalam 8 bagian, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja

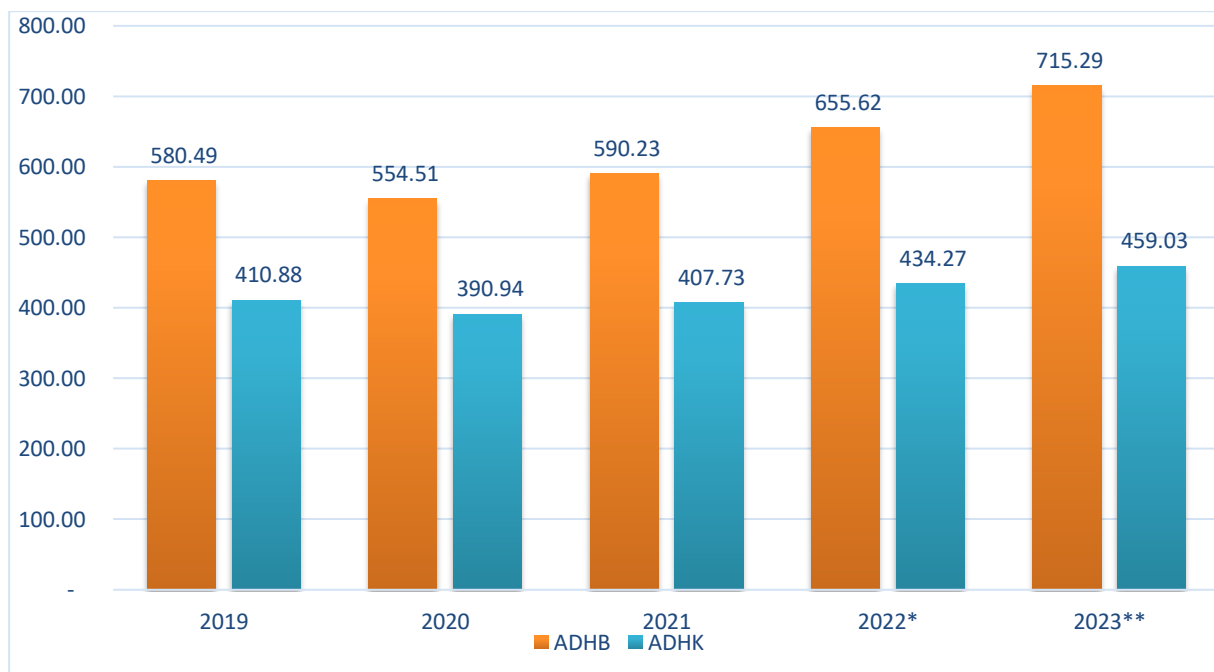
3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi pengukur struktur perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi -4,85%. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Pemulihan ekonomi dilakukan beriringan dengan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang membawa kinerja perekonomian Kota Surabaya yang semakin membaik sehingga pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,29% dan selanjutnya meningkat menjadi 6,51% di akhir tahun 2022. Pada tahun 2023, Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Surabaya bertumbuh di angka 5,7%. Bila dibandingkan dengan angka tahun 2022, kondisi di tahun 2023 memang cenderung mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan di dalam negeri dan dinamika global yang terjadi selama kurun waktu tahun 2023. Perubahan di dalam negeri seperti adanya kenaikan tarif bea cukai rokok hingga diberlakukannya penyesuaian harga BBM Non Subsidi selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan, dinamika global yang terjadi dan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Kota Surabaya di antaranya:

- Konflik Geopolitik Rusia-Ukraina serta Israel-Hamas berpengaruh terhadap harga pangan dan energi global;
- Kenaikan suku bunga untuk pengendalian inflasi yang berdampak juga pada beban pinjaman perumahan dan pinjaman usaha, hal ini menyebabkan tingkat tabungan untuk memenuhi biaya hidup;
- Iklim *El Nino* yang berdampak pada isu ketahanan pangan karena, harga pangan dunia, dan negara produsen beras membatasi ekspor;
- Pasar global kurang menunjukkan geliatnya karena terjadinya perlambatan sektor manufaktur secara terus-menerus terkait dengan penurunan produksi industri, investasi, dan perdagangan barang internasional;
- Pemulihan ekonomi Tiongkok yang melambat, berdampak pada perekonomian dunia yang melambat mengingat Tiongkok memiliki kontribusi besar dalam ekonomi global.

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2024

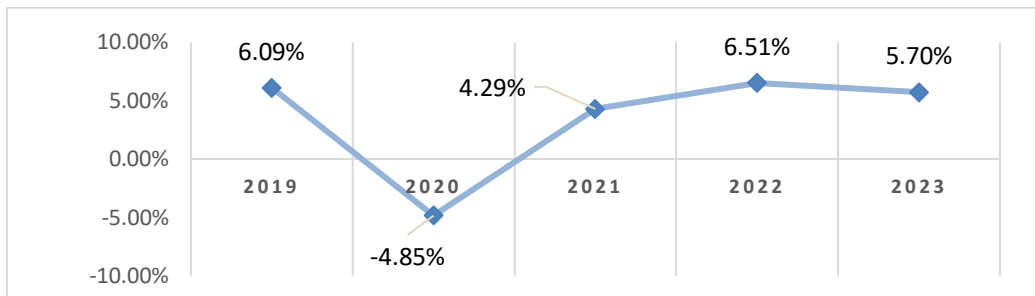
Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	6,1-6,6%	6,3-6,7%	6,3 - 6,8%	2,96%	5,9%
Realisasi	6,10%	-4,85%	4,29%	6,51%	5,7%
Capaian	100,00%	-76,98%	68,10%	219,93%	96,61%

*) Target tahun 2023 berdasarkan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023

Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2024

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2024

Capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya merupakan gambaran keberhasilan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam sinergi pemulihan ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Dalam mewujudkan keberlanjutan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya menyusun berbagai program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Intervensi diwujudkan melalui beberapa upaya antara lain:

1. Peningkatan investasi diutamakan melalui pembinaan dan pengawasan melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal domestik;
2. Integrasi pelayanan investasi maupun perizinan dilakukan secara daring maupun perluasan jaringan;
3. Pemerintah Kota Surabaya saat ini telah menyusun peraturan terkait penyelenggaraan *mall* pelayanan publik di Kota Surabaya yang tertuang dalam Perwali nomor 15 tahun 2023, di mana perluasan pelayanan diwujudkan melalui sentra pelayanan publik sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pelayanan publik dalam skala kecil, sehingga perluasan fungsi pelayanan terpadu dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
4. Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan berupa fasilitasi penggunaan aset, memberikan bantuan pemenuhan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha melalui Program Padat Karya di kecamatan-kecamatan dengan jumlah Rumah Padat Karya per 31 Desember 2023 sebanyak 41 lokasi yang tersebar di 21 kecamatan, dengan 18 kategori jenis usaha dan sebanyak 665 keluarga miskin yang terserap pada program Padat Karya. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, jumlah padat karya yang didirikan sebanyak 34 rumah padat karya di 14 kecamatan;
5. Penyediaan akses lowongan pekerjaan melalui program melalui *job fair* serta *link and match* ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerja) yang telah dilaksanakan sebanyak 4

kali di tahun 2023. Pada tahun 2023 pelaksanaan *job fair* diikuti 7.225 peserta/pengunjung, dan sebanyak 260 orang diterima dari *event job fair*;

6. Pemulihan sektor wisata melalui pengawasan kawasan wisata pada kawasan Kalimas, Ampel, Kya-kya, Kenjeran, Tunjungan dan Romokalisari;
7. Pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi pemasaran *online* pada e-Peken dengan UMKM yang tergabung sebanyak 3.440 (UMKM, Tokel dan SWK), fasilitasi toko daring pada eKatalog sebanyak 598 UMKM, serta pembangunan Surabaya Kriya Gallery dan acara-acara yang melibatkan UMKM.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah pembangunan utama di Indonesia, Kota Surabaya menempati posisi yang tertinggi dibandingkan dengan Jakarta, Makassar, dan Medan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pembangunan Utama

Wilayah	Nilai ADHK (dalam Juta Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi
	2022	2023	
Wilayah Pembangunan Utama A (Kota Pusat Pertumbuhan: Medan)	165.120.000,01	173.445.000,69	5,04%
Wilayah Pembangunan Utama B (Kota Pusat Pertumbuhan: Jakarta)	1.953.488.991,00	2.050.465.970,00	4,96%
Wilayah Pembangunan Utama C (Kota Pusat Pertumbuhan: Surabaya)	434.268.341,12	459.030.719,58	5,70%
Wilayah Pembangunan Utama D (Kota Pusat Pertumbuhan: Makassar)	133.132.598,14	140.197.903,47	5,31%

Sumber: BPS, 2024

Upaya-upaya untuk peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi di 2024, dilakukan melalui:

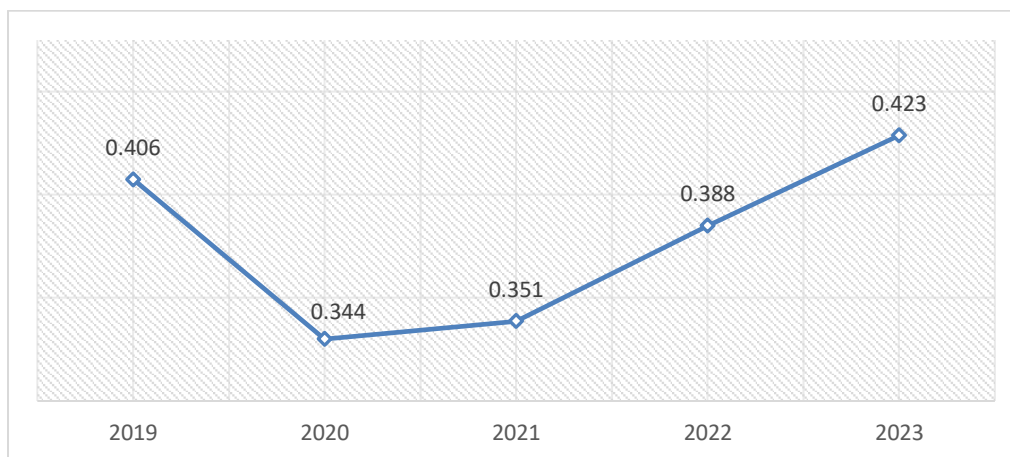
1. Menjaga inflasi agar tetap terkendali pada sehingga terciptanya kepastian dan kondusivitas perekonomian. Di antaranya melalui optimalisasi peran tim pengendalian inflasi daerah (TPID);
2. Meningkatkan investasi melalui promosi, kemudahan investasi dan pelayanan perizinan non perizinan di Kota Surabaya;
3. Meningkatkan produktivitas bisnis dan sektor pelaku usaha melalui pemberian insentif/kelonggaran pajak maupun retribusi;

4. Keberlanjutan revitalisasi sejumlah titik potensi wisata di Kota Surabaya sebagai langkah untuk menggerakkan titik pertumbuhan;
5. Pengembangan UMKM melalui fasilitasi pemasaran contohnya e-Peken dan Niaga *Gallery*, legalitas usaha melalui sertifikasi halal, fasilitasi tempat usaha, fasilitasi pemasaran, dan akses permodalan;
6. Keberlanjutan program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan golongan masyarakat berpendapatan rendah;
7. Meningkatkan sektor pariwisata melalui keberlanjutan program penataan kawasan wisata, kolaborasi dengan *stakeholder* pariwisata, usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, hotel dan restoran, melakukan *event-event* dan promosi wisata dan sejarah serta melakukan pembentukan, pelatihan dan pembinaan kelompok sadar wisata.

B. Indeks Gini

Indeks Gini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Rasio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

Gambar 3.2
Indeks Gini Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Jawa Timur dan Bappedalitbang, diolah, 2024

Tabel 3.2
Indeks Gini Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,328	0,323

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi	0,406	0,344	0,351	0,388	0,423
Capaian	93,16%	107,03%	105,14%	81,71%	69,04%

Sumber: BPS Jawa Timur dan Bappedalitbang, diolah, 2024

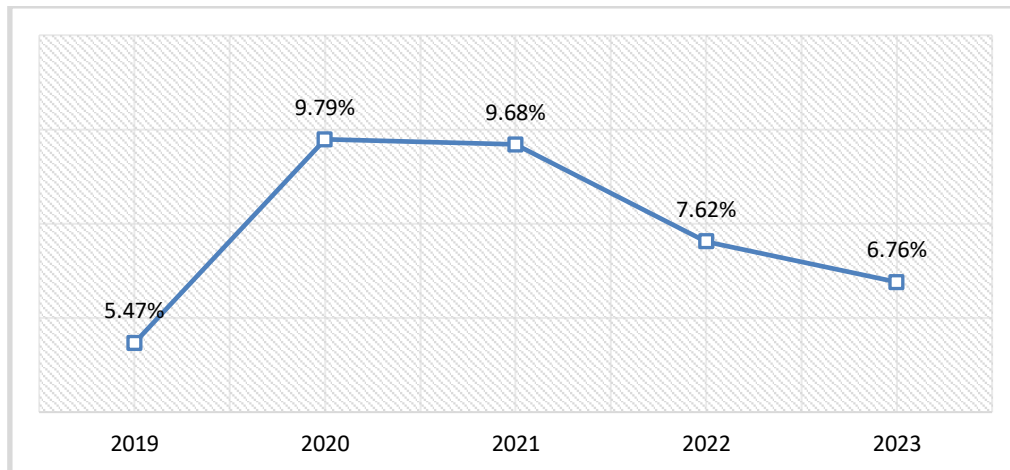
Indeks Gini pada tahun 2023 melemah dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,388 menjadi 0,423 di tahun 2023. Dalam 5 tahun terakhir Indeks Gini Kota Surabaya termasuk dalam kategori ketimpangan “sedang”. Pada dasarnya indeks gini merupakan ketimpangan kelompok pendapatan atas dan kelompok pendapatan kelas bawah, yang berarti dua hal tersebut bertolak belakang. Maka upaya Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2023 terkait ketimpangan memiliki 2 strategi yakni untuk golongan kelompok pendapatan atas dilakukan penagihan pajak dan retribusi yang intensif. Sedangkan untuk kelompok bawah, selaras dengan arahan presiden terkait penurunan kemiskinan ekstrim menuju nol persen. Pada tahun 2024, selain mengurangi ketimpangan, pengurangan kemiskinan serta penurunan pengangguran juga dilakukan dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Intervensi diwujudkan melalui beberapa upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya melalui peningkatan sektor strategis berbasis potensi lokal yakni:

1. Peningkatan pendapatan melalui program padat karya yang merupakan kegiatan multi-perangkat daerah yang di dalamnya terdapat pelatihan dan bimbingan teknis untuk keluarga miskin, pra miskin maupun miskin ekstrim yang dalam tahun 2023 terdapat 600 orang yang sudah dilatih dan disalurkan di 18 rumah padat karya. Dari sisi permodalan, dilakukan juga pemberian bantuan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya serta akses permodalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama (SAU) melalui program PUSPITA sejumlah 300 debitur;
2. Fasilitasi e-Peken sebagai upaya pemasaran pelaku usaha lokal yang terdiri dari usaha mikro binaan, toko kelontong yang terdaftar, dan pedagang sentra wisata kuliner dengan tujuan agar sektor usaha mikro tidak hanya didominasi oleh pedagang besar atau swalayan. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 4.349 pelaku usaha lokal yang terdaftar di e-Peken;
3. Penyerapan tenaga kerja pada keluarga miskin dilakukan penyaluran ke sektor usaha lokal sejumlah 300 jiwa, dan untuk pencari kerja umum disalurkan pada program ASSiK yang di antara kegiatannya *job fair* serta *link and match* perusahaan sejumlah 7.142 pencari kerja.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2024

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	6,47%	6,40 - 5,95%	6,30 - 5,90%	8,99 %	5,00%*
Realisasi	5,47%	9,79%	9,68%	7,62%	6,76%
Capaian	115,46%	47,03%	46,35%	115,24%	64,80%

*Target tahun 2023 sesuai Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2024

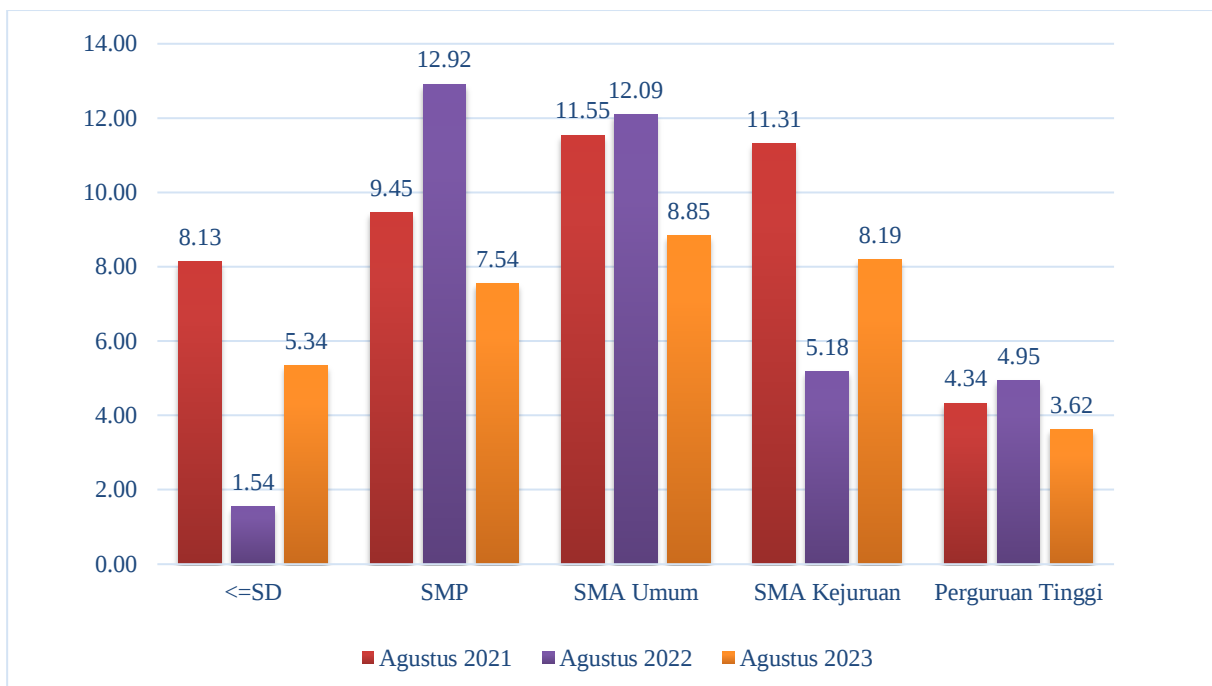
Tabel 3.4
Komposisi Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	130.459	154.933	152.273	125.276	106.120
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	2.222.469	1.582.564	1.572.888	1.643.314	1.569.714
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,87	9,79	9,68	7,62	6,76

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2024

Pada Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya sebesar 5,47%. TPT Kota Surabaya di tahun 2019 relatif rendah di kisaran 5%. Namun, pada tahun 2020 TPT menjadi 9,79%. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta pengurangan jam kerja. Seiring meredanya pandemi Covid-19, TPT Kota Surabaya secara bertahap semakin menguat. Kondisi tersebut ditunjukkan dari nilai realisasi yang terus menguat semenjak tahun 2021, di mana tercatat sebesar 9,68% atau mengalami perbaikan sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan menguat kembali pada tahun 2022 sebesar 2,06% menjadi 7,62%. Nilai TPT Kota Surabaya terus menguat terjadi seiring kondisi perbaikan ekonomi, dengan realisasi TPT Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar 6,76%. Bila dibandingkan dengan Kota Bandung yang berada pada posisi TPT sebesar 8,83% dan Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai sebesar 6,53%. Bila dilihat dari kontribusi jumlah pengangguran di Kota Surabaya, didominasi dari jenjang pendidikan SMA Umum dan SMA Kejuruan.

Gambar 3.4
TPT Menurut Pendidikan Tahun 2021 – 2023



Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang, diolah, 2024

Upaya-upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja baik di sektor formal dan informal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2023, antara lain:

1. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan oleh yang menunjang keahlian bagi para pencari kerja untuk siap dalam dunia kerja sebanyak 736 orang, yang meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 732 orang;
2. Memberian sertifikasi keahlian sebanyak 935 orang di bidang administrasi perkantoran, akuntansi dasar, barista, kepariwisataan, teknologi dan informasi, desain grafis, fotografi, otomotif, *make-up artist*, perhotelan, *public relation* dan sebagainya;
3. Melaksanakan pemagangan di 42 perusahaan untuk meningkatkan daya saing para pencari kerja sehingga akhirnya dapat terserap pada perusahaan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 38 perusahaan;
4. Pemberian fasilitasi juga diberikan melalui *job fair* serta *link and match* ASSiK untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan sesuai dengan keahliannya, yang dilaksanakan sebanyak 4 kali pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2023 pelaksanaan *job fair* diikuti 7.225 peserta/pengunjung dan sebanyak 260 orang diterima dari *event job fair*;
5. Mendorong para pencari kerja untuk berwirausaha dengan memberikan bimbingan teknis/pelatihan berwirausaha sebanyak 546 orang, yang meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 532 orang;
6. Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan berupa fasilitasi penggunaan aset, memberikan bantuan pemenuhan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha melalui Program Padat Karya di kecamatan-kecamatan dengan jumlah Rumah Padat Karya per 31 Desember 2023 sebanyak 41 lokasi yang tersebar di 21 kecamatan, dengan 18 kategori jenis usaha dan sebanyak 665 keluarga miskin yang terserap pada program Padat Karya. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, rumah padat karya yang didirikan sebanyak 34 rumah di 14 kecamatan;
7. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan kemudahan akses pemasaran melalui e-Peken, Surabaya Kriya Galeri pada 2(dua) lokasi di Siola dan di MERR. Pameran yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 12 *event* meningkat dibandingkan 2022 yang diselenggarakan sebanyak 6 *event*;
8. Melakukan himbauan dan sosialisasi secara masif ke hotel, toko swalayan, *mall* dan perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja ber-KTP Surabaya yang dilakukan melalui himbauan surat yang dikirim oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta mengumpulkan Asosiasi *Mall* yang ada di Kota Surabaya.

Di masa mendatang, Pemerintah Kota Surabaya akan semakin aktif dan intensif dalam memberikan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya melalui Program Padat Karya dan fasilitasi *link and match*.

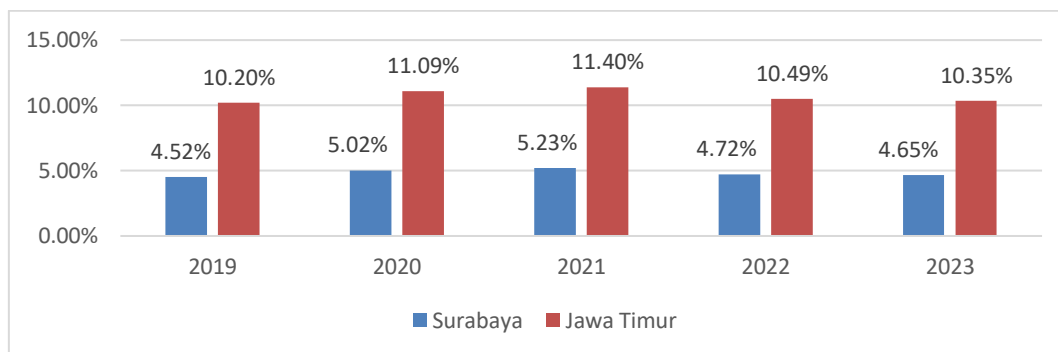
Sedangkan upaya-upaya untuk menekan angka TPT di 2024 dilakukan melalui:

1. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan kompetensi, sertifikasi dan keahlian bagi pencari kerja;
2. Penyuluhan dan bimbingan *soft skill* bagi pencari kerja, serta memberikan keterampilan dalam melakukan wawancara, membuat lamaran dan kiat-kiat komunikasi saat wawancara;
3. Pengadaan *job fair* secara masif, khususnya pada periode kelulusan pendidikan dan informasi terkait lowongan kerja;
4. Bimbingan-bimbingan kepada balai penyaluran tenaga kerja;
5. Penyuluhan terhadap calon tenaga migran;
6. Kemudahan investasi yang diharapkan menyerap tenaga kerja lokal masyarakat Kota Surabaya;
7. Melaksanakan pemagangan bagi lulusan baru atau peserta pelatihan dengan tujuan agar dapat diterima;
8. Mencegah perselisihan perusahaan dan karyawan.

D. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Namun pada praktiknya, indikator tersebut diwakili oleh Angka Kemiskinan (P0) yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar 3.5
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kota Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2024

Tabel 3.5
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	4,75 - 4,70%	4,71 - 4,60%	4,62%	4,31%
Realisasi	4,52%	5,02%	5,23%	4,72%	4,65%
Capaian	-	94,32%	88,96%	97,84%	92,11%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, garis kemiskinan di Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar Rp611.466 perkapita perbulan dengan jumlah penduduk miskin Kota Surabaya mencapai 152,49 ribu jiwa, sehingga persentase penduduk miskin sebesar 5,23%. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Kota Surabaya mencapai Rp652.540 perkapita perbulan, meningkat sebesar Rp41.074 perkapita perbulan atau sebesar 6,72% bila dibandingkan tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Kota Surabaya tahun 2022 mencapai 138,21 ribu jiwa, jumlah ini berkurang sebesar 14,28 ribu jiwa dari tahun 2021, sehingga persentase penduduk miskin turun menjadi 4,72%. Pada tahun 2023, garis kemiskinan di Kota Surabaya kembali meningkat menjadi Rp718.370 perkapita perbulan dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 136,37 ribu jiwa. Dengan demikian persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,65%.

Meski belum mencapai target, jumlah penduduk miskin masih berhasil diturunkan sebanyak 1,84 ribu jiwa dari tahun 2022. Adanya perlambatan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di tahun 2023 ini disebabkan karena terjadinya inflasi umum selama periode Maret 2022 hingga Maret 2023 sebesar 6,3 persen, urutan ketiga terbesar di Provinsi Jawa Timur setelah Jember dan Sumenep. Meski dengan kondisi inflasi yang

cukup tinggi tersebut, kenyataannya Pemerintah Kota Surabaya mampu mendorong sebanyak 1,84 ribu jiwa penduduk Kota Surabaya untuk keluar dari status miskin.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P1) serta keparahan (P2) dari kemiskinan yang terjadi. Upaya yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Surabaya mengalami peningkatan nilai di sebesar 0,02 poin menjadi 0,71 pada tahun 2023. Untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,18 pada 2022, menjadi 0,16 pada 2023.

Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun hingga tahun 2023 ini, menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kota Surabaya, tidak terlalu besar. Sampai dengan tahun 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Surabaya memiliki kecenderungan menurun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kota Surabaya, semakin mendekati Garis Kemiskinan. Terjadinya peningkatan nilai P1 pada tahun 2023 sebesar 0,02 poin diduga karena peningkatan inflasi yang cukup tinggi selama Maret 2022 hingga Maret 2023, sehingga tidak mampu mendorong penduduk yang sangat miskin untuk meningkatkan daya belinya. Berdasarkan hal ini, program bantuan sosial kemiskinan selanjutnya diarahkan untuk mengangkat mereka yang berada di status sangat miskin atau miskin ekstrem.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai tingkat 0% (nol persen) pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi yang digunakan oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu rumah tangga yang mendapatkan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 69,33 ribu jiwa (2,39%), terus menurun di tahun 2021, sebanyak 35,02 ribu jiwa (1,20%), hingga tahun 2022, sebanyak 23,53 ribu jiwa (0,80%). Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, di antaranya dengan menetapkan data kemiskinan ekstrem melalui SK Walikota No. 188.45/556/436.1.2/2022 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kota Surabaya Tahun 2022, yakni sejumlah 23.530 jiwa pada 5.310 KK.

Pemerintah Kota Surabaya menciptakan berbagai inovasi untuk mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi warga, antara lain pelatihan masyarakat (keluarga miskin) dalam program Padat Karya, inovasi e-peken dan pemberian bantuan modal. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk mengurangi beban pengeluaran warga, antara lain dengan cara meningkatkan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2023 menjadi 100%, pemberian beasiswa Pendidikan seperti beasiswa penghafal kitab suci, beasiswa pemuda tangguh, pembebasan ijazah, serta pemberian bantuan langsung kepada warga miskin melalui penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Selain dari pemerintah, kontribusi pihak swasta dalam pemberian bantuan juga sangat berperan dalam mengurangi beban keluarga miskin. Di samping itu, Pemerintah Kota juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui Program Dandan Omah serta pengadaan jamban sehingga Kota Surabaya mencapai *Open Defecation Free* (ODF) 100%. Sebagai upaya optimalisasi penyelesaian masalah kemiskinan secara terpadu, dilakukan perbaikan data yang dilakukan melalui kegiatan musyawarah kelurahan (muskel) yang dilakukan setiap bulan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Walikota.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan utamanya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 atau yang disebut SP 2020, terdapat pemutakhiran nilai IPM menyesuaikan data dasar jumlah penduduk sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

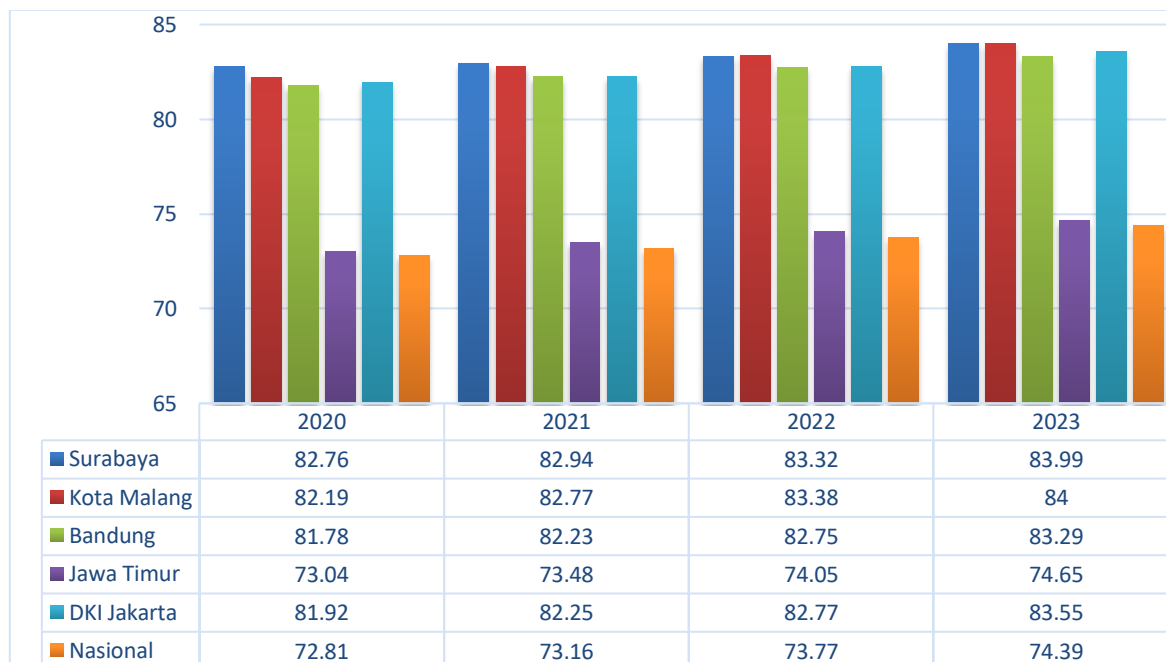
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	80-81	80-81	81-82	82,50	82,50
Realisasi	82,22*	82,76	82,94	83,32	83,99
Capaian	101,51%	102,17%	101,15%	100,99%	101,81%

*Realisasi tahun 2019 menggunakan data AHH dari BPS yang berbasis pada hasil SP2010.

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2019 hingga 2023. IPM Kota Surabaya meningkat dari 82,76 pada tahun 2020 menjadi 83,99 di tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya selalu masuk pada kategori “sangat tinggi” karena sudah memiliki nilai IPM yang lebih dari 80.

Gambar 3.6
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya masih berada di atas capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta serta Kota Bandung, namun masih berada di bawah Kota Malang dengan selisih 0,01 dengan selisih pada sektor Dimensi

Pengetahuan yakni pada Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, sedangkan pada Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup serta Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita per Tahun, capaian Kota Surabaya masih lebih unggul dibandingkan dengan Kota Malang.

E.1. Dimensi Pengetahuan

Pada dimensi pengetahuan, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kota Surabaya mencapai 10,70 tahun (setingkat kelas XI SMA/MA/SMK) atau meningkat 0,19 poin dibanding tahun 2022 yaitu 10,51. Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Surabaya mencapai 14,85 tahun (setingkat Diploma II/III) atau meningkat 0,02 poin dibanding tahun 2022 yaitu 14,83. Capaian ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya antara lain melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP, penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada 100 SD negeri dan swasta dan 55 Unit Layanan Disabilitas di jenjang SMPN, pengembangan PAUD Holistik Integratif, Kejar Paket dengan muatan pendidikan vokasi, Sinau Bareng Arek Suroboyo yang diselenggarakan di 216 balai RW, serta Program Tebus Ijazah bagi 436 siswa jenjang SMA/SMK/MA dengan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong program Orang Tua Asuh, beasiswa bagi penghafal kitab suci sebanyak 1.339 siswa (meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 1.162 siswa), serta Program Surabaya Mengajar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kota Surabaya.

Tabel 3.7
Perbandingan Indeks Pendidikan Kota di Indonesia Tahun 2023

Nama Kota	Angka RLS	Angka HLS
Kota Surabaya	10,7	14,85
Kota Malang	10,94	15,77
Kota Semarang	10,81	15,55
Kota Bandung	11,06	14,24
Provinsi Jawa Timur	8,11	13,38
Provinsi DKI Jakarta	11,45	13,33
Nasional	8,77	13,15

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Meski demikian, jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Timur seperti pada tabel di atas, angka RLS dan HLS di Kota Surabaya masih tertinggal dari Kota Malang

dan Semarang. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dan pramiskin serta bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya untuk bantuan tebus ijazah bagi siswa yang tidak mampu. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan akses pada pendidikan tinggi telah diberikan beasiswa Pemuda Tangguh yang diperuntukkan kepada Siswa-siswi SMA/MA/SMK sebanyak 20.356 orang (tahun sebelumnya 13.862 siswa) dan Mahasiswa sebanyak 3.196 orang (tahun sebelumnya 2.486 mahasiswa). Di masa mendatang penyebaran informasi beasiswa baik yang berasal dari Pemerintah Kota maupun pihak swasta melalui media sosial juga terus dilakukan sebagai bentuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya.

Selain mendorong akses terhadap pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi, Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong peningkatan partisipasi pendidikan dimulai dari usia dini hingga SMP atau sederajat melalui capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD atau sederajat, maupun SMP atau sederajat, serta dengan tetap proaktif dalam menyekolahkan kembali anak-anak yang sempat putus sekolah. Peningkatan kualitas guru juga didorong melalui peningkatan kinerja, sertifikasi, serta pemetaan dan pemerataan penugasan guru. Kualitas lembaga pendidikan juga didorong untuk meningkat melalui peningkatan peringkat akreditasi lembaga pendidikan, baik TK, SD atau sederajat, dan SMP atau sederajat. Selain itu, bantuan seragam sekolah juga diberikan kepada 55.751 siswa setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kota Surabaya, yang berasal dari keluarga miskin dan pramiskin.

Tabel 3.8
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
APK PAUD (%)	88,85	90,33	91,81	76,11	77,58
APK SD/MI (%)	105,86	104,30	106,90	106,37	106,40
APK SMP/MTs (%)	86,49	98,93	110,64	108,47	108,51

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2023

E.2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Surabaya di tahun 2023 mencapai 75,82 tahun, meningkat 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya yaitu 75,62 tahun. Hal ini dicapai melalui komitmen penjaminan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya melalui *Universal Health Coverage* (UHC) yang telah mencapai 100% pada tahun 2023, yang keberhasilannya tidak lepas dari upaya koordinasi, komunikasi, serta kerja sama yang

baik dengan seluruh pemangku kepentingan bidang Kesehatan di Kota Surabaya. Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada Tahun 2023 sebanyak 1.192.949 jiwa (PBI APBD) dan sebanyak 1.871.756 jiwa (Jaminan Kesehatan Kepesertaan Lainnya), sehingga capaian pada Tahun 2023 mencapai 101,84%. Angka Kematian Ibu, terus menurun menjadi sebesar 32,59 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi berhasil diturunkan menjadi 4,04 per 1.000 kelahiran hidup, serta penurunan balita *stunting* aktif menjadi 279 balita pada akhir tahun 2023 (berkurang dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 923 balita). Hal tersebut tidak lepas dari pemberian intervensi yang telah dilakukan pada 923 balita *stunting*, 118 balita gizi buruk, pendampingan Ibu hamil sebanyak 44.057 orang, penyediaan nutrisi dan vitamin yang memadai dengan melalui pemberian tablet Tambah Darah dengan Sasaran Remaja putri sebanyak 95.320 orang, Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil sebanyak 41.434 orang, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 2.900 orang serta pemberian *Community Feeding Center* (CFC) atau PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) kepada balita malnutrisi sebanyak 794 balita.

Pemerintah Kota Surabaya juga terus mengupayakan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai pada 63 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah, pembangunan sarana kesehatan lingkungan dan air bersih serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif perilaku hidup bersih dan sehat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berinovasi dengan program 1 Puskesmas 1 Pediatri (dokter anak) serta 1 Puskesmas 1 Obgin (dokter kandungan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Pemerintah Kota Surabaya juga mengimplementasikan integrasi layanan primer (ILP) di puskesmas, puskesmas pembantu serta posyandu keluarga di Kota Surabaya.

Tabel 3.9
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Indonesia Tahun 2023

Nama Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)
Kota Surabaya	75,82
Kota Malang	75,32
Kota Bandung	75,53
Provinsi Jawa Timur	74,87
Provinsi DKI Jakarta	75,81
Nasional	73,93

Sumber: BPS (Hasil Long Form SP2020), 2024

E.3. Dimensi Standar Hidup Layak

Pada tahun 2023, Pengeluaran per Kapita per Tahun mencapai Rp18.977.000 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp18.345.000 per tahun atau lebih tinggi sebesar Rp632.000 (3,45%). Nilai Pengeluaran per Kapita Kota Surabaya menempati posisi tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dibandingkan dengan Kota Malang yang hanya mencapai Rp17.222.000 dan Provinsi Jawa Timur yang hanya mencapai Rp13.870.000, maka Kota Surabaya lebih tinggi 10,19% dari Kota Malang dan lebih tinggi 36,82% dari Provinsi Jawa Timur. Selain itu, bila dibandingkan dari Kota lain seperti Kota Bandung yang memiliki nilai Pengeluaran per Kapita Tahun 2023 sebesar Rp18.236.000 dan Kota Semarang yang masih hanya mencapai Rp16.420.000. Hal tersebut diperkuat dengan nilai inflasi sampai dengan akhir tahun 2023 yang hanya sebesar 3,03%, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Surabaya semakin membaik. Meningkatnya daya beli masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, juga tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pemberdayaan UMKM, program Padat Karya, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, membuka peluang kerja melalui aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerja (ASSiK), menyelenggarakan acara *job fair* secara rutin, melibatkan partisipasi perusahaan swasta untuk penyerapan tenaga kerja, *rebranding* destinasi wisata baru dan menyelenggarakan *event* untuk meningkatkan omset dari para pelaku ekonomi.

F. Indeks Harmoni Sosial

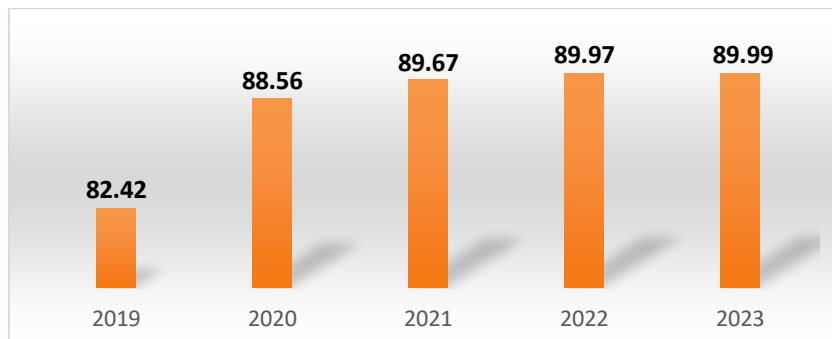
Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menekankan pada paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut.

Indeks Budaya Lokal disusun oleh melalui survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

Selama periode tahun 2018-2021, Indeks Budaya Lokal digunakan sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang positif terhadap budaya lokal dan kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Hal ini dapat tercermin pada Gambar

berikut, di mana Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya menunjukkan kenaikan tiap tahunnya.

Gambar 3.7
Indeks Budaya Lokal Tahun 2019 – 2023



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Tabel 3.10
Indeks Budaya Lokal Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	79,61	80,00	81,50	88,90	89,30
Realisasi	82,42	88,56	89,67	89,97	89,99
Capaian	103,53%	110,70%	110,02%	101,20%	100,77%

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Pada tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, indeks budaya lokal disempurnakan menjadi Indeks Harmoni Sosial dengan menambahkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Penambahan kedua indikator ini guna mendukung upaya pembentukan karakter masyarakat Kota Surabaya yang produktif, religius, berbudaya dan harmonis dalam bingkai kebhinnekaan. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (4) persentase rumah sehat. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan melalui survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan. Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar

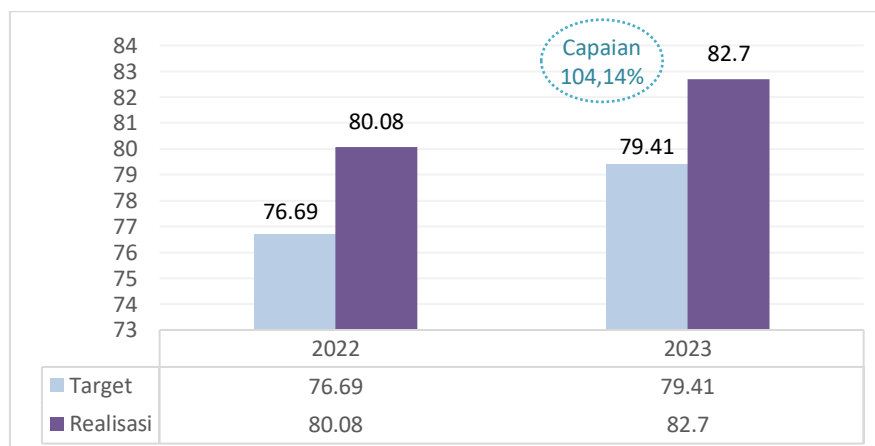
masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, beserta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel 3.11
Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2023

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Harmoni Sosial	79,41	82,70	104,14%
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	56,46	56,51	100,09%
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	89,20	97,86	109,71%
1.c	Indeks Budaya Lokal	89,30	89,99	100,77%

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Gambar 3.8
Indeks Harmoni Sosial 2022 - 2023



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2023 sebesar 82,70% tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi *event* budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya.

Capaian Indeks Budaya Lokal didapatkan dari survei Tingkat Kepedulian Masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan, dan survei Tingkat Pemahaman Budaya Surabaya. Survei tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan dilakukan bulan yaitu November-Desember 2023 secara daring. Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan beberapa intervensi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mendorong nilai-nilai kebangsaan. Tingkat

kepedulian masyarakat diukur dengan menggunakan skala *likert* 1-7. Responden untuk survei ini sejumlah 3.554 responden dengan 24 kategori kegiatan yang dilakukan oleh warga yang bermanfaat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjadi salah satu ciri dari bangsa Indonesia yang terbagi dalam 4 *sub survey* (karakteristik responden untuk mengetahui keberagaman umur, pendidikan terakhir, bahasa yang digunakan sehari-hari, tempat kelahiran dan lama menetap di Surabaya; Pendapat masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan, tingkat kepedulian kebangsaan berdasarkan kegiatan; serta Kegiatan Pemerintah) yang diukur dengan menggunakan skala *likert* 1-5. Tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan dilaksanakan melalui pembacaan Pancasila di sekolah-sekolah, mengumandangkan Lagu Indonesia Raya, Parade Juang, Wisata Kebangsaan, Peringatan Hari Pahlawan, menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, mengunjungi museum bersejarah, mengikuti kegiatan pramuka untuk anak-anak, memperingati hari besar nasional, melestarikan gotong royong dan siskamling di lingkungan tempat tinggal, pemahaman terkait lokasi taman makam pahlawan. Hasilnya, rata-rata tingkat kepedulian masyarakat Surabaya pada tahun 2023 terhadap kegiatan yang mendorong nilai kebangsaan sebesar 89,81. Pada tahun 2022, rata-rata tingkat kepedulian masyarakat sebesar 89,78%, yang berarti menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepedulian masyarakat Surabaya terhadap kegiatan yang mendorong nilai kebangsaan sebesar 0,03%.

Sedangkan untuk survei tingkat pemahaman budaya juga dilakukan secara daring kepada 5.059 responden yang terbagi dalam 2 *sub survey* (Karakteristik responden untuk mengetahui keberagaman umur, pendidikan terakhir, bahasa yang digunakan sehari-hari, tempat kelahiran dan lama menetap di Surabaya serta Tingkat Pemahaman Budaya). Tingkat Pemahaman Budaya dilihat dari Pemahaman terhadap jenis makanan seperti Rujak Cingur, Lontong Balap, Semanggi, Kupang, Tahu campur, Sate Klopo, Tahu Tek, Rawon; Pemahaman terhadap jenis budaya arek seperti Bahasa Arek, Campur Sari, Karawitan, Ludruk, Wayang Orang, Ketoprak, Reog, Jaranan, Keroncong, Seni Nuansa Islam (Hadrah/Tanjidor), Tari (Misal Tari Remo), Lukis, dan Wayang Kulit; Pemahaman terhadap mainan tradisional seperti Pathil Lele, Dakon, Gobak Sodor, Benteng-bentengan, Egrang, Engkle, Okol/Panco, Boi-boian, Adu Doro; Pemahaman terhadap adat istiadat seperti Pernikahan Adat, Tahlil, Sedekah Bumi, Busana Adat (udeng batik, beskap, jarik), dan Upacara Adat Kelahiran; Pemahaman terhadap cagar budaya seperti Tugu pahlawan/museum, Balai Pemuda, Balai Kota, Siola, Hotel Mojopahit, Koridor

Tunjungan dan Kampung Ketandan, Kebun Binatang Surabaya, Kawasan Kampung Peneleh dan Rumah HOS Cokroaminoto, Masjid Ampel dan Kampung Arab, Kota Tua (Jln. Karet, Jln. Kembang Jepun, Hotel Ibis, PTPN), Gereja Katolik Kepanjen, Museum Bank Indonesia, Siropen Pabrik Es Jatim, Rumah W.R. Supratman, Benteng Kedung Cowek, Museum Kesehatan, Kampung Lawang Seketeng (Langgar Dukur, Sumur Jobong), Rumah Lahir Bung Karno; Pemahaman terhadap pagelaran budaya seperti Festival Rujak Uleg, *Surabaya Art and Culture Festival*, Parade Budaya dan Bunga, *Cross Culture Festival/ Festival Budaya Lintas Negara*, Pemilihan Cak dan Ning dan Pemahaman terhadap pengembangan wisata budaya di kawasan Tunjungan Romansa, Festival Layang-layang, Susur Sungai Kalimas, Alun-alun Suroboyo, Kya-kya. Dari survei tersebut, tingkat pemahaman budaya lokal Surabaya tahun 2023 naik sebesar 90,17% dari hasil pada tahun 2022 sebesar 90,16%. Beberapa kegiatan sudah dilakukan, misalnya festival rujak uleg, festival tunjungan street, pagelaran seni budaya, pagelaran seni virtual, parade budaya dan bunga, *Surabaya Vaganza*, Sedekah Bumi, festival lintas budaya serta pemilihan cak dan ning. Mayoritas pengunjung kegiatan tersebut diketahui melalui media sosial atau teman. Pemerintah Kota Surabaya juga memperbanyak ruang ekspresi seni dan sejarah serta secara aktif menggandeng seniman dan komunitas sejarah dalam kegiatan seni dan budaya.

Pencapaian dalam aspek kapasitas pengelolaan lingkungan didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat umum, pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan yang dimaksud di antaranya pembinaan bank sampah di 470 lokasi dan 40 kampung *zero waste*, pembinaan Kampung Iklim dan Energi serta diadakannya perlombaan lingkungan seperti *Surabaya Smart City*, Surabaya ECO school dan Sekolah Adiwiyata, serta ECO campus dan ECO pesantren.

Sedangkan capaian Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan di tahun 2023 sebesar 56,51. Relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 48,01. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, fasilitasi sarana prasarana pengolahan sampah, melibatkan fasilitator lingkungan sebagai pendamping dalam upaya pelestarian lingkungan, pembinaan konservasi energi dan pemilahan sampah.

Kemudian, dukungan atas pencapaian Indeks Harmoni Sosial tersebut juga didukung oleh capaian Indeks Kepedulian Sosial yang di tahun 2023 mencapai 97,86, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 97,67. Peningkatan ini terwujud melalui upaya

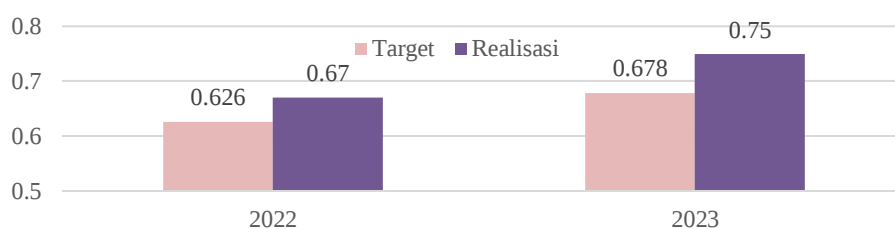
pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkoba dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

G. Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota dihitung untuk mengukur keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanian serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan sebelum tahun 2022 dengan tahun 2022 dan 2023 berbeda dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Gambar 3.9
Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2022 – 2023



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2023

Tabel 3.12
Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2023

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur Kota	0,678	0,75	110,62%
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,8	0,81	101,25%
1.b	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanian	0,50	0,67	133,20%
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,690	0,74	107,25%

Catatan: Tahun 2023 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2024

Pada tahun 2023, realisasi Indeks Infrastruktur Kota mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,75. Hal ini dikarenakan unsur pembentuk yaitu indeks kebinamargaan dan pematusan serta indeks penyelenggaraan transportasi mengalami kenaikan dari tahun 2022.

Realisasi Indeks kebinamargaan dan pematusan pada tahun 2022 adalah 0,78 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,81. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan *overlay* (pelapisan ulang aspal) pada tahun 2022 sebanyak 2.072 ruas jalan dan menjadi sebanyak 2.780 ruas jalan di tahun 2023, serta peningkatan konektivitas jalan melalui pembangunan jalan baru (Jalan Lingkar Luar Barat di tahun 2022 dan *Radial Road* di tahun 2023). Penanganan genangan dilakukan melalui pembangunan dan/rehabilitasi sistem drainase pada tahun 2022 sebanyak 353 lokasi sedangkan pada tahun 2023 menjadi 435 lokasi sesuai dengan rencana penyelesaian genangan, penambahan kapasitas dan pembangunan rumah pompa baru sebanyak 4 unit di tahun 2022 dan bertambah 7 unit di tahun 2023, pengadaan dan pemasangan 6 stasiun hujan pada tahun 2023 di beberapa rumah pompa antara lain Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gadukan, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Wonorejo 1, Rumah Pompa Bulak, dan Rumah Pompa Merr serta pengerukan saluran primer, sekunder dan tersier di 1.192 lokasi di tahun 2022 dan menjadi di 1.348 lokasi di tahun 2023, sesuai dengan rencana pemeliharaan rutin saluran. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah titik lokasi genangan di Kota Surabaya dari 414 titik lokasi genangan pada tahun 2022 menjadi 250 titik lokasi genangan pada tahun 2023.

Selanjutnya realisasi indeks penyelenggaraan transportasi pada tahun 2022 adalah 0,67 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,74. Keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan antara lain angkutan Suroboyo Bus sebanyak 28 unit yang melayani 2 rute layanan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, kerjasama Kementerian Perhubungan melalui Program Teman Bus sebanyak 17 unit yang melayani 1 rute, serta angkutan *feeder* sebanyak 52 unit yang melayani 6 rute di tahun 2022 dan di tahun 2023. Selain itu, capaian kinerja aspek transportasi didukung dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta koordinasi dengan pihak penyelenggara moda transportasi kereta api (PT. KAI DAOP VIII Surabaya) untuk menjalin konektivitas antar moda transportasi pada 3 stasiun serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Dari aspek Keciaptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Kota juga melakukan berbagai upaya yaitu penyediaan hunian layak melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin sebanyak 105 blok rusunawa di tahun 2022 dan meningkat menjadi 109 blok rusunawa di tahun 2023. Program Dandan Omah sebagai upaya rehabilitasi terhadap rumah tapak tidak layak huni sebanyak 929 unit rumah pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 3.909 unit rumah pada tahun 2023 yang bersumber dari APBD sebanyak 3.140 unit, 108 unit bersumber dari Baznas, 632 unit bersumber dari BSPS, 2 unit bersumber dari Yayasan Manarul Ilmi, 8 unit berasal dari Gereja Victory, 1 unit bersumber dari Alumni SMA 5, dan 18 Unit bersumber dari Bangsa Surabaya Peduli, fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebanyak 22 lokasi di tahun 2022 dan meningkat menjadi 35 lokasi di tahun 2023, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. Selain itu, dari sisi penataan ruang dan penyediaan tanah telah dilakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi serta berbasis teknologi.

Untuk meningkatkan keberhasilan kualitas infrastruktur kota, akan terus dilakukan peningkatan kualitas jalan, pembangunan sarana dan prasarana jalan (jembatan dan pedestrian), pembangunan sarana dan prasarana drainase (saluran dan rumah pompa), penyediaan rutilahu, pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung pemerintah, pembangunan/pemeliharaan rusunawa, penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum, penambahan koridor layanan angkutan umum perkotaan, serta peningkatan sinergitas dengan *stakeholder* penyelenggaraan moda transportasi lain untuk meningkatkan konektivitas jaringan.

H. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan secara nasional sebagai indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kualitas dan kondisi udara, air dan tutupan tanah dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan, industri besar, industri kecil, kepadatan lingkungan permukiman. Sedangkan kondisi tutupan lahan yang sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan besaran Ruang Terbuka Hijau serta sistem persampahan dan sanitasi. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-318/ PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH Tahun 2020-2024 yang diterapkan mulai tahun 2021. Dengan demikian, nilai IKLH tahun 2019 dan 2020 tidak dapat disandingkan dengan nilai IKLH tahun 2021-2023. Selain itu, terdapat perbedaan perhitungan nilai IKLH Nasional dan Jawa Timur dengan IKLH Kabupaten/Kota, di mana di tingkat Kabupaten/Kota tidak menyertakan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam perhitungan IKLH. Berikut capaian nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2023.

Tabel 3.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
IKLH Kota Surabaya	67,78*	35,06	55,97
IKLH Provinsi Jawa Timur	N/A	68,49	69,92
IKLH Nasional	N/A	71,45	72,42

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

*)Berdasarkan metode perhitungan RPJMD kota Surabaya tahun 2021 - 2026

Tabel 3.14
Indeks Penyusun IKLH Tahun 2021 – 2023

Indeks	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A*	49,15	49,02
Indeks Kualitas Udara (IKU)	74,38	75,76	70,15
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,56	31,07	35,06

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024. *) Indikator IKA tidak masuk dalam perhitungan

Selain IKLH, fokus peningkatan kualitas lingkungan di Kota Surabaya adalah pada pengelolaan sampah. Tingginya sampah yang dihasilkan seiring dengan tingginya

jumlah penduduk Kota Surabaya sebesar 3.009.286 Jiwa dan tingginya aktivitas ekonomi, oleh karenanya dibutuhkan prioritas pengelolaan persampahan, sehingga Kota Surabaya melakukan penambahan Indeks Persampahan. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebagai kinerja utama dengan komponen penyusun yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Persampahan.

Berpedoman kepada UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dengan demikian, perhitungan Indeks Persampahan mencakup 1) Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan; 2) Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya; 3) Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 didasarkan pada evaluasi IKLHS RPJMD Kota Surabaya periode sebelumnya, yaitu Tahun 2016-2021, dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Berikut merupakan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Persampahan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.15
Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2019 – 2023

Indeks	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,68	56,05	58,18	57,91	58,50
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,30	90,31	90,28	90,55	86,61
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,45	42,63	42,63	42,64	42,65
Indeks Persampahan	75,09	75,84	76,62	82,91	83,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Tabel 3.16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	64,9	65	65,1	68,32	68,54
Realisasi	64,97	65,08	65,71	70,82	70,35
Capaian	100,11%	100,12%	100,94%	103,66%	102,64%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2019 sampai 2022, di mana pada tahun 2019 IKLHS sebesar 64,97 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 mencapai 70,82. Nilai IKLHS mengalami kenaikan karena salah satu unsur pembentuk yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan pengolah sampah menjadi energi listrik. Adapun upaya lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan IKLHS antara lain pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, penghematan energi dengan cara konservasi energi yang dapat menurunkan pemakaian energi secara tidak tepat dan tidak efisien, serta upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Pada tahun 2023, IKLHS mengalami sedikit penurunan menjadi 70,35. Penurunan IKLHS disebabkan oleh relatif menurunnya Indeks Kualitas Udara dikarenakan faktor iklim yaitu kemarau panjang yang menyebabkan suhu dan volume debu meningkat. Selain itu, emisi polutan dari sumber bergerak belum dapat dikendalikan, karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkatnya aktivitas perekonomian pasca pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Surabaya terus mengupayakan kualitas udara yang lebih baik antara lain melalui: 1) Optimalisasi pengurangan/penyerapan polutan melalui RTH dengan diversifikasi jenis pohon/tanaman untuk meningkatkan efektivitas penyerapan polutan; 2) Penyebarluasan informasi dan pendampingan Program Kampung Iklim serta pelaksanaan Car Free Day pada 7 lokasi; 3) Inventarisasi emisi untuk mengidentifikasi kegiatan/usaha sumber pencemar yang berkontribusi dalam pencemaran/polusi udara agar dapat disusun rencana aksi dan strategi yang tepat sasaran; 4) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi Program Langit Biru terkait pengendalian pencemaran udara antara lain penggunaan angkutan umum, pemanfaatan energi terbarukan, penyediaan sarana prasarana pejalan kaki dan sebagainya; serta 5)

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi menyebabkan pencemaran/polusi udara.

Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Persampahan mengalami kenaikan pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 sebesar 57,91 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 58,50. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Kegiatan pengawasan kegiatan usaha terkait dengan pengelolaan IPAL dan pemenuhan Baku mutu air yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usahanya serta sosialisasi dan pembinaan pengelolaan air limbah dan sampah terhadap masyarakat dan kegiatan/usaha, antara lain sosialisasi utamanya pada warga di area bantaran sungai untuk pencegahan dan penanggulangan buang sampah sembarangan dan BABS, bersih-bersih bantaran sungai, pantai, dan saluran air. Selain itu dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta membantu masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki jamban, Pemerintah Kota berupaya membangun jamban sebanyak 7.922 unit bersumber dari APBD Kota Surabaya, 3.000 unit jamban dari BAZNAS Surabaya, dan 50 unit jamban dari PDAM Surya Sembada, sehingga Surabaya dapat mencapai status 100% ODF serta dapat mengentaskan masyarakat dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Kemudian untuk Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu dari 42,64 menjadi sebesar 42,65. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari Pemerintah Kota dalam melakukan pengembangan RTH publik melalui taman dan pemeliharaan RTH antara lain lapangan olahraga serta taman dan jalur hijau. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Luas Ruang terbuka hijau publik pada tahun 2023 sebesar 7.363, 51 Ha atau 22,01%, luasan ini telah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau Publik pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yakni minimal 20%. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 921 taman yang terdiri dari 178 taman aktif dan 743 taman pasif.

Sedangkan untuk Indeks Persampahan pada tahun 2022 sebesar 82,91 dan meningkat menjadi 83,79 pada tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya pengurangan sampah lingkungan melalui Bank sampah di RT-RW yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah, terdapat sarana prasarana pengelolaan persampahan yang beroperasi secara optimal antara lain berupa rumah

kompos, TPS, TPS 3R dan TPA Benowo yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan pengolah sampah menjadi energi listrik, dan tercukupinya sarana (armada) pengangkutan sampah dari TPS, pengangkutan sampah dari TPS secara rutin sesuai jadwal yang telah disusun. Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 2.224,27 ton/hari, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.222,62 ton/hari. Pada tahun 2021 sebanyak 1.752,50 ton/hari, sedangkan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 volume produksi sampah adalah 1.800,04 ton/hari, sebagaimana rekap data pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Volume Produksi Sampah (ton/hari)	2.224,27	2.222,62	1.752,50	1.792,72	1.800,04
Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.969,87	1.958,41	1.585,26	1.601	1.536,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

I. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi terhadap Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mekanisme evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Evaluasi RB pada tahun 2023 ditekankan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif, dan meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

- RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
- RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik. Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang

dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan penggunaan produk dalam negeri. Pada tahun 2023, penilaian Reformasi Birokrasi dibagi menjadi RB General dan RB Tematik. RB General tersusun atas beberapa indikator yang disajikan pada tabel berikut beserta dengan perolehan skor Kota Surabaya 2023.

Tabel 3.18
Penilaian RB General Kota Surabaya Tahun 2023

No	Indikator Penilaian	Skor
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,67
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	95,12
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,483
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1,5
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83,92
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,38
10	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4
11	Indeks Kualitas Kebijakan	70,87
12	Indeks Reformasi Hukum	66,11
13	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,67
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	67,91
15	Indeks Sistem Merit	341,5
16	Indeks Pelayanan Publik	4,53
17	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	97,49
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,49
19	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	100
20	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	90,32
21	Opini BPK	5
22	Tindak Lanjut Rekomendasi	95,3
23	Indeks BerAkhlak	77,3
24	Survei Penilaian Integritas	79,57
25	Survei Kepuasan Masyarakat	95,64
26	Koefisien	0

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Sedangkan RB Tematik mengusung beberapa tema antara lain Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pengendalian Inflasi.

Selain itu, RB Tematik juga tersusun dari beberapa indikator yang disajikan pada tabel berikut beserta dengan perolehan skor Kota Surabaya 2023.

Tabel 3.19
Penilaian RB Tematik Kota Surabaya Tahun 2023

No	Indikator Penilaian	Skor
1	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,37
2	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,27
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,37
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4
5	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,25
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	100
7	Realisasi Investasi (Capaian Output)	100
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	100
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	100
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	100
11	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,61
12	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	2,08
13	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3
14	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	2,21
15	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	0,61

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Berdasarkan surat KemenPAN RB Nomor B/304/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Surabaya Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.20
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target	BB	A	82,61	83,41
Realisasi	BB 78,13	BB 78,38	A 80,14	A- 95,12*
Capaian	Tercapai	Tidak tercapai	97,01%	114,04%

* Perhitungan realisasi berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Sumber: Bagian Organisasi, 2024

Indeks RB mengalami peningkatan predikat dari BB di tahun 2021 menjadi A di tahun 2022 dengan nilai 80,14 dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi 95,12. Adapun beberapa upaya yang perlu disempurnakan untuk pencapaian Reformasi Birokrasi antara

lain: (1) Penyusunan Rencana Aksi RB yang memenuhi aspek perencanaan, penganggaran, proses bisnis, pengawasan, teknologi informasi dan adanya perbaikan/inovasi serta berfokus pada aktivitas-aktivitas intervensi yang mendukung prioritas permasalahan utama/kritis, (2) Menindaklanjuti proses Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, (3) Pengendalian dan pendampingan yang masif kepada SDM terkait manajemen risiko, (4) Peninjauan atas pohon kinerja mengutamakan *Critical Success Factor* (CSF) agar pencapaian kinerja strategis yang dipengaruhi dapat terkawal, (5) Pengendalian dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian tahun lalu serta kemampuan mencapai target, (6) Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Menyusun profil pegawai berbasis pemetaan kompetensi dan *talent pool* untuk keseluruhan pegawai untuk mendapatkan analisis kesenjangan kompetensi untuk keseluruhan pegawai dan mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan, (7) Melaksanakan praktik kerja, *coaching*, dan mentoring secara terjadwal dan disertai dengan evaluasinya serta menyempurnakan analisis permasalahan kinerja, (8) Melakukan kegiatan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip Satu Data Indonesia, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas data secara berkesinambungan, (9) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi melalui optimalisasi penggunaan teknologi serta mengevaluasi pengguna layanan.

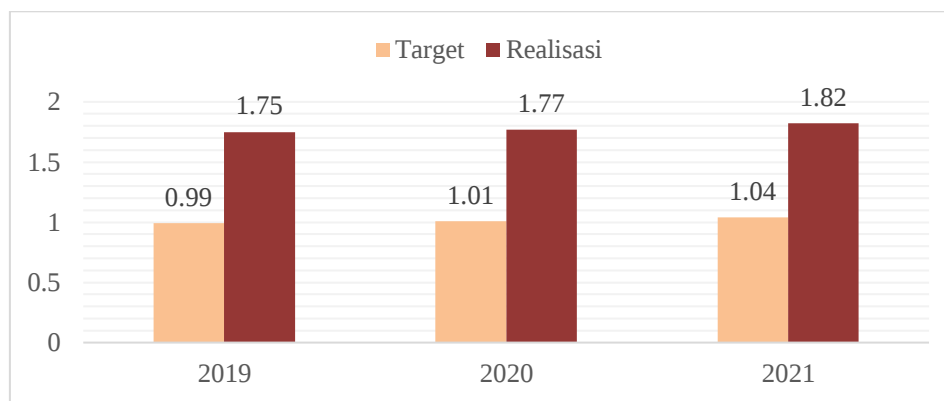
J. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban Kota

Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota merupakan salah satu faktor pendukung yang penting untuk memastikan kepastian pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar serta menopang kepercayaan investor. Pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota melalui indikator Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman, indeks ini diarahkan untuk melatih berbagai elemen masyarakat dalam rangka kesiap-siagaan dalam penanganan bencana, peningkatan ketenteraman dan ketertiban serta penyebaran informasi terkait penanganan bencana, peningkatan ketenteraman dan ketertiban.

Selama periode tahun 2019-2021, kinerja ketertiban dan ketenteraman kota diukur dengan Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota, dengan menghitung rata-rata invers banyaknya kejadian anarkis dan banyaknya pelanggaran Perda. Pada periode empat

tahun terakhir tersebut, Indeks Ketertiban dan Ketenteraman menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2021, Angka Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota mencapai angka 1,82 meningkat 0,05 poin dibandingkan tahun 2020 sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum norma dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berjalannya kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.10
Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota Tahun 2019 – 2021



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Sesuai dengan fokus penguatan terhadap upaya penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka pengukuran ditambah dengan Indeks Penanggulangan Bencana sehingga menjadi Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota terdiri dari dua komponen utama, yaitu Indeks Penanggulangan Bencana serta Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota. Indeks Penanggulangan Bencana sendiri diperoleh dari perhitungan: (1) penanganan bencana yang terintegrasi dan (2) pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi. Sedangkan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota mengalami perubahan formulasi dari periode sebelumnya, yakni menjadi diperoleh dari perhitungan rata-rata: (1) Penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD) yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) serta (2) Penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir/ Pasang Air Laut	0	0	0	0	0
2	Angin Puting Beliung/ Angin Kencang	7	2	4	0	0
3	Kebakaran	515	608	705	589	771
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Tinggi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	0

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2023

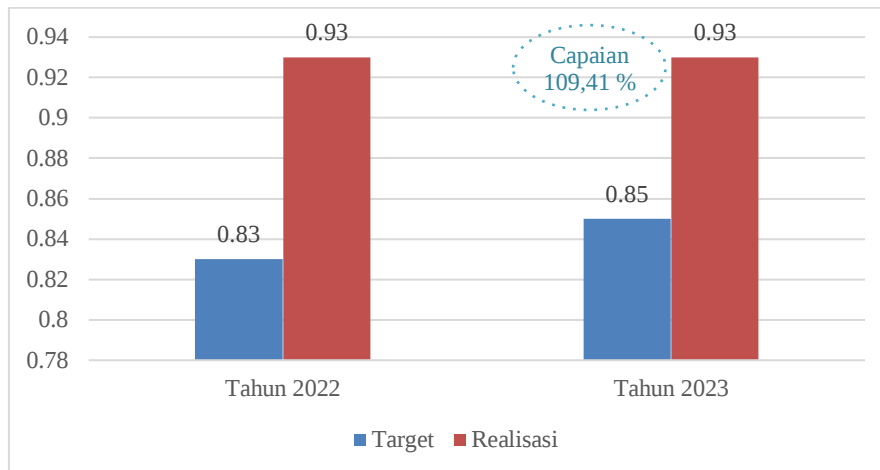
Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Surabaya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota
Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2023

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,85	0,93	109,41%
1.a	Indeks Penanggulangan Bencana	0,828	0,92	111,11%
1.b	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,87	0,93	106,90%

Sumber: Bappedalitbang, 2024 (data diolah)

Gambar 3.11
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban Kota Tahun 2022-2023



**Tahun 2022 dan 2023 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
Sumber: Bappedalitbang, 2023 (data diolah)*

Hingga tahun 2023, kepatuhan masyarakat terhadap hukum norma dan peraturan yang berlaku serta integrasi dan mitigasi guna menanggulangi dan menangani bencana masih menunjukkan hal positif. Hal ini terlihat pada gambar di atas, yang menunjukkan capaian Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk melakukan mitigasi bencana dengan melakukan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Pratama sebanyak 61 Kelurahan, pelatihan pencegahan dan pengurangan resiko bencana sebanyak 72 kali dan diikuti peserta dari unsur sekolah/madrasah, pegawai Rumah Sakit/Puskesmas serta relawan, penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, serta upaya maksimal dalam penanganan korban bencana dan/atau kedaruratan. Selain itu, dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, telah dilakukan upaya pemeriksaan proteksi kebakaran dan sosialisasi kepada pemilik bangunan gedung, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran, peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan penanganan kebakaran, peningkatan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan, serta peningkatan waktu tanggap kejadian kebakaran dengan standar ≤ 7 menit dan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran.

Tercapainya ketenteraman dan ketertiban juga tidak lepas dari upaya pencegahan dan penindakan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pelaksanaan patroli rutin pada lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan

kerusuhan massa, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta penertiban pelanggaran Perda yang persuasif dan humanis dengan cara sosialisasi sebelum dilakukannya penertiban guna menemukan titik terang solusi dan mencegah adanya kesalahpahaman. Kemudian sebagai upaya untuk memberikan penerangan pada jalan lingkungan, Pemerintah kota juga melakukan upaya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 105.846 titik pada 7.960 lokasi sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan ditahun 2024 akan melakukan upaya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada 7.586 titik. Selain itu, dalam menjaga stabilitas kesatuan bangsa di masyarakat, telah dilakukan upaya melalui optimalisasi peran kerukunan umat beragama dalam meminimalisir potensi konflik yang muncul di tengah - tengah masyarakat, peningkatan koordinasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dalam pencegahan konflik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, koordinasi dalam pemantauan orang, tenaga kerja dan lembaga asing, serta mendorong peran partai politik untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Selain itu dilakukan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada pengurus RT/RW, Karang Taruna, kader serta tokoh masyarakat sebagai elemen terkecil dari masyarakat agar turut serta mencegah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dari level terkecil di masyarakat

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, bidang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 39 bidang urusan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan dalam tabel 3.23. Pada tabel tersebut disajikan 39 bidang urusan dengan rata-rata capain sebesar 112%, hal ini menunjukkan bahwa bidang urusan telah diselenggarakan dengan baik, hal ini tidak lepas dari keberhasilan program kegiatan yang mendukung pencapaian pada 39 bidang urusan tersebut.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.23
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
1.1.	Indeks Pendidikan	78.52	76.92	97.96%	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,7 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui 1) pemberian beasiswa SMA/MA/SMK dan bagi anak putus sekolah, 2) pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 3) menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Pemerintah Kota Surabaya juga bekerjasama dengan pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pemberian beasiswa bagi siswa SMP dari keluarga miskin dan pramiskin serta dengan Baznas Kota Surabaya untuk bantuan tebus ijazah bagi siswa yang tidak mampu. Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2023 telah mencapai 14,85 tahun, Pemerintah Kota Surabaya memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin. Penyebarluasan informasi beasiswa melalui media sosial juga terus dilakukan sebagai bentuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
2.1.	Angka Harapan Hidup	74.44	75.82	101.85%	
2.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat	89.23%	95.82%	107.39%	
	2.2.1. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	89.23%	93.30%	104.56%	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1.	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0.80	0.81	101.25%	
3.2.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan	0.503	0.67	133.20%	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
	3.2.1.	Indeks Penataan Ruang	0.286	0.31	108.39%	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
4.1.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan		0.503	0.67	133.20%	
	4.1.1.	Indeks Keciptakarya	0.17	0.35	205.88%	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Indeks Penanggulangan Bencana		0.828	0.92	111.11%	
5.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0.87	0.93	106.90%	
	5.2.1.	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	78.58%	84.96%	108.12%	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
6.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan		0.83	0.71	114.46%	
6.2.	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk		2.28%	1.47%	135.53%	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
1.1.	Persentase tenaga kerja yang terserap		21.57%	22.67%	105.10%	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.	Indeks Pembangunan Gender		93.74	94.21	100.50%	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan		94.00	94.34	100.36%	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
4.1.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanian		0.503	0.67	133.20%	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
	4.1.1.	Indeks Pertanahan	0.047	0.01	21.28%	1. Adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
5.1.	Indeks Kualitas Air		56.08	58.50	104.32%	
5.2.	Indeks Kualitas Udara		90.33	86.61	95.88%	1. Faktor iklim yaitu kemarau panjang yang menyebabkan suhu dan volume debu meningkat. 2. Emisi polutan dari sumber bergerak belum dapat dikendalikan, karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan.
5.3.	Indeks Kualitas Lahan		42.69	42.65	99.91%	1. Keterbatasan ruang untuk perluasan dan pengembangan RTH publik 2. Identifikasi data RTH privat untuk perencanaan pengembangan RTH masih dalam tahap persiapan
5.4.	Indeks Persampahan		77.54	83.79	108.06%	
5.5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan		56.46	56.51	100.09%	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		89.23%	95.82%	107.39%	
	6.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	89.23%	96.11%	107.71%	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					
7.1	Indeks Pembangunan Gender		93.74	94.21	100.50%	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1.	Angka Harapan Hidup		74.44	75.82	101.85%	
	7.1.1.	Indeks Bangga Kencana	66.96	67.80	101.25%	
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
9.1.	Indeks Penyelenggaraan Transportasi		0.69	0.74	107.25%	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
10.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3.2	4.49	140.31 %	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah					
11.1.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro		16.60%	17.17%	103.43%	
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
12.1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		5.50%	7.67%	139.45%	
12.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat		89.23%	95.82%	107.39%	
	12.2.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	89.23%	95.41%	106.93%	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
13.1.	Indeks Pendidikan		78.52	76.92	97.96%	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,7 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui 1) pemberian beasiswa SMA/MA/SMK dan bagi anak putus sekolah, 2) pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 3) menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Pemerintah Kota Surabaya juga bekerjasama dengan pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pemberian beasiswa bagi siswa SMP dari keluarga miskin dan pramiskin serta dengan Baznas Kota Surabaya untuk bantuan tebus ijazah bagi siswa yang tidak mampu. Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2023 telah mencapai 14,85 tahun, Pemerintah Kota Surabaya memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin. Penyebarluasan informasi beasiswa melalui media sosial juga terus dilakukan sebagai bentuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi.
	13.1.1.	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0.73	1.04	142.47%	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
14.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3.2	4.49	140.31%	
	14.1.1.	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100%	100%	100%	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
15.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3.2	4.49	140.31%	
	15.1.1.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100%	100%	100%	
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
16.1.	Indeks Budaya Lokal		89.30	89.99	100.77%	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
17.1	Indeks Pendidikan		78.52	76.92	97.96%	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,7 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui 1) pemberian beasiswa SMA/MA/SMK dan bagi anak putus sekolah, 2) pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 3) menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Pemerintah Kota Surabaya juga bekerjasama dengan pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pemberian beasiswa bagi siswa SMP dari keluarga miskin dan pramiskin serta dengan Baznas Kota Surabaya untuk bantuan tebus ijazah bagi siswa yang tidak mampu. Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2023 telah mencapai 14,85 tahun, Pemerintah Kota Surabaya memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin. Penyebarluasan informasi beasiswa melalui media sosial juga terus dilakukan sebagai bentuk peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi.
	17.1.1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68.90	80.30	116.55%	
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
	18.1.1.	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	76.92%	79.69%	103.60%	
Layanan Urusan Pilihan						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
1.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum		5.18%	7.84%	151.35%	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
2.1.	Skor Pola Pangan Harapan		94.00	94.34	100.36%	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
	2.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	16%	16.93%	105.81%	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
3.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		3.86%	5.48%	141.97%	
3.2.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan		3.70%	3.34%	90.27%	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan mengalami perlambatan disebabkan oleh naiknya harga bahan baku secara global yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan permintaan terhadap produk lapangan usaha tersebut.
3.3.	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak		5.25%	1.45%	27.62%	Masih belum optimalnya pemulihan aktivitas perdagangan pasca covid-19, sehingga berimbas pada arus barang dan arus kontainer perdagangan di Pelabuhan Tanjung Perak.
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
4.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan		3.70%	3.34%	90.27%	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan mengalami perlambatan disebabkan oleh naiknya harga bahan baku secara global yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan permintaan terhadap produk lapangan usaha tersebut.
	4.1.1.	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	77%	100.00%	129.87%	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
5.1.	Skor Pola Pangan Harapan		94.00	94.34	100.36%	
	5.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	5.1%	5.1%	100.00%	
Penunjang Urusan						
1	Perencanaan					
1.1.	Nilai SAKIP		82.97	83.92	101.14%	
	1.1.1.	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	23.93	25.02	104.55%	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
2	Keuangan					
2.1.	Opini BPK		WTP	WTP	100.00%	
	2.1.1.	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	88.88%	98.39%	110.70%	
3	Kepegawaian					
	3.1.1.	Indeks Kualitas Pegawai	79.64	81.48	102.31%	
4	Pendidikan dan Pelatihan					
	4.1.1.	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	77.14	80.65	104.55%	
5	Penelitian dan pengembangan					
5.1.	Nilai SAKIP		82.97	83.92	101.14%	
	5.1.1.	Nilai Indeks Inovasi Daerah	58	61.41	105.88%	
6	Sekretariat Daerah					
6.1.	Nilai SAKIP		82.97	83.92	101.14%	
7	Sekretariat DPRD					
	7.1.1.	Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	100.00%	100.00%	100.00%	
8	Inspektorat Daerah					
	8.1.1.	Indeks kualitas pengawasan	81.60	85.32	104.56%	
9	Kesatuan Bangsa dan Politik					
9.1.	Indeks Kepedulian Sosial		89.20	97.86	109.71%	
9.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0.87	0.93	106.90%	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
	9.2.1.	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95.59%	100%	104.61%	
10	Kecamatan					
10.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		89.23%	95.82%	107.39%	
	10.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	89.23%	96.91%	108.61%	

3.1.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan

3.1.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum program dan kegiatan dalam urusan wajib pelayanan dasar telah memenuhi target sehingga rata-rata capaian 112,51%. Penjabaran pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar yang dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya, dijabarkan dalam 6 Bidang urusan antara lain :

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada;

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.24
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran -Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Command Center 112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93%	96,74%	104,02%			1. Melakukan kajian terkait pemetaan dan identifikasi wilayah rawan bencana 2. Memberikan informasi, edukasi dan advokasi dalam masyarakat berkaitan dengan penanggulangan bencana 3. Perlu inovasi memasukkan kurikulum penanggulangan bencana pada satuan pendidikan	1. Pemetaan dan identifikasi wilayah rawan bencana dituangkan dalam Kajian Resiko Bencana Kota Surabaya per wilayah Kelurahan yang akan diajukan penetapan oleh Bapak Walikota Surabaya. 2. Pada Tahun 2023 BPBD telah memberikan pelayanan sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada sekolah, puskesmas, rumah sakit, hotel, mall, perkantoran dan usaha lainnya serta komunitas relawan. Sosialisasi dan edukasi kebencanaan dilakukan baik secara langsung dan melalui media sosial secara rutin dan berkala. 3. BPBD telah melaksanakan amanat dari Permendikbud 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dengan melakukan sosialisasi ke masing - masing sekolah dan meminta sekolah tersebut membentuk Tim Tanggap Bencana di Sekolah. Sampai tahun 2023 telah terbentuk 391 Tim Tanggap Bencana di jenjang SMP. BPBD telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									terkait kurikulum penanggulangan bencana.
											4. Perlu adanya kajian resiko bencana berkaitan dengan kerawanan bangunan tua dan kondisi pohon-pohon besar	4. Terkait dengan kajian kebencanaan untuk kerawanan bangunan tua dan kondisi pohon-pohon besar akan didetailkan dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). BPBD berkoordinasi lebih lanjut dengan DPRKPP, DLH dan Kecamatan untuk mendata bangunan tua dan pohon-pohon besar yang rawan roboh/tumbang.
											5. Menyediakan rumah perlindungan sebagai tempat evakuasi	5. Pada tahun 2023 BPBD telah melakukan pemetaan titik kumpul evakuasi hunian sementara (huntara) skala kelurahan. Pada tahun 2024 BPBD bersama dengan PD dan instansi terkait menyiapkan lahan/fasilitas umum/fasilitas sosial skala RW yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana.
											6. Peningkatan SDM, Sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan pada command centre	6. BPBD melaksanakan beberapa pelatihan diantaranya pengoperasian aplikasi Sistem Peringatan Dini, Telemedicine dan Manajemen Informasi serta melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap sarana dan prasarana yang menunjang operasional petugas command center.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											7. Evaluasi kelayakan dan keamanan transportasi perahu tambang agar tidak terjadi kecelakaan saat beroperasi	7. Kewenangan terkait perijinan operasional perahu tambang berada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Terkait kelayakan dan keamanan perahu tambang, BPBD Kota Surabaya berperan melakukan pendataan kepemilikan usaha perahu tambang serta melakukan sosialisasi terkait standar kelayakan operasional perahu tambang kepada pemilik usaha perahu tambang. Selain itu BPBD Kota Surabaya memberikan peringatan cuaca ekstrim untuk tidak melakukan aktivitas sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan.
1.05.01.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.05.01.2.02.01		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	100,00%				
1.05.01.2.06		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100,00%				
1.05.01.2.06.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	8 Paket	47,06%	Penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sesuai dengan prioritas	Perlu menyusun skala prioritas belanja dan mengatur ulang jadwal		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kebutuhan untuk menunjang seluruh kegiatan di BPBD	untuk dapat mencapai realisasi yang optimal		
1.05.01.2.08		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100,00%				
1.05.01.2.08.04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	98,68%	98,68%	1. Adanya kejadian kedaruratan yang bersamaan di satu lokasi pada jam sibuk 2. Cakupan layanan posko terpadu dan pos pantau untuk mengoptimalkan penanganan kejadian kedaruratan/bencana 3. Banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke command center 112 dengan tingkat urgensi/kedaruratan yang rendah	1. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk penanganan kedaruratan pada jam sibuk di lokasi padat mobilitas penduduk 2. Optimalisasi Cakupan layanan posko terpadu dan pos pantau terutama di lokasi yang sering terjadi kejadian kedaruratan/bencana 3. Sosialisasi melalui media sosial kepada masyarakat terkait kejadian kedaruratan yang penting dan mendesak untuk dilaporkan melalui command center 112		
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%	98,34%	98,34%	Pemahaman masyarakat telah meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 didukung oleh : 1. Diversifikasi materi dan metode penyampaian pelatihan menyesuaikan terhadap jenis/kelompok sasaran peserta	1. Melakukan kegiatan penyebaran informasi terkait potensi bencana di Kota Surabaya secara masif 2. Memperluas cakupan sasaran peningkatan kapasitas mitigasi bencana bagi masyarakat penghuni rusunawa, rumah sakit, kelompok dasawisma dan bunda PAUD		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pelatihan sehingga masyarakat dapat memahami materi dengan lebih baik. 2. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Kelurahan sehingga peningkatan kapasitas masyarakat lebih efektif, terarah dan tepat sasaran. Namun demikian masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	dengan tujuan dapat menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran anak usia PAUD.		
1.05.03.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	42 Kegiatan	100,00%				
1.05.03.2.02.04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	5 Unit	100,00%				
1.05.03.2.02.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1650 Orang	1748 Orang	105,94%				
1.05.03.2.02.06		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	30 Kawasan	30 Kawasan	100,00%				
1.05.03.2.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	11 Jenis	110,00%				
1.05.03.2.03.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12000 Orang	16639 Orang	138,66%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.03.2.03.04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	424 Orang	90,79%	Pemberian bantuan logistik bagi korban bencana / kedaruratan adalah berdasarkan hasil kaji cepat pasca bencana yang mengidentifikasi kebutuhan masing-masing korban bencana sehingga efisien dan tepat sasaran	Peningkatan kapasitas petugas kaji cepat agar hasil penilaian kaji jitu pasca bencana dapat diberikan dengan efisien dan tepat sasaran		
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	89,40%	89,40%	Masih adanya permintaan layanan kesekretariatan yang belum dapat terpenuhi dikarenakan kebutuhan prioritas lainnya	Optimalisasi perencanaan layanan kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan	1. Melakukan kajian SSH terkait nilai dan kuota PMT (pemberian makanan tambahan) 2. Terkait layanan kesehatan agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk peningkatan kualitas layanan 3. Diharapkan layanan telemedicine dilakukan untuk penyakit umum dan dilaksanakan di semua puskesmas	1. Dinas Kesehatan telah melakukan kajian Standar Satuan Harga (SSH) pemberian makanan tambahan (PMT) bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Sedangkan sasaran penerima PMT ditentukan berdasarkan jumlah balita di wilayah kerja Puskesmas. 2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk peningkatan kualitas layanan baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik. 3. Puskesmas Kota Surabaya telah melaksanakan layanan telemedicine yang memberikan layanan konsultasi diagnostic antar fasilitas layanan kesehatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kota Surabaya Tahun 2023								yang ada di Surabaya	
			-Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kota Surabaya								4. Ketuntasan penanganan stunting yang berkelanjutan	4. Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan intervensi berkelanjutan kepada balita stunting melalui Pendampingan Balita, Pemberian susu PKMK dan kudapan tinggi protein hewani yang diberikan sampai dengan balita lulus stunting, pra stunting dan lulus usia. Ketuntasan penanganan stunting dimaksudkan untuk mengentaskan balita stunting dan mencegah terjadinya stunting baru. Salah satu upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus stunting baru adalah identifikasi balita dengan status weight faltering atau data timbang naik tidak sesuai kenaikan berat badan minimal (KBM) yang diperoleh dari hasil penimbangan Posyandu setiap bulan.
			-Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya								5. Optimalisasi kegiatan dan anggaran untuk posyandu lansia	5. Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan Kegiatan Posyandu Lansia minimal 1 bulan sekali, dalam bentuk senam lansia dan pemeriksaan kesehatan.
			-Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Bagi Penduduk Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2023 tentang Sekolah Orang Tua Hebat									
1.02.01.2.02		Dinas Kesehatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.02.01		Dinas Kesehatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1343 Orang/bulan	1343 Orang/bulan	100,00%				
1.02.01.2.07		Dinas Kesehatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.07.10		Dinas Kesehatan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6 Unit	150,00%				
1.02.01.2.08		Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.08.03		Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan	3 jenis	3 jenis	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas yang terpenuhi							
1.02.01.2.10.01		Dinas Kesehatan		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	63 unit kerja	63 unit kerja	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%	100%	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,04%	100,40%	101,37%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82,50%	103,81%	125,83%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,18%	100,02%	100,85%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani $\leq 1 \times 24$ Jam	100%	100%	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	79,37%	100%	125,99%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100%	100%	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Jaminan Kesehatan	96,97%	101,84%	105,02%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100%	100%	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100%	100%	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	55%	61,90%	112,55%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Rumah Sehat	88,19%	88,39%	100,23%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%	100%	100,00%				
1.02.02		Dinas Kesehatan			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,10%	0,08%	122,33%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33%				
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	10 unit	10 unit	100,00%				
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	64 Unit	64 Unit	100,00%				
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah unit layanan yang terpenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	64 Unit	65 Unit	101,56%				
1.02.02.2.01.20		Dinas Kesehatan		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	16 Unit	69 Unit	431,25%				
1.02.02.2.01.14		Dinas Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	19 Unit	633,33%				
1.02.02.2.01.07		Dinas Kesehatan		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	4 Unit	133,33%				
1.02.02.2.01.17		Dinas Kesehatan		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%				
1.02.02.2.01.16		Dinas Kesehatan		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	50,00%	Penyediaan vaksin didapatkan dari dropping Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi sehingga Dinas Kesehatan tidak melakukan pengadaan sendiri.	Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan vaksin		
1.02.02.2.01.13		Dinas Kesehatan		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01.09		Dinas Kesehatan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	10 Unit	100,00%				
1.02.02.2.01.01		Dinas Kesehatan		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	100,00%				
1.02.02.2.01.10		Dinas Kesehatan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	100 Dokumen	100 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas	2 kegiatan	3 kegiatan	150,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di puskesmas	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di puskesmas	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan penyediaan jaminan persalinan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	700 Lokasi	804 Lokasi	114,86%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas, dan bayi baru lahir	63 Unit	63 Unit	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100,00%				
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	54669 jiwa	17820 jiwa	32,60%	adanya rekonsiliasi data melalui pengalihan pembiayaan dari PBPU ke perusahaan/mandiri dan APBN yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta adanya proses cleaning data kepesertaan PBPU Pemerintah Kota dengan Data Warehouse Kemendagri	Melakukan koordinasi terkait data kepesertaan BPJS (Penerima PBPU BP Pemda) dengan pihak terkait (BPJS, Dinas Sosial)		
1.02.02.2.02.26		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.02		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41885 Orang	41907 Orang	100,05%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43881 Orang	43881 Orang	100,00%				
1.02.02.2.02.07		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	314690 Orang	268347 Orang	85,27%	Kurang optimalnya capaian layanan kesehatan penduduk usia lanjut dikarenakan ketidaktersediaan data	mengoptimalkan pendataan terkait penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		
1.02.02.2.02.15		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.17		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11 Dokumen	91,67%	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan edukasi kesehatan lingkungan yang diberikan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing, serta kurang aktifnya kader lingkungan wilayah puskesmas setempat	meningkatkan sosialisasi dan edukasi pentingnya kesehatan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan kader lingkungan setempat sesuai area wilayah puskesmas masing-masing		
1.02.02.2.02.35		Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	40 Unit	40 Unit	100,00%				
1.02.02.2.02.19		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.06		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2041119 Orang	1336931 Orang	65,50%	Kurang optimalnya capaian layanan kesehatan penduduk usia produktif dikarenakan ketidaktersediaan data	mengoptimalkan pendataan terkait penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		
1.02.02.2.02.25		Dinas Kesehatan		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	25 Dokumen	208,33%				
1.02.02.2.02.20		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	11 Dokumen	91,67%	kurang maksimalnya pelaksanaan surveilans kesehatan	meningkatkan efektivitas penyusunan dokumen pelaporan		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dikarenakan belum tersusunnya dokumen secara lengkap atas pelaksanaan imunisasi dan KLB di wilayah kerja Puskesmas terkait	sesuai pelaksanaan surveilans kesehatan di wilayah puskesmas		
1.02.02.2.02.14		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.37		Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	823 Orang	943 Orang	114,58%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60480 Orang	60563 Orang	100,14%				
1.02.02.2.02.33		Dinas Kesehatan		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	756 Dokumen	756 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.25		Dinas Kesehatan		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	756 Dokumen	756 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.15		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	756 Dokumen	756 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.15		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	11 Dokumen	91,67%	adanya sasaran balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi yang tidak ditemukan karena tingginya mobilitas domisili sasaran dan tidak sesuai dengan target sasaran awal yang telah direncanakan, sehingga dokumen tidak tersusun secara sempurna dan	melakukan rekonsiliasi dan integrasi data antar wilayah kerja Puskesmas agar didapat data sasaran yang tidak ditemukan akibat mobilitas penduduk yang ada sehingga dokumen dapat tersusun lengkap sesuai target		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									lengkap sesuai target dokumen			
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	1236 Orang	165,91%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	221 Orang	97,79%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	546 Orang	563 Orang	103,11%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	218 Orang	97,76%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	935 Orang	892 Orang	95,40%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang	742 Orang	89,29%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	679 Orang	505 Orang	74,37%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	766 Orang	795 Orang	103,79%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1035 Orang	834 Orang	80,58%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	392 Orang	107,10%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1292 Orang	1180 Orang	91,33%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	667 Orang	98,67%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	601 Orang	463 Orang	77,04%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	975 Orang	665 Orang	68,21%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	819 Orang	799 Orang	97,56%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	283 Orang	555 Orang	196,11%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang	387 Orang	128,57%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	825 Orang	395 Orang	47,88%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	852 Orang	621 Orang	72,89%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	830 Orang	401 Orang	48,31%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	583 Orang	853 Orang	146,31%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1115 Orang	1000 Orang	89,69%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	692 Orang	360 Orang	52,02%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	614 Orang	100,33%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	324 Orang	108,72%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	796 Orang	194,62%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	606 Orang	542 Orang	89,44%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									telah yang ada telah terlayani	kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	368 Orang	90,86%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	704 Orang	1177 Orang	167,19%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	247 Orang	92,51%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	854 Orang	875 Orang	102,46%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	905 Orang	938 Orang	103,65%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	465 Orang	462 Orang	99,35%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164 Orang	1019 Orang	87,54%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	827 Orang	740 Orang	89,48%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	622 Orang	985 Orang	158,36%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	866 Orang	101,88%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	761 Orang	276 Orang	36,27%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	539 Orang	502 Orang	93,14%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	475 Orang	112,83%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	349 Orang	56,66%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1084 Orang	1118 Orang	103,14%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	649 Orang	100,15%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	790 Orang	622 Orang	78,73%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	542 Orang	556 Orang	102,58%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	709 Orang	694 Orang	97,88%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	461 Orang	369 Orang	80,04%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1353 Orang	1203 Orang	88,91%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	624 Orang	1407 Orang	225,48%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	794 Orang	564 Orang	71,03%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1057 Orang	1694 Orang	160,26%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	610 Orang	531 Orang	87,05%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1170 Orang	1149 Orang	98,21%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	309 Orang	123,11%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	592 Orang	441 Orang	74,49%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	304 Orang	262 Orang	86,18%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	948 Orang	838 Orang	88,40%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	361 Orang	100,28%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	725 Orang	694 Orang	95,72%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	738 Orang	715 Orang	96,88%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	852 Orang	902 Orang	105,87%				
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	619 Orang	543 Orang	87,72%	adanya jumlah Ibu Hamil pada wilayah puskesmas dibawah jumlah sasaran sesuai proyeksi ibu hamil yang telah ditargetkan, akan tetapi seluruh ibu hamil sesuai jumlah riil telah yang ada telah terlayani	mengoptimalkan target sasaran yang menjadi proyeksi Ibu Hamil pada 1 wilayah puskesmas terkait dan melakukan pengecekan secara rutin jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja puskesmas terkait		
1.02.02.2.02.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	1938 Orang	171,66%				
1.02.02.2.02.17		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	756 Dokumen	756 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	249 orang	246 orang	98,80%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diprojektikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 orang	788 orang	123,13%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 orang	338 orang	135,20%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1416 orang	1416 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	912 orang	975 orang	106,91%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dengan Risiko Terinfeksi HIV								
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	732 orang	807 orang	110,25%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	922 orang	1080 orang	117,14%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1224 orang	1051 orang	85,87%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diprojektikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	465 orang	595 orang	127,96%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1420 orang	1420 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 orang	598 orang	111,15%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 orang	697 orang	100,29%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1109 orang	1109 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	924 orang	1290 orang	139,61%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	333 orang	422 orang	126,73%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 orang	616 orang	77,78%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproyeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	882 orang	882 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1217 orang	1217 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 orang	949 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2175 orang	2175 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1287 orang	1331 orang	103,42%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	696 orang	730 orang	104,89%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	664 orang	585 orang	88,10%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproyeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 orang	735 orang	171,33%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	462 orang	386 orang	83,55%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproyeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 orang	682 orang	94,99%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproyeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	447 orang	462 orang	103,36%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	754 orang	973 orang	129,05%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	290 orang	257 orang	88,62%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproyeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 orang	1145 orang	110,41%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dengan Risiko Terinfeksi HIV								
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	971 orang	1008 orang	103,81%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	718 orang	712 orang	99,16%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1430 orang	2200 orang	153,85%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	879 orang	838 orang	95,34%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	670 orang	724 orang	108,06%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	948 orang	1314 orang	138,61%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	832 orang	1030 orang	123,80%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	592 orang	691 orang	116,72%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	490 orang	669 orang	136,53%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	687 orang	687 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1436 orang	1251 orang	87,12%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproyeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 orang	677 orang	96,71%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diproyeksikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	966 orang	983 orang	101,76%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803 orang	1005 orang	125,16%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 orang	1053 orang	110,73%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	578 orang	578 orang	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1638 orang	1455 orang	88,83%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diprojektikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	686 orang	759 orang	110,64%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	861 orang	861 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 orang	1148 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666 orang	767 orang	115,17%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 orang	1342 orang	105,09%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 orang	490 orang	132,79%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	613 orang	671 orang	109,46%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 orang	350 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1037 orang	1143 orang	110,22%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dengan Risiko Terinfeksi HIV								
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 orang	508 orang	126,68%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 orang	754 orang	94,84%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diprojektikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 orang	1014 orang	107,42%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	952 orang	952 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	667 orang	640 orang	95,95%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus HIV di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus HIV di puskesmas akan disesuaikan/diprojektikan dengan potensi kasus HIV di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1235 orang	1377 orang	111,50%				
1.02.02.2.02.12		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52741 orang	56551 orang	107,22%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	949 orang	1036 orang	109,17%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	282 orang	332 orang	117,73%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	707 orang	724 orang	102,40%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	293 orang	298 orang	101,71%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1293 orang	1315 orang	101,70%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1178 orang	1325 orang	112,48%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	711 orang	661 orang	92,97%	Adanya perbedaan antara proyeksi target yang telah ditetapkan dengan kondisi riil kasus orang terduga tuberkulosis di puskesmas	Perencanaan atau penetapan target kasus orang terduga tuberkulosis di puskesmas akan disesuaikan/diproeksi dengan potensi kasus orang terduga tuberkulosis di setiap puskesmas di tahun sebelumnya		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1163 orang	1256 orang	108,00%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1216 orang	1260 orang	103,62%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 orang	632 orang	136,50%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1878 orang	1832 orang	97,55%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	887 orang	532 orang	59,98%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	834 orang	901 orang	108,03%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1203 orang	895 orang	74,40%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1273 orang	1379 orang	108,33%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	422 orang	454 orang	107,58%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	353 orang	622 orang	176,20%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 orang	981 orang	106,98%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1067 orang	1018 orang	95,41%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1065 orang	944 orang	88,64%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	847 orang	898 orang	106,02%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1514 orang	1411 orang	93,20%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	916 orang	979 orang	106,88%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	750 orang	823 orang	109,73%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	391 orang	450 orang	115,09%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	496 orang	375 orang	75,60%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 orang	999 orang	106,16%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	593 orang	733 orang	123,61%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029 orang	1165 orang	113,22%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	298 orang	299 orang	100,34%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1162 orang	1065 orang	91,65%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1323 orang	1141 orang	86,24%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1009 orang	718 orang	71,16%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1648 orang	1431 orang	86,83%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	932 orang	899 orang	96,46%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	842 orang	726 orang	86,22%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1136 orang	1184 orang	104,23%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1267 orang	978 orang	77,19%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	741 orang	767 orang	103,51%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	630 orang	599 orang	95,08%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	798 orang	734 orang	91,98%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1534 orang	1414 orang	92,18%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1115 orang	1064 orang	95,43%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	944 orang	988 orang	104,66%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1443 orang	1467 orang	101,66%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1126 orang	816 orang	72,47%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	680 orang	680 orang	100,00%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1382 orang	1447 orang	104,70%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	840 orang	837 orang	99,64%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1017 orang	1136 orang	111,70%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1245 orang	1412 orang	113,41%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	779 orang	1208 orang	155,07%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1562 orang	1211 orang	77,53%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	354 orang	425 orang	120,06%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1148 orang	1154 orang	100,52%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 orang	388 orang	106,30%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1193 orang	1298 orang	108,80%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	552 orang	654 orang	118,48%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1175 orang	1102 orang	93,79%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1186 orang	1155 orang	97,39%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1195 orang	1327 orang	111,05%				
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829 orang	826 orang	99,64%	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas	Optimalisasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.11		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1403 orang	1407 orang	100,29%				
1.02.02.2.02.20		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	756 Dokumen	756 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.02.08		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	744435 Orang	440659 Orang	59,19%	Kurang optimalnya capaian layanan kesehatan hipertensi dikarenakan ketidaktersediaan data	mengoptimalkan pendataan terkait penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		
1.02.02.2.02.40		Dinas Kesehatan		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	666 orang	2345 orang	352,10%				
1.02.02.2.02.41		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	205 orang	1299 orang	633,66%				
1.02.02.2.02.42		Dinas Kesehatan		Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 orang	10 orang	100,00%				
1.02.02.2.03		Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100,00%				
1.02.02.2.03.01		Dinas Kesehatan		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%				
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	125 Lembaga	102,46%				
1.02.02.2.04.03		Dinas Kesehatan		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	63 Unit	100,00%				
1.02.02.2.04.04		Dinas Kesehatan		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.02.03		Dinas Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	48,49%	60,46%	124,69%				
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan	63 Orang	1015 Orang	1611,11 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	pengembangan sumber daya manusia kesehatan							
1.02.03.2.02.03		Dinas Kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%				
1.02.03.2.02.02		Dinas Kesehatan		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1794 Orang	2026 Orang	112,93%				
1.02.04		Dinas Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100%	100%	100,00%				
1.02.04.2.06		Dinas Kesehatan		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	217 PIRT	100,00%				
1.02.04.2.06.01		Dinas Kesehatan		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	209 Unit	139,33%				
1.02.05		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100%	100%	100,00%				
1.02.05.2.02		Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100,00%				
1.02.05.2.02.01		Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(UKBM) yang dilakukan Puskesmas							
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100,00%				
1.02.05.2.03.01		Dinas Kesehatan		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	11 Dokumen	91,67%	adanya jenis UKBM yang kurang berjalan maksimal di beberapa wilayah puskesmas dikarenakan kurangnya partisipasi dari sasaran yang ada disetiap wilayah kerja puskesmas, sehingga ada puskesmas yang penyusunan dokumennya tidak sesuai dengan target yang ditentukan	melakukan sosialisasi dan edukasi atas pentingnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam meningkatkan partisipasi dan mengoptimalkan penyusunan dokumen yang ada sesuai target yang ditentukan		
1.02.05.2.03.01		Dinas Kesehatan		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	756 Dokumen	756 Dokumen	100,00%				
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82%	92,59%	112,91%			1. Optimalisasi semua lahan dan aset untuk pelayanan kesehatan 2. Perluasan RSUD Bhakti	1. Telah dilakukan Rehabilitasi Eksisting gedung, penambahan unit mesin hemodialisa, Ruang Rawat Inap VIP/VVIP, kamar operasi, penambahan pelayanan kemoterapi, Medical Check Up, bedah onkologi, perluasan IGD, pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan pemenuhan RS Pendidikan Satelit 2. Telah dilakukan penyusunan Master Plan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			2023 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu								Dharma Husada guna meningkatkan layanan	RSUD Bhakti Dharma Husada, Peningkatan layanan RSUD Bhakti Dharma Husada dengan penambahan layanan kemoterapi, Medical Check Up, Bedah Onkologi, Perluasan IGD, Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan pemenuhan RS Pendidikan Satelit
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
			-Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2023 tentang									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2023 tentang Sekolah Orang Tua Hebat									
1.02.01		RSUD Bhakti Dharma Husada			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	92,76%	105,41%				
1.02.01.2.02		RSUD Bhakti Dharma Husada		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.02.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	235 Orang/bulan	236 Orang/bulan	100,43%				
1.02.01.2.08		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.08.04		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.02.01.2.10		RSUD Bhakti Dharma Husada		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100%	100%	100,00%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.10.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,00%				
1.02.02		RSUD Bhakti Dharma Husada		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98%	101,47%	103,54%				
1.02.02.2.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100,00%				
1.02.02.2.01.14		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	89 Unit	89 Unit	100,00%				
1.02.02.2.01.05		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	100,00%				
1.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82,88%	86,87%	104,81%			1. Perlu koordinasi dengan TAPD yang berkaitan dengan perhitungan rasionalisasi target pendapatan 2. Pemenuhan SDM tenaga kesehatan untuk memenuhi ketersediaan alat kesehatan	1. Telah dilaksanakan koordinasi bersama TAPD dalam penentuan target pendapatan berdasarkan potensi pada RSUD dr. M. Soewandhie. 2. Upaya pemenuhan SDM pada RSUD dr. M. Soewandhie dilakukan melalui rekrutmen PPPK dan pelatihan serta bimbingan bagi tenaga kesehatan agar dapat mengoperasikan alat kesehatan dengan efektif

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											3. Inovasi digitalisasi rekam medis untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit	3. Telah dibangun rekam medis elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan dalam proses integrasi dengan Satu Sehat yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan
											4. Peningkatan kualitas SDM, maka juga ada peningkatan pelayanan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat	4. RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat, di antaranya klinik sore untuk penyakit dalam, Onkologi Center, serta adanya pelayanan Radioterapi.
											5. Adanya inovasi digitalisasi rekam medis harus segera diterapkan	5. Telah dibangun rekam medis elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan dalam proses integrasi dengan Satu Sehat yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan
											6. Peningkatan pendapatan RSUD dari sektor pengelolaan parkir	6. 1. RSUD dr. M. Soewandhie telah menyediakan lahan parkir di gedung baru dan telah berkoordinasi dengan Dishub, Kecamatan/Kelurahan, serta dengan RW terkait untuk mengurangi parkir liar di sekitar lingkungan. 2. RSUD dr. M. Soewandhie juga telah meningkatkan pendapatan parkir dengan pengelolaan parkir umum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												(basement) yang dikelola oleh penyedia.
1.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87,88%	88,63%	100,85%				
1.02.01.2.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	475 Orang/bulan	475 Orang/bulan	100,00%				
1.02.01.2.08		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.08.04		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.02.01.2.08.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.02.01.2.10		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100%	100%	100,00%				
1.02.01.2.10.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,00%				
1.02.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98,08%	100%	101,96%				
1.02.02.2.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Mohamad Soewandhie	100%	100%	100,00%				
1.02.02.2.01.14		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	188 Unit	370 Unit	196,81%				
1.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Pemadam	-Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		88%	96,28%	109,41%			1. Memastikan perawatan dan	1. Pemeliharaan dan perawatan atas unit

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	N BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kebakaran dan Penyelamatan	2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan						pengawasan untuk alat-alat yang dipakai PMK	pemadam kebakaran telah dilaksanakan secara berkala baik oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sesuai merek unit maupun oleh tim teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
			-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023								2. Perlunya kerjasama dengan pihak PLN terkait jaringan pendek listrik di permukiman warga	2. Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terjadinya kejadian kebakaran termasuk didalamnya materi mengenai pencegahan terjadinya arus pendek. Selain itu dilakukan kerjasama dengan pihak PLN saat terjadi kebakaran di permukiman warga dengan memutus jaringan listrik agar mempermudah operasional pemadaman dan penyelamatan.
			-Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Command Center 112								3. meningkatkan pelatihan tanggap darurat pada security/bidang-bidang lainnya di gedung, hotel, perkantoran, plaza dan gedung Pemerintahan	3. Telah dilakukan pelatihan tanggap darurat pada security atau bidang-bidang lainnya di gedung, hotel, perkantoran, plaza dan gedung Pemerintahan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas								4. Perlu adanya SOP untuk pemeliharaan APAR	4. Telah dilakukan penyusunan SOP untuk pemeliharaan APAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								5. Alokasi penyediaan APAR di tiap-tiap RW	5. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan bahwa Pengadaan, distribusi, pemeliharaan serta pengisian ulang APAR untuk ditempatkan di balai RT/RW merupakan kewenangan kelurahan melalui dana kelurahan sesuai dengan kesepakatan usulan pada musyawarah pembangunan kelurahan.
1.05.01.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.05.01.2.02.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	100,00%				
1.05.01.2.06		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	100,00%				
1.05.01.2.06.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%				
1.05.01.2.08		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	3 paket	3 paket	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.01.2.08.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.05.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	48	37,88	121,08%				
1.05.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%	100%	100,00%				
1.05.04.2.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	656 Petugas	764 Petugas	116,46%				
1.05.04.2.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Persentase sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berfungsi baik	100%	100%	100,00%				
1.05.04.2.01.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100,00%				
1.05.04.2.01.07		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	10 Orang	100,00%				
1.05.04.2.01.05		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal							
1.05.04.2.01.06		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	191 Unit	191 Unit	100,00%				
1.05.04.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	460 Berkas	460 Berkas	100,00%				
1.05.04.2.02.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				
1.05.04.2.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	80 Kegiatan	80 Kegiatan	100,00%				
1.05.04.2.04.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	800 Orang	800 Orang	100,00%				
1.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91,75%	94,61%	103,12%			1. Peningkatan kualitas SDM guru untuk menunjang pemerataan dan kekurangan tenaga pendidik	1. 1. Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pemberian beasiswa sarjana kepada guru secara bertahap, pelatihan-pelatihan berupa pemanfaatan google for education, pembuatan Karya Tulis Ilmiah, dan pembuatan inovasi pembelajaran. 2. Pemenuhan kebutuhan guru dilakukan dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												rekrutmen guru melalui mekanisme PPPK. 3. Pemerataan kualitas guru dilakukan melalui Program Pengimbasan Penggerak Merdeka Belajar (Pendekar) ke komunitas guru di sekolah-sekolah secara merata. Selain itu, dalam rangka menunjang pemerataan kualitas guru telah dilakukan Program Surabaya Mengajar, dengan melibatkan mahasiswa semester 5 yang berlatar belakang program studi kependidikan untuk menerapkan ilmu praktik mengajar di sekolah-sekolah.
			-Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah								2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kepastian penyediaan gedung dan sarana prasarana sekolah jenjang SMA / SMK	2. 1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait pemenuhan kebutuhan SMA/SMK di Surabaya, pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam kegiatan koordinasi pemenuhan data kajian RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman). 2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Menengah Kejuruan Di Provinsi Jawa Timur, disampaikan bahwa terdapat pembatasan pendirian SMA.
			-Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah								3. Perlu adanya penambahan guru untuk tenaga pendidik inklusif	3. Dinas Pendidikan telah mengusulkan formasi jabatan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam rekrutmen PPPK ke MenPAN-RB dan Dirjen GTK, melalui surat nomor 800.1.1.1/14618/436.7.1/2023, tanggal 29 Mei 2023, tentang Permohonan Formasi PPPK 2023.
			-Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
			-Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya									
1.01.01.2.01		Dinas Pendidikan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%				
1.01.01.2.01.01		Dinas Pendidikan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.01.01.2.02		Dinas Pendidikan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.01.01.2.02.01		Dinas Pendidikan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6389 Orang/bulan	7589 Orang/bulan	118,78%				
1.01.01.2.06		Dinas Pendidikan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100,00%				
1.01.01.2.06.02		Dinas Pendidikan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.01.2.07		Dinas Pendidikan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100,00%				
1.01.01.2.07.11		Dinas Pendidikan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	964 Unit	964 Unit	100,00%				
1.01.01.2.08		Dinas Pendidikan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100,00%				
1.01.01.2.08.02		Dinas Pendidikan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%				
1.01.01.2.08.04		Dinas Pendidikan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%				
1.01.02		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100,00%				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100,00%				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%	100,00%				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase guru PAUD yang kompeten	100%	100,99%	100,99%				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	28%	22,35%	79,82%	1. Masih adanya kendala bagi para guru dalam melakukan konversi angka kredit, yang disebabkan karena adanya regulasi baru, yakni: a. Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional. b. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan	1. Meningkatkan pendampingan dalam rangka untuk mendorong kelancaran kenaikan pangkat. 2. Dilakukan sosialisasi dalam melakukan konversi angka kredit. 3. Meningkatkan ketepatan waktu terhadap pencapaian target/sasaran kinerja.		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									Kepala Sekolah. 2. Adanya perubahan aplikasi kenaikan pangkat, yakni SIMPAKIN (Kemdikbud) dan SPAKATI (BKN).			
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase lembaga PAUD berkualitas	83,71%	91,54%	109,35%				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	87,60%	102,78%	117,33%				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	85%	100%	117,65%				
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase SD terakreditasi minimal B	93,69%	93,57%	99,87%	- Beberapa sekolah baru belum mendapat kuota pelaksanaan akreditasi karena sesuai juknis, sekolah tersebut belum bisa diakreditasi karena belum meluluskan siswa kelas 6. - Terdapat beberapa lembaga pendidikan yang kurang siap dalam memenuhi administrasi dan persyaratannya, karena keterbatasan prasarana lembaga ybs.	Meningkatkan sosialisasi dan bimtek terkait dengan juknis dan ketentuan akreditasi, terutama bagi lembaga pendidikan yang terakreditasi C maupun yang belum terakreditasi.		
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,79%	94,51%	97,64%	- Beberapa sekolah baru belum mendapat kuota pelaksanaan akreditasi karena sesuai juknis, sekolah tersebut belum bisa diakreditasi karena belum meluluskan siswa kelas 9. - Terdapat beberapa lembaga pendidikan	1. Meningkatkan sosialisasi dan bimtek terkait dengan juknis dan ketentuan akreditasi, terutama bagi lembaga pendidikan yang terakreditasi C maupun yang belum terakreditasi. 2. Meningkatkan belanja		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									yang kurang siap dalam memenuhi administrasi dan persyaratannya, karena keterbatasan prasarana lembaga ybs.	modal untuk melengkapi syarat akreditasi bagi sekolah negeri. 3. Mengusahakan penggunaan BPD dan BOS untuk mendorong akreditasi bagi sekolah swasta tertentu sesuai persyaratan penerima BPD dan BOS.		
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan	4 laporan	100,00%				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga	692 Lembaga	100,00%				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	100%	100,00%				
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100,00%				
1.01.02.2.01.16		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	100,00%				
1.01.02.2.01.21		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85997 Peserta Didik	92047 Peserta Didik	107,04%				
1.01.02.2.01.23		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	649 Satuan Pendidikan	649 Satuan Pendidikan	100,00%				
1.01.02.2.01.25		Dinas Pendidikan		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	73986 Peserta Didik	73989 Peserta Didik	100,00%				
1.01.02.2.01.27		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3547 Orang	113,14%				
1.01.02.2.01.28		Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	259 Satuan	259 Satuan	100,00%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kelembagaan dan manajemen sekolah	Pendidikan	Pendidikan					
1.01.02.2.01.29		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	587 Satuan Pendidikan	587 Satuan Pendidikan	100,00%				
1.01.02.2.01.06		Dinas Pendidikan		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	100,00%				
1.01.02.2.01.12		Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	125 Unit	125 Unit	100,00%				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Jumlah lembaga pendidikan menengah yang mendapatkan peningkatan mutu	305 Lembaga	292 Lembaga	95,74%	1. Adanya sekolah yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BOPDA, di antaranya karena SPP di atas 500 ribu. 2. Adanya sekolah yang telah memenuhi syarat namun tidak mencairkan. 3. Adanya hambatan terkait izin operasional sekolah.	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pendidikan menengah sebagai penerima maupun calon penerima BOPDA.		
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100%	97,14%	97,14%	Alur izin penyelenggaraan pendidikan semula melalui beberapa tahap user verifikator, sehingga membutuhkan waktu verifikasi yang lebih panjang. Sejak bulan Oktober alur perizinan diperbaiki sehingga waktu verifikasi yang	Perbaiki alur perizinan sehingga waktu verifikasi yang dibutuhkan tidak terlalu panjang.		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dibutuhkan tidak terlalu panjang.			
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100,00%				
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan			Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	4 laporan	100,00%				
1.01.02.2.02.27		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	100,00%				
1.01.02.2.02.32		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40574 Peserta Didik	43675 Peserta Didik	107,64%				
1.01.02.2.02.36		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	39248 Peserta Didik	39607 Peserta Didik	100,91%				
1.01.02.2.02.38		Dinas Pendidikan		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta Didik	2694 Peserta Didik	134,70%				
1.01.02.2.02.40		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1102 Orang	108,79%				
1.01.02.2.02.41		Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	275 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	100,00%				
1.01.02.2.02.42		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	98,53%	Adanya lembaga pendidikan SMP yang tidak aktif di Dapodik.	Diperlukan koordinasi dan supervisi yang terstruktur dengan Lembaga SMP Penerima BOS sesuai SK Pencairan BOS yang baru.		
1.01.02.2.02.12		Dinas Pendidikan		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	100,00%				
1.01.02.2.02.24		Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	63 Unit	63 Unit	100,00%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	7 laporan	7 laporan	100,00%				
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100,00%				
1.01.02.2.03.11		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	251 Peserta Didik	275 Peserta Didik	109,56%				
1.01.02.2.03.13		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	88678 Peserta Didik	106000 Peserta Didik	119,53%				
1.01.02.2.03.16		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3092 Orang	2536 Orang	82,02%	Adanya jadwal pelatihan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan tidak dapat dipenuhi dengan baik.	Menambah jadwal peningkatan kompetensi bagi pendidik PAUD yang belum mengikuti peningkatan kompetensi sesuai jadwal Kemendikbudristek.		
1.01.02.2.03.18		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2442 Satuan Pendidikan	2442 Satuan Pendidikan	100,00%				
1.01.02.2.03.17		Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	2646 Satuan Pendidikan	112,36%				
1.01.02.2.03.09		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	100,00%				
1.01.02.2.03.04		Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	100,00%				
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100,00%				
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan			Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan	6 laporan	150,00%				
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan			Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	5 hari	1.03 hari	179,40%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.04.10		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	31 Peserta Didik	103,33%				
1.01.02.2.04.12		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2792 Peserta Didik	2995 Peserta Didik	107,27%				
1.01.02.2.04.15		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	218 Orang	87,20%	Adanya jadwal pelatihan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan tidak dapat dipenuhi dengan baik.	Menambah jadwal peningkatan kompetensi bagi pendidik nonformal/kesetaraan yang belum mengikuti peningkatan kompetensi sesuai jadwal Kemendikbudristek.		
1.01.02.2.04.16		Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	293 Satuan Pendidikan	293 Satuan Pendidikan	100,00%				
1.01.02.2.04.17		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	100,00%				
1.01.02.2.04.09		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	100,00%				
1.01.04		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0,05	0,05	100,00%				
1.01.04		Dinas Pendidikan			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0,05	0,06	120,00%				
1.01.04.2.01		Dinas Pendidikan		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	12685 orang	100,00%				
1.01.04.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	7725 orang	100,00%				
1.01.04.2.01.01		Dinas Pendidikan		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan							
1.01.04.2.01.02		Dinas Pendidikan		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	350 Laporan	350 Laporan	100,00%				
1.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Milik -Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	88%	94,12%	106,95%			1. Melakukan kajian terhadap penuntasan pemenuhan layanan permukiman layak huni bagi warga tidak mampu 2. Melakukan evaluasi pengelolaan rumah susun terkait penghuni yang bermasalah	1. Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat kebijakan dan strategi pemenuhan pemukiman layak huni dan saat ini sedang dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. 2. Telah dilakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni rumah susun sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730									
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
			-Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun									
			-Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun									
			-Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2023 tentang									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan									
			-Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah									
1.04.01.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100,00%				
1.04.01.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%				
1.04.01.2.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.04.01.2.02.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kawasan Permukiman serta Pertanahan										
1.04.01.2.06		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis	100,00%				
1.04.01.2.06.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100,00%				
1.04.01.2.09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	100,00%				
1.04.01.2.09.06		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	98 Unit	100,00%				
1.04.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	75%	76,61%	102,15%				
1.04.02.2.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	5233 Unit Hunian	5233 Unit Hunian	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		serta Pertanahan										
1.04.02.2.05.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	111 Dokumen	101,83%				
1.04.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	92%	106,93%	116,23%				
1.04.03.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	2 jenis	100,00%				
1.04.03.2.03.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2700 Unit Rumah	2887 Unit Rumah	106,93%				
1.04.04		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100%	100%	100,00%				
1.04.04.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	7 lokasi	7 lokasi	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.04.04.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	100,00%				
1.04.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	40%	54,79%	136,98%				
1.04.05.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	11 dokumen	14 dokumen	127,27%				
1.04.05.2.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	11 Laporan	15 Laporan	136,36%				
1.03.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber IMB	2,20%	1,99%	90,45%	1. Banyaknya permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan diskresi sehingga dokumen SK PBG belum dapat dicetak dikarenakan administrasi permohonan yang belum lengkap 2. Berkurangnya permohonan	melakukan monitoring terhadap berkas diskresi agar segera dipenuhi	1. Melaksanakan rekomendasi Pansus perubahan nama jalan	1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan : 1). Koordinasi dengan Perangkat Daerah, Kelurahan, Kecamatan dan Kepolisian serta 2). Pendataan jumlah KK dan KTP Warga terdampak serta identifikasi potensi dampak antara lain perubahan alamat pada KTP , IMB, surat tanah, dan dokumen lainnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									bangunan oleh pengembang			Selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan SK Walikota tentang pemberian dan perubahan nama jalan dan proses lainnya sesuai ketentuan
			-Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame								2. Perlunya pengawasan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait pemenuhan SLF termasuk bangunan apartemen	2. Telah dilakukan pendataan dan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran bangunan yang masuk dalam kriteria wajib SLF sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 82 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
			-Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemanfaatan Ruang -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
1.03.08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90,48%	91,65%	101,29%				
1.03.08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	82%	74,16%	90,44%	1. Penyesuaian kecepatan penyelesaian perijinan menyesuaikan pemenuhan standar pelayanan perijinan yang baru (lebih cepat) 2. Adanya rekomendasi teknis yang perlu dipenuhi dari Perangkat Daerah lain sebelum perizinan diterbitkan	1. Optimalisasi dan pembagian tugas bagi petugas pemroses perijinan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi terkait jangka waktu penyelesaian perijinan 2. Petugas pemroses PBG untuk melakukan monitoring terhadap berkas diskresi dan mendorong pemohon untuk segera memenuhi kelengkapan		
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	253 Bangunan	360 Bangunan	142,29%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	3472 Berkas	3660 Berkas	105,41%				
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan disahkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan dan pengawasan bangunan yang dilaksanakan	1872 Lokasi	2401 Lokasi	128,26%				
1.03.08.2.01.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	59 Dokumen	108 Dokumen	183,05%				
1.03.08.2.01.13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	175 Unit	190 Unit	108,57%				
1.03.08.2.01.09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1861 Unit	2401 Unit	129,02%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.08.2.01.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				
1.03.08.2.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				
1.03.08.2.01.12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	147 Unit	171 Unit	116,33%				
1.03.11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	93%	118,10%	126,99%				
1.03.11.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jenis kelembagaan konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	4 jenis	4 jenis	100,00%				
1.03.11.2.01.07		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	105 Orang	124 Orang	118,10%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		serta Pertanahan										
1.03.12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pelayanan penataan ruang	95%	98,76%	103,96%				
1.03.12.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%				
1.03.12.2.01.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%				
1.03.12.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100,00%				
1.03.12.2.03.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%				
1.03.12.2.03.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		serta Pertanahan										
1.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Command Center 112 -Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	93,92%	106,73%			1. Ketersediaan seluruh data kemiskinan, terutama keluarga ekstim miskin dan pra miskin yang konkret 2. Melakukan sosialisasi berkaitan dengan prosedur perolehan SKM melalui E-Pelayanan Dinsos, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan SKM dalam kondisi urgent 3. Perlu adanya inovasi pelaksanaan kegiatan pekan pameran hasil kemajuan atau hasil karya PMKS guna meningkatkan program pemberdayaan 4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan kerjasama	1. Telah dilakukan musyawarah kelurahan atau muskel secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi dan pemutakhiran data Keluarga Miskin 2. Telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial terkait E-pelayanan yang memuat prosedur dan alur perolehan SKM 3. Pameran hasil karya PMKS telah diikutsertakan dalam acara gelar pameran baik skala Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan pihak swasta dan komunitas untuk menampilkan hasil karya PMKS. 4. Telah dilakukan koordinasi dengan panti lansia berbayar swasta yang ada di Kota Surabaya untuk menampung lansia dari keluarga yang mampu.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Listrik Kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya								dengan pihak swasta berkaitan dengan pengelolaan griya werdha agar dapat menampung tidak hanya dari keluarga miskin	
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								5. Evaluasi terhadap Pemetaan warga miskin di Kota Surabaya supaya lebih akurat dan tepat sasaran	5. Telah dilakukan musyawarah kelurahan (Muskel) secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi dan pemutakhiran data Keluarga Miskin. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penggunaan data hasil registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK).
			-Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik Kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya								6. Memastikan semua warga mendapatkan bantuan yang terdata sebagai keluarga miskin untuk mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota	6. Telah dilakukan musyawarah kelurahan (Muskel) secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi dan pemutakhiran data Keluarga Miskin. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												terkait penggunaan data hasil registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK). Sehingga, intervensi Pemerintah Kota dapat dilakukan dengan tepat sasaran.
			-Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya									
1.06.01.2.02		Dinas Sosial		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.06.01.2.02.01		Dinas Sosial		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	100,00%				
1.06.01.2.06		Dinas Sosial		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100,00%				
1.06.01.2.06.02		Dinas Sosial		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100,00%				
1.06.01.2.08		Dinas Sosial		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100,00%				
1.06.01.2.08.04		Dinas Sosial		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.06.02		Dinas Sosial		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepelawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	82,35%	64,29%	78,07%	Kurangnya kesadaran dari PSKS kelembagaan dan Lembaga Kepahlawanan untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam Pengentasan PMKS	Memberikan bimbingan dan monitoring kepada PSKS Kelembagaan dan Lembaga Kepahlawanan agar ikut dalam kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam pengentasan PMKS		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.02		Dinas Sosial			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	85,95%	81,96%	95,36%	Kurangnya kesadaran dari PSKS kelembagaan dan Lembaga Kepahlawanan untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam Pengentasan PMKS	Memberikan bimbingan dan monitoring kepada PSKS Kelembagaan dan Lembaga Kepahlawanan agar ikut dalam kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam pengentasan PMKS		
1.06.02.2.03		Dinas Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	5 jenis	6 jenis	120,00%				
1.06.02.2.03		Dinas Sosial			Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	1500 orang	1559 orang	103,93%				
1.06.02.2.03.04		Dinas Sosial		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	8 Lembaga	100,00%				
1.06.02.2.03.01		Dinas Sosial		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	577 Orang	535 Orang	92,72%	Kurangnya partisipasi dari anggota PSKS perorangan untuk mengikuti kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas PSKS	Memberikan bimbingan kepada Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial agar ikut dalam kegiatan pembinaan dan berpartisipasi dalam pengentasan PMKS		
1.06.04		Dinas Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100,00%				
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100,00%				
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100,00%				
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100,00%				
1.06.04.2.01		Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	12 kali	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali	12 kali	100,00%				
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali	12 kali	100,00%				
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali	12 kali	100,00%				
1.06.04.2.01.04		Dinas Sosial		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1598 Orang	1687 Orang	105,57%				
1.06.04.2.01.05		Dinas Sosial		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	216 Orang	221 Orang	102,31%				
1.06.04.2.01.08		Dinas Sosial		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	104 Orang	104,00%				
1.06.04.2.01.12		Dinas Sosial		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Orang	57 Orang	116,33%				
1.06.04.2.01.01		Dinas Sosial		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	23327 Orang	23327 Orang	100,00%				
1.06.04.2.02		Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	12 kali	100,00%				
1.06.04.2.02		Dinas Sosial			Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan	12 laporan	100,00%				
1.06.04.2.02.07		Dinas Sosial		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	1552 Orang	172,44%				
1.06.04.2.02.02		Dinas Sosial		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	4876 Orang	103,39%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.05		Dinas Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	96,53%	110,95%				
1.06.05.2.02		Dinas Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	12 laporan	100,00%				
1.06.05.2.02		Dinas Sosial			Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan	12 laporan	100,00%				
1.06.05.2.02.02		Dinas Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	88316 keluarga	88435 keluarga	100,13%				
1.06.05.2.02.03		Dinas Sosial		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	88316 Keluarga	148525 Keluarga	168,17%				
1.06.05.2.02.01		Dinas Sosial		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	268343 Orang	272670 Orang	101,61%				
1.06.05.2.02.04		Dinas Sosial		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	826 Orang	834 Orang	100,97%				
1.06.07		Dinas Sosial		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100,00%				
1.06.07.2.01		Dinas Sosial		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 Jenis	3 Jenis	100,00%				
1.06.07.2.01.02		Dinas Sosial		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	7 Makam	100,00%				
1.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	92%	98,30%	106,85%			1. Penyusunan rencana induk sistem drainase lingkungan di perkotaan	1. Penyusunan rencana induk sistem drainase lingkungan pada tahap inventarisasi dan digitalisasi prasarana di masing-masing sistem drainase pada masing-masing rayon yang akan diintegrasikan melalui SAMID (Sistem Aplikasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Manajemen Infrastruktur Drainase)
			-Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame								2. Perlunya memperhatikan fasilitas bagi penyangang disabilitas di sarana pedestrian	2. Pemerintah Kota Surabaya telah melengkapi pedestrian dengan lajur pemandu berupa batu granit tipe strip line dan tipe dot, serta lajur yang landai sehingga ramah terhadap disabilitas.
			-Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang								3. Perlu adanya koordinasi berkaitan dengan pemasangan utilitas di daerah permukiman	3. Pemerintah Kota Surabaya telah berkoordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan selaku pemangku wilayah saat pelaksanaan survey pengajuan permohonan pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya untuk utilitas, serta mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana								4. Pengembalian kondisi jalan seperti semula setelah adanya penggalian utilitas sehingga tidak	4. Telah dilaksanakan upaya untuk menjamin pelaksana pekerjaan agar melakukan rekondisi jalan melalui penjaminan berupa bank garansi. Selain itu dilakukan survei pengawasan bagi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								merugikan masyarakat	pekerjaan utilitas yang telah selesai. Pemohon yang tidak melaksanakan pekerjaan rekondisi sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya diterbitkan surat peringatan.
											5. Perlu adanya konektivitas pembangunan jalan, paving dan saluran di area pemukiman baru di seluruh wilayah Surabaya	5. Telah dilaksanakan pembangunan jalan paving dan saluran secara bersamaan sehingga elevasi jalan paving dan saluran terkoneksi untuk menghindari genangan.
											6. Menyiapkan alat dengan spesifikasi khusus agar dapat menjangkau pembersihan saluran-saluran di daerah pemukiman padat penduduk	6. Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap akan menambah dan terus melakukan pemeliharaan terhadap alat berat yang digunakan sebagai alat pembersihan di daerah pemukiman padat penduduk.
											7. Monitoring ketersediaan dan fungsi sanitasi umum untuk masyarakat luas	7. Telah dilaksanakan pembangunan tangki septik komunal dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditahun 2023, pada 3 (tiga) Kelurahan yaitu : Kel. Darmo, Kel. Simokerto, dan Kel. Genting Kalianak, telah dilaksanakan pembangunan tangki septik komunal di Kel. Wonokusumo, serta melakukan pemeliharaan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												SPALD-T di Kawasan Tertentu (Rusunawa)
1.03.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,00%	91,79%	106,73%				
1.03.01.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100,00%				
1.03.01.2.01.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%				
1.03.01.2.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.03.01.2.02.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang/bulan	189 Orang/bulan	100,00%				
1.03.01.2.06		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100,00%				
1.03.01.2.06.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%				
1.03.01.2.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	321 unit	321 unit	100,00%				
1.03.01.2.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%	100%	100,00%				
1.03.01.2.09.03		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	100,00%				
1.03.01.2.09.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	248 Unit	248 Unit	100,00%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.01.2.09.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	8 Unit	114,29%				
1.03.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rumah pompa yang beroperasi	100%	100%	100,00%				
1.03.02.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	61 unit	61 unit	100,00%				
1.03.02.2.01.55		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	266 Unit	266 Unit	100,00%				
1.03.05		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%	100%	100,00%				
1.03.05		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	906 m3	906 m3	100,00%				
1.03.05.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	3 kelurahan	150,00%				
1.03.05.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis	4 Jenis	100,00%				
1.03.05.2.01.06		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	161 Rumah Tangga	174 Rumah Tangga	108,07%				
1.03.05.2.01.10		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	96 Unit	96 Unit	100,00%				
1.03.06		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100%	100%	100,00%				
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	83 dokumen	103,75%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1127 lokasi	1175 lokasi	104,26%				
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi	201 lokasi	100,50%				
1.03.06.2.01.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	60000 M	68428 M	114,05%				
1.03.06.2.01.05		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	7000 M	7895 M	112,79%				
1.03.06.2.01.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	50 Dokumen	52 Dokumen	104,00%				
1.03.06.2.01.07		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2700 M	3871.68 M	143,40%				
1.03.06.2.01.03		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	30 Dokumen	31 Dokumen	103,33%				
1.03.06.2.01.12		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	13917.8 M	139,18%				
1.03.07		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	7%	7,31%	104,43%				
1.03.07		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100,00%				
1.03.07.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	245 berkas	102,08%				
1.03.07.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.07.2.01.03		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	240 Sistem Jaringan	245 Sistem Jaringan	102,08%				
1.03.07.2.01.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Sistem Jaringan	18 Sistem Jaringan	150,00%				
1.03.10		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Luas jalan yang diperbaiki	150000 m2	581969.87 m2	387,98%				
1.03.10		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	10850 meter	60826.17 meter	560,61%				
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	151 dokumen	156 dokumen	103,31%				
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	270 lokasi	283 lokasi	104,81%				
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	2200 lokasi	2780 lokasi	126,36%				
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	4 lokasi	4 lokasi	100,00%				
1.03.10.2.01.05		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10.85 KM	52.51 KM	483,96%				
1.03.10.2.01.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	13600 M ²	17375 M ²	127,76%				
1.03.10.2.01.11		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	90 KM	153.35 KM	170,39%				
1.03.10.2.01.23		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	60 Dokumen	65 Dokumen	108,33%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.10.2.01.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	91 Dokumen	91 Dokumen	100,00%				
1.03.10.2.01.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.2 KM	0.27 KM	135,00%				
1.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	-Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran -Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,50%	97,76%	101,31%			1. Melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah kebangsaan 2. Mengevaluasi ketentuan mengenai jam operasional terkait pariwisata dalam Peraturan Daerah 3. Konsistensi petugas Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban	1. Telah dilaksanakan sekolah kebangsaan di Lanudal Juanda dengan diikuti oleh 47 siswa setingkat SMA dan 1 orang siswa setingkat SMP, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya lainnya. Setelah pelaksanaan sekolah kebangsaan dilanjutkan dengan melibatkan dalam kegiatan kepemudaan tingkat kota untuk memastikan peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya. 2. Telah dilakukan pengawasan jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Telah dilaksanakan kegiatan patroli Asuhan Rembulan setiap malam dalam rangka pengawasan kegiatan masyarakat yang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Command Center 112								perjudian atau tindak pidana lainnya di kawasan perkampungan	dibagi menjadi 5 tim gabungan yang bergerak pada 5 wilayah Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								4. Perlu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengawasan dan penertiban untuk daerah perkampungan dan jalan raya yang rawan	4. Telah dilaksanakan kegiatan rutin Patroli Asuhan Rembulan setiap malam bekerjasama dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Kogartap III Surabaya
											5. Evaluasi barang hasil sitaan agar tidak disalahgunakan oleh oknum	5. Telah dilaksanakan SOP penanganan barang di gudang SATPOL PP di Tanjungsari. SOP tersebut mengatur tentang mekanisme penyerahan barang dari pasukan pada petugas, mekanisme penyimpanan barang hasil penertiban, dan mekanisme pengambilan barang hasil penertiban.
											6. Mengevaluasi penentuan target, pencapaian realisasi indeks ketentraman, ketertiban dan bencana dengan memperhatikan kondisi di	6. Penetapan target dan pencapaian realisasi pada indikator "Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan", telah berdasarkan data dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											lapangan / masyarakat	
1.05.01.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00%				
1.05.01.2.02.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	100,00%				
1.05.01.2.06		Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100,00%				
1.05.01.2.06.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100,00%				
1.05.01.2.08		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100,00%				
1.05.01.2.08.04		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	100,00%				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase PPNS yang dibina	100%	100%	100,00%				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%	100,00%				
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100,00%				
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	11 Lembaga	100,00%				
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada	98 Titik/Lokasi	98 Titik/Lokasi	100,00%				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	192 Kali	197 Kali	102,60%				
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1150 Orang	1150 Orang	100,00%				
1.05.02.2.01.09		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.05.02.2.01.05		Satuan Polisi Pamong Praja		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	978 Orang	978 Orang	100,00%				
1.05.02.2.01.06		Satuan Polisi Pamong Praja		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%				
1.05.02.2.01.08		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00%				
1.05.02.2.01.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10080 Kasus	10106 Kasus	100,26%				
1.05.02.2.01.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	36 Kasus	37 Kasus	102,78%				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan							
1.05.02.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	94 Objek	100 Objek	106,38%				
1.05.02.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	4230 Objek	5933 Objek	140,26%				
1.05.02.2.02.02		Satuan Polisi Pamong Praja		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.05.02.2.02.03		Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100,00%				
1.05.02.2.02.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	4 Laporan	100,00%				
1.05.02.2.03		Satuan Polisi Pamong Praja		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	80 Orang	82 Orang	102,50%				
1.05.02.2.03.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	4 Laporan	100,00%				

3.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu penyelenggaraan pada bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan Dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, serta Kearsipan. Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Surabaya telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang positif. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.25
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	22%	22.12 %	100.55 %			1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet	1. Pada tahun 2023, Disbudporapar telah melakukan berbagai peningkatan sarana prasarana olahraga di Kota Surabaya, antara lain : 1. Peningkatan fasilitas olahraga pada Gelora Bung Tomo (GBT), Gelora 10 Nopember serta Lapangan Thor sesuai dengan standart FIFA sehingga dapat dipergunakan dalam event Piala Dunia U-17. 2. Pemeliharaan Gelora Pancasila, Softball dan Hockey, Gelanggang Remaja sehingga dapat dimaksimalkan penggunaannya oleh atlet-atlet Surabaya
			-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023								2. Adanya kerjasama dengan Kecamatan, Satpol PP dan Polsek atau pemangku wilayah dalam mengatur batas-batas wilayah untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja	2. Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman kepada pemuda tentang bahaya HIV AIDS, kenakalan remaja dan narkoba terhadap 775 pemuda di 5 Kecamatan yang menjadi prioritas berdasarkan hasil koordinasi dengan BNN, Kepolisian , Kejaksaan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan kegiatan patroli Asuhan Rembulan setiap malam dalam rangka pengawasan kegiatan masyarakat termasuk untuk mendeteksi dan penanganan kenakalan remaja yang dibagi menjadi 5 tim gabungan yang bergerak pada 5 wilayah Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan serta bekerjasama dengan jajaran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Kogartap III Surabaya. Pemuda dibawah 18 tahun dapat diikuti dalam sekolah kebangsaan.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
2.19.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	22%	23.31 %	105.95 %				
2.19.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46.86 %	70.78 %	151.05 %				
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	2 jenis	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor, Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja dan Pemuda Pasukan Pengibar Bendera	23 jenis	23 jenis	100.00 %				
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa/Mahasiswi Berprestasi	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
2.19.02.2.01.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	825 Orang	825 Orang	100.00 %				
2.19.02.2.01.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang	500 Orang	100.00 %				
2.19.02.2.01.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	925 Orang	925 Orang	100.00 %				
2.19.02.2.01.07		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	3186 Orang	3186 Orang	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Olah Raga serta Pariwisata		Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Penerima Penghargaan							
2.19.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	174 medali	398 medali	228.74 %				
2.19.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	17%	17%	100.00 %				
2.19.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	10 kecamatan	10 kecamatan	100.00 %				
2.19.03.2.01.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit	30 Unit	100.00 %				
2.19.03.2.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	45 cabang olahraga	49 cabang olahraga	108.89 %				
2.19.03.2.03.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	642 Orang	689 Orang	107.32 %				
2.19.03.2.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Olah Raga serta Pariwisata			pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi							
2.19.03.2.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah Prasarana Olahraga yang Difasilitasi dan Dipelihara	386 lokasi	386 lokasi	100.00 %				
2.19.03.2.05.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00 %				
2.19.03.2.05.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	386 Unit	386 Unit	100.00 %				
2.22.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	93.34 %	103.71 %			1. Membentuk UPTD Pengelola cagar budaya 2. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif	1. Telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Wali Kota dan pembentukan Tim Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. 2. 1. Optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya Bunker Tegalsari sebagai Co Working. 2. Optimalisasi pemanfaatan Kantor Pos Kebon Rojo sebagai Pos Bloc. 3. Optimalisasi pemanfaatan Rumah Lahir Bung Karno sebagai Museum Modern yang menggunakan mapping 4. Bangunan Balai Pemuda sebagai sarana pelatihan dan seminar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									ekonomi kreatif Pada tahun 2023, terdapat 37 komunitas / 3 lembaga / 0 sanggar / 15 perguruan tinggi yang memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan ekonomi kreatif
2.22.01.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.22.01.2.02.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	100.00 %				
2.22.01.2.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	100%	100.00 %				
2.22.01.2.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
2.22.01.2.08.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.22.01.2.08.04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	70%	70%	100.00 %				
2.22.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan tampilan pemanfaatan budaya daerah	520 kali	521 kali	100.19 %				
2.22.02.2.01.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	100.00 %				
2.22.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59.50 %	59.86 %	100.61 %				
2.22.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian tradisional	12 dokumen	12 dokumen	100.00 %				
2.22.03.2.01.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	860 Orang	927 Orang	107.79 %				
2.22.04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	74%	75.13 %	101.53 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Raga serta Pariwisata										
2.22.04.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	10 kali	100.00 %				
2.22.04.2.01.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.22.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92.04 %	96.99 %	105.38 %				
2.22.05.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	270 lokasi	270 lokasi	100.00 %				
2.22.05.2.02.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	270 Objek	270 Objek	100.00 %				
2.22.06		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	100%	100.00 %				
2.22.06.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum dan bangunan sejarah yang dikelola	9 lokasi	9 lokasi	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22.06.2.01.04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2.22.06.2.01.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	747 Unit	747 Unit	100.00 %				
2.22.06.2.01.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
2.22.06.2.01.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	9 Unit	100.00 %				
2.12.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	86.22 %	89.98 %	104.36 %			1. Perlu adanya pengawasan khusus terkait warga negara asing 2. Penyederhanaan administrasi birokrasi dalam pengurusan data kependudukan sehingga	1. Terhadap permohonan administrasi kependudukan orang asing telah dilaksanakan verifikasi data sesuai dengan ketentuan sampai dengan terbitnya dokumen administrasi kependudukan orang asing. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan Tim Pemantauan Orang Asing melakukan pengawasan rutin orang asing di tempat yang ditengarai terdapat orang asing. Selain itu diberlakukan denda bagi orang asing yang terlambat melakukan pelaporan ijin tinggal (ITAS/ITAP). 2. Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan telah dilaksanakan, selain itu juga dilaksanakan pelayanan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya								selesai di tingkat kelurahan	administrasi kependudukan di Balai RW pada jam kerja dan pelayanan malam di hari Selasa. Sebagai layanan tambahan, Disdukcapil juga memiliki inovasi RT Kalimasada dimana warga dapat mengajukan pelayanan administrasi kependudukan melalui Ketua RT yang telah bekerjasama.
			-Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2048								3. Validasi data kependudukan khususnya terkait dengan profesi dan tingkat pendidikan	3. Telah dilaksanakan upaya kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan beberapa perguruan tinggi untuk update data pendidikan terakhir. Terdapat inovasi Kalimasada dimana Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat mendorong warga untuk mengajukan update data kependudukan (profesi, tingkat pendidikan, dll). Dengan adanya kemudahan pelayanan adminduk mendorong peningkatan jumlah permohonan pelayanan adminduk yang signifikan.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan									
			-Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan									
2.12.01.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.12.01.2.01.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12.01.2.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.12.01.2.02.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	193 Orang/bulan	100.00 %				
2.12.01.2.06		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	100%	100.00 %				
2.12.01.2.06.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.00 %				
2.12.01.2.08		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
2.12.01.2.08.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.12.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	100%	105.26 %				
2.12.02.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	156000 berkas	184539 berkas	118.29 %				
2.12.02.2.01.02		Dinas Kependudukan		Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		an dan Pencatatan Sipil		Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
2.12.02.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	302228 berkas	354613 berkas	117.33 %				
2.12.02.2.03.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.12.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	100%	105.26 %				
2.12.03.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	36000 berkas	37054 berkas	102.93 %				
2.12.03.2.01.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.12.03.2.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	109107 berkas	138801 berkas	127.22 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12.03.2.02.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	68%	88.06 %	129.50 %				
2.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	40%	77.27 %	193.18 %				
2.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	96%	98.44 %	102.54 %				
2.12.04.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	110942 data	112565 data	101.46 %				
2.12.04.2.01.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.12.04.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %				
2.12.04.2.03.06		Dinas Kependudukan dan		Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pencatatan Sipil			Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi							
2.12.04.2.03.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	10 Dokumen	200.00 %				
2.12.04.2.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	32 unit layanan	100.00 %				
2.12.04.2.04.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.12.05		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	100%	100.00 %				
2.12.05.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah jenis informasi yang dilaporkan dalam dokumen Profil Perkembangan Kependudukan	4 Informasi	4 Informasi	100.00 %				
2.12.05.2.01.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.09.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93.5 %	94.5 %	101.07 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya Tahun 2023-2024 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
2.09.01.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.09.01.2.02.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	100.00 %				
2.09.01.2.08		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09.01.2.08.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.09.01.2.08.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.09.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1.15	1.83	159.13 %				
2.09.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
2.09.03.2.01.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Dokumen	15 Dokumen	100.00 %				
2.09.03.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3 Jenis	3 Jenis	100.00 %				
2.09.03.2.04.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.09.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.88 %	99.28 %	101.43 %				
2.09.05.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.09.05.2.01.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	100.00 %				
2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	18%	22.41 %	124.50 %				
2.21.02.2.01		Dinas Komunikasi		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas	3 kali/per hari	3.02 kali/per hari	100.67 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Informatika		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi dan Informatika							
2.21.02.2.01.04		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100.00 %				
2.21.02.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	6 Kali	100.00 %				
2.21.02.2.02.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
2.16.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Command Center 112 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.55 %	93.59 %	104.51 %			1. Evaluasi dan sinkronisasi aplikasi pada seluruh OPD 2. Mengintegrasikan aplikasi surabayagoid dengan Website seluruh OPD 3. Menambah kecepatan bandwidth pada lokasi pelayanan publik	1. Telah dilakukan penyederhanaan aplikasi utamanya portal layanan publik, salah satunya melalui aplikasi wargaku. Aplikasi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota telah dipetakan dan dikelola sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2. Pada situs surabaya.go.id telah disediakan menu untuk dapat mengakses situs perangkat daerah. Seluruh situs perangkat daerah telah melalui pengecekan terhadap prosedur keamanan informasi. 3. Telah dilakukan penambahan akses internet untuk peningkatan layanan publik yang ada di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, BLC, RW, taman, SWK, dan Pasar. Berdasarkan evaluasi berkala yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa kebutuhan kecepatan pada

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									lokasi pelayanan publik tersebut masih memadai.
											4. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait peningkatan fungsi CCTV	4. Telah dilakukan koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan terkait dengan pemetaan titik - titik lokasi CCTV yang ada di Kota Surabaya. CCTV yang dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui Surabaya Intelligent Transport System (SITS) berfungsi untuk memonitoring kondisi lalu lintas bekerja sama dengan Polrestabes untuk Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sedangkan untuk objek vital dan pemantauan daerah rawan kejahatan, pengelolaan CCTV dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
2.16.01.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.16.01.2.02.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	100.00 %				
2.16.01.2.06		Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
2.16.01.2.06.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.16.01.2.09		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
2.16.01.2.09.06		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	100.00 %				
2.16.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	86%	90.22 %	104.91 %				
2.16.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				
2.16.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%	100%	100.00 %				
2.16.02.2.01.06		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.16.02.2.01.08		Dinas Komunikasi dan Informatika		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.16.02.2.01.05		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
2.16.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.16.03.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	100%	100%	100.00 %				
2.16.03.2.01.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	226 Unit	226 Unit	100.00 %				
2.16.03.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	100.00 %				
2.16.03.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	100%	100%	100.00 %				
2.16.03.2.02.10		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58 Dokumen	58 Dokumen	100.00 %				
2.16.03.2.02.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58 Dokumen	58 Dokumen	100.00 %				
2.16.03.2.02.07		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	190 Unit	190 Unit	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Berbasis Elektronik yang Dikembangkan							
2.16.03.2.02.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
2.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	100%	100.00 %				
2.20.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	5 Sektor	100.00 %				
2.20.02.2.01.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
2.17.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	93.61 %	104.01 %			1. Pemulihan sektor UMKM diantaranya dengan pembentukan kelompok usaha baru oleh pendamping UMKM di yang lebih adaptif	1. Untuk mendorong terbentuknya kelompok usaha baru telah dilaksanakan survey lapangan terhadap calon pelaku usaha mikro baru oleh pendamping UMKM di setiap kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian pelatihan atau workshop. Kelompok usaha baru yang telah terbentuk diberikan fasilitasi berupa legalisasi usaha dan fasilitasi sertifikasi produk bagi usaha mikro, fasilitasi pemasaran melalui kegiatan pameran, gelar produk dan bazar pada event-event Pemerintah Kota maupun kerjasama dengan instansi lainnya, serta Surabaya Kriya Gallery.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								2. Inovasi digitalisasi dalam pengelolaan koperasi di Surabaya	2. Untuk mendorong digitalisasi dalam pengelolaan koperasi di Kota Surabaya telah dilakukan fasilitasi antara pengembang aplikasi dengan gerakan koperasi sehingga koperasi dapat memenuhi kebutuhan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi.
			-Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat								3. Fasilitasi e-peken agar mempunyai harga yang bersaing dan dapat go public	3. Telah dilakukan penetapan Harga Acuan Tertinggi Peken (HATP) secara periodik setiap bulan serta fasilitasi perkulakan di distributor atau agen bahan pokok agar harga yang ada di e-Peken

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Karya di Kota Surabaya									tidak lebih mahal dibandingkan harga pada Toko Swalayan. Masyarakat umum telah mendapat akses untuk melakukan transaksi di e-Peken.
											4. Menjaga konsistensi mutu SWK yang ada di Surabaya agar mendapat respon positif dari masyarakat	4. Telah dilaksanakan pendampingan cita rasa dan peningkatan pelayanan ke pedagang SWK, pelatihan kreasi makanan/minuman kekinian di SWK, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana di SWK, serta pendampingan legalitas usaha dan e-Peken di SWK.
											5. Melakukan pendampingan kepada seluruh koperasi yang ada di Kota Surabaya	5. Telah dilakukan pendampingan gerakan koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pendampingan gerakan koperasi melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), pendampingan atau konsultasi laporan keuangan koperasi, pendampingan pemenuhan persyaratan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, pemenuhan legalitas lainnya seperti NIB serta Surat Keterangan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Selain itu, dilakukan mediasi pada permasalahan perkoperasian yang menjadi binaan wilayah keanggotaan Kota Surabaya.
2.17.01.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.17.01.2.02.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Perdagangan										
2.17.01.2.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.17.01.2.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.17.01.2.08.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.17.01.2.08.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.17.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	23%	23.13 %	100.57 %				
2.17.02.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.02.2.01.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	100.00 %				
2.17.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas keanggotaannya (koperasi ber RAT)	68%	85.06 %	125.09 %				
2.17.03.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	415 koperasi	100.00 %				
2.17.03.2.01.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	415 Unit Usaha	415 Unit Usaha	100.00 %				
2.17.05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	29%	29.32 %	101.10 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.17.05.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang	103 Orang	100.00 %				
2.17.05.2.01.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 Orang	103 Orang	100.00 %				
2.17.06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	40%	40%	100.00 %				
2.17.06.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	83 koperasi	100.00 %				
2.17.06.2.01.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	83 Orang	83 Orang	100.00 %				
2.17.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang	19.95 %	21.03 %	105.41 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Menengah dan Perdagangan		USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha							
2.17.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%	93.88 %	93.88 %	1. Tingginya turnover pedagang di SWK dikarenakan adanya pedagang baru yang baru masuk 2. Masih banyaknya pedagang yang memiliki omset rata-rata dibawah 1 juta dan tidak bertahan lama berjualan di SWK	1. Berkoordinasi dengan PD lainnya untuk pelaksanaan event diprioritaskan pada SWK yang masih sepi pengunjung dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara konsisten (kontinu) 2. Mendaftarkan pedagang baru ke aplikasi e-Peken dan food e-commerce lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan 3. Melakukan pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang yang baru masuk di SWK 4. Memberikan pelatihan peningkatan cipta rasa dan menu bagi pedagang di SWK 5. Peningkatan motivasi dan komitmen pedagang untuk berjualan di SWK secara kontinu		
2.17.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	136 Orang	100.00 %				
2.17.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra	10 sentra	100.00 %				
2.17.07.2.01.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	136 Unit Usaha	136 Unit Usaha	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Menengah dan Perdagangan			Kemitraan Usaha Mikro							
2.17.07.2.01.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100.00 %				
2.17.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	64%	66.68 %	104.19 %				
2.17.08.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	500 orang	100.00 %				
2.17.08.2.01.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	100.00 %				
2.11.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86%	90.16 %	104.84 %			1. Inovasi digitalisasi data di bidang lingkungan hidup	1. Telah dilakukan pengembangan aplikasi untuk mempermudah pemantauan kewajiban pelaporan pelaksanaan persetujuan lingkungan hidup. Aplikasi yang dikembangkan adalah e-simpel, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan setiap semester, dimana hal ini merupakan pengawasan tidak

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												langsung; Solid Waste Application Transportation (SWAT) adalah aplikasi untuk pengelolaan, penjadwalan pengangkutan sampah dan monitoring sampah masuk di TPA Benowo ; serta Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM) adalah aplikasi untuk mempermudah laporan dari Bank Sampah Unit, sebagai database pengurangan sampah dari sektor bank sampah.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								2. Perlu adanya evaluasi terkait penataan SWK atau fasilitas umum lainnya yang lokasinya dekat dengan TPS	2. Telah dilakukan upaya pembersihan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA secara tepat waktu sehingga tidak mengganggu operasional SWK dan fasilitas umum lainnya.
											3. Melakukan evaluasi kebersihan dan tata kelola UMKM di taman bungkul yang sering diadakan kegiatan car free day	3. Telah ditempatkan sarana prasarana kebersihan di lokasi CFD dan di area UMKM dan dilakukan pembersihan jalan setelah CFD selesai
											4. Menjaga kebersihan transportasi sampah dan mencantumkan nomor telp di bak belakang untuk komplain warga	4. Pengaduan warga terhadap pengangkutan sampah dapat dilakukan melalui aplikasi Wargaku dan 112
											5. Penyediaan lahan TPS di masing-masing kelurahan	5. Sampai dengan bulan Desember 2023, telah terbangun dan beroperasi sejumlah 191 tempat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												penampungan sementara (TPS) yang tersebar di 153 Kelurahan di Kota Surabaya, sehingga setiap Kelurahan telah terfasilitasi minimal 1 TPS.
2.11.01.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.11.01.2.02.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	100.00 %				
2.11.01.2.08		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
2.11.01.2.08.04		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.11.01.2.09		Dinas Lingkungan Hidup		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	100.00 %				
2.11.01.2.09.10		Dinas Lingkungan Hidup		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
2.11.03		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	44%	46.9 %	106.59 %				
2.11.03		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	84%	90.96 %	108.29 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.03.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.11.03.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
2.11.03.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
2.11.03.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.11.03.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	2 stasiun	100.00 %				
2.11.03.2.02		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%	100%	100.00 %				
2.11.03.2.02.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan							
2.11.03.2.02.03		Dinas Lingkungan Hidup		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	8000 Titik	7922 Titik	99.03 %	1. masih banyak warga yang menolak dibangun jamban sehat 2. sudah banyak warga yang membangun jamban sehat mandiri 3. banyak lokasi penerima jamban yang tidak bisa dikerjakan seperti rumah apung, keterbatasan lahan, alamat tidak ditemukan, rumah kosong, data ganda	1. Menggandeng pihak eksternal melalui CSR untuk pembangunan jamban pada lokasi/rumah yang tidak dapat diintervensi melalui Pemerintah Kota Surabaya misalnya rumah apung, keterbatasan lahan, status tanah di lahan Instansi Pemerintah lainnya dan sebagainya 2. Pendekatan persuasif pada warga dengan menggandeng Dinkes, Satpol PP, Kelurahan, dan Kecamatan		
2.11.04		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	99.24 %	101.68 %	102.46 %				
2.11.04.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %				
2.11.04.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.81 Ha	2.86 Ha	101.78 %				
2.11.04.2.01.04		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275.84 Ha	275.84 Ha	100.00 %				
2.11.04.2.01.07		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	125 Unit	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.04.2.01.05		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	143.26 Ha	143.26 Ha	100.00 %				
2.11.04.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.11.05		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	100%	125.00 %				
2.11.05		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	90%	90%	100.00 %				
2.11.05.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	250 berkas	265 berkas	106.00 %				
2.11.05.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255 Dokumen	278 Dokumen	109.02 %				
2.11.05.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
2.11.05.2.02.02		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya							
2.11.06		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	60%	61%	101.67 %				
2.11.06.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	432 obyek	100.00 %				
2.11.06.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%	100%	125.00 %				
2.11.06.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan	275 Dokumen	300 Dokumen	109.09 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan							
2.11.06.2.01.03		Dinas Lingkungan Hidup		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	432 Laporan	432 Laporan	100.00 %				
2.11.08		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	55.66 %	82.69 %	148.56 %				
2.11.08		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	57.74 %	64.1 %	111.01 %				
2.11.08.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	1 jenis	100.00 %				
2.11.08.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	12 kali	100.00 %				
2.11.08.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							
2.11.08.2.01.03		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1560 Orang	1610 Orang	103.21 %				
2.11.09		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	60.80 %	75.6 %	124.34 %				
2.11.09.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	4 penghargaan	100.00 %				
2.11.09.2.01.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	10 Entitas	100.00 %				
2.11.10		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	49 obyek	51 obyek	95.92 %	1. Banyaknya pengaduan yang masuk dari warga dengan banyaknya akses/media penyampaian pengaduan misalnya wargaku, whatsapp, dan datang langsung ke kantor atau media lainnya 2. Komitmen DLH untuk merespon dan	1. Penyampaian informasi dan himbauan serta alternatif solusi penyelesaian permasalahan lingkungan kepada masyarakat sebelum penerapan sanksi 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk penyelesaian permasalahan lingkungan 3. Optimalisasi tim verifikator lapangan untuk pemilahan pengaduan dan verifikasi permasalahan di lapangan 4. Verifikasi kejelasan identitas pihak pengadu dan pihak yang teradu		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									menyelesaikan pengaduan permasalahan lingkungan hidup 3. Banyaknya pengaduan yang masuk ke DLH tidak semua terkait dengan lingkungan 4. Perlunya uji melalui lab yang terakreditasi sebagai bukti dukung terkait pengaduan			
2.11.10.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100.00 %				
2.11.10.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	49 Dokumen	51 Dokumen	104.08 %				
2.11.11		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	2.56 %	5.13 %	200.39 %				
2.11.11		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	87.64 %	100%	114.10 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.11		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	50.5 %	53.18 %	105.31 %				
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	3 jenis	100.00 %				
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis	4 jenis	100.00 %				
2.11.11.2.01.03		Dinas Lingkungan Hidup		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	650430 Ton	560917.19 Ton	86.24 %	Ketidak tercapaian indikator ini karena adanya keberhasilan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah yang didukung melalui: 1. Penambahan jumlah TPS 3R sebagai upaya pengurangan sampah 2. Pengurangan sampah lingkungan melalui Bank sampah di RT-RW yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah,	1. Pengadaan truk compactor untuk optimalisasi volume pengangkutan sampah ke TPA 2. Pengadaan troli sampah ukuran 660 liter untuk meningkatkan penampungan sampah di TPS sebelum diangkut ke TPA 3. Pembangunan TPS 3R		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									didukung oleh : - Pembinaan bank sampah dengan menggandeng bank sampah induk surabaya dan LSM bersama dengan kader surabaya hebat dan kader lingkungan - Adanya Sistem Informasi Bank Sampah (Sibasam) untuk memudahkan monitoring hasil pengelolaan sampah			
2.11.11.2.01.02		Dinas Lingkungan Hidup			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			
2.11.11.2.01.07		Dinas Lingkungan Hidup			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	226 Unit	227 Unit	100.44 %			
2.13.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Implementasi Program Pokok PKK dimasyarakat	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		n Penduduk dan Keluarga Berencana	Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
2.13.05.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	53 Kegiatan	34 Kegiatan	64.15 %	adanya pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan usulan kegiatan TP PKK dimana beberapa kegiatan yang semula dilaksanakan sendiri-sendiri menjadi kegiatan dalam satu pelaksanaan yang sama	melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK di awal pelaksanaan tahun untuk perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun sehingga pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal		
2.13.05.2.01.09		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	53 Laporan	34 Laporan	64.15 %	adanya pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan usulan kegiatan TP PKK dimana	melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK di awal pelaksanaan tahun untuk perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun sehingga pelaksanaan		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			beberapa kegiatan yang semula dilaksanakan sendiri-sendiri menjadi kegiatan dalam satu pelaksanaan yang sama	dapat dilakukan sesuai dengan jadwal		
2.08.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak -Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	95.31 %	95.31 %	Terdapat perubahan perencanaan kebutuhan yang dialihkan pada kebutuhan prioritas	Optimalisasi pemberian pelayanan kesekretariatan untuk seluruh pegawai di DP3APPKB	1. Pemenuhan tenaga Psikolog PUSPAGA di tingkat RW 2. Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan kenakalan anak atau remaja	1. Telah dilakukan kerjasama dengan 13 Universitas di Kota Surabaya dalam program Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi DI Bidang Psikologi untuk menjadi mahasiswa volunteer sebagai fasilitator Puspaga Balai RW sebanyak 227 mahasiswa serta dosen volunteer sebanyak 19 orang (psikolog) untuk memberikan konseling/pendampingan psikologi lanjutan dan kelas parenting. Selain itu, telah dilaksanakan kerjasama dengan Kemendikbudristek melalui program Kampus Merdeka dengan program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang melibatkan 372 mahasiswa yang tersebar di Balai RW untuk mendukung pelaksanaan Puspaga Balai RW. 2. Telah dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP PPAK) dengan berbagai fitur diantaranya tombol panic button untuk pengaduan permasalahan keluarga dan kekerasan pada perempuan dan anak, penanganan dan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketuntasan intervensi OPD terkait yang diberikan kepada client

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dan keluarga, penyediaan database, relawan PKBM, satgas PPA, fasilitator PUPAGA Balai RW, mahasiswa yang membantu PUSPAGA Balai RW, Media Informasi perlindungan perempuan dan anak, Informasi Puspaga Kota, Puspaga RW, PUSPAGA TV, Kelas Catin, UPTD PPA, serta layanan telekonsultasi online. Selain itu, telah dilaksanakan peningkatan layanan UPTD PPA termasuk gelar kasus serta penguatan jejaring UPTD PPA dengan Polresta PPA/KP3, kejaksaan negeri, Kejaksaan Sukomanunggal, Pengadilan Negeri, NGO/LSM, relawan PKBM tingkat kecamatan, satgas PPA tingkat kelurahan, fasilitator PUSPAGA Balai RW, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi
			-Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak								3. Monitoring pada pekerja anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi eksploitasi anak	3. Publikasi Komunikasi Informasi dan Edukasi serta kerjasama dengan LSM pemerhati anak (jejaring) terkait pekerja anak dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap pekerja anak, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk memastikan kepatuhan perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan								4. Penguatan Peran PKK dalam Memberdayakan Perempuan dan menjaga ketahanan keluarga	4. Telah dilakukan penguatan peran PKK dalam memberdayakan perempuan dan menjaga ketahanan keluarga melalui : penganggaran dan pelaksanaan pada kegiatan PKK, pelatihan dan bimbingan teknis, pelaksanaan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									Program Surabaya Emas dan Program Sekolah Orang Tua Hebat, serta pemberian modal berusaha pada perempuan yang mengalami penelantaran ekonomi dengan didampingi oleh PKK.
2.08.01.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.08.01.2.02.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	100.00 %				
2.08.01.2.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08.01.2.06.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	100.00 %				
2.08.01.2.08		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
2.08.01.2.08.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	100.00 %				
2.08.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	100%	100.00 %				
2.08.02.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
2.08.02.2.01.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
2.08.02.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	500 Orang	568 Orang	113.60 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Keluarga Berencana			Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.02.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	44 Organisasi	141.94 %				
2.08.02.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100.00 %				
2.08.02.2.03.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	740 Orang	740 Orang	100.00 %				
2.08.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		n Penduduk dan Keluarga Berencana			trafficking ≤ 1 x 24 jam							
2.08.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	48.38 %	48.39 %	100.02 %				
2.08.03.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	74 kasus	82 kasus	110.81 %				
2.08.03.2.02.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	74 Orang	82 Orang	110.81 %				
2.08.03.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	15 kecamatan	15 kecamatan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		n Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.08.03.2.03.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.08.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	245	322	131.43 %				
2.08.04.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
2.08.04.2.03.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah	3 Layanan	3 Layanan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		n Penduduk dan Keluarga Berencana		dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia							
2.08.05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	100%	100.00 %				
2.08.05.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %				
2.08.05.2.01.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.08.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	60.38 %	100%	165.62 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.08.06.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00 %				
2.08.06.2.01.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	58 Organisasi	58 Organisasi	100.00 %				
2.08.06.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00 %				
2.08.06.2.02.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.06.2.02.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	31 Orang	155.00 %				
2.08.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	100.00 %				
2.08.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	48.38 %	48.39 %	100.02 %				
2.08.07.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	15 lembaga	15 lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	182 kasus	121.33 %				
2.08.07.2.02.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	182 Orang	121.33 %				
2.08.07.2.02.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Layanan	182 Layanan	121.33 %				
2.14.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	46.07 %	47.38 %	102.84 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	DAN KELUARGA BERENCANA	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
2.14.02.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	150 Orang	292 Orang	194.67 %				
2.14.02.2.01.09		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	75 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	200.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Keluarga Berencana			SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal							
2.14.02.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00 %				
2.14.02.2.02.13		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.14.02.2.02.12		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.02.2.02.09		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.14.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.35 %	16.7 %	108.99 %				
2.14.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	83%	83%	100.00 %				
2.14.03.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00 %				
2.14.03.2.01.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Keluarga Berencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
2.14.03.2.01.08		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2.14.03.2.01.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.14.03.2.01.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	31 Organisasi	31 Organisasi	100.00 %				
2.14.03.2.02		Dinas Pemberdayaan		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan	12 Kali	12 Kali	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		an Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP							
2.14.03.2.02.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.03.2.02.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1566 Orang	1566 Orang	100.00 %				
2.14.03.2.02.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana	31 Organisasi	31 Organisasi	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							
2.14.03.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	307610 Orang	307610 Orang	100.00 %				
2.14.03.2.03.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.03.2.03.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	66 Unit	66 Unit	100.00 %				
2.14.03.2.03.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	1950 Orang	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.14.03.2.03.08		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.03.2.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.14.03.2.04.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31 Kampung	31 Kampung	100.00 %				
2.14.03.2.04.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	22.9 tahun	114.50 %				
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.55 %	49.88 %	120.05 %				
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	43.37 %	92.82 %	214.02 %				
2.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	41%	71.43 %	174.22 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	10 Kelompok	14 Kelompok	140.00 %				
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah laporan kegiatan penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah laporan pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan			Jumlah laporan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Kesejahteraan Keluarga							
2.14.04.2.01.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	2263 Kelompok	2263 Kelompok	100.00 %				
2.14.04.2.01.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.14.04.2.01.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	20 Unit	30 Unit	150.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		n Penduduk dan Keluarga Berencana		Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
2.14.04.2.01.05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6642 Orang	6664 Orang	100.33 %				
2.14.04.2.01.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	625 Orang	625 Orang	100.00 %				
2.18.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	92.68 %	102.98 %			1. Membut aplikasi yang memetakan investasi baru di Kota Surabaya, agar potensi peluang kerja terpetakan	1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya saat ini mempunyai aplikasi atau sistem Klinik Investasi yang dapat diakses melalui laman (https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/petapotensiinvestasi/html/interaktif/index.html) didalamnya terdapat Peta Potensi Investasi Kota Surabaya untuk menunjukkan usaha-usaha potensial pada masing-masing Kecamatan hingga kelayakan usaha di Kecamatan tersebut. Terkait pemetaan investasi baru di Kota Surabaya dikoordinasikan dengan Tim Portal Satu Data untuk dapat diintegrasikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya								2. Sistem pencatatan investasi di kota Surabaya harus di upgrade dan jelas datanya	2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya saat ini untuk pencatatan investasi menggunakan aplikasi atau sistem secara nasional yaitu Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) serta melakukan monitoring dan rekapitulasi setiap hari terkait data penanaman modal/realisasi investasi yang telah disetujui. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya juga melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dengan Kementerian Investasi/BKPM RI agar data tarikan investasi pelaku usaha secara keseluruhan dapat dimunculkan pada menu Pelaporan LKPM.
			-Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik									
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
			-Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya									
2.18.01.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.18.01.2.02.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	100.00 %				
2.18.01.2.08		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Terpadu Satu Pintu										
2.18.01.2.08		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	100%	100.00 %				
2.18.01.2.08.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.18.01.2.08.04		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.18.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	170 Perusahaan	170 Perusahaan	100.00 %				
2.18.02.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	72%	77.4 %	107.50 %				
2.18.02.2.02.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.18.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55%	59.67 %	108.49 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18.03.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	305 Calon Investor / Investor	122.00 %				
2.18.03.2.01.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
2.18.04		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	100%	100.00 %				
2.18.04.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	85000 berkas	103827 berkas	122.15 %				
2.18.04.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	11500 Kegiatan usaha	12373 Kegiatan usaha	107.59 %				
2.18.04.2.01.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	11500 Kegiatan Usaha	12373 Kegiatan Usaha	107.59 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18.04.2.01.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	11167 Pelaku Usaha	111.67 %			
2.18.05		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis	43%	45.73 %	106.35 %				
2.18.05.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1200 perusahaan	1230 perusahaan	102.50 %				
2.18.05.2.01.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2870 Kegiatan Usaha	3073 Kegiatan Usaha	107.07 %				
2.18.05.2.01.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	260 Pelaku Usaha	293 Pelaku Usaha	112.69 %				
2.18.06		Dinas Penanaman Modal dan		PROGRAM PENGELOLAAN DATA	jumlah permohonan pemanfaatan data	20 lembaga	20 lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu		DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	investasi dan penanaman modal							
2.18.06.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	350 perusahaan	387 perusahaan	110.57 %				
2.18.06.2.01.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.15.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tarif dan Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	93.55 %	101.68 %			1. Pengawasan secara intensif untuk parkir tepi jalan umum 2. Pengawasan potensi pendapatan parkir agar tidak terjadi kebocoran	1. 1. Melakukan pendataan pada lokasi potensi parkir Tepi Jalan Umum baru dan peningkatan retribusi pada lokasi yang ada; 2. Melakukan patroli gabungan bersama jajaran samping TNI-POLRI terkait Pengawasan, pemantauan, penertiban dan penindakan parkir liar, dengan sasaran tempat2 hiburan malam. 2. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan realisasi pendapatan retribusi parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya : a. Melakukan koordinasi dengan PT. Intiland Group dan PT. Citraland Group dalam rangka percepatan penyelenggaraan parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Jalan Mayjend Yono Soewoyo dan Kawasan G-Walk serta pemanfaatan lahan BBWS sebagai lokasi parkir; b. Melakukan penerapan digitalisasi pembayaran parkir secara non tunai dalam bentuk penambahan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya									fitur QRIS di 6 lokasi Parkir tempat khusus (PTK)
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								3. Pemanfaatan jalan harus sesuai dengan kelas jalan, antara pengguna jalan umum dengan truk, trailer dan kendaraan besar lainnya	3. Dinas Perhubungan pada tahun 2023 telah melakukan pemasangan rambu kelas jalan pada 500 ruas jalan sesuai dengan kriteria kelas jalan yang direkomendasikan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Sedangkan pengawasan dan penindakan pelanggaran penggunaan kelas jalan dilakukan dengan berkolaborasi bersama pihak TNI dan Polri.
			-Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atasperaturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor								4. Ketersediaan PJU di wilayah yang minim pencahayaan untuk menghindari tindak pidana kejahatan	4. Dinas Perhubungan pada tahun 2023 telah melakukan pemasangan PJU baru pada 10.171 titik sehingga total PJU tersebar di Kota Surabaya pada 106.423 titik
											5. Melakukan pembinaan kepada sopir suroboyo bus, agar tertib lalu lintas	5. Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pembinaan sopir angkutan umum, salah satunya sopir Suroboyo Bus melalui kegiatan Abdi Yasa

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Teladan yakni pembinaan yang dilakukan untuk menciptakan kesadaran bagi para sopir tentang pentingnya keselamatan berkendara.
2.15.01.2.02		Dinas Perhubungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.15.01.2.02.01		Dinas Perhubungan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/bulan	275 Orang/bulan	100.00 %				
2.15.01.2.06		Dinas Perhubungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	100.00 %				
2.15.01.2.06.02		Dinas Perhubungan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	14 Paket	60.87 %	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran terkendala oleh ketersediaan barang/jasa di lapangan	Identifikasi prioritas pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta melakukan pemeliharaan rutin		
2.15.01.2.08		Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	100%	100.00 %				
2.15.01.2.08.04		Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100.00 %				
2.15.02		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	43 km/jam	43.18 km/jam	100.42 %				
2.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48.65 %	50.4 %	103.60 %				
2.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase kepuasan masyarakat dalam	80%	81.99 %	102.49 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya							
2.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%	80.98 %	101.23 %				
2.15.02.2.02		Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	31 Kawasan	100.00 %				
2.15.02.2.02		Dinas Perhubungan			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
2.15.02.2.02.01		Dinas Perhubungan		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5000 Unit	10423 Unit	208.46 %				
2.15.02.2.02.03		Dinas Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	96252 Unit	96252 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.02.02		Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1883 Unit	1946 Unit	103.35 %				
2.15.02.2.02.04		Dinas Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	9000 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.03		Dinas Perhubungan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	13 Lokasi	13 Lokasi	100.00 %				
2.15.02.2.03.03		Dinas Perhubungan		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.04		Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Penerbitan Izin	75 Berkas	75 Berkas	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							
2.15.02.2.04.02		Dinas Perhubungan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.15.02.2.05		Dinas Perhubungan		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	123388 Unit	123870 Unit	100.39 %				
2.15.02.2.05.01		Dinas Perhubungan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	33 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.06		Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	7 Jenis	100.00 %				
2.15.02.2.06		Dinas Perhubungan			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	9 Lokasi	90.00 %	Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait penerapan manajemen rekayasa lalu lintas sehingga terdapat lokasi rencana yang belum terlaksana.	Penyusunan perencanaan titik lokasi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 serta meningkatkan intensitas koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan		
2.15.02.2.06.01		Dinas Perhubungan		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9 Laporan	9 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.06.04		Dinas Perhubungan		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.15.02.2.09		Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	9 Koridor	10 Koridor	111.11 %				
2.15.02.2.09		Dinas Perhubungan			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	75 Orang	100.00 %				
2.15.02.2.09.02		Dinas Perhubungan		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2.15.02.2.09.01		Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	88 Unit	88 Unit	100.00 %				
2.15.02.2.11		Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	1 Jaringan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.15.02.2.11.01		Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.15.03		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	100%	100.00 %				
2.15.03.2.04		Dinas Perhubungan		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	2 Kali	100.00 %				
2.15.03.2.04.02		Dinas Perhubungan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
2.15.05		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	100%	100.00 %				
2.15.05.2.01		Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan, Penetapan Kebijakan, dan Sosialisasi Keselamatan serta Rencana Induk Perkeretaapian	2 Kali	2 Kali	100.00 %				
2.15.05.2.01.02		Dinas Perhubungan		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rencana Induk Perkeretaapian	Rencana Induk Perkeretaapian							
2.07.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	94.37 %	102.58 %			1. Validasi terhadap Angka pengangguran terbuka 2. Pemetaan efisiensi intervensi terhadap pengentasan pengangguran 3. Monitoring pengurangan pengangguran yang berasal dari program padat karya secara berkelanjutan	1. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan melakukan integrasi data terhadap angkatan kerja yang bersumber dari data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui aplikasi check-in, pelaporan perusahaan terkait tenaga kerja, permohonan pencatatan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan intervensi Pemerintah Kota melalui aplikasi Sayang Warga dan Padat Karya. 2. Pelatihan dan sertifikasi yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan pada pasar kerja dengan mempertimbangkan usulan masyarakat yang bersumber dari Musrenbang, Saran dan Pokok Pikiran DPRD, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi Pengusaha, dan informasi lowongan dari perusahaan yang diinformasikan pada aplikasi ASSIK. 3. Monitoring intervensi Padat Karya dilakukan secara berkala setiap bulan baik melalui aplikasi Padat Karya maupun pemantauan dari Kecamatan dan/atau Kelurahan serta dilakukan analisa dan evaluasi oleh Bagian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
											4. Penambahan program padat karya berbasis kebutuhan warga di tingkat kelurahan	4. Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk mendapatkan informasi warga yang menginginkan pekerjaan di sektor informal melalui Program Padat Karya dan selanjutnya diberikan bimbingan teknis atau pelatihan yang sesuai.
											5. Menyediakan BLK untuk memenuhi kebutuhan anak-anak lulusan SMA/SMK serta di usia produktif yang ingin bekerja	5. Telah dilakukan pelatihan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Surabaya serta pelaksanaan sertifikasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menambah keunggulan kompetitif tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja, termasuk tenaga kerja lulusan SMA/SMK.
											6. Memastikan perusahaan di wilayah Kota Surabaya untuk merekrut tenaga kerja di wilayah sekitar	6. 1. Pemerintah Kota Surabaya telah membuat Nota Kesepakatan dengan Hotel, dan pengelola pusat perbelanjaan (mall) di Surabaya diantaranya berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan; 2. Dalam pemberian pelayanan bidang ketenagakerjaan di SSWAlfa, perusahaan dipersyaratkan melaporkan Daftar Seluruh pekerja/buruh di Perusahaan dengan proporsi jumlah pekerja penduduk surabaya paling sedikit 50% dari total seluruh pekerja di perusahaan dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												mencantumkan nama, alamat, dan NIK pekerja; 3. Mengundang perusahaan di Kawasan SIER, Margomulyo dan sekitarnya, serta perusahaan alih daya untuk diberikan himbauan agar memprioritaskan penduduk Surabaya pada saat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja; 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan Surat Edaran kepada perusahaan-perusahaan yang berisi himbauan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan.
2.07.01.2.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.07.01.2.02.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100.00 %				
2.07.01.2.08		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.01.2.08		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.01.2.08.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.01.2.08.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.07.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	79.02 %	80.84 %	102.30 %				
2.07.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90.2 %	97.96 %	108.60 %				
2.07.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.07.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
2.07.03.2.01.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	736 Orang	102.22 %				
2.07.03.2.01.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	42 Lembaga	210.00 %				
2.07.03.2.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
2.07.03.2.04.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.07.03.2.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.07.03.2.05.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
2.07.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	2.5 %	3.5 %	140.00 %				
2.07.04.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	9 laporan	100.00 %				
2.07.04.2.01.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1000 Orang	1000 Orang	100.00 %				
2.07.04.2.01.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1900 Orang	1938 Orang	102.00 %				
2.07.04.2.01.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	500 Orang	546 Orang	109.20 %				
2.07.04.2.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
2.07.04.2.03.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	200 Orang	260 Orang	130.00 %				
2.07.04.2.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kompetensi CPMI/PMI							
2.07.04.2.04.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang	100.00 %				
2.07.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	13.14 %	13.58 %	103.35 %				
2.07.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	30%	30.95 %	103.17 %				
2.07.05.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.05.2.01.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.05.2.01.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan	220 Perusahaan	300 Perusahaan	136.36 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online							
2.07.05.2.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.07.05.2.02.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	60 Perkara	120.00 %				
2.07.05.2.02.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	110 Perkara	116 Perkara	105.45 %				
2.23.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.04 %	97.53 %	101.55 %			1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan buku di TBM	1. 1. Pada tahun 2023, telah dilakukan penambahan koleksi pustaka berupa buku fisik sebanyak 1.792 eksemplar, dan eBook sebanyak 5 judul. 2. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi bagi 250 petugas layanan baca sekolah dan 250 petugas TBM berupa in-house

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah Tahun Anggaran 2023									training, antara lain terkait standar pelayanan, softskill dan kompetensi literasi. 3. Telah dilaksanakan 245 event literasi sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan minat literasi dan belajar masyarakat.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								2. Perlu adanya inovasi teknologi di bidang perpustakaan, misalnya E-book	2. Sampai dengan tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki 1.650 judul eBook, yang 225 judul di antaranya merupakan karya GENDIS SEWU, yakni kumpulan karya yang ditulis oleh bibit-bibit penulis yang dibina. Seluruh eBook tersebut dapat diakses melalui SIPUS (Sistem Informasi Perpustakaan).
											3. Melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, terkait rumah jurnal untuk karya ilmiah	3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berkolaborasi dengan para guru di jenjang pendidikan SD dan SMP negeri maupun swasta untuk memanfaatkan Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) sebagai salah satu media publikasi jurnal para guru tersebut.
											4. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan penguatan literasi di sekolah-sekolah	4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal: 1. Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling; 2. Mengadakan Lomba Perpustakaan; 3. Mengadakan Lomba Mendongeng; 4. Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Sekolah; 5. Pelatihan Petugas Pengelolaan Perpustakaan.

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.23.01.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
2.23.01.2.02.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	100.00 %				
2.23.01.2.06		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00 %				
2.23.01.2.06.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.00 %				
2.23.01.2.07		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100.00 %				
2.23.01.2.07.11		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	100.00 %				
2.23.01.2.08		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
2.23.01.2.08.04		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
2.23.01.2.08.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase event literasi yang diselenggarakan	38.8 %	38.8 %	100.00 %				
2.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	56.13 %	80.09 %	142.69 %				
2.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	67.21 %	69.95 %	104.08 %				
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100.00 %				
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	271 Lembaga	271 Lembaga	100.00 %				
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Tingkat Kepuasan Pemustaka	82 nilai	93.31 nilai	113.79 %				
2.23.02.2.01.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1498 Perpustakaan	1498 Perpustakaan	100.00 %				
2.23.02.2.01.04		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar	68 Perpustakaan	68 Perpustakaan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Nasional Perpustakaan	Nasional Perpustakaan							
2.23.02.2.01.05		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	203 Perpustakaan	101.50 %				
2.23.02.2.01.06		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	506 Orang	101.20 %				
2.23.02.2.01.09		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1498 Eksemplar	1797 Eksemplar	119.96 %				
2.23.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	4477 orang	4477 orang	100.00 %				
2.23.02.2.02.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	245 Lokus	245 Lokus	100.00 %				
2.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	28.25 %	29.64 %	104.92 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
2.24.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	64.14 %	64.55 %	100.64 %				
2.24.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase jumlah jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	12.12 %	16.04 %	132.34 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.24.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	9000 item	9000 item	100.00 %				
2.24.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	48 lembaga	51 lembaga	106.25 %				
2.24.02.2.01.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	471 Berkas	471 Berkas	100.00 %				
2.24.02.2.01.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Laporan	66 Laporan	100.00 %				
2.24.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	8640 Lembar	8640 Lembar	100.00 %				
2.24.02.2.02.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	300 Arsip	100.00 %				
2.24.02.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	7457 item	8205 item	110.03 %				
2.24.02.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga	70 Lembaga	100.00 %				
2.24.02.2.03.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	2559 Pengguna	3080 Pengguna	120.36 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
2.24.02.2.03.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	70 Laporan	70 Laporan	100.00 %				
2.24.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	39.96 %	51.95 %	130.01 %				
2.24.03.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
2.24.03.2.01.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	880 Arsip	880 Arsip	100.00 %				
2.10.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	42279.63 M2	8179 M2	19.35 %	1. Menyesuaikan program prioritas pembangunan di tingkat kota, khususnya dalam pemulihan ekonomi dan penanganan genangan 2. Adanya status tanah yang belum clean and clear sehingga	1. Menyesuaikan program prioritas pembangunan di tingkat kota, khususnya dalam pemulihan ekonomi dan penanganan genangan 2. Adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023						berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan			
2.10.05.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	3 lokasi	3 lokasi	100.00 %				
2.10.05.2.01.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				

3.1.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Pemerintah Kota Surabaya menjalankan urusan pilihan diantaranya Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan kekhasan daerah dimana terlihat dari program dan kegiatan yang telah mencapai target yang ditentukan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan melalui bidang urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berikut merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan pada tahun 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.26
Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	42.85 %	42.86 %	100.02 %				
3.26.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	2 lokasi	100.00 %				
3.26.02.2.01.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00 %				
3.26.02.2.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	1 lokasi	100.00 %				
3.26.02.2.03.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	1 Lokasi	1 Lokasi	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Olah Raga serta Pariwisata			Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							
3.26.02.2.03.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3.26.02.2.03.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60 Dokumen	60 Dokumen	100.00 %				
3.26.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	42.5 %	103.88 %	244.42 %				
3.26.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
3.26.03.2.01.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
3.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	80%	100%	125.00 %				
3.26.05		Dinas Kebudayaan,			Persentase peserta pelatihan yang telah	22%	22.22 %	101.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			melaksanakan pengembangan pariwisata							
3.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	40%	40%	100.00 %				
3.26.05.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah jenis kelompok pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan penjajakan kerjasama	3 jenis	3 jenis	100.00 %				
3.26.05.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah laporan pelaksanaan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3.26.05.2.01.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	250 Orang	250 Orang	100.00 %				
3.26.05.2.01.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	72 Orang	72 Orang	100.00 %				
3.26.05.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	3 Produk	3 Produk	100.00 %				
3.26.05.2.02.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	150 Orang	150 Orang	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Olah Raga serta Pariwisata			Pendampingan Ekonomi Kreatif							
3.25.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	35%	41.43 %	118.37 %			1. Perlu adanya intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya pada nelayan agar bisa meningkatkan pendapatan 2. Perlu adanya inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot dan perikanan	1. Telah dilakukan pemberian bantuan perahu wisata yang dapat dioperasikan untuk membawa pengunjung berwisata di sekitar Taman Suroboyo dan THP Kenjeran sebagai tambahan penghasilan keluarga nelayan di saat nelayan tidak bisa melaut. Selain itu, juga dilakukan program pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap berupa perahu, jaring/gillnet, dan sarana penunjang lainnya. 2. Telah dilakukan pelatihan budidaya perikanan dengan penerapan teknologi tepat guna, melalui pemanfaatan pakan alternatif seperti maggot untuk budidaya perikanan yang dapat mengurangi biaya operasional dengan meminimalisir penggunaan pakan pabrikan. Selain itu, telah dilakukan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												sosialisasi bagi peternak untuk membentuk kelompok dan mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan akses permodalan serta dilakukan pelatihan terkait kewirausahaan kepada pembudidaya perikanan agar dapat mengelola keuangan secara mandiri.
3.25.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3.25.03.2.01.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	55 Unit	55 Unit	100.00 %				
3.25.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	25 orang/kelompok	25 orang/kelompok	100.00 %				
3.25.04.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	34 kali	34 kali	100.00 %				
3.25.04.2.02.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses	25 Kelompok	25 Kelompok	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
3.25.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	1 laporan	100.00 %				
3.25.04.2.04.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53 Unit	60 Unit	113.21 %				
3.25.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus	0 kasus	100.00 %				
3.25.05.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Kali	12 Kali	100.00 %				
3.25.05.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.25.06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	65%	65%	100.00 %				
3.25.06.2.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sentra ikan yang dikelola	2 sentra	2 sentra	100.00 %				
3.25.06.2.03.02		Dinas Ketahanan		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pangan dan Pertanian		dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi							
3.27.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah pembudidaya pekarangan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	30 Orang	30 Orang	100.00 %			1. Mengoptimalkan produk urban farming supaya bisa menjangkau supermarket di Kota Surabaya 2. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan tanaman Toga dan hidroponik terhadap masyarakat untuk memaksimalkan program padat karya	1. Telah dilakukan pendampingan teknis budidaya tanaman mulai dari persiapan lahan atau media tanam, pembibitan tanaman, penanaman bibit tanaman, perawatan tanaman dan teknik pemanenan serta teknik pasca panen mulai dari perlakuan sortir dan packaging hasil panen dengan tujuan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas hasil panen produk urban farming sehingga bisa mencapai pasar yang lebih luas 2. Telah dilakukan pelatihan dan pendampingan teknik budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA), tanaman hortikultura dan tanaman hidroponik yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												sarana budidaya sebagai bahan praktek pelatihan dan penerapan Program Padat Karya.
3.27.02.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	10 Jenis	100.00 %				
3.27.02.2.01.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
3.27.02.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3.27.02.2.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Jenis	6 Jenis	100.00 %				
3.27.02.2.03.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.27.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	19 Lokasi	19 Lokasi	100.00 %				
3.27.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	2 Ha	100.00 %				
3.27.03.2.01		Dinas Ketahanan		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pangan dan Pertanian			Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian							
3.27.03.2.01.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	16 Laporan	100.00 %				
3.27.03.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
3.27.03.2.02.09		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
3.27.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	5 kelompok	5 kelompok	100.00 %				
3.27.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89.5 %	89.53 %	100.03 %				
3.27.04.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	90.95 %	113.69 %				
3.27.04.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.27.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	30 Unit	31 Unit	103.33 %				
3.27.04.2.04.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.27.06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	100%	100.00 %				
3.27.06.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha sektor pertanian dan perikanan	80%	100%	125.00 %				
3.27.06.2.01.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.27.07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	100%	100.00 %				
3.27.07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Tingkat Produktivitas Pertanian	5.85 ton/ha	6.56 ton/ha	112.14 %				
3.27.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	7 kali	7 kali	100.00 %				
3.27.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	26 orang	104.00 %				
3.27.07.2.01.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
3.27.07.2.01.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.30.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	93%	99.65 %	107.15 %			1. Perlu adanya pengawasan, pengawasan dan pengendalian dalam pendistribusian produk berbahaya seperti gas, bahan bakar dan produk yang mengandung zat berbahaya	1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, wewenang terkait pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota
			-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023								2. Perlu adanya revitalisasi pasar tradisional yang merupakan salah satu fokus pemulihan ekonomi	2. Telah dilaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pasar seperti fasilitas umum, lapak pedagang, dan penambahan fasilitas pasar diantaranya ruang laktasi, pos ukur ulang, dan tempat ibadah, serta pemenuhan sarana dan prasarana lain untuk persiapan SNI Pasar Tradisional.
			-Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat									
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
			-Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian Bidang Metrologi Legal									
			-Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan									
3.30.02.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.02.2.01.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	450 Dokumen	547 Dokumen	121.56 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Terintegrasi Secara Elektronik							
3.30.02.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.02.2.02.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	200 Dokumen	202 Dokumen	101.00 %				
3.30.02.2.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.02.2.03.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	29 Dokumen	120.83 %				
3.30.02.2.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.02.2.04.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	29 Dokumen	120.83 %				
3.30.02.2.05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Perdagangan		untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							
3.30.02.2.05.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64 Dokumen	92 Dokumen	143.75 %				
3.30.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
3.30.03.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.03.2.02.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	622 Dokumen	101.80 %				
3.30.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	100%	100.00 %				
3.30.04.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.30.04.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.04.2.02.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.04.2.02.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	100%	100.00 %				
3.30.06.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.30.06.2.01.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	22880 Unit	23246 Unit	101.60 %				
3.30.06.2.01.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang	1264 Orang	105.33 %				
3.30.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Perdagangan										
3.30.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
3.30.07.2.01.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5220 UMKM	5301 UMKM	101.55 %				
3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian -Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	17%	17.05 %	100.29 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian Bidang Metrologi Legal -Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan									
3.31.02.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
3.31.02.2.01.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.31.02.2.01.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
3.31.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	82%	100%	121.95 %				
3.31.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								
3.31.03.2.01.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
3.31.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	100%	100.00 %				
3.31.04.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
3.31.04.2.01.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				

3.1.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan ini merupakan unsur yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.27
Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00 %			1. Perlu upaya untuk mengatasi dampak inflasi pada berbagai sektor	1. Upaya untuk mengatasi dampak inflasi yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok dilaksanakan secara survei dan dilakukan setiap hari di beberapa pasar Kota Surabaya 2. Melakukan Operasi Pasar Beras Medium Bulog SPHP kepada pedagang tradisional di Kota Surabaya 3. Melakukan Operasi Pasar minyak goreng bekerjasama dengan PT. Megasurya dan PT. Mahesi Agri Karya selaku produsen Minyakita untuk menyuplai ketersediaan Minyakita di 17 lokasi pasar di Kota Surabaya 4. Pasar murah dalam rangka penyediaan komoditas pangan murah bekerjasama dengan distributor dilakukan di kelurahan - kelurahan 5. Gerakan Pangan Murah 6. Tanam cepat panen yang dilaksanakan serentak bersama kelompok tani urban farming dan para petani

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												konvensional se Kota Surabaya 7. Kerjasama antar daerah dengan daerah penghasil bahan pokok 8. Koordinasi dengan TPID skala kota tiap bulan untuk monitoring dan evaluasi tingkat inflasi di Kota Surabaya
			-Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Semampir Dalam Wilayah Kota Surabaya								2. Memberdayakan UMKM pada stan KBS	2. 1. Menyediakan lokasi di area parkir bagi UMKM warga sekitar dengan gratis tanpa dipungut biaya sewa 2. Menyediakan lahan/stand dengan harga khusus untuk bagi UMKM 3. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan terkait higienitas makanan, bagi UMKM yang berjualan makanan dan minuman 4. Menyediakan sarana tempat berjualan untuk UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tarif sangat murah dibandingkan tenant reguler
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota								3. Perlu adanya sinergi dengan organisasi perangkat daerah lainnya terkait fasilitasi komunikasi pimpinan	3. 1. Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Pembuatan Sambutan/Greeting dimana dalam tahapan penyusunan telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									Daerah terkait untuk penentuan jadwal dan lokasi, serta materi yang mencakup daftar tamu undangan dan update data/isu strategis Kota Surabaya; 2. Telah disampaikan Surat Pemberitahuan kepada semua Perangkat Daerah terkait pembuatan Materi Paparan KDH/WKDH harus disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dan telah didiskusikan dengan Tenaga Pakar/Ahli, Sekretaris Daerah, Asisten serta diterima oleh Bapak Walikota pada H-2 pelaksanaan kegiatan; 3. Telah dilakukan rekapitulasi dan arsip dokumentasi video sambutan/ greeting untuk evaluasi dan perbaikan kedepannya.
											4. Revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana pasar tradisional	4. 1. Telah dilakukan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar di Pasar Simo, Pasar Simomulyo dan Pasar Simo Gunung bersama dengan DPRKPP 2. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar juga dilakukan melalui CSR antara lain dengan digitalisasi pasar tradisional dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												pemberian komputer di Pasar Pabean dan Pasar Kapasan, pemasangan mesin ATM di Pasar Kapasan dan Pasar Tambak Rejo, serta perbaikan prasarana di Pasar Pegirian 3. PD Pasar Surya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional
											5. Pembenahan Manajemen PD RPH agar nilai hasil audit wajar tanpa pengecualian	5. 1. Untuk peningkatan tertib tata kearsipan telah dilakukan penyusunan SOP keuangan dan non keuangan 2. Untuk peningkatan tertib pencatatan aset sebagai salah satu aspek audit Kantor Akuntan Publik (KAP), PD Rumah Potong Hewan mengajukan pengembalian aset ke Pemerintah Kota Surabaya
											6. Mengevaluasi pengadaan barang perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang disesuaikan dengan kebijakan TKDN di Pemerintah Pusat agar kinerja OPD tidak terhambat	6. 1. Telah dilakukan koordinasi dengan kementerian perdagangan dan perindustrian terkait permasalahan dan solusi terkait pengadaan barang perkantoran di Perangkat Daerah 2. Telah disampaikan Surat Edaran perihal Penyusunan Rencana

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Umum Pengadaan (RUP) TA 2023 nomor 910/23902/436.2.2/2022 dan Surat Edaran perihal Pelaksanaan Anggaran TA 2023 nomor 000.3 /6804/436.2.2/2023 kepada Perangkat Daerah untuk memastikan syarat TKDN tidak menjadi hambatan dalam pengadaan barang perkantoran
											7. Perlu melakukan evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pada OPD yang beban kerjanya tidak berimbang	7. 1. Telah dilakukan monev Analisis Beban Kerja (ABK) secara periodik. 2. Telah dilakukan evaluasi kelembagaan dengan hasil akhir masuk kategori P-5 (skor 81-100) dimana skor Perangkat Daerah paling rendah 96,7 dan rata-rata skor seluruh Perangkat Daerah 99,2. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											8. Meningkatkan kapasitas SDM di Kecamatan dan kelurahan	8. Peningkatan Kapasitas SDM di Kelurahan dan Kecamatan dilakukan dengan: 1. In House Training Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kasie pembangunan dan ketertiban kecamatan dan kelurahan; 2. Diklat Pertanahan dan tertib administrasi pertanahan untuk Lurah; 3. Pemberian materi komunikasi efektif untuk pelayanan di kelurahan dan kecamatan, dengan peserta camat, lurah, LPMK dan perwakilan RT dan RW; 4. Sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi basis data kewilayahan untuk pendataan bangunan dengan peserta dari sekretaris kecamatan dan staf kelurahan.
											9. Mengevaluasi kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pemberian beasiswa	9. 1. Telah dilakukan evaluasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memastikan beasiswa tepat sasaran. 2. Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama pada tahun 2023 sebanyak 13 Perguruan Tinggi, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 11 Perguruan Tinggi. Pemerintah Kota Surabaya telah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												memberikan beasiswa pendidikan kepada 3.186 mahasiswa ber KTP Surabaya.
											10. Penyediaan rumah tapak murah dan terjangkau bagi masyarakat	10. 1. PT. Surya Karsa Utama melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemasaran dan pembangunan unit-unit perumahan 2. Penjualan unit rumah tinggal bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat yang berminat 3. Manajemen juga melakukan upaya untuk kemudahan fasilitas pembayaran unit yang akan dijual dengan lebih fleksibel, memberikan kemudahan dan fasilitas untuk melakukan skema pembayaran melalui KPR Bank dan juga memberikan diskon untuk unit yang akan dijual 4. PT. Surya Karsa Utama melakukan pembangunan jalan paving dan saluran serta pemeliharaan lingkungan dilakukan bersama dengan warga perumahan
											11. Revisi Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014	11. Telah dilakukan penyusunan rancangan perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dan disampaikan kepada DPRD Kota

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												Surabaya untuk dilakukan pembahasan
											12. Meningkatkan bantuan permodalan kepada UMKM agar usahanya tetap berkembang	12. 1. Pemberian pinjaman permodalan oleh BPR Surya Artha Utama Perseroda bagi UMKM melalui produk pinjaman khusus UMKM yaitu : - PUSPITA (Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh) plafond maksimal 5 juta dan bunga 3% per tahun dengan pola Pinjaman Kelompok - Si-KUMIS (Si-Kredit Usaha Mikro Surabaya) plafond di atas 5 juta sampai dengan 20 juta bunga 5% per tahun 2. BPR Surya Artha Utama aktif melakukan sosialisasi bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan untuk memperkenalkan program pinjaman permodalan 3. BPR Surya Artha Utama melakukan pemberian penghargaan kepada UMKM dengan kategori UMKM bebas rentenir, UMKM naik kelas (Puspita naik ke Si-Kumis), UMKM bebas dari keluarga miskin (Gakin), dan UMKM usaha berkembang Penerima manfaat program pemberian pinjaman permodalan mengalami peningkatan, tahun 2023 ada 1.409

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												UMKM dibanding tahun 2022 ada 848 UMKM
											13. Melakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan yang berkaitan dengan pemenuhan layanan pada masyarakat	13. Telah dilakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan, rehabilitasi dan perbaikan 7 (tujuh) kantor kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kantor kelurahan. Pemenuhan sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan juga dilakukan melalui pengadaan barang perkantoran penunjang pelayanan seperti printer, laptop, kursi, dan sebagainya oleh BPBJAP yang tercantum pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
											14. Efisiensi bahan pangan untuk binatang	14. 1. PD Taman Satwa KBS telah mencari substitusi pakan satwa dengan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kandungan nutrisinya 2. Pengembangan program edukasi konservasi dalam kegiatan feeding time dengan skema penjualan kepada pengunjung untuk paket pakan satwa. Upaya ini bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan efisiensi bahan pakan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												satwa 3. Membuat formulasi perhitungan pakan untuk menentukan standar gizi yang dibutuhkan masing-masing jenis satwa
											15. Pembenahan Manajemen PD Pasar Surya agar nilai hasil audit wajar tanpa pengecualian	15. 1. PD Pasar Surya menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam proses penyusunan laporan keuangan dan Chart Of Account (COA) sesuai aturan di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2. PD Pasar Surya melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit perpajakan secara khusus untuk kebenaran perhitungan dan penyetoran perpajakan
											16. Mengoptimalkan fungsi pendapatan bidang pariwisata di Disbudporapar serta melakukan kajian pembentukan UPTD	16. Bagian Organisasi telah melakukan pendampingan penyusunan kajian pembentukan UPTD sarana prasarana olahraga untuk optimalisasi pendapatan di bidang olahraga.
											17. Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bersama UMKM untuk	17. BPR Surya Artha Utama berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk : 1. Pengembangan di beberapa pasar di Surabaya yaitu Pasar Wisata Penjaringan Sari,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											penyampaian produk BPR Surya Artha Utama	Pasar Raci, Pasar Wisata Harmoni Keputih dengan memasang neon box pembayaran QRIS (cashless) di stand pedagang serta melakukan pendampingan pengoperasian QRIS bagi pedagang 2. Melakukan sosialisasi produk pinjaman PUSPITA dan SI - KUMIS di 9 SWK di Kota Surabaya dan pelaku UMKM di SWK telah memanfaatkan program pinjaman untuk menambah permodalan
											18. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas yang harus dilakukan terhadap kinerja BUMD	18. 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD dengan melibatkan tenaga ahli yang dilakukan secara : - bulanan : penyelesaian permasalahan meliputi permasalahan optimalisasi aset BUMD dan lain sebagainya - triwulanan : menilai tingkat kesehatan 9 BUMD mencakup aspek keuangan, operasional, dan administrasi sesuai modul dari Kemendagri - tahunan : evaluasi laporan tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												telah melakukan seleksi secara terbuka untuk memperoleh anggota Direksi, Badan/Dewan Pengawas dan Komisaris yang profesional dan kompeten 3. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang efektif : - Peningkatan jumlah BUMD yang berpredikat sehat pada tahun 2023 sebanyak 6 BUMD dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4 BUMD - Peningkatan laba bersih BUMD tahun 2023
											19. Diversifikasi usaha sebagai upaya peningkatan pendapatan PD RPH	19. 1. Meningkatkan jumlah pemotongan sapi dengan melayani jasa pemotongan sapi dengan penanganan khusus (sapi tanpa tali keluh) 2. Sosialisasi kepada mitra jagal RPH terkait rencana simulasi jasa timbang sapi hidup untuk memberikan kepastian pasokan daging 3. Sosialisasi kepada mitra jagal RPH dan masyarakat umum terkait rencana layanan jasa pemotongan iga dan buntut sapi
											20. Meningkatkan respon pelayanan kepada konsumen	20. 1. Penyediaan call center dan penetapan waktu tanggap keluhan maksimal 1 x 24 jam untuk pengaduan kebocoran atau air tidak keluar 2. Pembagian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												shift petugas untuk penyelesaian pengaduan 3. Pengembangan aplikasi Customer Information System (CIS) untuk kemudahan pelayanan pembayaran, pengaduan, histori pemakaian, pelaporan pencatatan dan informasi meter air yang juga dapat dilakukan secara mandiri, dan keluhan terkait layanan PDAM lainnya 4. PDAM Surya Sembada telah bergabung dalam aplikasi WargaKU sebagai bentuk partisipasi dalam layanan terpadu
											21. Perlu adanya inisiatif khusus untuk pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu	21. Pemerintah Kota Surabaya telah mengundang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, serta petunjuk teknisnya yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya.
											22. Pembenahan Manajemen PT Surya Karsa Utama agar nilai hasil audit wajar	22. Pembenahan manajemen utamanya manajemen keuangan pada PT. Surya Karsa Utama dilakukan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											tanpa pengecualian	dengan melakukan koreksi piutang pada laporan tahun 2023 dengan mencadangkan piutang yang menjadi koreksi oleh pihak auditor dan akan memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan agar hasil opini audit wajar tanpa pengecualian
											23. Perlu meningkatkan koordinasi dengan satuan empat terkait kegiatan-kegiatan yang ada di OPD	23. Telah dilakukan koordinasi secara rutin antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Pengadaan Barang Jasa Administrasi Pembangunan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.
											24. Adanya inovasi untuk pengecekan meteran	24. PDAM Surya Sembada telah mengembangkan aplikasi Customer Information System (CIS) untuk kemudahan pelayanan pembayaran, pengaduan, histori pemakaian, pelaporan pencatatan dan informasi meter air yang juga dapat dilakukan secara mandiri, dan keluhan terkait layanan PDAM lainnya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											25. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya agar melibatkan RT, RW dan LPMK	25. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama telah melibatkan RT, RW, dan LPMK dalam rangka memberikan pemahaman agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan informasi yang disampaikan dapat tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Surabaya. Selain itu, dalam proses penyusunan Perda dan Perwali juga melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak peraturan yang dimaksud.
											26. Inovasi dan strategi baru untuk meningkatkan minat pengunjung	26. 1. Pengembangan wahana yang bersifat edukasi konservasi 2. Pembuatan dan pengembangan film pendek tentang edukasi satwa yang sebagai sarana promosi di media sosial 3. Pembuatan dan pengembangan produk-produk cinderamata dengan tema satwa di KBS 4. Kerjasama dengan sekolah melalui kunjungan dari tim marketing ke sekolah-sekolah dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												menawarkan proposal paket-paket wisata edukasi rombongan 5. Kerjasama dengan asosiasi travel dengan memberikan tarif diskon rombongan 6. Inovasi baru wisata malam "Surabaya Night Zoo"
											27. Memastikan kebersihan pasar di kota surabaya untuk kenyamanan pengunjung	27. Upaya yang telah dilakukan untuk memastikan kebersihan pasar di Kota Surabaya : 1. Melakukan pembersihan rutin oleh petugas kebersihan di tiap unit pasar 2. Sosialisasi dan pemberian himbauan kepada pedagang di pasar untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan 3. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengangkutan sampah dari pasar ke TPA dan petugas kebersihan 4. Dilakukan penilaian bulanan terkait kebersihan area pasar, fasilitas umum dan sarana prasarana pasar oleh kepala pasar 5. Melakukan pengecatan lantai lorong di Pasar Wisata Bratang 6. Melakukan kerja bakti terutama pada pasar dengan nilai kebersihan rendah dan safari pembersihan saluran pasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											28. Menyusun regulasi berkaitan dengan tindaklanjut barang milik daerah ataupun barang sitaan yang dapat menghasilkan PAD atau perlu dimusnahkan	28. Pengadaan barang milik daerah termasuk yang menghasilkan PAD dikoordinasikan antara BPKAD dengan BPBJAP, untuk kemudian pengelolaan BMD tersebut dilaksanakan oleh BPKAD. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh BPKAD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Perda 1 Tahun 2020 dan Perwali 109 Tahun 2021.
											29. Menginisiasi Ketersediaan air minum dalam kemasan yang berkualitas	29. PDAM Surya Sembada telah melakukan kerjasama dengan ITS Surabaya Hebat untuk menginisiasi usaha produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek He2O (dibaca : HERO) dan dalam proses sertifikasi SNI, Halal, dan BPOM
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat	92%	99.96 %	108.65 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja							
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan revidi kelembagaan yang dilakukan	85%	100%	117.65 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	66.66 %	100%	150.02 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	100%	100.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	97%	100%	103.09 %				
4.01.01		Sekretariat Daerah			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	95%	95.00 %	1. Penyesuaian pemenuhan barang/jasa perkantoran dengan pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri 2. Pelayanan administrasi perkantoran belum	1. Memperbanyak penyedia jasa di e-katalog 2. karena ketersediaan anggaran kurang memadai jadi pelayanan administrasi perkantoran diharapkan tetap bisa dipenuhi tanpa anggaran yang banyak		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									dilaksanakan secara optimal			
4.01.01.2.02		Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.02.01		Sekretariat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/bulan	168 Orang/bulan	100.00 %				
4.01.01.2.05		Sekretariat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
4.01.01.2.05.02		Sekretariat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	9 Paket	180.00 %				
4.01.01.2.07		Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
4.01.01.2.07.06		Sekretariat Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1800 Unit	2569 Unit	142.72 %				
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan PD	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.08.03		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.01.2.08.04		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
4.01.01.2.08.01		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.01.2.11		Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.11.01		Sekretariat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100.00 %				
4.01.01.2.11.04		Sekretariat Daerah		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100.00 %				
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah		Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	58 instansi	100.00 %				
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi	58 instansi	100.00 %				
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit	253 unit	100.00 %				
4.01.01.2.13.04		Sekretariat Daerah		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Publik dan Tata Laksana							
4.01.01.2.13.03		Sekretariat Daerah			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
4.01.01.2.13.01		Sekretariat Daerah			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.01.2.14		Sekretariat Daerah			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
4.01.01.2.14		Sekretariat Daerah				Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00 %				
4.01.01.2.14.01		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.01.2.14.02		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	2 hari	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah				Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari	14 hari	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah				Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	92%	100%	108.70 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah				Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	83%	100%	120.48 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah				Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	38.91 %	43.48 %	111.75 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	98%	100%	102.04 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	77.42 %	80.65 %	104.17 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%	100%	100.00 %				
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	72 Lembaga	80 Lembaga	111.11 %				
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	24 Kecamatan	25 Kecamatan	104.17 %				
4.01.02.2.01.02		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.01.03		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.02.2.01.01		Sekretariat Daerah			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan bina mental spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah				Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah				Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pelayanan masyarakat pada Aplikasi SIMPROLAMAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4.01.02.2.02.02		Sekretariat Daerah			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
4.01.02.2.02.01		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
4.01.02.2.02.03		Sekretariat Daerah			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	20 permasalahan hukum	20 permasalahan hukum	100.00 %				
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah				Jumlah produk hukum yang dipublikasi	60 produk hukum	104 produk hukum	173.33 %				
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah				Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	60 rancangan produk hukum	104 rancangan produk hukum	173.33 %				
4.01.02.2.03.01		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	104 Dokumen	173.33 %				
4.01.02.2.03.02		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus	20 Kasus	100.00 %				
4.01.02.2.03.03		Sekretariat Daerah			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	104 Dokumen	173.33 %				
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah evaluasi kerjasama yang dilakukan	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00 %				
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah				Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 Lembaga	20 Lembaga	100.00 %				
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah				Jumlah kerjasama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00 %				
4.01.02.2.04.01		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.04.02		Sekretariat Daerah			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
4.01.02.2.04.03		Sekretariat Daerah			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
4.01.03		Sekretariat Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03		Sekretariat Daerah			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq 76\%$	84.5 %	88.23 %	104.41 %				
4.01.03		Sekretariat Daerah			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	80%	100%	125.00 %				
4.01.03.2.01		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
4.01.03.2.01.01		Sekretariat Daerah		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
4.01.03.2.01.02		Sekretariat Daerah		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.03.2.01.03		Sekretariat Daerah		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
4.01.03.2.02		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
4.01.03.2.02.02		Sekretariat Daerah		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
4.01.03.2.02.03		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	100.00 %				
4.01.03.2.03		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	92%	100%	108.70 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.03		Sekretariat Daerah				Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %			
4.01.03.2.03.01		Sekretariat Daerah			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	23 Dokumen	115.00 %			
4.01.03.2.03.03		Sekretariat Daerah			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	323 Orang	107.67 %			
4.01.03.2.04		Sekretariat Daerah			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1 laporan	1 laporan	100.00 %			
4.01.03.2.04.01		Sekretariat Daerah			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
4.02.01	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92.5 %	92.22 %	99.70 %	Secara keseluruhan untuk tingkat pelayanan kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan sudah terpenuhi, namun masih terdapat aspek pelayanan yang kurang maksimal.	Meningkatkan komunikasi dan pelayanan kesekretariatan dalam memenuhi kebutuhan peralatan perkantoran.	1. adanya digitalisasi SPJ dan berkas-berkas untuk kegiatan alat kelengkapan DPRD	1. Digitalisasi SPJ kegiatan alat kelengkapan DPRD telah dilaksanakan sesuai ketentuan, melalui aplikasi GRMS (Government Resource Management System) Pemerintah Kota Surabaya. Dokumentasi dan publikasi berita terkait kegiatan alat kelengkapan DPRD telah dikoordinasikan dan dilaksanakan melalui media sosial

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									dan media resmi lainnya.
											2. Memperhatikan terkait kelengkapan sarana dan prasarana serta perawatan gedung	2. Untuk pemeliharaan gedung DPRD telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Untuk pemeliharaan sarana di dalam gedung sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4.02.01.2.02		Sekretariat DPRD		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
4.02.01.2.02.01		Sekretariat DPRD		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100.00 %				
4.02.01.2.06		Sekretariat DPRD		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
4.02.01.2.06.02		Sekretariat DPRD		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100.00 %				
4.02.01.2.09		Sekretariat DPRD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari	1 Hari	100.00 %				
4.02.01.2.09.10		Sekretariat DPRD		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	140 Unit	68.63 %	Kurang optimalnya penentuan rencana realisasi.	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait penentuan rencana realisasi.		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.02.01.2.14		Sekretariat DPRD		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari	1 Hari	100.00 %				
4.02.01.2.14.01		Sekretariat DPRD		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	96 Laporan	100.00 %				
4.02.01.2.15		Sekretariat DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	100%	100.00 %				
4.02.01.2.15.01		Sekretariat DPRD		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	49.75 Orang/Bulan	99.50 %	Adanya anggota DPRD Kota Surabaya yang meninggal dunia dan belum ada penggantian antar waktu (PAW).	Meningkatkan komunikasi dengan partai dan fraksi terkait, serta pimpinan DPRD untuk segera melakukan pergantian antar waktu (PAW).		
4.02.01.2.16		Sekretariat DPRD		Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari	1.13 Hari	143.50 %				
4.02.01.2.16.03		Sekretariat DPRD		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	24 Laporan	66.67 %	Kurangnya frekuensi pelaksanaan kunjungan kerja unsur DPRD Kota Surabaya dalam rangka pengalihan fokus pada penjangkauan aspirasi dari masyarakat.	Meningkatkan komunikasi dengan unsur DPRD Kota Surabaya dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kunjungan kerja.		
4.02.02		Sekretariat DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
4.02.02.2.01		Sekretariat DPRD		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00 %				
4.02.02.2.01.01		Sekretariat DPRD		Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah							
4.02.02.2.04		Sekretariat DPRD			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	37 Orang	74.00 %	1. Tidak semua anggota DPRD Kota Surabaya mendapatkan undangan bimtek/diklat dari Partai Politiknya masing-masing. 2. Tidak semua anggota DPRD Kota Surabaya yang mendapat undangan, dapat menghadiri bimtek/diklat.	1. Meningkatkan komunikasi dengan Partai Politik terkait undangan bimtek/diklat bagi seluruh unsur DPRD Kota Surabaya. 2. Meningkatkan komunikasi dengan unsur DPRD Kota Surabaya agar dapat menghadiri bimtek/diklat, setidaknya sekali dalam setahun.		
4.02.02.2.04.03		Sekretariat DPRD			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
4.02.02.2.04.02		Sekretariat DPRD			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	15 Dokumen	750.00 %				
4.02.02.2.05		Sekretariat DPRD			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %				
4.02.02.2.05.03		Sekretariat DPRD			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	150 Dokumen	100.00 %				
4.02.02.2.08		Sekretariat DPRD			Fasilitasi Tugas DPRD	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari	1 Hari	150.00 %				
4.02.02.2.08.01		Sekretariat DPRD			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	93 Dokumen	258.33 %				

3.1.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur penunjang urusan Pemerintahan dilaksanakan melalui :

1. Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.28
Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.03.01	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	94.1 %	105.73 %			1. Implementasi sistem meritokrasi secara riil berdasarkan kapasitas, kemampuan dan prestasi 2. Perlu adanya database rekam jejak pegawai ASN termasuk kualitas, kompetensi dan kinerjanya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 3. Melakukan pemenuhan kebutuhan ASN di perangkat daerah (jabatan yang belum terisi), dengan memperhatikan jumlah ASN yang pensiun dan non job 4. Perlu adanya rotasi dan mutasi ASN yang menempati jabatan berpuluh- puluh tahun	1. Telah dilaksanakan Manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil. 2. Telah dikembangkan aplikasi e-SDM yang memuat dokumentasi ASN baik data dasar, kompetensi, beserta riwayat kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. 3. Telah dilakukan Analisa Beban Kerja (ABK) sehingga dapat memproyeksi kebutuhan ASN termasuk di dalamnya kebutuhan yang diakibatkan oleh adanya tenaga ASN yang pensiun. Pemenuhan kebutuhan ASN dilakukan melalui rekrutmen PPPK dengan memperhatikan ketentuan dari BKN dan Kemenpan-RB. 4. Telah dilaksanakan rotasi dengan mempertimbangkan masa kerja jabatan dan lokasi tempat kerja dengan tempat tinggal yang memperhatikan kebutuhan

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												atas formasi sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK) di Perangkat Daerah.
											5. Penempatan ASN berbasis wilayah tempat tinggal (zonasi)	5. Telah dilaksanakan rotasi dengan mempertimbangkan masa kerja jabatan dan lokasi tempat kerja dengan tempat tinggal yang memperhatikan kebutuhan atas formasi sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK) di Perangkat Daerah.
5.03.01.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
5.03.01.2.02.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	100.00 %				
5.03.01.2.06		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
5.03.01.2.06.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	100.00 %				
5.03.01.2.08		Badan Kepegawaian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Sumber Daya Manusia										
5.03.01.2.08.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	92%	99.86 %	108.54 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang disiplin	96.50 %	96.59 %	100.09 %				
5.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	30.77 %	35.61 %	115.73 %				
5.03.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	91%	100%	109.89 %				
5.03.02.2.01.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.03.02.2.01.03		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
5.03.02.2.01.11		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
5.03.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8555 berkas	9493 berkas	110.96 %			
5.03.02.2.02.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
5.03.02.2.02.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
5.03.02.2.02.03		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %			
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	2 jenis	100.00 %			
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian				Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis	1 jenis	100.00 %			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis	5 jenis	100.00 %				
5.03.02.2.04.08		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
5.03.02.2.04.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6138 Dokumen	6067 Dokumen	98.84 %	Data ASN bersifat dinamis (adanya mutasi masuk, mutasi keluar atau meninggal) yang tidak dapat diprediksi jumlahnya sehingga ada beberapa data SKP yang tidak dapat terinput sesuai dengan jumlah target	Melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan data ASN valid dan update		
5.03.02.2.04.03		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
5.04.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94.5 %	100%	105.82 %			1. Meningkatkan kompetensi SDM pada ASN secara berkelanjutan	1. Telah dilaksanakan Peningkatan kompetensi SDM pada ASN baik melalui pendidikan formal dan non formal. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal melalui peningkatan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik melalui mekanisme

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												tugas belajar dengan biaya mandiri atau tugas belajar atau beasiswa. Sedangkan peningkatan pendidikan melalui pendidikan non formal melalui pelaksanaan pelatihan/kursus/workshop/ baik bidang teknis, fungsional, manajerial dan sosiokultural yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanah Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								2. Perlu adanya peningkatan SDM bidang kesehatan dalam pemenuhan layanan dasar, antara lain di RSUD dan Puskesmas	2. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan melalui rekrutmen PPPK dan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan melalui pelaksanaan pelatihan/kursus/workshop yang dilaksanakan baik secara mandiri atau difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.
5.04.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	2232 orang	2292 orang	102.69 %				
5.04.02.2.01.03		Badan Kepegawaian dan		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2232 Orang	2292 Orang	102.69 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengembangan Sumber Daya Manusia			Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
5.04.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	168 orang	168 orang	100.00 %				
5.04.02.2.02.07		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.02.01	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	95.37 %	104.80 %				1. Intensifikasi dan monitoring kepada perangkat daerah yang memiliki potensi PAD agar tidak terjadi kebocoran	1. Telah dilakukan pengembangan aplikasi untuk memonitoring progress pendapatan dari Perangkat Daerah. Selain itu, untuk meningkatkan PAD dilakukan melalui penelitian terhadap data-data perpajakan PBB dan BPHTB, serta dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi dan potensi pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
			-Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									2. Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih inovatif	2. Telah dikembangkan sistem aplikasi berbasis online guna mencegah kebocoran pajak daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											menyiapkan strategi cadangan guna pencapaian target pendapatan	dan bekerja sama dengan lintas sektor dalam upaya menggali potensi retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah.
			-Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Dan/Atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730									
			-Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah									
			-Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerintah Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730									
			-Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga									
			-Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730									
			-Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan									
			-Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730									
			-Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame									
			-Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Administratif Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun									
			-Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaaan, Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Jaminan Biaya Bongkar Reklame									
			-Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame									
			-Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tarif Sewa Gelora Pancasila, Sirkuit Gelora Bung Tomo, Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo dan Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke-78									
			-Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke-78									
			-Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78									
			-Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78									
			-Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan									
			-Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan									
			-Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan									
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
			-Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan									
			-Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Dan/Atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78									
			-Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dan/Atau Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah									
			-Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78									
			-Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemegang Izin Pemakaian Tanah Karena Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila									
			-Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila									
			-Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya									
			-Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila									
			-Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan									
			-Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan									
			-Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Di Lapangan Pada Saat Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan									
			-Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Bunga Dan/Atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kepada Masyarakat Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu									
			-Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu									
			-Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu									
			-Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan									
			-Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan									

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Administrasi Kependudukan									
5.02.01.2.02		Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.02.01		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	100.00 %				
5.02.01.2.04		Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.01.2.04.02		Badan Pendapatan Daerah		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.01.2.08		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.08.03		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.01.2.08.04		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.02		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100.00 %				
5.02.02.2.02		Badan Pendapatan Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
5.02.02.2.02.05		Badan Pendapatan Daerah		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
5.02.04		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	82%	99.83 %	121.74 %				
5.02.04		Badan Pendapatan Daerah			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	67%	67.79 %	101.18 %				
5.02.04		Badan Pendapatan Daerah			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	60%	189.38 %	315.63 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19426 Objek Pajak	25749 Objek Pajak	132.55 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.04.2.01.11		Badan Pendapatan Daerah			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %			
5.02.04.2.01.13		Badan Pendapatan Daerah			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %			
5.02.04.2.01.05		Badan Pendapatan Daerah			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %			
5.02.04.2.01.07		Badan Pendapatan Daerah			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	19426 Obyek Pajak	25749 Obyek Pajak	132.55 %			
5.02.04.2.01.14		Badan Pendapatan Daerah			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %			
5.02.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	92.87 %	102.05 %			1. Melakukan pendataan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset yang dimiliki untuk program pemberdayaan masyarakat 2. Penentuan target pendapatan dan belanja yang	1. BPKAD bersama dengan Perangkat Daerah lainnya telah melakukan pendataan aset-aset potensial yang dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan PAD. Pada tahun 2023, penggunaan lahan untuk proyek padat karya meningkat menjadi 34 lokasi dibandingkan tahun 2022 sebanyak 11 lokasi 2. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan baik realisasi pendapatan maupun

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											rasional sehingga dimungkinkan tercapai	realisasi belanja perangkat daerah untuk memantau kondisi dan melakukan rencana kebutuhan belanja perangkat daerah. Selain itu, terkait dengan pendapatan dan belanja transfer, telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
											3. Penerjemahan janji kepala daerah di RPJMD pada program disetiap perangkat daerah secara konkret	3. Penerjemahan janji Kepala Daerah di RPJMD pada program disetiap Perangkat Daerah secara konkret diimplementasikan dalam tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator opini BPK dan target kinerja WTP. Adapun target yang sudah dicapai mulai Tahun 2021-2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini diupayakan melalui : 1. Pendampingan kepada 63 puskesmas yang pada awal Tahun 2022 menjadi BLUD supaya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) 2. Pengembangan aplikasi penyusunan LKPD disesuaikan dengan perubahan kode akun yang telah mengalami

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												beberapa perubahan sesuai dengan peraturan yang baru 3. Pencatatan aset yang dapat dipertanggungjawabkan 4. Meminimalkan belanja silang yaitu penyesuaian belanja modal menjadi belanja barang dan jasa atau sebaliknya 5. Mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.
5.02.01.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.02.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	100.00 %				
5.02.01.2.07		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.07.10		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200 Unit	100.00 %				
5.02.01.2.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.08.03		Badan Pengelolaan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDAS DPRD
		Kuangan dan Aset Daerah				Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
5.02.01.2.08.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.02.01.2.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100.00 %				
5.02.01.2.09.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2660 Unit	2412 Unit	90.68 %	Adanya usulan penjualan kendaraan roda 2 yang akan diganti dengan sepeda motor listrik masih dalam tahap penilaian penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik sehingga realisasi pemeliharaan kendaraan dnas TA 2023 belum memenuhi target	1. Untuk penjualan kendaraan roda 2 yang sudah tidak layak pakai akan dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 2. Pemutakhiran data kendaraan dinas pasca lelang sehingga realisasi pemeliharaan kendaraan dinas dapat dilakukan sesuai data terkini		
5.02.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	100%	100.00 %				
5.02.02.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun							
5.02.02.2.01.07		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.01.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.01.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.01.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	90220 berkas	94756 berkas	105.03 %				
5.02.02.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen	244 Dokumen	100.00 %				
5.02.02.2.02.09		Badan Pengelolaan		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data	90220 Dokumen	94756 Dokumen	105.03 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kuangan dan Aset Daerah			Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						
5.02.02.2.02.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	244 Dokumen	100.00 %			
5.02.02.2.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %			
5.02.02.2.03.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %			
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	100%	100.00 %			
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%	100%	100.00 %			
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	25%	100.00 %			
5.02.02.2.04.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			
5.02.02.2.04.10		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			
5.02.02.2.04.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	61.8 %	61.9 %	100.16 %				
5.02.03.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00 %				
5.02.03.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	100%	100.00 %				
5.02.03.2.01.10		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	8115 Dokumen	105.68 %				
5.02.03.2.01.07		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.02.03.2.01.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	100.00 %				
5.02.03.2.01.13		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	100.00 %				
5.01.01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.47 %	96.97 %	101.57 %			1. Perlu upaya pengentasan kemiskinan yang konkret dan berkolaborasi dengan seluruh OPD	1. Telah dilaksanakan updating data kemiskinan melalui musyawarah kelurahan setiap bulannya dan berdasarkan data dimaksud, telah dilakukan intervensi yang terintegrasi oleh semua Perangkat Daerah kepada warga

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												miskin Kota Surabaya melalui upaya peningkatan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pemberdayaan ekonomi warga
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023								2. Sinkronisasi target pencapaian tahun anggaran 2022 sesuai dengan RPJMD	2. Telah dilakukan penyesuaian target indikator tahun 2023 dengan mempertimbangkan capaian target indikator tahun 2022 dan target yg tercantum dalam RPJMD serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres ketercapaian target indikator yang telah ditetapkan tersebut
			-Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Inovasi Daerah								3. Evaluasi terkait dengan indikator-indikator pada LKPJ dan implementasinya pada penerapan capaian riil di masyarakat	3. Capaian indikator telah dilakukan verifikasi bersama terutama terkait validitas kinerja yang dilaporkan, penghambat pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
											4. Evaluasi terkait dengan indikator-indikator pada LKPJ dan implementasinya dibandingkan dengan serapan anggarannya	4. Pencapaian kinerja mengoptimalkan seluruh sumber pembiayaan sehingga APBD dapat dimanfaatkan untuk program dan pekerjaan prioritas lainnya.
											5. Capaian indikator perangkat	5. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator maupun

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											daerah seharusnya berbanding lurus dengan pendapatan, capaian indikator yang tinggi namun anggaran pendapatan tidak tercapai menunjukkan kinerja yang tidak sinkron	realisasi pendapatan secara berkala guna mengatasi permasalahan yang dapat menghambat tercapainya kinerja Perangkat Daerah
											6. Perlunya sosialisasi terhadap perubahan kebijakan terkait program serta anggaran pendapatan dan belanja	6. Telah dilakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah terkait perubahan kebijakan
											7. Agar lebih diperhatikan dan segera ditindaklanjuti terkait realisasi pokok-pokok pikiran DPRD	7. Pokok-pokok pikiran DPRD telah tercantum dalam dokumen perencanaan serta dokumen penganggaran Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan yg berlaku
5.01.01.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %				
5.01.01.2.01.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Penelitian dan Pengembangan										
5.01.01.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
5.01.01.2.02.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	100.00 %				
5.01.01.2.08		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00 %				
5.01.01.2.08.04		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.01.01.2.08.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
5.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	100%	100.00 %				
5.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100.00 %				
5.01.02.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100.00 %				
5.01.02.2.01.07		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.01.02.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	58 PD	100.00 %				
5.01.02.2.02.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	38 Masukan	39 Masukan	102.63 %				
5.01.02.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	58 PD	100.00 %				
5.01.02.2.03.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.01.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.36 %	99.01 %	100.66 %				
5.01.03.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.01.08		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.01.04		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.02.04		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.01.03.2.02.08		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dan Bidang Kewilayahan yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.03.04		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.01.03.2.03.08		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									
5.05.02.2.04		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi serta pelaksanaan diseminasi yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
5.05.02.2.04.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %				
5.05.02.2.04.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				

3.1.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Unsur pengawasan urusan pemerintahan mencakup Urusan Pemerintahan bidang Inspektorat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.29
Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	97.58 %	97.58 %	1. Belum optimalnya identifikasi kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Optimalisasi penggunaan barang perkantoran yang ada	1. Melakukan identifikasi serta penyusunan prioritas kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Optimalisasi penggunaan barang perkantoran yang ada	1. Upaya preventif agar ASN terhindar dari pelanggaran kasus pidana seperti halnya psikotropika, korupsi dan penyalahgunaan perizinan	1. Upaya preventif yang dilakukan Inspektorat Kota Surabaya untuk mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pelanggaran kasus pidana, seperti penyalahgunaan psikotropika, korupsi, dan penyalahgunaan perizinan dengan mengimplementasikan whistleblowing system dan WA pengaduan. Aplikasi Whistleblowing System (WBS) disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. WA pengaduan juga disediakan untuk menerima dan menanggapi pengaduan warga Surabaya jika menemui atau mendapati ASN yang melakukan pelanggaran KKN. Keunggulan implementasi Whistleblowing System dan WA Pengaduan selama tahun 2023 pelaporan tidak perlu tatap muka di kantor, namun dapat dilakukan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023									dimana saja. Data dukung dan bukti yang dimiliki pelapor dapat dikirim ke Inspektorat Kota Surabaya untuk selanjutnya dapat diproses.
											2. Penertiban terhadap ASN yang indiscipliner dan menyalahgunakan kewenangan, dan disosialisasikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik	2. 1. Penertiban terhadap ASN yang indiscipliner dan penyalahgunaan wewenang dilakukan berdasarkan adanya pengaduan melalui Whistleblowing System dan WA Pengaduan. Pengaduan tersebut diproses oleh Inspektorat dan jika terbukti melanggar akan dilaporkan kepada Walikota Surabaya. 2. Sosialisasi terkait media pengaduan (Whistleblowing System dan WA Pengaduan) kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial, situs web Pemerintah Kota Surabaya dan media informasi lainnya. Keterbukaan informasi publik terkait pengaduan pada Whistleblowing System dapat diakses melalui https://wbs.surabaya.go.id/
6.01.01.2.02		Inspektorat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
6.01.01.2.02.01		Inspektorat		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	100.00 %				
6.01.01.2.06		Inspektorat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					peralatan dan perlengkapan kantor							
6.01.01.2.06.02		Inspektorat		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00 %				
6.01.01.2.08		Inspektorat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100.00 %				
6.01.01.2.08.04		Inspektorat		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
6.01.02		Inspektorat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
6.01.02		Inspektorat			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100.00 %				
6.01.02		Inspektorat			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil revidi laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	17 Dokumen	100.00 %				
6.01.02.2.01		Inspektorat			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan	36 Rekomendasi	36 Rekomendasi	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan money							
6.01.02.2.01		Inspektorat			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	60 lembaga	60 lembaga	100.00 %				
6.01.02.2.01.02		Inspektorat		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				
6.01.02.2.01.07		Inspektorat		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 Dokumen	36 Dokumen	100.00 %				
6.01.02.2.01.03		Inspektorat		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	100.00 %				
6.01.02.2.01.04		Inspektorat		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	100.00 %				
6.01.02.2.02		Inspektorat		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	20 lembaga	100.00 %				
6.01.02.2.02.02		Inspektorat		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6.01.02.2.02.01		Inspektorat		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
6.01.03		Inspektorat		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	100%	100.00 %				
6.01.03		Inspektorat			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100.00 %				
6.01.03		Inspektorat			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
6.01.03.2.01		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	4 dokumen	100.00 %				
6.01.03.2.01.01		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.00 %				
6.01.03.2.01.02		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6.01.03.2.02		Inspektorat		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	93 Kali	93 Kali	100.00 %				
6.01.03.2.02		Inspektorat			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				
6.01.03.2.02.01		Inspektorat		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	100.00 %				
6.01.03.2.02.02		Inspektorat		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	100.00 %				
6.01.03.2.02.03		Inspektorat		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6.01.03.2.02.04		Inspektorat		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	100.00 %				

3.1.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Kewilayahan ini meliputi Bidang Kecamatan yang dilaksanakan oleh 31 Kecamatan.

Pelaksanaan unsur Kewilayahan di Kota Surabaya pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Kewilayahan Kota Surabaya tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.30
Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01.01	KECAMATAN	Kec. Asemrowo	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan -Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.37 %	95.5 %	96.11 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 -Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya									
7.01.01.2.02		Kec. Asemrowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Asemrowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Asemrowo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Asemrowo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Asemrowo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Asemrowo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.55 %	99.55 %	Masih banyak pelaku usaha belum ber-NIB yang sudah didata namun tidak aktif atau pindah, sehingga kesulitan untuk melakukan pendampingan secara lebih intensif.	Melakukan komunikasi yang lebih intensif sebelum dilakukan pendataan dan pendampingan secara berkelanjutan.		
7.01.02		Kec. Asemrowo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Asemrowo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %	68.22 %	250.17 %				
7.01.02.2.01		Kec. Asemrowo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Asemrowo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Asemrowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	139 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Asemrowo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Asemrowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Asemrowo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Asemrowo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan	3 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Asemrowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Asemrowo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Asemrowo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	17 Lembaga	17 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Asemrowo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	62 Unit Usaha	62 Unit Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Asemrowo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Asemrowo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Asemrowo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Asemrowo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	5 Lokasi	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01.01		Kec. Asemrowo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	20 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Asemrowo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	164 Orang	80 Orang	48.78 %	Belum optimalnya perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan.	Perlunya ketelitian dalam melaksanakan perencanaan kegiatan.		
7.01.05.2.01.05		Kec. Asemrowo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Benowo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.81 %	94.04 %	96.15 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan yang paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Benowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Benowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Benowo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Benowo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Benowo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Benowo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	9 Unit	180.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Benowo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	34.45 %	40.99 %	118.98 %				
7.01.02.2.01		Kec. Benowo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Benowo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Benowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	193 lembaga	102.66 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Benowo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Benowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	16 Dokumen	106.67 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Benowo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Benowo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Benowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Benowo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Benowo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	12 Unit	133.33 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2 Unit	66.67 %	Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan.	Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	9 Unit	90.00 %	Adanya target sasaran yang telah dikerjakan oleh PD Teknis.	Perlunya koordinasi lebih intensif dengan PD terkait dalam pembagian target pekerjaan di awal tahun.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	125.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Benowo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	133.33 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Benowo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	26 Lembaga	26 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Benowo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Potensi usaha	50 Potensi usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Benowo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Benowo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Benowo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Benowo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Benowo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Benowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Benowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Benowo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Benowo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	12 Orang	12 Orang	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01.05		Kec. Benowo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Bubutan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.00 %	95.34 %	99.31 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan yang paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Bubutan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Bubutan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Bubutan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Bubutan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	24 Paket	80.00 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan yang paling utama.		
7.01.01.2.09		Kec. Bubutan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Bubutan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	120.00 %				
7.01.02		Kec. Bubutan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	97.62 %	97.62 %	Masih banyak pelaku usaha yang belum ber-NIB karena kurang	Melakukan pendampingan dan pendataan secara berkelanjutan		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									paham/takut dalam melaporkan pajak.	terutama terkait perpajakan.		
7.01.02		Kec. Bubutan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bubutan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.82 %	59.17 %	248.40 %				
7.01.02.2.01		Kec. Bubutan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Bubutan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Bubutan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	414 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Bubutan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15 Laporan	125.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bubutan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04.01		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	83 Dokumen	207.50 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Bubutan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bubutan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bubutan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	8 Unit	133.33 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	12 Unit	133.33 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	7 Unit	70.00 %	Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	11 Unit	122.22 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	6 Unit	60.00 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Bubutan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bubutan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	420 Lembaga	421 Lembaga	100.24 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Bubutan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03.03		Kec. Bubutan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	93 Unit	93 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Bubutan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Bubutan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Bubutan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Bubutan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	34 Kasus	34 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Bubutan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	145 Orang	120.83 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Bubutan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Bulak		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.44 %	95.81 %	97.33 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan karena adanya pengalihan untuk kegiatan prioritas skala kota.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Bulak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Bulak		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Bulak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	24 paket	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Bulak		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Bulak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Bulak		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Bulak			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.36 %	64.29 %	275.21 %				
7.01.02.2.01		Kec. Bulak		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.01.01		Kec. Bulak		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Bulak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	158 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Bulak		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	150.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Bulak			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan	12 Layanan	109.09 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04.03		Kec. Bulak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bulak		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Bulak			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bulak		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Bulak			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Bulak		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Bulak		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Bulak		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bulak		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	21 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Bulak			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	420 Lembaga	420 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Bulak		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Bulak		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	94 Unit	94 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Bulak		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Bulak		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Bulak		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Bulak		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bulak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Bulak			Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	36 Orang	109.09 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Bulak		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	36 Orang	109.09 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Bulak		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.81 %	93.93 %	97.03 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					administrasi umum yang disediakan							
7.01.01.2.06.02		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %	76.29 %	289.86 %				
7.01.02.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	196 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Dukuh Pakis		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Dukuh Pakis		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Dukuh Pakis		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	25 Lembaga	25 Lembaga	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03.04		Kec. Dukuh Pakis		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	328 Unit	60 Unit	18.29 %	Terdapat komponen Meja Lipat dan Kursi Lipat yang sudah difasilitasi dan direalisasikan untuk RW pada Tahun Anggaran 2022.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait kebutuhan pikir untuk lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai penerima manfaat.		
7.01.04		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Dukuh Pakis		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 Kasus	36 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Dukuh Pakis		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	160 Orang	141 Orang	88.13 %	Terdapat peserta yang berhalangan hadir karena urusan	Meningkatkan komunikasi dengan sasaran peserta		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				pribadi sehingga jumlah peserta tidak sesuai target yang ditentukan.	yang lebih optimal agar tingkat kehadirannya tinggi.		
7.01.05.2.01.05		Kec. Dukuh Pakis		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gayungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.39 %	94.78 %	96.33 %	Pelayanan kesekretariatan belum sesuai dengan perencanaan.	Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana.		
7.01.01.2.02		Kec. Gayungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Gayungan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Gayungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Gayungan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gayungan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Gayungan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gayungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gayungan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Gayungan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.71 %	72.73 %	262.47 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gayungan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Gayungan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Gayungan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	197 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Gayungan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Gayungan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	48 Dokumen	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04.02		Kec. Gayungan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Gayungan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gayungan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gayungan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Gayungan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	12 Unit	133.33 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	9 Unit	450.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	6 Unit	75.00 %	Adanya penyesuaian target awal (8 lokasi) menjadi 6 lokasi.	Meningkatkan koordinasi antara unit perencanaan dan pelaksana kegiatan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Gayungan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	9 Unit	150.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gayungan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga	30 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gayungan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	120 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Gayungan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	30 Laporan	250.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Gayungan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	119 Unit	118 Unit	99.16 %	Terdapat penyedia yang nilai Tingkat Kandungan Dalam Negerinya di bawah ketentuan.	Meningkatkan koordinasi dengan unit perencanaan dalam hal pengusulan SSH (standar satuan harga) baru.		
7.01.04		Kec. Gayungan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gayungan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Gayungan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Gayungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	45 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik	2 topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Gayungan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	40 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Gayungan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Genteng		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.40 %	96.32 %	98.89 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Genteng		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Genteng		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Genteng		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					administrasi umum yang disediakan							
7.01.01.2.06.02		Kec. Genteng		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Genteng		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Genteng		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Genteng		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Genteng			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Genteng			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	23.38 %	74.29 %	317.75 %				
7.01.02.2.01		Kec. Genteng		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Genteng		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Genteng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	364 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Genteng		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Genteng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
7.01.03		Kec. Genteng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Genteng			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Genteng		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Genteng			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	8 Unit	40.00 %	Adanya 12 jenis pengadaan barang yang tidak	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									teralisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	9 Unit	64.29 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	14 Unit	107.69 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	2 Unit	12.50 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	9 Unit	90.00 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Genteng		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Genteng		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	61 Lembaga	61 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Genteng			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	20 Lembaga	23 Lembaga	115.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Genteng		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Genteng		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	183 Unit	183 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Genteng		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01		Kec. Genteng		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Genteng		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Genteng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Genteng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	12 Kasus	133.33 %				
7.01.05.2.01		Kec. Genteng			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Genteng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	57 Orang	57 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Genteng		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gubeng		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.91 %	95.84 %	98.90 %	Kurang optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan prioritas penyediaan di awal perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang paling utama.		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Gubeng		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Gubeng		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Gubeng		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Gubeng		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	16 Paket	160.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gubeng		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Gubeng		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	43 Unit	71.67 %	Kurang optimalnya pemeliharaan (servis) sarana dan prasarana karena adanya pengalihan untuk kebutuhan prioritas skala kota, serta adanya pengurangan jumlah unit kendaraan R2.	Melakukan koordinasi dan prioritasasi penyediaan di awal perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang paling utama.		
7.01.02		Kec. Gubeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gubeng			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gubeng			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.77 %	91.18 %	296.33 %				
7.01.02.2.01		Kec. Gubeng		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Gubeng		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Gubeng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	480 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Gubeng		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	35 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Gubeng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Gubeng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gubeng			Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5 Unit	500.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	14 Unit	175.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	9 Unit	180.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gubeng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	13 Unit	216.67 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Gubeng		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	120.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gubeng		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	52 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gubeng			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	90 Unit Kerja	91 Unit Kerja	101.11 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Gubeng		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Gubeng		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	108 Unit	108 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Gubeng		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gubeng		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01.01		Kec. Gubeng		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Gubeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	28 Kasus	116.67 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Gubeng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69 Orang	69 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Gubeng		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.99 %	96.05 %	98.02 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	28 Paket	31 Paket	110.71 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	31 Paket	110.71 %				
7.01.01.2.09		Kec. Gunung Anyar		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	18 Unit	24 Unit	133.33 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Gunung Anyar		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	24 Unit	133.33 %				
7.01.02		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	98.1 %	98.10 %	Masih banyak pelaku usaha yang belum ber-NIB karena kurangnya kesadaran pelaku usaha akan manfaat NIB.	Meningkatkan intensitas pendampingan secara berkelanjutan.		
7.01.02		Kec. Gunung Anyar			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Gunung Anyar			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50%	35.78 %	71.56 %	Adanya usulan yang terkendala status lahan.	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait, utamanya pada masyarakat atau pengembang dan PD dalam penyelesaian status lahan.		
7.01.02.2.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	2 laporan	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Gunung Anyar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga	217 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Gunung Anyar		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	620 Dokumen	304 Dokumen	49.03 %	1. Kurangnya kesadaran masyarakat meski telah dilakukan sosialisasi. 2. Adanya keberatan masyarakat untuk membayarkan biaya pengurusan IMB dan denda.	Menerapkan pemberian sanksi terhadap pemilik persil yang tidak memiliki IMB atau IMB-nya kadaluarsa.		
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar			Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar			Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 laporan	12 laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	620 Dokumen	304 Dokumen	49.03 %	1. Kurangnya kesadaran masyarakat meski telah dilakukan sosialisasi. 2. Adanya keberatan masyarakat untuk membayarkan biaya pengurusan IMB dan denda.	Menerapkan pemberian sanksi terhadap pemilik persil yang tidak memiliki IMB atau IMB-nya kadaluarsa.		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04.02		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Gunung Anyar		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Gunung Anyar			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Gunung Anyar		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	125.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	10 Unit	250.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Gunung Anyar		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	7 Unit	350.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	29 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	110.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Gunung Anyar		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	32 Unit	60.38 %	Terdapat komponen berupa kursi dan tenda yang tidak terserap karena tidak dibutuhkan oleh masyarakat/warga.	Usulan pokir yang diterima dapat mempertimbangkan pemenuhan usulan di tahun sebelumnya. Jika sudah tercukupi dan belum rusak, maka tidak perlu mengadakan kembali.		
7.01.04		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01.01		Kec. Gunung Anyar		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	26 kasus	108.33 %				
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Gunung Anyar		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Gunung Anyar		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Jambangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.30 %	95.81 %	97.47 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.01.2.02		Kec. Jambangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Jambangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Jambangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Jambangan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	109 Paket	109.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Jambangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Jambangan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	99 Unit	99.00 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan karena adanya pengalihan untuk kegiatan prioritas skala kota	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama		
7.01.02		Kec. Jambangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.34 %	99.34 %	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum ber-NIB atau masih dalam proses kepengurusan NIB	Melakukan pendampingan dan pendataan secara berkelanjutan		
7.01.02		Kec. Jambangan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Jambangan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25.99 %	62.88 %	241.94 %				
7.01.02.2.01		Kec. Jambangan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Jambangan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178 Laporan	178 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Jambangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	168 Lembaga	168 Lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	penyelenggaraan urusan pemerintahan							
7.01.02.2.02.03		Kec. Jambangan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	53 Dokumen	331.25 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4277 Laporan	4672 Laporan	109.24 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Jambangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Jambangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Jambangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					musbangkel berdasarkan konsep inovasi							
7.01.03.2.02.01		Kec. Jambangan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	112.50 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	13 Unit	108.33 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	11 Unit	366.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya	26 Lembaga	26 Lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					untuk Pemberdayaan dapat disediakan							
7.01.03.2.03		Kec. Jambangan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	100 Lembaga	103 Lembaga	103.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Jambangan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Jambangan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Jambangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Jambangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Jambangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	361 Laporan	100.28 %				
7.01.05		Kec. Jambangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Jambangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	38 Kasus	39 Kasus	102.63 %				
7.01.05.2.01		Kec. Jambangan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Jambangan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	4 Orang	4 Orang	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01.05		Kec. Jambangan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38 Laporan	39 Laporan	102.63 %				
7.01.01		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.77 %	94.61 %	97.77 %	Masih diperlukan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana penunjang kerja	Perencanaan dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.		
7.01.01.2.02		Kec. Karangpilang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Karangpilang		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Karangpilang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Karangpilang		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	23 Unit	79.31 %	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran karena adanya pengalihan untuk kegiatan prioritas skala kota.	Meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran.		
7.01.02		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Karangpilang			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Karangpilang			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	56.45 %	73.86 %	130.84 %				
7.01.02.2.01		Kec. Karangpilang		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Karangpilang		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Karangpilang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	220 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Karangpilang		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	70 Dokumen	145.83 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04.02		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Karangpilang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Karangpilang		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Karangpilang			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Karangpilang		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Karangpilang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Karangpilang		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	29 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Karangpilang			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	116 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Karangpilang		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Karangpilang		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	37 Unit	97.37 %	Adanya data pokir dengan isi intervensi dan alamat penerima manfaat yang sama, sehingga hanya salah 1 saja yang direalisasikan.	Melakukan verifikasi usulan pokir secara lebih teliti, sehingga mengurangi usulan yang identik (dobel).		
7.01.04		Kec. Karangpilang		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Karangpilang		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Karangpilang		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus	73 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Karangpilang		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	74 Orang	74 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Karangpilang		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.71 %	97.51 %	98.78 %	Belom optimalnya pelayanan kesekretariatan	Meningkatkan kembali pelayanan kesekretariatan dengan sarana dan prasarana yang sudah disediakan		
7.01.01.2.02		Kec. Kenjeran		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Kenjeran		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Kenjeran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06.02		Kec. Kenjeran		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.51 %	99.51 %	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum ber-NIB karena ketidakmauan pelaku usaha dalam membayar kewajiban pajak.	Melakukan pendataan dan pendampingan secara berkelanjutan, utamanya terkait perpajakan agar tidak terkesan menakutkan bagi pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Kenjeran			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Kenjeran			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %	55.98 %	167.96 %				
7.01.02.2.01		Kec. Kenjeran		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Kenjeran		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Kenjeran		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	460 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Kenjeran		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Kenjeran			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	135 Dokumen	135.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13 Laporan	108.33 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Kenjeran		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Kenjeran		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Kenjeran			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	15 Unit	107.14 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	13 Unit	108.33 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Kenjeran		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.03		Kec. Kenjeran		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	43 Lembaga	113.16 %				
7.01.03.2.03		Kec. Kenjeran			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	102 pelaku usaha	102.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Kenjeran		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Kenjeran		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	54 Unit	54 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Kenjeran		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Kenjeran		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	10 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Kenjeran		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Kenjeran		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Kenjeran			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01.02		Kec. Kenjeran		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	218 Orang	218 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Kenjeran		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Krembangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.30 %	95.3 %	97.94 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Krembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Krembangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Krembangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Krembangan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	26 Paket	108.33 %				
7.01.01.2.09		Kec. Krembangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Krembangan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	23 Unit	63.89 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.	Melakukan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.02		Kec. Krembangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase data terverifikasi yang	100%	99.22 %	99.22 %	1. Kurangnya pemahaman pelaku	Meningkatkan pendampingan dan		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dibutuhkan Perangkat Daerah				usaha terkait proses pengurusan NIB yang sebenarnya mudah. 2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban pajak jika sudah ber-NIB.	pendataan secara berkelanjutan.		
7.01.02		Kec. Krembangan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Krembangan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %	57.22 %	154.19 %				
7.01.02.2.01		Kec. Krembangan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Krembangan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Krembangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	431 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Krembangan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	76 Dokumen	316.67 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Krembangan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Krembangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Krembangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	8 Unit	200.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	4 Unit	133.33 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2 Unit	40.00 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	10 Unit	166.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1 Unit	25.00 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.01		Kec. Krembangan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Krembangan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	231 Pelaku Usaha	231.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Krembangan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Krembangan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	51 Unit	51 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Krembangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Krembangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Krembangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Krembangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Laporan	9 Laporan	128.57 %				
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	35 Orang	35 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Krembangan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang	35 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Krembangan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	9 Laporan	128.57 %				
7.01.01		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.24 %	96.14 %	98.87 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Lakarsantri		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Lakarsantri		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Lakarsantri		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Lakarsantri		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Lakarsantri		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09.10		Kec. Lakarsantri		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Lakarsantri			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Lakarsantri			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.36 %	76.06 %	325.60 %				
7.01.02.2.01		Kec. Lakarsantri		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Lakarsantri		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Lakarsantri		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	205 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	42 Dokumen	92 Dokumen	219.05 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2923 Laporan	3235 Laporan	110.67 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Lakarsantri		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Lakarsantri			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	12 Unit	80.00 %	Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya. 2.		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	14 Unit	466.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	4 Unit	400.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	16 Unit	106.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	8 Unit	266.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	8 Unit	800.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	150.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	32 Lembaga	32 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	124 Lembaga	124 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Lakarsantri		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Lakarsantri		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	59 Unit	59 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Lakarsantri		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Lakarsantri		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Lakarsantri		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	44 Kasus	44 Kasus	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					bersama Babinsa/Babinkamtibmas							
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Lakarsantri		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	40 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Lakarsantri		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6 Laporan	6 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.95 %	95.56 %	98.57 %	Kurang maksimalnya pelayanan kesekretariatan dalam penyediaan sarana dan prasarana.	Meningkatkan kembali pelayanan kesekretariatan dengan memenuhi sarana dan prasarana yang menjadi prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Mulyorejo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Mulyorejo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	29 Paket	131.82 %				
7.01.01.2.09		Kec. Mulyorejo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Mulyorejo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Mulyorejo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Mulyorejo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.51 %	60.36 %	149.00 %				
7.01.02.2.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Mulyorejo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	346 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Mulyorejo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Mulyorejo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3 Unit	300.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Mulyorejo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	8 Unit	800.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Mulyorejo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	58 Lembaga	109.43 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	92 Pelaku Usaha	92.00 %	Ketidakstabilan ekonomi berakibat berkurangnya masyarakat yang menjalankan usaha.	Meningkatkan intensitas pendampingan masyarakat untuk menjalankan usaha kembali.		
7.01.03.2.03.04		Kec. Mulyorejo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	7 Laporan	175.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	89 Unit	85 Unit	95.51 %	Adanya komponen pengadaan berupa komputer dan tenda/terop yang tidak direalisasikan karena kurangnya informasi terkait detail penerima manfaat.	Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan PD terkait dalam mendukung penyediaan kepada masyarakat.		
7.01.04		Kec. Mulyorejo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	29 Lokasi	111.54 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Mulyorejo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	24 Kasus	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Mulyorejo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	53 Orang	72 Orang	135.85 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Mulyorejo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	2 Laporan	200.00 %				
7.01.01		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.68 %	95.35 %	97.61 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Pabean Cantian		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Pabean Cantian		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.77 %	99.77 %	Kurangnya kesadaran warga terkait pentingnya nomor identitas pelaku usaha (NIB).	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.		
7.01.02		Kec. Pabean Cantian			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pabean Cantian			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	15%	55.43 %	369.53 %				
7.01.02.2.01		Kec. Pabean Cantian		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Pabean Cantian		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Pabean Cantian		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 Lembaga	371 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Pabean Cantian		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Pabean Cantian		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pabean Cantian			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Pabean Cantian		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Pabean Cantian		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pabean Cantian		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	52 Lembaga	50 Lembaga	96.15 %	Adanya penggabungan lembaga kemasyarakatan yang disebabkan penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Perak Timur Menjadi Kelurahan Tanjung Perak.	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait perubahan jumlah lembaga kemasyarakatan.		
7.01.03.2.03		Kec. Pabean Cantian			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Pabean Cantian		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	58 Unit	55 Unit	94.83 %	Adanya data alamat penerima manfaat pengadaan sound system yang doblel.	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait untuk mendapatkan data		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										penerima yang lebih detail agar tepat sasaran.		
7.01.04		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Pabean Cantian		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Pabean Cantian		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	21 Kasus	105.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Pabean Cantian		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Pabean Cantian		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Pakal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.35 %	94.35 %	96.92 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Pakal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Pakal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Pakal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Pakal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	516 Paket	102.99 %				
7.01.01.2.09		Kec. Pakal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Pakal		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	26 Unit	136.84 %				
7.01.02		Kec. Pakal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pakal			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Pakal			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %	63.92 %	120.17 %				
7.01.02.2.01		Kec. Pakal		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Pakal		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Pakal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	229 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Pakal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Pakal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Pakal			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pakal		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Pakal			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	13 Unit	162.50 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	116.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	12 Unit	400.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Pakal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	16 Unit	88.89 %	Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan.	Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan PD terkait agar lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Pakal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Pakal		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pakal		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	34 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Pakal			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Pakal		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Pakal		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	522 Unit	455 Unit	87.16 %	Adanya penyediaan tenda/terop dan komputer yang belum terealisasi karena waktu penyediaan yang kurang optimal (tenda/terop) serta adanya kendala spek teknis yang belum sesuai (komputer).	Mengoptimalkan koordinasi dengan PD terkait lebih awal, sehingga masalah teknis yang ada dapat diselesaikan lebih awal.		
7.01.04		Kec. Pakal		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Pakal		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Pakal		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Pakal		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pakal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	19 Kasus	158.33 %				
7.01.05.2.01		Kec. Pakal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Pakal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Pakal		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Rungkut		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.86 %	94.52 %	97.58 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Rungkut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Rungkut		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	67 Orang/bulan	101.52 %				
7.01.01.2.06		Kec. Rungkut		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					administrasi umum yang disediakan							
7.01.01.2.06.02		Kec. Rungkut		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Rungkut		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Rungkut		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Rungkut		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	98.99 %	98.99 %	Adanya sebagian pelaku usaha baru yang sedang berproses dan terkendala masalah teknis aplikasi pendaftaran NIB.	Meningkatkan upaya pendampingan yang berkelanjutan.		
7.01.02		Kec. Rungkut			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Rungkut			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.16 %	53.75 %	144.64 %				
7.01.02.2.01		Kec. Rungkut		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Rungkut		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Rungkut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	497 Lembaga	497 Lembaga	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	penyelenggaraan urusan pemerintahan							
7.01.02.2.02.03		Kec. Rungkut		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00 %				
7.01.03		Kec. Rungkut		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Rungkut			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	2 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	150.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.01		Kec. Rungkut		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	120.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	9 Unit	225.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	8 Unit	200.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	14 Unit	140.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Rungkut		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	74 Lembaga	74 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Rungkut			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Rungkut		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Rungkut		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	95 Unit	78 Unit	82.11 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.04		Kec. Rungkut		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Rungkut		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	22 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Rungkut		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Rungkut		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	150 Kasus	150 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Rungkut		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	110 Orang	91.67 %	Kurangnya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan PD terkait pengelolaan target output dan anggaran.		
7.01.05.2.01.05		Kec. Rungkut		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	5 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.86 %	96.37 %	97.48 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Sambikerep		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Sambikerep		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sambikerep		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	29 Paket	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06.02		Kec. Sambikerep		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.02 %	99.02 %	Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki NIB.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran ber-NIB.		
7.01.02		Kec. Sambikerep			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sambikerep			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %	64.14 %	263.19 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	261 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Sambikerep		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	8 Bidang Urusan	9 Bidang Urusan	112.50 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	81 Dokumen	213.16 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Sambikerep		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sambikerep		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.50 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sambikerep			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Sambikerep		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	14 Unit	155.56 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	11 Unit	550.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	15 Unit	214.29 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sambikerep		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	12 Unit	600.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	133.33 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sambikerep		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	38 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sambikerep			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga	148 Lembaga	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03.04		Kec. Sambikerep		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Sambikerep		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	69 Unit	69 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sambikerep		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Sambikerep		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	37 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Sambikerep		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	37 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Sambikerep		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	80 Orang	80 Orang	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.01		Kec. Sawahan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.59 %	95.07 %	98.43 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Sawahan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Sawahan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sawahan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Sawahan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sawahan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Sawahan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	133.33 %				
7.01.02		Kec. Sawahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sawahan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sawahan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	42.86 %	72.09 %	168.20 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sawahan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	musrenbang pada tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01.01		Kec. Sawahan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sawahan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	627 lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Sawahan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Sawahan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
7.01.03		Kec. Sawahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sawahan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	16 Unit	84.21 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	21 Unit	175.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	15 Unit	187.50 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	13 Unit	86.67 %	Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	20 Unit	222.22 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sawahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	7 Unit	58.33 %	Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Sawahan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sawahan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	72 Lembaga	72 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sawahan			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	288 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Sawahan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03.03		Kec. Sawahan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	197 Unit	92 Unit	46.70 %	1. Adanya penyediaan barang (LCD Proyektor, printer dan komputer) yang terkendala TKDN. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait agar lebih awal dalam menentukan perencanaan penyediaan barang.		
7.01.04		Kec. Sawahan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sawahan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	16 Lokasi	114.29 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Sawahan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sawahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	144 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Sawahan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	91 Orang	91 Orang	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01.05		Kec. Sawahan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Semampir		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.17 %	97.24 %	102.18 %				
7.01.01.2.02		Kec. Semampir		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Semampir		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Semampir		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Semampir		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Semampir		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Semampir		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Semampir		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Semampir			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Semampir			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.36 %	75.09 %	321.45 %				
7.01.02.2.01		Kec. Semampir		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan	4 Lembaga	7 Lembaga	175.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	musrenbang pada tingkat kecamatan							
7.01.02.2.01.01		Kec. Semampir		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Semampir		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	636 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Semampir		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	30 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Semampir			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Semampir			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	12 Dokumen	120.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Semampir		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
7.01.03		Kec. Semampir		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Semampir			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Semampir		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Semampir			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Semampir		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	11 Unit	220.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	250.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	8 Unit	266.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	7 Unit	175.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Semampir		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Semampir		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	70 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Semampir			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Semampir		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Semampir		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	91 Unit	86 Unit	94.51 %	Adanya pengadaan barang 1 unit LCD proyektor dan 4 unit meja lipat yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.04		Kec. Semampir		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Semampir		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	16 Lokasi	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01.01		Kec. Semampir		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Semampir		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Semampir		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	21 Kasus	21 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Semampir			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Semampir		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	89 Orang	15.86 %	Adanya pengurangan jumlah peserta disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.05.2.01.05		Kec. Semampir		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Simokerto		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.46 %	96.78 %	99.30 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Simokerto		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Simokerto		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Simokerto		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Simokerto		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Simokerto		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Simokerto		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	70 Unit	107.69 %				
7.01.02		Kec. Simokerto		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.93 %	99.93 %	Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki NIB karena kurangnya pemahaman.	Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha secara lebih intensif.		
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.35 %	70.09 %	131.38 %				
7.01.02.2.01		Kec. Simokerto		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	5 lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Simokerto		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Simokerto		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	356 lembaga	356 lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	penyelenggaraan urusan pemerintahan							
7.01.02.2.02.03		Kec. Simokerto		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen	60 Dokumen	300.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Simokerto		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Simokerto			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto			jumlah kelurahan yang melaksanakan	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					musbangkel berdasarkan konsep inovasi							
7.01.03.2.02.01		Kec. Simokerto		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	142.86 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	8 Unit	160.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	10 Unit	333.33 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	34 Unit	12 Unit	35.29 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	10 Unit	62.50 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	18 Unit	1800.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Simokerto		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	48 Lembaga	48 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Simokerto			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Simokerto		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Simokerto		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	48 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Simokerto		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Simokerto		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Simokerto		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Simokerto		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan							
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	18 Kasus	257.14 %				
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Simokerto		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Simokerto		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.03 %	95.15 %	98.06 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	1. Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas. 2. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara pribadi.		
7.01.01.2.02		Kec. Sukolilo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Sukolilo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sukolilo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Sukolilo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	17 Paket	113.33 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Sukolilo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	21 Unit	61.76 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.02		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.9 %	99.90 %	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan NIB karena merasa kesulitan.	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait dalam mempermudah persyaratan persyaratan NIB.		
7.01.02		Kec. Sukolilo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukolilo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.71 %	56.52 %	211.61 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sukolilo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Sukolilo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sukolilo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	441 Lembaga	441 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Sukolilo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukolilo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	50 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Sukolilo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukolilo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukolilo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	7 kelurahan	7 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Sukolilo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	12 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	108.33 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	11 Unit	366.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	8 Unit	266.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	15 Unit	300.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	125.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	10 Unit	333.33 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	14 Unit	116.67 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukolilo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	8 Unit	160.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukolilo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	67 Lembaga	67 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukolilo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Sukolilo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Sukolilo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Sukolilo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sukolilo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	12 Lokasi	109.09 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Sukolilo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 Kasus	5 Kasus	250.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Sukolilo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	160 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Sukolilo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	5 Laporan	125.00 %				
7.01.01		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.86 %	96.02 %	98.12 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06.02		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Sukomanunggal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Sukomanunggal		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51%	51.57 %	101.12 %				
7.01.02.2.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	323 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	60 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	58 Dokumen	193.33 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Sukomanunggal			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Sukomanunggal		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	8 Unit	114.29 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	14 Unit	140.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	4 Unit	66.67 %	Terdapat lokasi pekerjaan fisik yang fasilitas umumnya belum diserahkan oleh pengembang di wilayah RW 01 dan RW 02 Kelurahan Sonokwijenan.	1. Mendorong peningkatan komunikasi antara warga dengan pengembang untuk bersepakat mengenai proses penyerahan fasum. 2. Mendorong PD terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan pengembang terkait proses penyerahan fasum.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Sukomanunggal		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	36 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Sukomanunggal		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	230 Unit	214 Unit	93.04 %	Adanya pengadaan jenis barang berupa LCD proyektor dan tenda/terop yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.04		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01.01		Kec. Sukomanunggal		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Sukomanunggal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	84 Orang	84 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Sukomanunggal		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.44 %	96.33 %	98.86 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Tambaksari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Tambaksari		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Tambaksari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Tambaksari		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.78 %	99.78 %	Masih banyak pelaku usaha yang belum ber NIB atau belum tahu cara proses pengurusan NIB	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam penyediaan data dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendataan		
7.01.02		Kec. Tambaksari			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tambaksari			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47.02 %	47.37 %	100.74 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tambaksari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	749 Lembaga	749 Lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	penyelenggaraan urusan pemerintahan							
7.01.02.2.02.03		Kec. Tambaksari		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	89 Dokumen	185.42 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Tambaksari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tambaksari		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tambaksari			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	2 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari			jumlah kelurahan yang melaksanakan	8 kelurahan	8 kelurahan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					musbangkel berdasarkan konsep inovasi							
7.01.03.2.02.01		Kec. Tambaksari		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	116.67 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	17 Unit	242.86 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	4 Unit	36.36 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	23 Unit	287.50 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	9 Unit	81.82 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	7 Unit	77.78 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan pekerjaan fisik (saluran) di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Tambaksari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	10 Unit	111.11 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	200.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga	78 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tambaksari			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	209 pelaku usaha	139.33 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Tambaksari		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Tambaksari		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	415 Unit	102 Unit	24.58 %	Adanya alamat penerima manfaat yang sama dengan alamat penerima intervensi yang sama di tahun 2022, sehingga sebanyak 313 unit tidak jadi diadakan.	Melakukan perencanaan dengan baik di antaranya dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.		
7.01.04		Kec. Tambaksari		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	17 lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Tambaksari		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan							
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	12 kasus	600.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Tambaksari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	310 Orang	46.76 %	Kurangnya sinkronisasi antara target dengan anggaran yang tersedia.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan PD terkait pengelolaan target output dan anggaran.		
7.01.05.2.01.05		Kec. Tambaksari		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tandes		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.63 %	95.22 %	98.54 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Tandes		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Tandes		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tandes		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Tandes		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tandes		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemerintah Daerah yang disediakan							
7.01.01.2.09.10		Kec. Tandes		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	60 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tandes		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tandes			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tandes			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %	52.07 %	103.09 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tandes		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Tandes		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tandes		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	371 lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Tandes		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Tandes			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tandes			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	36 Dokumen	102.86 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Tandes		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tandes		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tandes			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tandes		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tandes			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	7 Unit	116.67 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit	150.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tandes		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	18 Unit	200.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	120.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Tandes		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.03		Kec. Tandes		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga	51 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tandes			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Tandes		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Tandes		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	245 Unit	223 Unit	91.02 %	Adanya alamat penerima manfaat yang sama dengan alamat penerima intervensi yang sama di tahun 2022, sehingga LCD Projector sebanyak 22 unit tidak jadi diadakan.	Melakukan perencanaan dengan baik di antaranya dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.		
7.01.04		Kec. Tandes		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tandes		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	15 lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Tandes		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tandes		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tandes		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	20 Kasus	21 Kasus	105.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					bersama Babinsa/Babinkamtibmas							
7.01.05.2.01		Kec. Tandes			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Tandes		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Tandes		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69 Orang	69 Orang	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.05 %	94.1 %	95.97 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Tegalsari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Tegalsari		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tegalsari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Tegalsari		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tegalsari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Tegalsari		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	7 Unit	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.5 %	99.50 %	Kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dalam mengurus legalitas usahanya karena khawatir akan terkena pajak.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pelaku usaha mikro utamanya agar memahami permasalahan terkait kewajiban pajak.		
7.01.02		Kec. Tegalsari			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tegalsari			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %	61.29 %	263.61 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tegalsari		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Tegalsari		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	125 Laporan	125 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tegalsari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga	364 Lembaga	99.73 %	Adanya penggabungan RT 01 dan RT 03 menjadi 1 RT di RW 11 Kelurahan Kedungdoro sehingga Ketua RT berkurang 1.	Melakukan pengajuan usulan perubahan output jumlah lembaga kemasyarakatan yang diintervensi.		
7.01.02.2.02.03		Kec. Tegalsari		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Tegalsari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Tegalsari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4140 Laporan	4163 Laporan	100.56 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Tegalsari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tegalsari		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tegalsari			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Tegalsari		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	9 Unit	75.00 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	5 Unit	55.56 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	14 Unit	77.78 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	10 Unit	41.67 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2 Unit	40.00 %	1. Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota. 2. Kurang optimalnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.	1. Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan. 2. Mengusahakan untuk mencari penyedia yang lebih optimal waktu pelaksanaan pekerjaannya.		
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tegalsari		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya	48 Lembaga	48 Lembaga	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					untuk Pemberdayaan dapat disediakan							
7.01.03.2.03		Kec. Tegalsari			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	192 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Tegalsari		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	53 Laporan	110.42 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Tegalsari		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	150 Unit	48 Unit	32.00 %	Adanya pengadaan barang jenis komputer, printer, sound system, dan tenda/terop yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.04		Kec. Tegalsari		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tegalsari		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	21 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Tegalsari		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	62 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik	2 Topik	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional							
7.01.05.2.01.02		Kec. Tegalsari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94 Orang	100 Orang	106.38 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Tegalsari		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.95 %	96.08 %	100.14 %				
7.01.01.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Tenggilis Mejoyo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	25 Paket	131.58 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	25 Paket	131.58 %				
7.01.01.2.09		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	45 Unit	150.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	45 Unit	150.00 %				
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.74 %	99.74 %	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mendaftar NIB secara mandiri, disebabkan	Melakukan pendampingan dan pendataan secara berkelanjutan.		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kurangnya pemahaman IT.			
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	24.73 %	74.51 %	301.29 %				
7.01.02.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	185 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Laporan	2 Laporan	200.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	6 Laporan	150.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokumen	200.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	6 Laporan	150.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	22 Unit	2200.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	4 Unit	400.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	200.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	8 Unit	800.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	8 Unit	800.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	25 Lembaga	26 Lembaga	104.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	67 Unit	67 Unit	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 lokasi	14 lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 kasus	20 kasus	83.33 %	Adanya 8 peserta undangan yang tidak hadir karena keperluan pribadi.	Menyelenggarakan kegiatan di luar jam kerja.		
7.01.05.2.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	92 Orang	92.00 %	Adanya 8 peserta undangan yang tidak hadir karena keperluan pribadi.	Menyelenggarakan kegiatan di luar jam kerja.		
7.01.05.2.01.05		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
7.01.01		Kec. Wiyung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.39 %	97.15 %	98.74 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan prioritas.		
7.01.01.2.02		Kec. Wiyung		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Wiyung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wiyung		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Wiyung		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100.00 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wiyung		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Wiyung		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wiyung		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wiyung			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wiyung			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	55.81 %	64.96 %	116.39 %				
7.01.02.2.01		Kec. Wiyung		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01.01		Kec. Wiyung		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	212 lembaga	100.47 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Wiyung		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Wiyung		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wiyung			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	5 Unit	55.56 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Wiyung		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wiyung		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	34 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wiyung			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	20 unit usaha	29 unit usaha	145.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Wiyung		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	22 Laporan	183.33 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Wiyung		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	37 Unit	97.37 %	Adanya dukungan dari PD Teknis dalam melakukan pendampingan dan pengadaan barang.			
7.01.04		Kec. Wiyung		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wiyung		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	15 lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Wiyung		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.05		Kec. Wiyung		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak	100%	100%	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan							
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Wiyung		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	78 Orang	78 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Wiyung		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.24 %	95.54 %	98.25 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait, utamanya terkait perencanaan agar lebih diperhitungkan di awal.		
7.01.01.2.02		Kec. Wonocolo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Wonocolo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wonocolo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.06.02		Kec. Wonocolo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	113 Paket	113.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Wonocolo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Wonocolo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	113 Unit	113.00 %				
7.01.02		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	99.14 %	99.14 %	Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk mendaftar NIB disebabkan karena ketakutan terkait kewajiban setelah memiliki NIB.	Perlu dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam pendampingan pelaku usaha dan kerjasama dengan PD terkait dalam proses pendampingan pelaku usaha.		
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	29.54 %	58.97 %	199.63 %				
7.01.02.2.01		Kec. Wonocolo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Wonocolo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Wonocolo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	281 Lembaga	281 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Wonocolo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	81 Dokumen	168.75 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Wonocolo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonocolo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonocolo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Wonocolo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	9 Unit	150.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	11 Unit	91.67 %	Adanya pekerjaan pembangunan tembok makam, CCTV dan paving yang tidak terealisasi karena anggaran yang diprioritaskan	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									pekerjaan fisik (saluran) yang menjadi kebutuhan di skala kota.			
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonocolo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	7 Unit	87.50 %	Adanya pembangunan saluran di RT 4/RW 4 yang bermasalah karena menempati persil milik salah satu warga yang menolak pembangunan saluran tersebut.	Meningkatkan komunikasi dengan warga masyarakat terkait pembangunan fasilitas umum.		
7.01.03.2.03		Kec. Wonocolo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	44 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonocolo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	156 Lembaga	203 Lembaga	130.13 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Wonocolo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	48 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Wonocolo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	49 Unit	49 Unit	100.00 %				
7.01.04		Kec. Wonocolo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wonocolo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Wonocolo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	360 Laporan	360 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	88 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Wonocolo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	63 Orang	63 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Wonocolo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88 Laporan	88 Laporan	100.00 %				
7.01.01		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.97 %	96.6 %	98.60 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran.	Melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan paling utama.		
7.01.01.2.02		Kec. Wonokromo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.02.01		Kec. Wonokromo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	100.00 %				
7.01.01.2.06		Kec. Wonokromo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	100%	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06.02		Kec. Wonokromo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	24 Paket	104.35 %				
7.01.01.2.09		Kec. Wonokromo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	100%	100.00 %				
7.01.01.2.09.10		Kec. Wonokromo		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonokromo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	100%	100.00 %				
7.01.02		Kec. Wonokromo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20.43 %	68.49 %	335.24 %				
7.01.02.2.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.01.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.02		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	568 Lembaga	100.00 %				
7.01.02.2.02.03		Kec. Wonokromo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %				
7.01.02.2.04.01		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00 %				
7.01.02.2.04.02		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.02.2.04.03		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonokromo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	37.5 %	100.00 %				
7.01.03		Kec. Wonokromo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	100%	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %				
7.01.03.2.02.01		Kec. Wonokromo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	10 Unit	1000.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	18 Unit	360.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	4 Unit	400.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	11 Unit	91.67 %	Adanya pengadaan barang yang tidak terealisasi disebabkan pengalihan prioritas untuk kebutuhan di skala kota.	Meningkatkan koordinasi di awal perencanaan dan pelaksanaan terkait prioritas masing-masing pekerjaan.		
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.02		Kec. Wonokromo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	100.00 %				

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.02.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana /prasarannya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00 %				
7.01.03.2.03		Kec. Wonokromo			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Unit Usaha	116 Unit Usaha	100.00 %				
7.01.03.2.03.04		Kec. Wonokromo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				
7.01.03.2.03.03		Kec. Wonokromo		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	464 Unit	369 Unit	79.53 %	Adanya alamat penerima manfaat yang sama dengan alamat penerima intervensi yang sama di tahun 2022, sehingga sebanyak 95 unit tidak jadi diadakan.	Melakukan perencanaan dengan baik di antaranya dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.		
7.01.04		Kec. Wonokromo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.04.2.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	20 Lokasi	20 Lokasi	100.00 %				
7.01.04.2.01.01		Kec. Wonokromo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	100%	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	12 Kasus	100.00 %				
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %				
7.01.05.2.01.02		Kec. Wonokromo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	86 Orang	86 Orang	100.00 %				
7.01.05.2.01.05		Kec. Wonokromo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %				

3.1.2.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Pemerintahan Umum mencakup urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum di Kota Surabaya pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum Kota Surabaya tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.31
Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	96.94 %	96.94 %	Masih belum optimalnya pemenuhan kualitas serta kuantitas sarana prasarana untuk pelayanan.	Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada saat ini	1. Mengevaluasi kegiatan atau aktivitas fisik di sekolah kebangsaan 2. Melakukan sosialisasi tentang materi kebangsaan melalui media sosial agar generasi muda atau pelajar tertarik mengikuti sekolah kebangsaan dengan melibatkan organisasi kepemudaan 3. Evaluasi terhadap indikator ketenteraman dan ketertiban umum agar berbanding lurus dengan kondisi riil di masyarakat	1. Sekolah Kebangsaan dilaksanakan melalui Pembinaan Paskibraka Tahun 2023 yang dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dari BPIP dan dilakukan secara terukur bersama pelatih dari Garnisun. 2. Materi Wawasan Kebangsaan telah disosialisasikan melalui Media Sosial Bakesbangpol. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, karang taruna dan tokoh masyarakat di tingkat kelurahan di Kota Surabaya. 3. Nilai Indeks Kepedulian Sosial Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 97,86 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 97,67. Peningkatan kepedulian sosial di Kota Surabaya ditunjukkan antara lain dengan 1) Rasa aman

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												dan toleransi dalam beribadah 2) Gotong royong dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan sebagainya. Selain itu BAKESBANGPOL bersama tim terpadu penanganan konflik mencegah dan menurunkan potensi konflik IPOLEKSOSBUDKAM melalui mediasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
8.01.01.2.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00 %				
8.01.01.2.02.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	100.00 %				
8.01.01.2.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00 %				
8.01.01.2.06.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.00 %				
8.01.01.2.08		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	100%	100.00 %				
8.01.01.2.08.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8.01.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	91%	95.3 %	104.73 %				
8.01.02.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	298 Lembaga	298 Lembaga	100.00 %				
8.01.02.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	298 Orang	298 Orang	100.00 %				
8.01.03		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	46%	46.54 %	101.17 %				
8.01.03.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	70 Lembaga	89 Lembaga	127.14 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
8.01.03.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	150 Orang	107.14 %				
8.01.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	40%	40.77 %	101.93 %				
8.01.04.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	26 Lembaga	83.87 %	Masih ada Organisasi Kemasyarakatan yang belum tercatat dan Ormas yang sudah tercatat masih ada yang tidak bersedia untuk hadir	1) Melakukan pendataan dan pemutakhiran ormas yang masih aktif di Kota Surabaya 2) Menambah jumlah sasaran ormas yang		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Organisasi Kemasyarakatan					pada kegiatan Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kota Surabaya	direncanakan mendapat pengawasan dan/atau diberdayakan 3) Koordinasi yang intens dengan sekretariat ormas untuk memastikan kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan pengawasan dan/atau pemberdayaan		
8.01.04.2.01.05		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %				
8.01.05		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	100%	100.00 %				
8.01.05.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 Lembaga	8 Lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

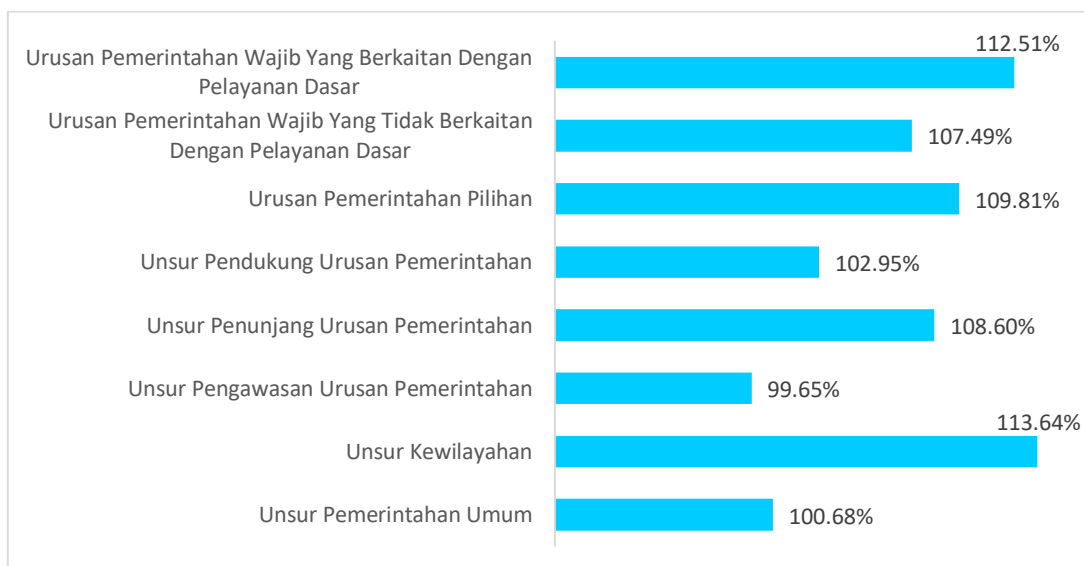
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya							
8.01.05.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	792 Orang	114.78 %			
8.01.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
8.01.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00 %				
8.01.06.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 Lembaga	15 Lembaga	107.14 %				
8.01.06.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis	17 Lembaga	17 Lembaga	100.00 %				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	REKOM DPRD	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial							
8.01.06.2.01.05		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	65 Laporan	147.73 %			
8.01.06.2.01.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 Orang	19 Orang	111.76 %			

Berdasarkan data capaian kinerja dapat diketahui Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan yang cukup berat pada masa pandemi tersebut. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

Gambar 3.12
Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya



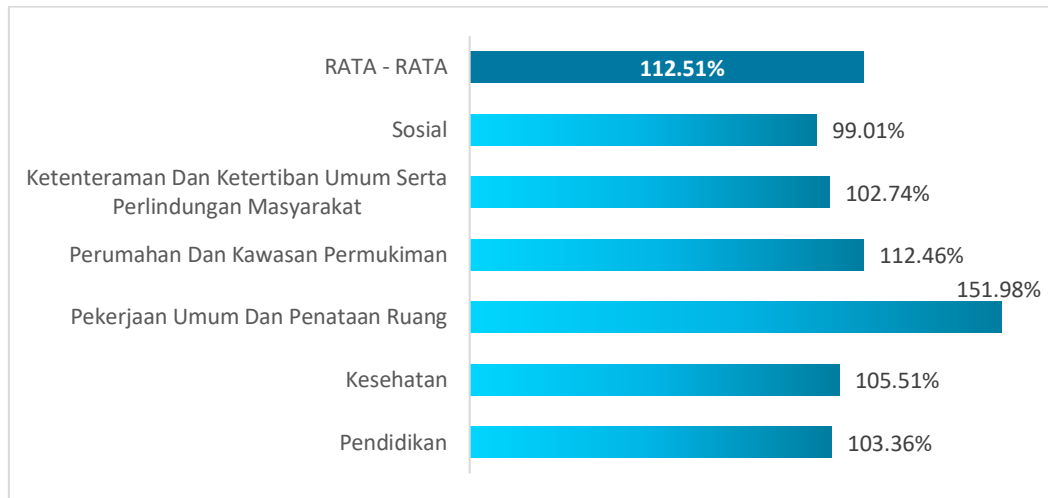
Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja

3.1.3.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial mampu mencatat kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan wajib pelayanan dasar mencapai 112,51% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Gambar 3.13
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar



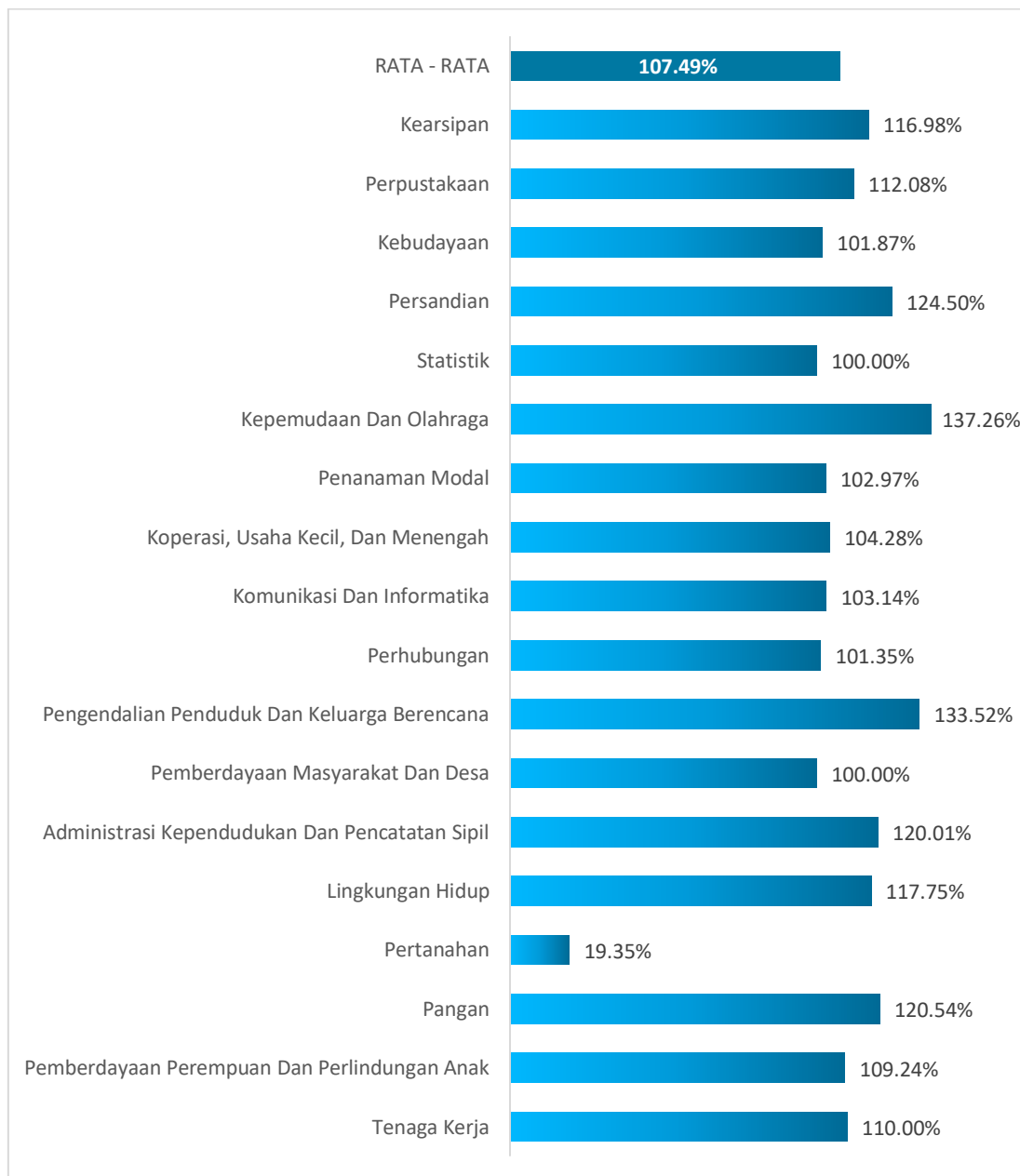
Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

3.1.3.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: urusan Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan mencatat hasil yang sangat baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai 107,49% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Namun demikian, urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan perlu memperoleh perhatian khusus dengan rata-rata capaian sebesar 19,35%. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain Adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan serta penyesuaian program prioritas pembangunan di tingkat kota. Dalam hal mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan monitoring secara rutin dan membuat Sekretariat Bersama (Sekber) di Kantor Pertanahan guna memudahkan koordinasi kemajuan pembebasan tanah untuk pembangunan non infrastruktur.

Gambar 3.14
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

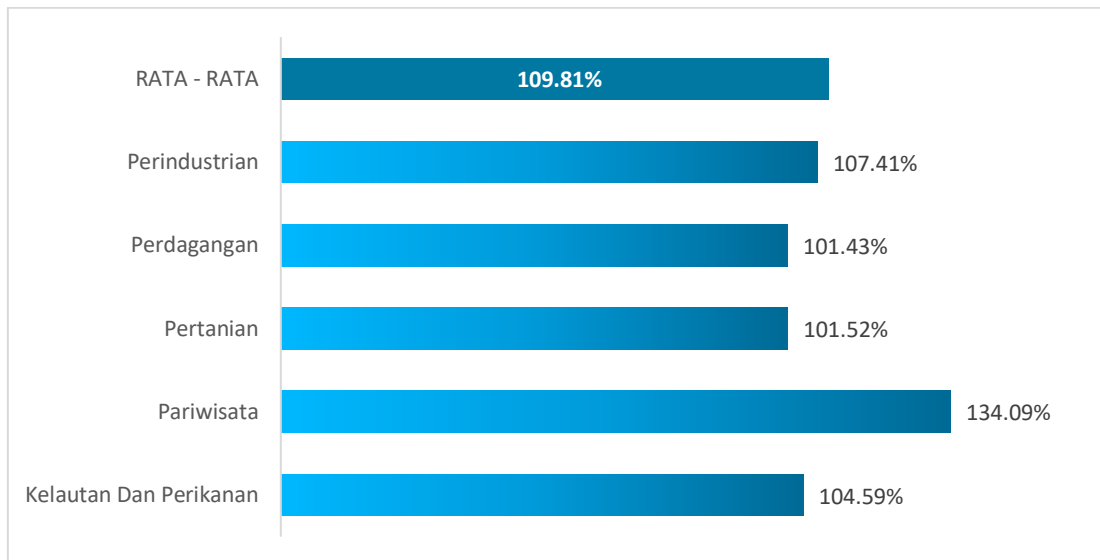


Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

3.1.3.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan yang meliputi: Urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 109,81% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Gambar 3.15
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan

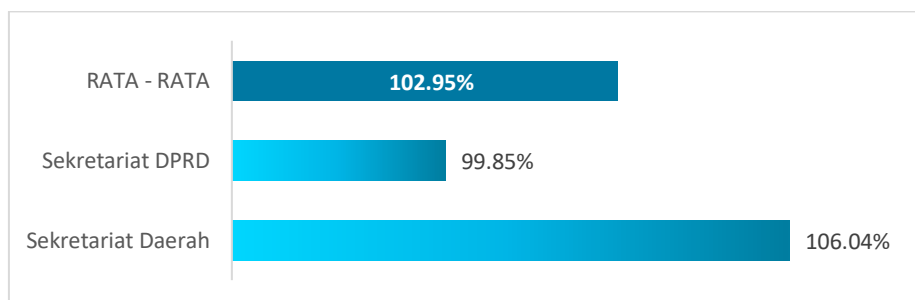


Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

3.1.3.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang meliputi urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD belum terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 102,95% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Gambar 3.16
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

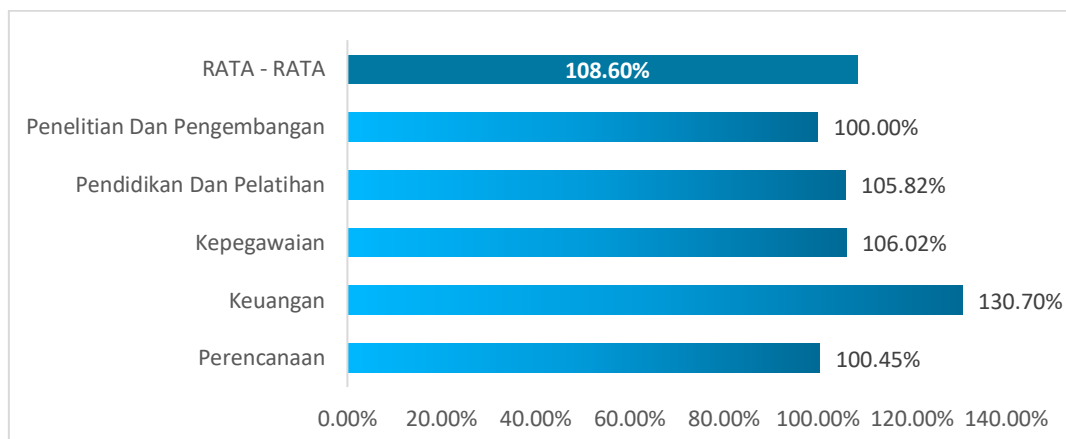


Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

3.1.3.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi fungsi: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 108,60% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Gambar 3.17
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024

3.1.3.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Inspektorat Daerah menunjukkan kinerja yang baik, di mana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 99,65% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

3.1.3.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 113,64% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

3.1.3.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 100,68% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori Sangat Tinggi.

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang diambil oleh Walikota Surabaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.32
Kebijakan Strategis Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Perdagangan dan Perindustrian	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian	a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan perindustrian; b. Perwujudan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan perindustrian
2	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Optimalisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
3	Perlindungan Anak	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Perwujudan perlindungan terhadap anak serta adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya.
4	Kepemudaan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan	Peningkatan dan pengembangan kualitas kepemudaan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5	Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023.
6	Penerimaan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengaturan Umum Pajak Dan Retribusi
7	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya
8	Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah	Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
9	Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah	Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah
10	Ketahanan Pangan	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surabaya Tahun 2023-2024	Memberikan landasan yuridis bagi RAD-PG sebagai pedoman dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat di Daerah
11	Pusat Informasi Sahabat Anak	Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak	Pembentukan dan pengelolaan Pusat Informasi Sahabat Anak
12	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Perubahan Tarif Sewa Rumah Susun
13	Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya
14	Pelimpahan Urusan Otonomi Daerah	Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan	dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan
15	Mal Pelayanan Publik	Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya	Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Sentra Pelayanan Publik (SPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
16	Pemutakhiran Data	Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya	Pengelolaan dan pemutakhiran data sasaran intervensi Pemerintah
17	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Dan/Atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730	Untuk memberikan keringanan beban masyarakat Kota Surabaya Terkait Pajak Bumi dan Bangunan
18	Pembinaan Pengawasan Rusun	Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Milik	Pembinaan dan pengawasan terhadap PPPSRS sehingga dapat berhasil guna, berdaya guna, dan memberikan perlindungan hukum kepada Pemilik, Penghuni, dan masyarakat umum dalam menjadikan Rumah Susun sebagai tempat tinggal yang sehat, nyaman, aman, dan harmonis
19	Pelayanan Command Center 112	Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Command Center 112	Penjelasan tugas dan fungsi sebagai pusat kendali terpadu serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan koordinasi antar instansi lainnya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
20	Pengelolaan Keuangan	Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan APBD
21	Transportasi	Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tarif dan Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Meningkatkan mutu pelayanan BLUD UPTD PTU dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek kepastian hukum dan kepatutan
22	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Memberikan Informasi terkait Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
23	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730	Untuk memberikan keringanan beban masyarakat Kota Surabaya terkait Pajak Daerah
24	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Pemungutan retribusi guna pengembangan tempat rekreasi dan olahraga
25	Batas Wilayah	Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Semampir Dalam Wilayah Kota Surabaya	Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan
26	Rumah Susun Sederhana Sewa	Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Penyesuaian tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat khususnya warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
27	Dana Kelurahan	Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
28	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja	Pelayanan pengolahan limbah cair dalam bentuk limbah tinja
29	Bantuan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik Kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya	Akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pemberian bantuan biaya pembayaran listrik kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya yang bersumber dari APBD
30	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730	Untuk meringankan beban masyarakat di Kota Surabaya khususnya penghuni Rumah Susun Sewa Kota Surabaya
31	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730	a. memberikan keringanan beban bagi warga masyarakat; b. meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan IMB/PBG; dan c. menjadi stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi IMB/PBG.
32	Sanksi Administratif	Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan	Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang bangunan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung
33	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya serta meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah
34	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, mudah dan berkualitas
35	Pendidikan	Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2023/2024	Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
36	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Administratif Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tahun	Meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung sekaligus sebagai stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung
37	Perdagangan dan Perindustrian	Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat	Optimalisasi penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian termasuk pengelolaan Pasar Rakyat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan umum
38	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya	peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan dan penyempurnaan ketentuan dalam hal pemberian kemudahan, kepastian dan percepatan waktu pengurusan perizinan dan non perizinan
39	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Jaminan Biaya Bongkar Reklame	meningkatkan pelayanan dan guna menjamin kepastian hukum untuk pelaksanaan pembayaran Uang Jaminan Bongkar Reklame
40	Pembangunan Kependudukan	Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2048	a. Meningkatkan informasi Kependudukan yang berkualitas; b. meningkatkan pengendalian jumlah penduduk; c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk; d. meningkatkan tingkat pendidikan penduduk; e. meningkatkan kesejahteraan penduduk; f. meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan gender yang berkeadilan dan berkesetaraan; g. meningkatkan akses dan pemerataan pemenuhan hak anak; h. meningkatkan ketakwaan, keharmonisan dan wawasan nasionalisme keluarga dalam pembangunan; dan i. meningkatkan persebaran penduduk secara berkeadilan dan berkelanjutan.

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
41	Tata Ruang	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan KLB maksimum untuk bangunan tinggi dan/atau penambahan intensitas pemanfaatan ruang dengan melakukan kontribusi terhadap pembangunan Daerah.
42	Kearsipan	Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	terwujudnya layanan arsip secara cepat, tepat, dan aman
43	Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu	a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan dan pembinaan Posyandu; dan b. mewujudkan pemenuhan wadah pemberdayaan masyarakat.
44	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame	Perubahan Atas Peraturan tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
45	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tarif Sewa Gelora Pancasila, Sirkuit Gelora Bung Tomo, Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo dan Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Pedoman terkait Tarif Sewa Gelora Pancasila, Sirkuit Gelora Bung Tomo, Lapangan Sepak Bola A,B,C Gelora Bung Tomo dan Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya
46	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke-78	untuk meringankan beban masyarakat di Kota Surabaya khususnya penghuni Rumah Susun Kota Surabaya
47	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke- 78	untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya
48	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78	untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
49	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024	a. Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
50	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78	untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
51	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai persetujuan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi
52	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyempurnaan Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya
53	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan mengenai Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat
54	Pelayanan Publik	Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
55	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2023	Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023	adanya perubahan prioritas pembangunan daerah serta kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2023 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023
56	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan	dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang bangunan terutama dalam tahap pemanfaatan bangunan agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
57	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Dan/Atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78	dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
58	Standar Pelayanan	Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	evaluasi terhadap kewenangan atas penyelenggaraan pelayanan kelurahan
59	Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kota Surabaya	Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kota Surabaya
60	Perekonomian	Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya	Pemulihan perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja yang melibatkan keluarga miskin
61	Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya	Mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
62	Bantuan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dan/Atau Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surabaya	Optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari dana Bagi Hasil Tembakau di Kota Surabaya
63	Rencana Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kota Surabaya Tahun 2024	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024
64	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah	Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah
65	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
66	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Karena Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya	Pencabutan Peraturan Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Karena Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya dikarenakan berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia
67	Jaminan Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya	Memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya
68	Pelayanan Pemakaian Rumah Susun	Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun	Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan meningkatkan pelayanan di bidang rumah susun serta sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan kebutuhan hukum
69	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila	Untuk memberikan keringanan beban kepada masyarakat di Kota Surabaya terkait Pajak Bumi dan Bangunan
70	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya terkait Pajak Daerah
71	Bantuan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pembayaran Listrik Kepada Lanjut Usia Tunggal Keluarga Miskin di Kota Surabaya	Perluasan sasaran pemberian bantuan berupa layanan fasilitas pembebasan biaya tagihan listrik bagi lanjut usia tunggal dari Keluarga Miskin di Kota Surabaya
72	Protokol Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya	Pencabutan Peraturan tentang Penerapan Protokol Kesehatan
73	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
74	Perdagangan dan Perindustrian	Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian Bidang Metrologi Legal	Peningkatan pengawasan Metrologi Legal terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran
75	Air Bersih	Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya	Pembebasan tarif pemakaian air minum bagi Lanjut Usia Tunggal dan Warakawuri
76	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik perizinan dan non perizinan
77	Transportasi	Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyempurnaan ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Surabaya
78	Kesehatan (Tumbuh kembang anak)	Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2023 tentang Sekolah Orang Tua Hebat	Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat dalam rangka pemberian pelayanan edukasi, pengasuhan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan pada keluarga-keluarga beresiko stunting melalui pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat di kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita
79	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah
80	Pelayanan Publik	Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya	Efektifitas pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat
81	Rumah Susun	Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun	Percepatan pelaksanaan percepatan pelayanan rekomendasi pertelaan, pengesahan pertelaan dan akta pemisahan serta dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
82	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya khususnya penghuni Rumah Susun Kota Surabaya
83	Perdagangan dan Perindustrian	Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan	Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan umum
84	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta dalam rangka mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya
85	Perizinan	Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan	Penyempurnaan ketentuan mengenai penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung agar pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien
86	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelanggaran Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Di Lapangan Pada Saat Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan	a. memberikan keringanan terhadap beban bagi warga masyarakat; b.meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan PBG; dan c. menjadi stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi PBG.
87	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Bunga Dan/Atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya terkait Pajak Bumi dan Bangunan
88	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya terkait Pajak Daerah
89	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya serta meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
90	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan melihat perkembangan masyarakat
91	Bantuan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin di Daerah
92	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	penyempurnaan ketentuan terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah dan ketentuan penyediaan pemakaman untuk pembangunan perumahan/pengembang perumahan pada hunian rumah susun
93	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya
94	Inovasi	Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Inovasi Daerah	a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota ATA 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.33 sebagai berikut.

Tabel 3.33
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
1	Implementasi sistem meritokrasi secara riil berdasarkan kapasitas, kemampuan dan prestasi	Telah dilaksanakan Manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil.	Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas serta berakhlak.
2	Meningkatkan kompetensi SDM pada ASN secara berkelanjutan	Telah dilaksanakan Peningkatan kompetensi SDM pada ASN baik melalui pendidikan formal dan non formal. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal melalui peningkatan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik melalui mekanisme tugas belajar dengan biaya mandiri atau tugas belajar atau beasiswa. Sedangkan peningkatan pendidikan melalui pendidikan non formal melalui pelaksanaan pelatihan/kursus/workshop/ baik bidang teknis, fungsional, manajerial dan sosiokultural yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanah Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.	Peningkatan kompetensi ASN Pemerintah Kota Surabaya.
3	Perlu adanya peningkatan SDM bidang kesehatan dalam pemenuhan layanan dasar, antara lain di RSUD dan Puskesmas	Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan melalui rekrutmen PPPK dan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan melalui pelaksanaan pelatihan/kursus/workshop yang dilaksanakan baik secara mandiri atau difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.	Pengembangan kapasitas SDM kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesehatan
4	Perlu adanya database rekam jejak pegawai ASN termasuk kualitas, kompetensi dan kinerjanya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Telah dikembangkan aplikasi e-SDM yang memuat dokumentasi ASN baik data dasar, kompetensi, beserta riwayat kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.	Administrasi kepegawaian menjadi tertib dan tertata dengan baik

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
5	Melakukan pemenuhan kebutuhan ASN di perangkat daerah (jabatan yang belum terisi), dengan memperhatikan jumlah ASN yang pensiun dan non job	Telah dilakukan Analisa Beban Kerja (ABK) sehingga dapat memproyeksi kebutuhan ASN termasuk di dalamnya kebutuhan yang diakibatkan oleh adanya tenaga ASN yang pensiun. Pemenuhan kebutuhan ASN dilakukan melalui rekrutmen PPPK dengan memperhatikan ketentuan dari BKN dan Kemenpan-RB.	Pemenuhan kebutuhan ASN di Perangkat Daerah
6	Perlu adanya rotasi dan mutasi ASN yang menempati jabatan berpuluh- puluh tahun	Telah dilaksanakan rotasi dengan mempertimbangkan masa kerja jabatan dan lokasi tempat kerja dengan tempat tinggal yang memperhatikan kebutuhan atas formasi sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK) di Perangkat Daerah.	Peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
7	Penempatan ASN berbasis wilayah tempat tinggal (zonasi)	Telah dilaksanakan rotasi dengan mempertimbangkan masa kerja jabatan dan lokasi tempat kerja dengan tempat tinggal yang memperhatikan kebutuhan atas formasi sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK) di Perangkat Daerah.	Peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
8	Mengevaluasi kegiatan atau aktivitas fisik di sekolah kebangsaan	Sekolah Kebangsaan dilaksanakan melalui Pembinaan Paskibraka Tahun 2023 yang dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dari BPIP dan dilakukan secara terukur bersama pelatih dari Garnisun.	Evaluasi dan keberlanjutan kegiatan wawasan kebangsaan di Kota Surabaya.
9	Melakukan sosialisasi tentang materi kebangsaan melalui media sosial agar generasi muda atau pelajar tertarik mengikuti sekolah kebangsaan dengan melibatkan organisasi kepemudaan	Materi Wawasan Kebangsaan telah disosialisasikan melalui Media Sosial Bakesbangpol. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, karang taruna dan tokoh masyarakat di tingkat kelurahan di Kota Surabaya.	Penyebarluasan Informasi terkait Materi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat termasuk generasi muda.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
10	Evaluasi terhadap indikator ketenteraman dan ketertiban umum agar berbanding lurus dengan kondisi riil di masyarakat	Nilai Indeks Kepedulian Sosial Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 97,86 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 97,67. Peningkatan kepedulian sosial di Kota Surabaya ditunjukkan antara lain dengan 1) Rasa aman dan toleransi dalam beribadah 2) Gotong royong dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan sebagainya. Selain itu BAKESBANGPOL bersama tim terpadu penanganan konflik mencegah dan menurunkan potensi konflik IPOLEKSOSBUDKAM melalui mediasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.	Evaluasi pencapaian ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
11	Melakukan kajian terkait pemetaan dan identifikasi wilayah rawan bencana	Pemetaan dan identifikasi wilayah rawan bencana dituangkan dalam Kajian Resiko Bencana Kota Surabaya per wilayah Kelurahan yang akan diajukan penetapan oleh Bapak Walikota Surabaya.	Pemetaan wilayah per Kelurahan yang memiliki potensi kerawanan bencana untuk diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan.
12	Memberikan informasi, edukasi dan advokasi dalam masyarakat berkaitan dengan penanggulangan bencana	Pada Tahun 2023 BPBD telah memberikan pelayanan sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada sekolah, puskesmas, rumah sakit, hotel, mall, perkantoran dan usaha lainnya serta komunitas relawan. Sosialisasi dan edukasi kebencanaan dilakukan baik secara langsung dan melalui media sosial secara rutin dan berkala.	Peningkatkan kesadaran dan wawasan tentang kebencanaan kepada masyarakat agar mampu melakukan upaya pengurangan risiko bencana secara mandiri.
13	Perlu inovasi memasukkan kurikulum penanggulangan bencana pada satuan pendidikan	BPBD telah melaksanakan amanat dari Permendikbud 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dengan melakukan sosialisasi ke masing - masing sekolah dan meminta sekolah tersebut membentuk Tim Tanggap Bencana di Sekolah. Sampai tahun 2023 telah terbentuk 391 Tim Tanggap Bencana di jenjang SMP. BPBD telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait kurikulum penanggulangan bencana.	Penyiapan Satuan Pendidikan yang tanggap terhadap bencana dan dapat melakukan upaya penanganan dini terhadap bencana sebelum petugas BPBD dan instansi terkait datang ke lokasi yang terdampak bencana.
14	Perlu adanya kajian resiko bencana berkaitan dengan kerawanan bangunan tua dan kondisi pohon-pohon besar	Terkait dengan kajian kebencanaan untuk kerawanan bangunan tua dan kondisi pohon-pohon besar akan didetailkan dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). BPBD berkoordinasi lebih lanjut dengan DPRKPP, DLH dan Kecamatan untuk mendata bangunan tua dan pohon-pohon besar yang rawan roboh/tumbang.	Tersedianya data dan kajian resiko bencana terkait bangunan dan pohon yang rawan roboh/tumbang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
15	Menyediakan rumah perlindungan sebagai tempat evakuasi	Pada tahun 2023 BPBD telah melakukan pemetaan titik kumpul evakuasi hunian sementara (huntara) skala kelurahan. Pada tahun 2024 BPBD bersama dengan PD dan instansi terkait menyiapkan lahan/fasilitas umum/fasilitas sosial skala RW yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana.	Penyediaan tempat evakuasi dan hunian sementara pada saat terjadi bencana.
16	Peningkatan SDM, Sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan pada command centre	BPBD melaksanakan beberapa pelatihan diantaranya pengoperasian aplikasi Sistem Peringatan Dini, Telemedicine dan Manajemen Informasi serta melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap sarana dan prasarana yang menunjang operasional petugas command center.	Peningkatan kualitas command center untuk menunjang pelayanan yang lebih optimal.
17	Evaluasi kelayakan dan keamanan transportasi perahu tambang agar tidak terjadi kecelakaan saat beroperasi	Kewenangan terkait perijinan operasional perahu tambang berada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Terkait kelayakan dan keamanan perahu tambang, BPBD Kota Surabaya berperan melakukan pendataan kepemilikan usaha perahu tambang serta melakukan sosialisasi terkait standar kelayakan operasional perahu tambang kepada pemilik usaha perahu tambang. Selain itu BPBD Kota Surabaya memberikan peringatan cuaca ekstrem untuk tidak melakukan aktivitas sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan.	Upaya antisipasi kecelakaan Perahu tambang melalui sosialisasi dan edukasi keamanan dan keselamatan transportasi perahu tambang.
18	Intensifikasi dan monitoring kepada perangkat daerah yang memiliki potensi PAD agar tidak terjadi kebocoran	Telah dilakukan pengembangan aplikasi untuk memonitoring progress pendapatan dari Perangkat Daerah. Selain itu, untuk meningkatkan PAD dilakukan melalui penelitian terhadap data-data perpajakan PBB dan BPHTB, serta dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi dan potensi pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.	Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
19	Mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih inovatif menyiapkan strategi cadangan guna pencapaian target pendapatan	Telah dikembangkan sistem aplikasi berbasis online guna mencegah kebocoran pajak daerah dan bekerja sama dengan lintas sektor dalam upaya menggali potensi retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah.	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
20	Melakukan pendataan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset yang dimiliki untuk program pemberdayaan masyarakat	BPKAD bersama dengan Perangkat Daerah lainnya telah melakukan pendataan aset-aset potensial yang dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan PAD. Pada tahun 2023, penggunaan lahan untuk proyek padat karya meningkat menjadi 34 lokasi dibandingkan tahun 2022 sebanyak 11 lokasi	Pendataan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan PAD
21	Penentuan target pendapatan dan belanja yang rasional sehingga dimungkinkan tercapai	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan baik realisasi pendapatan maupun realisasi belanja perangkat daerah untuk memantau kondisi dan melakukan rencana kebutuhan belanja perangkat daerah. Selain itu, terkait dengan pendapatan dan belanja transfer, telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Target pendapatan dan belanja yang rasional
22	Penerjemahan janji kepala daerah di RPJMD pada program disetiap perangkat daerah secara konkret	Penerjemahan janji Kepala Daerah di RPJMD pada program disetiap Perangkat Daerah secara konkret diimplementasikan dalam tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator opini BPK dan target kinerja WTP. Adapun target yang sudah dicapai mulai Tahun 2021-2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini diupayakan melalui : 1. Pendampingan kepada 63 puskesmas yang pada awal Tahun 2022 menjadi BLUD supaya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) 2. Pengembangan aplikasi penyusunan LKPD disesuaikan dengan perubahan kode akun yang telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan peraturan yang baru 3. Pencatatan aset yang dapat dipertanggungjawabkan 4. Meminimalkan belanja silang yaitu penyesuaian belanja modal menjadi belanja barang dan jasa atau sebaliknya 5. Mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.	Penerjemahan janji kepala daerah di RPJMD dengan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya ditunjukkan dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui indikator Opini BPK

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
23	Perlu upaya pengentasan kemiskinan yang konkret dan berkolaborasi dengan seluruh OPD	Telah dilaksanakan updating data kemiskinan melalui musyawarah kelurahan setiap bulannya dan berdasarkan data dimaksud, telah dilakukan intervensi yang terintegrasi oleh semua Perangkat Daerah kepada warga miskin Kota Surabaya melalui upaya peningkatan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pemberdayaan ekonomi warga	Data penduduk miskin terupdate setiap bulannya sehingga Perangkat Daerah pelaksana program dan kegiatan kemiskinan dapat menggunakan data tersebut untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, holistik, transparan dan akuntabel sehingga warga miskin Kota Surabaya dapat segera tergraduasi
24	Sinkronisasi target pencapaian tahun anggaran 2022 sesuai dengan RPJMD	Telah dilakukan penyesuaian target indikator tahun 2023 dengan mempertimbangkan capaian target indikator tahun 2022 dan target yg tercantum dalam RPJMD serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres ketercapaian target indikator yang telah ditetapkan tersebut	Sinkronisasi target indikator
25	Evaluasi terkait dengan indikator-indikator pada LKPJ dan implementasinya pada penerapan capaian riil di masyarakat	Capaian indikator telah dilakukan verifikasi bersama terutama terkait validitas kinerja yang dilaporkan, penghambat pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian dan evaluasi yang akuntabel
26	Evaluasi terkait dengan indikator-indikator pada LKPJ dan implementasinya dibandingkan dengan serapan anggarannya	Pencapaian kinerja mengoptimalkan seluruh sumber pembiayaan sehingga APBD dapat dimanfaatkan untuk program dan pekerjaan prioritas lainnya.	Optimalisasi belanja dalam pencapaian kinerja

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
27	Capaian indikator perangkat daerah seharusnya berbanding lurus dengan pendapatan, capaian indikator yang tinggi namun anggaran pendapatan tidak tercapai menunjukkan kinerja yang tidak sinkron	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator maupun realisasi pendapatan secara berkala guna mengatasi permasalahan yang dapat menghambat tercapainya kinerja Perangkat Daerah	Sinkronisasi antara konerja OPD Penghasil dengan pendapatan
28	Perlunya sosialisasi terhadap perubahan kebijakan terkait program serta anggaran pendapatan dan belanja	Telah dilakukan sosialisasi dan pemberitahuan secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah terkait perubahan kebijakan	Sosialisasi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran
29	Agar lebih diperhatikan dan segera ditindaklanjuti terkait realisasi pokok-pokok pikiran DPRD	Pokok-pokok pikiran DPRD telah tercantum dalam dokumen perencanaan serta dokumen penganggaran Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan yg berlaku	Tindak lanjut Pokok Pikiran DPRD
30	Mengevaluasi kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pemberian beasiswa	1. Telah dilakukan evaluasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memastikan beasiswa tepat sasaran. 2. Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama pada tahun 2023 sebanyak 13 Perguruan Tinggi, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 11 Perguruan Tinggi. Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan beasiswa pendidikan kepada 3.186 mahasiswa ber KTP Surabaya.	Sebagai upaya peningkatan pendidikan warga Kota Surabaya untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi, khususnya bagi mahasiswa dari Keluarga Miskin di Kota Surabaya sehingga diharapkan dapat meningkatkan harapan lama sekolah di Kota Surabaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
31	Perlu adanya inisiatif khusus untuk pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu	Pemerintah Kota Surabaya telah mengundang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, serta petunjuk teknisnya yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya.	Upaya bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Surabaya untuk menjamin hak masyarakat miskin di Daerah dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum
32	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya agar melibatkan RT, RW dan LPMK	Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama telah melibatkan RT, RW, dan LPMK dalam rangka memberikan pemahaman agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan informasi yang disampaikan dapat tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Surabaya. Selain itu, dalam proses penyusunan Perda dan Perwali juga melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak peraturan yang dimaksud.	Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota. Sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan Walikota Surabaya termasuk RT, RW, dan LPMK bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isi dan maksud peraturan tersebut, serta untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.
33	Perlu melakukan evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pada OPD yang beban kerjanya tidak berimbang	1. Telah dilakukan monev Analisis Beban Kerja (ABK) secara periodik. 2. Telah dilakukan evaluasi kelembagaan dengan hasil akhir masuk kategori P-5 (skor 81-100) dimana skor Perangkat Daerah paling rendah 96,7 dan rata-rata skor seluruh Perangkat Daerah 99,2. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.	Efektivitas dan efisiensi kinerja OPD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
34	Mengoptimalkan fungsi pendapatan bidang pariwisata di Disbudporapar serta melakukan kajian pembentukan UPTD	Bagian Organisasi telah melakukan pendampingan penyusunan kajian pembentukan UPTD sarana prasarana olahraga untuk optimalisasi pendapatan di bidang olahraga.	Efektivitas kelembagaan dalam optimalisasi pendapatan
35	Meningkatkan kapasitas SDM di Kecamatan dan kelurahan	Peningkatan Kapasitas SDM di Kelurahan dan Kecamatan dilakukan dengan: 1. In House Training Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kasie pembangunan dan ketertiban kecamatan dan kelurahan; 2. Diklat Pertanahan dan tertib administrasi pertanahan untuk Lurah; 3. Pemberian materi komunikasi efektif untuk pelayanan di kelurahan dan kecamatan, dengan peserta camat, lurah, LPMK dan perwakilan RT dan RW; 4. Sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi basis data kewilayahan untuk pendataan bangunan dengan peserta dari sekretaris kecamatan dan staf kelurahan.	Peningkatan Kapasitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
36	Melakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan yang berkaitan dengan pemenuhan layanan pada masyarakat	Telah dilakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan, rehabilitasi dan perbaikan 7 (tujuh) kantor kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kantor kelurahan. Pemenuhan sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan juga dilakukan melalui pengadaan barang perkantoran penunjang pelayanan seperti printer, laptop, kursi, dan sebagainya oleh BPBJAP yang tercantum pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kelurahan dan kecamatan
37	Mengevaluasi pengadaan barang perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang disesuaikan dengan kebijakan TKDN di Pemerintah Pusat agar kinerja OPD tidak terhambat	1. Telah dilakukan koordinasi dengan kementerian perdagangan dan perindustrian terkait permasalahan dan solusi terkait pengadaan barang perkantoran di Perangkat Daerah 2. Telah disampaikan Surat Edaran perihal Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2023 nomor 910/23902/436.2.2/2022 dan Surat Edaran perihal Pelaksanaan Anggaran TA 2023 nomor 000.3 /6804/436.2.2/2023 kepada Perangkat Daerah untuk memastikan syarat TKDN tidak menjadi hambatan dalam pengadaan barang perkantoran	Pengadaan barang berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan penggunaan produk dalam negeri

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
38	Perlu meningkatkan koordinasi dengan satuan empat terkait kegiatan-kegiatan yang ada di OPD	Telah dilakukan koordinasi secara rutin antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Pengadaan Barang Jasa Administrasi Pembangunan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.	Koordinasi yang efektif untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah
39	Menyusun regulasi berkaitan dengan tindak lanjut barang milik daerah ataupun barang sitaan yang dapat menghasilkan PAD atau perlu dimusnahkan	Pengadaan barang milik daerah termasuk yang menghasilkan PAD dikoordinasikan antara BPKAD dengan BPBJAP, untuk kemudian pengelolaan BMD tersebut dilaksanakan oleh BPKAD. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh BPKAD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016, Perda 1 Tahun 2020 dan Perwali 109 Tahun 2021.	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan PAD dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
40	Perlu upaya untuk mengatasi dampak inflasi pada berbagai sektor	Upaya untuk mengatasi dampak inflasi yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok dilaksanakan secara survei dan dilakukan setiap hari di beberapa pasar Kota Surabaya 2. Melakukan Operasi Pasar Beras Medium Bulog SPHP kepada pedagang tradisional di Kota Surabaya 3. Melakukan Operasi Pasar minyak goreng bekerjasama dengan PT. Megasurya dan PT. Mahesi Agri Karya selaku produsen Minyakita untuk menyuplai ketersediaan Minyakita di 17 lokasi pasar di Kota Surabaya 4. Pasar murah dalam rangka penyediaan komoditas pangan murah bekerjasama dengan distributor dilakukan di kelurahan - kelurahan 5. Gerakan Pangan Murah 6. Tanam cepat panen yang dilaksanakan serentak bersama kelompok tani urban farming dan para petani konvensional se Kota Surabaya 7. Kerjasama antar daerah dengan daerah penghasil bahan pokok 8. Koordinasi dengan TPID skala kota tiap bulan untuk monitoring dan evaluasi tingkat inflasi di Kota Surabaya	Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting di Kota Surabaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
41	Perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas yang harus dilakukan terhadap kinerja BUMD	1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD dengan melibatkan tenaga ahli yang dilakukan secara : - bulanan : penyelesaian permasalahan meliputi permasalahan optimalisasi aset BUMD dan lain sebagainya - triwulanan : menilai tingkat kesehatan 9 BUMD mencakup aspek keuangan, operasional, dan administrasi sesuai modul dari Kemendagri - tahunan : evaluasi laporan tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melakukan seleksi secara terbuka untuk memperoleh anggota Direksi, Badan/Dewan Pengawas dan Komisaris yang profesional dan kompeten 3. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang efektif : - Peningkatan jumlah BUMD yang berpredikat sehat pada tahun 2023 sebanyak 6 BUMD dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4 BUMD - Peningkatan laba bersih BUMD tahun 2023	Optimalisasi dan peningkatan kinerja BUMD
42	Penerapan ekonomi inklusif untuk dijadikan dasar arah pelaksanaan indikator program guna perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat	Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan inklusifitas pembangunan ekonomi melalui : 1. Perluasan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk UMKM melalui sosialisasi dan pembinaan pemanfaatan produk-produk lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Optimalisasi pemanfaatan produk keuangan dalam program perangkat daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Penerapan ekonomi inklusif
43	Perlu adanya sinergi dengan organisasi perangkat daerah lainnya terkait fasilitasi komunikasi pimpinan	1. Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Pembuatan Sambutan/Greeting dimana dalam tahapan penyusunan telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk penentuan jadwal dan lokasi, serta materi yang mencakup daftar tamu undangan dan update data/isu strategis Kota Surabaya; 2. Telah disampaikan Surat Pemberitahuan kepada semua Perangkat Daerah terkait pembuatan Materi Paparan KDH/WKDH harus disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait dan telah didiskusikan dengan Tenaga Pakar/Ahli, Sekretaris Daerah, Asisten serta diterima oleh Bapak Walikota pada H-2 pelaksanaan kegiatan; 3. Telah dilakukan rekapitulasi dan arsip dokumentasi video sambutan/ greeting untuk evaluasi dan perbaikan kedepannya.	Komunikasi Pimpinan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
44	Meningkatkan bantuan permodalan kepada UMKM agar usahanya tetap berkembang	1. Pemberian pinjaman permodalan oleh BPR Surya Artha Utama Perseroda bagi UMKM melalui produk pinjaman khusus UMKM yaitu : - PUSPITA (Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh) plafond maksimal 5 juta dan bunga 3% per tahun dengan pola Pinjaman Kelompok - SI-KUMIS (Si-Kredit Usaha Mikro Surabaya) plafond di atas 5 juta sampai dengan 20 juta bunga 5% per tahun 2. BPR Surya Artha Utama aktif melakukan sosialisasi bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan untuk memperkenalkan program pinjaman permodalan 3. BPR Surya Artha Utama melakukan pemberian penghargaan kepada UMKM dengan kategori UMKM bebas rentenir, UMKM naik kelas (Puspita naik ke Si-Kumis), UMKM bebas dari keluarga miskin (Gakin), dan UMKM usaha berkembang Penerima manfaat program pemberian pinjaman permodalan mengalami peningkatan, tahun 2023 ada 1.409 UMKM dibanding tahun 2022 ada 848 UMKM	Program Puspita dan SI-Kumis diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesulitan permodalan bagi UMKM
45	Mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bersama UMKM untuk penyampaian produk BPR Surya Artha Utama	BPR Surya Artha Utama berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk : 1. Pengembangan di beberapa pasar di Surabaya yaitu Pasar Wisata Penjaringan Sari, Pasar Raci, Pasar Wisata Harmoni Keputih dengan memasang neon box pembayaran QRIS (cashless) di stand pedagang serta melakukan pendampingan pengoperasian QRIS bagi pedagang 2. Melakukan sosialisasi produk pinjaman PUSPITA dan SI - KUMIS di 9 SWK di Kota Surabaya dan pelaku UMKM di SWK telah memanfaatkan program pinjaman untuk menambah permodalan	Kolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM
46	Membentuk UPTD Pengelola cagar budaya	Telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Wali Kota dan pembentukan Tim Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.	Pembentukan tim Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
47	Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, agar sarana dan prasarana lebih dioptimalkan untuk kebutuhan atlet-atlet	Pada tahun 2023, Disbudporapar telah melakukan berbagai peningkatan sarana prasarana olahraga di Kota Surabaya, antara lain : 1. Peningkatan fasilitas olahraga pada Gelora Bung Tomo (GBT), Gelora 10 Nopember serta Lapangan Thor sesuai dengan standart FIFA sehingga dapat dipergunakan dalam event Piala Dunia U-17. 2. Pemeliharaan Gelora Pancasila, Softball dan Hockey, Gelanggang Remaja sehingga dapat dimaksimalkan penggunaannya oleh atlet-atlet Surabaya	Peningkatan sarana prasarana olahraga untuk kebutuhan atlet
48	Adanya kerjasama dengan Kecamatan, Satpol PP dan Polsek atau pemangku wilayah dalam mengatur batas-batas wilayah untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja	Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman kepada pemuda tentang bahaya HIV AIDS, kenakalan remaja dan narkoba terhadap 775 pemuda di 5 Kecamatan yang menjadi prioritas berdasarkan hasil koordinasi dengan BNN, Kepolisian , Kejaksaan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan kegiatan patroli Asuhan Rembulan setiap malam dalam rangka pengawasan kegiatan masyarakat termasuk untuk mendeteksi dan penanganan kenakalan remaja yang dibagi menjadi 5 tim gabungan yang bergerak pada 5 wilayah Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan serta bekerjasama dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Kogartap III Surabaya. Pemuda dibawah 18 tahun dapat diikutkan dalam sekolah kebangsaan.	Kerja sama dengan berbagai pihak untuk upaya pencegahan kenakalan remaja
49	Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif	1. Optimalisasi pemanfaatan Cagar Budaya Bunker Tegalsari sebagai Co Working. 2. Optimalisasi pemanfaatan Kantor Pos Kebon Rojo sebagai Pos Bloc. 3. Optimalisasi pemanfaatan Rumah Lahir Bung Karno sebagai Museum Modern yang menggunakan mapping 4. Bangunan Balai Pemuda sebagai sarana pelatihan dan seminar ekonomi kreatif Pada tahun 2023, terdapat 37 komunitas / 3 lembaga / 0 sanggar / 15 perguruan tinggi yang memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan ekonomi kreatif	Pemanfaatan pembangunan cagar budaya sebagai wadah edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
50	Perlu adanya pengawasan khusus terkait warga negara asing	Terhadap permohonan administrasi kependudukan orang asing telah dilaksanakan verifikasi data sesuai dengan ketentuan sampai dengan terbitnya dokumen administrasi kependudukan orang asing. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan Tim Pemantauan Orang Asing melakukan pengawasan rutin orang asing di tempat yang ditengarai terdapat orang asing. Selain itu diberlakukan denda bagi orang asing yang terlambat melakukan pelaporan ijin tinggal (ITAS/ITAP).	Peningkatan pengawasan keberadaan orang asing di Surabaya.
51	Penyederhanaan administrasi birokrasi dalam pengurusan data kependudukan sehingga selesai di tingkat kelurahan	Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan telah dilaksanakan, selain itu juga dilaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Balai RW pada jam kerja dan pelayanan malam di hari Selasa. Sebagai layanan tambahan, Disdukcapil juga memiliki inovasi RT Kalimasada dimana warga dapat mengajukan pelayanan administrasi kependudukan melalui Ketua RT yang telah bekerjasama.	Pelayanan prima, cepat, dan berintegritas selesai di tingkat kelurahan.
52	Validasi data kependudukan khususnya terkait dengan profesi dan tingkat pendidikan	Telah dilaksanakan upaya kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan beberapa perguruan tinggi untuk update data pendidikan terakhir. Terdapat inovasi Kalimasada dimana Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat mendorong warga untuk mengajukan update data kependudukan (profesi, tingkat pendidikan, dll). Dengan adanya kemudahan pelayanan adminduk mendorong peningkatan jumlah permohonan pelayanan adminduk yang signifikan.	Pemutakhiran data kependudukan terkait profesi dan tingkat pendidikan untuk intervensi yang tepat sasaran
53	Melakukan kajian SSH terkait nilai dan kuota PMT (pemberian makanan tambahan)	Dinas Kesehatan telah melakukan kajian Standar Satuan Harga (SSH) pemberian makanan tambahan (PMT) bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Sedangkan sasaran penerima PMT ditentukan berdasarkan jumlah balita di wilayah kerja Puskesmas.	Tersusunnya menu PMT dengan standar angka kecukupan gizi (AKG) sesuai dengan kebutuhan balita
54	Terkait layanan kesehatan agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk peningkatan kualitas layanan	Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk peningkatan kualitas layanan baik di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
55	Diharapkan layanan telemedicine dilakukan untuk penyakit umum dan dilaksanakan di semua puskesmas yang ada di Surabaya	Puskesmas Kota Surabaya telah melaksanakan layanan <i>telemedicine</i> yang memberikan layanan konsultasi diagnostic antar fasilitas layanan kesehatan.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
56	Ketuntasan penanganan stunting yang berkelanjutan	Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan intervensi berkelanjutan kepada balita stunting melalui Pendampingan Balita, Pemberian susu PKMK dan kudapan tinggi protein hewani yang diberikan sampai dengan balita lulus stunting, pra stunting dan lulus usia. Ketuntasan penanganan stunting dimaksudkan untuk mengentaskan balita stunting dan mencegah terjadinya stunting baru. Salah satu upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus stunting baru adalah identifikasi balita dengan status weight faltering atau data timbang naik tidak sesuai kenaikan berat badan minimal (KBM) yang diperoleh dari hasil penimbangan Posyandu setiap bulan.	Penurunan prevalensi Balita stunting
57	Optimalisasi kegiatan dan anggaran untuk posyandu lansia	Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah melaksanakan Kegiatan Posyandu Lansia minimal 1 bulan sekali, dalam bentuk senam lansia dan pemeriksaan kesehatan.	Peningkatan kualitas kesehatan lansia
58	Perlu adanya intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya pada nelayan agar bisa meningkatkan pendapatan	Telah dilakukan pemberian bantuan perahu wisata yang dapat dioperasikan untuk membawa pengunjung berwisata di sekitar Taman Suroboyo dan THP Kenjeran sebagai tambahan penghasilan keluarga nelayan di saat nelayan tidak bisa melaut. Selain itu, juga dilakukan program pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap berupa perahu, jaring/gillnet, dan sarana penunjang lainnya.	Peningkatan pendapatan nelayan di Kota Surabaya
59	Mengoptimalkan produk urban farming supaya bisa menjangkau supermarket di Kota Surabaya	Telah dilakukan pendampingan teknis budidaya tanaman mulai dari persiapan lahan atau media tanam, pembibitan tanaman, penanaman bibit tanaman, perawatan tanaman dan teknik pemanenan serta teknik pasca panen mulai dari perlakuan sortir dan packaging hasil panen dengan tujuan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas hasil panen produk urban farming sehingga bisa mencapai pasar yang lebih luas	Optimalisasi jangkauan pemasaran produk urban farming

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
60	Perlu adanya inovasi dan peningkatan kualitas dari budidaya maggot dan perikanan	Telah dilakukan pelatihan budidaya perikanan dengan penerapan teknologi tepat guna, melalui pemanfaatan pakan alternatif seperti maggot untuk budidaya perikanan yang dapat mengurangi biaya operasional dengan meminimalisir penggunaan pakan pabrikan. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi bagi peternak untuk membentuk kelompok dan mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan akses permodalan serta dilakukan pelatihan terkait kewirausahaan kepada pembudidaya perikanan agar dapat mengelola keuangan secara mandiri.	Peningkatan kualitas dari budidaya maggot dan perikanan
61	Perlu adanya pelatihan pembudidayaan tanaman Toga dan hidroponik terhadap masyarakat untuk memaksimalkan program padat karya	Telah dilakukan pelatihan dan pendampingan teknik budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA), tanaman hortikultura dan tanaman hidroponik yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian sarana budidaya sebagai bahan praktek pelatihan dan penerapan Program Padat Karya.	Optimalisasi Program Padat Karya melalui pembudidayaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan tanaman hidroponik
62	Evaluasi dan sinkronisasi aplikasi pada seluruh OPD	Telah dilakukan penyederhanaan aplikasi utamanya portal layanan publik, salah satunya melalui aplikasi wargaku. Aplikasi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota telah dipetakan dan dikelola sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Kemudahan Akses masyarakat terhadap layanan publik
63	Mengintegrasikan aplikasi surabayagoid dengan Website seluruh OPD	Pada situs surabaya.go.id telah disediakan menu untuk dapat mengakses situs perangkat daerah. Seluruh situs perangkat daerah telah melalui pengecekan terhadap prosedur keamanan informasi.	Kemudahan akses masyarakat terhadap informasi
64	Menambah kecepatan bandwidth pada lokasi pelayanan publik	Telah dilakukan penambahan akses internet untuk peningkatan layanan publik yang ada di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, BLC, RW, taman, SWK, dan Pasar. Berdasarkan evaluasi berkala yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa kebutuhan kecepatan pada lokasi pelayanan publik tersebut masih memadai.	Peningkatan dan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
65	Koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait peningkatan fungsi CCTV	Telah dilakukan koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan terkait dengan pemetaan titik - titik lokasi CCTV yang ada di Kota Surabaya. CCTV yang dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui Surabaya Intelligent Transport System (SITS) berfungsi untuk memonitoring kondisi lalu lintas bekerja sama dengan Polrestabes untuk Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sedangkan untuk objek vital dan pemantauan daerah rawan kejahatan, pengelolaan CCTV dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.	Peningkatan pemantauan dan pengawasan keamanan Kota Surabaya
66	Pemulihan sektor UMKM diantaranya dengan pembentukan kelompok usaha baru yang lebih adaptif	Untuk mendorong terbentuknya kelompok usaha baru telah dilaksanakan survey lapangan terhadap calon pelaku usaha mikro baru oleh pendamping UMKM di setiap kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian pelatihan atau workshop. Kelompok usaha baru yang telah terbentuk diberikan fasilitasi berupa legalisasi usaha dan fasilitasi sertifikasi produk bagi usaha mikro, fasilitasi pemasaran melalui kegiatan pameran, gelar produk dan bazar pada event-event Pemerintah Kota maupun kerjasama dengan instansi lainnya, serta Surabaya Kriya Gallery.	Pembentukan kelompok usaha baru yang lebih adaptif untuk pemulihan ekonomi utamanya sektor UMKM
67	Inovasi digitalisasi dalam pengelolaan koperasi di Surabaya	Untuk mendorong digitalisasi dalam pengelolaan koperasi di Kota Surabaya telah dilakukan fasilitasi antara pengembang aplikasi dengan gerakan koperasi sehingga koperasi dapat memenuhi kebutuhan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi.	Pengelolaan koperasi dengan memanfaatkan teknologi informasi
68	Perlu adanya pengawalan, pengawasan dan pengendalian dalam pendistribusian produk berbahaya seperti gas, bahan bakar dan produk yang mengandung zat berbahaya	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, wewenang terkait pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota	Pengawasan Bahan Berbahaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
69	Fasilitasi e-peken agar mempunyai harga yang bersaing dan dapat go public	Telah dilakukan penetapan Harga Acuan Tertinggi Peken (HATP) secara periodik setiap bulan serta fasilitasi perkulakan di distributor atau agen bahan pokok agar harga yang ada di e-Peken tidak lebih mahal dibandingkan harga pada Toko Swalayan. Masyarakat umum telah mendapat akses untuk melakukan transaksi di e-Peken.	Optimalisasi e-Peken melalui perluasan jangkauan pemasaran dan keterjangkauan harga e-Peken
70	Perlu adanya revitalisasi pasar tradisional yang merupakan salah satu fokus pemulihan ekonomi	Telah dilaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pasar seperti fasilitas umum, lapak pedagang, dan penambahan fasilitas pasar diantaranya ruang laktasi, pos ukur ulang, dan tempat ibadah, serta pemenuhan sarana dan prasarana lain untuk persiapan SNI Pasar Tradisional.	Revitalisasi pasar tradisional serta persiapan menuju pasar SNI
71	Menjaga konsistensi mutu SWK yang ada di Surabaya agar mendapat respon positif dari masyarakat	Telah dilaksanakan pendampingan cita rasa dan peningkatan pelayanan ke pedagang SWK, pelatihan kreasi makanan/minuman kekinian di SWK, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana di SWK, serta pendampingan legalitas usaha dan e-Peken di SWK.	Peningkatan mutu dan kualitas Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya
72	Melakukan pendampingan kepada seluruh koperasi yang ada di Kota Surabaya	Telah dilakukan pendampingan gerakan koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pendampingan gerakan koperasi melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), pendampingan atau konsultasi laporan keuangan koperasi, pendampingan pemenuhan persyaratan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, pemenuhan legalitas lainnya seperti NIB serta Surat Keterangan Pengurus dan Pengawas Koperasi. Selain itu, dilakukan mediasi pada permasalahan perkoperasian yang menjadi binaan wilayah keanggotaan Kota Surabaya.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kota Surabaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
73	Inovasi digitalisasi data di bidang lingkungan hidup	Telah dilakukan pengembangan aplikasi untuk mempermudah pemantauan kewajiban pelaporan pelaksanaan persetujuan lingkungan hidup. Aplikasi yang dikembangkan adalah e-simpel, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pelaporan setiap semester, dimana hal ini merupakan pengawasan tidak langsung; Solid Waste Application Transportation (SWAT) adalah aplikasi untuk pengelolaan, penjadwalan pengangkutan sampah dan monitoring sampah masuk di TPA Benowo ; serta Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM) adalah aplikasi untuk mempermudah laporan dari Bank Sampah Unit, sebagai database pengurangan sampah dari sektor bank sampah.	Pemantauan kualitas lingkungan hidup
74	Perlu adanya evaluasi terkait penataan SWK atau fasilitas umum lainnya yang lokasinya dekat dengan TPS	Telah dilakukan upaya pembersihan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA secara tepat waktu sehingga tidak mengganggu operasional SWK dan fasilitas umum lainnya.	Tidak terganggunya operasional SWK dan fasilitas umum yang berdekatan dengan TPS.
75	Melakukan evaluasi kebersihan dan tata kelola UMKM di taman bungkul yang sering diadakan kegiatan car free day	Telah ditempatkan sarana prasarana kebersihan di lokasi CFD dan di area UMKM dan dilakukan pembersihan jalan setelah CFD selesai	Peningkatan kebersihan pada lokasi Car Free Day
76	Menjaga kebersihan transportasi sampah dan mencantumkan nomor telp di bak belakang untuk komplain warga	Pengaduan warga terhadap pengangkutan sampah dapat dilakukan melalui aplikasi Wargaku dan 112	Peningkatan pelayanan dan sarana kebersihan lingkungan
77	Penyediaan lahan TPS di masing-masing kelurahan	Sampai dengan bulan Desember 2023, telah terbangun dan beroperasi sejumlah 191 tempat penampungan sementara (TPS) yang tersebar di 153 Kelurahan di Kota Surabaya, sehingga setiap Kelurahan telah terfasilitasi minimal 1 TPS.	Terpenuhinya fasilitas TPS di setiap Kelurahan di Kota Surabaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
78	Memastikan perawatan dan pengawasan untuk alat-alat yang dipakai PMK	Pemeliharaan dan perawatan atas unit pemadam kebakaran telah dilaksanakan secara berkala baik oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sesuai merek unit maupun oleh tim teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Kondisi unit/alat selalu dalam kondisi siap pakai saat dibutuhkan
79	Perlunya kerjasama dengan pihak PLN terkait jaringan pendek listrik di permukiman warga	Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terjadinya kejadian kebakaran termasuk didalamnya materi mengenai pencegahan terjadinya arus pendek. Selain itu dilakukan kerjasama dengan pihak PLN saat terjadi kebakaran di permukiman warga dengan memutus jaringan listrik agar mempermudah operasional pemadaman dan penyelamatan.	Pencegahan kejadian kebakaran yang diakibatkan karena arus pendek
80	meningkatkan pelatihan tanggap darurat pada security/bidang-bidang lainnya di gedung, hotel, perkantoran, plaza dan gedung Pemerintahan	Telah dilakukan pelatihan tanggap darurat pada security atau bidang-bidang lainnya di gedung, hotel, perkantoran, plaza dan gedung Pemerintahan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatkan kemampuan tanggap darurat sehingga mengurangi risiko cedera atau kerugian jiwa dalam situasi darurat.
81	Perlu adanya SOP untuk pemeliharaan APAR	Telah dilakukan penyusunan SOP untuk pemeliharaan APAR	APAR dapat digunakan pada saat dibutuhkan sehingga mencegah kebakaran yang lebih besar.
82	Alokasi penyediaan APAR di tiap-tiap RW	Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan bahwa Pengadaan, distribusi, pemeliharaan serta pengisian ulang APAR untuk ditempatkan di balai RT/RW merupakan kewenangan kelurahan melalui dana kelurahan sesuai dengan kesepakatan usulan pada musyawarah pembangunan kelurahan.	Pengurangan dampak kejadian kebakaran yang lebih besar.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
83	Pemenuhan tenaga Psikolog PUSPAGA di tingkat RW	Telah dilakukan kerjasama dengan 13 Universitas di Kota Surabaya dalam program Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi DI Bidang Psikologi untuk menjadi mahasiswa volunteer sebagai fasilitator Puspaga Balai RW sebanyak 227 mahasiswa serta dosen volunteer sebanyak 19 orang (psikolog) untuk memberikan konseling/pendampingan psikologi lanjutan dan kelas parenting. Selain itu, telah dilaksanakan kerjasama dengan Kemendikbudristek melalui program Kampus Merdeka dengan program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang melibatkan 372 mahasiswa yang tersebar di Balai RW untuk mendukung pelaksanaan Puspaga Balai RW.	Pemenuhan kebutuhan layanan informasi, konsultasi, kelas parenting dan konseling untuk mewujudkan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak bagi warga kota Surabaya
84	Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan kenakalan anak atau remaja	Telah dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP PPAK) dengan berbagai fitur diantaranya tombol panic button untuk pengaduan permasalahan keluarga dan kekerasan pada perempuan dan anak, penanganan dan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketuntasan intervensi OPD terkait yang diberikan kepada client dan keluarga, penyediaan database, relawan PKBM, satgas PPA, fasilitator PUPAGA Balai RW, mahasiswa yang membantu PUSPAGA Balai RW, Media Informasi perlindungan perempuan dan anak, Informasi Puspaga Kota, Puspaga RW, PUSPAGA TV, Kelas Catin, UPTD PPA, serta layanan telekonsultasi online. Selain itu, telah dilaksanakan peningkatan layanan UPTD PPA termasuk gelar kasus serta penguatan jejaring UPTD PPA dengan Polrestabes PPA/KP3, kejaksaaan negeri, Kejaksaaan Sukomanunggal, Pengadilan Negeri, NGO/LSM, relawan PKBM tingkat kecamatan, satgas PPA tingkat kelurahan, fasilitator PUSPAGA Balai RW, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi	Sinergitas dan ketuntasan dalam penanganan dalam permasalahan perempuan dan anak.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
85	Monitoring pada pekerja anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi eksploitasi anak	Publikasi Komunikasi Informasi dan Edukasi serta kerjasama dengan LSM pemerhati anak (jejaring) terkait pekerja anak dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap pekerja anak, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk memastikan kepatuhan perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada lagi pekerja anak di bawah umur
86	Penguatan Peran PKK dalam Memberdayakan Perempuan dan menjaga ketahanan keluarga	Telah dilakukan penguatan peran PKK dalam memberdayakan perempuan dan menjaga ketahanan keluarga melalui : penganggaran dan pelaksanaan pada kegiatan PKK, pelatihan dan bimbingan teknis, pelaksanaan Program Surabaya Emas dan Program Sekolah Orang Tua Hebat, serta pemberian modal berusaha pada perempuan yang mengalami penelantaran ekonomi dengan didampingi oleh PKK.	Terimplementasinya 10 program Pokok PKK
87	Membut aplikasi yang memetakan investasi baru di Kota Surabaya, agar potensi peluang kerja terpetakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya saat ini mempunyai aplikasi atau sistem Klinik Investasi yang dapat diakses melalui laman (https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/petapotensiinvestasi/html/interaktif/index.html) didalamnya terdapat Peta Potensi Investasi Kota Surabaya untuk menunjukkan usaha-usaha potensial pada masing-masing Kecamatan hingga kelayakan usaha di Kecamatan tersebut. Terkait pemetaan investasi baru di Kota Surabaya dikoordinasikan dengan Tim Portal Satu Data untuk dapat diintegrasikan.	Pemetaan investasi baru di Kota Surabaya guna meningkatkan investasi serta akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja penduduk Kota Surabaya.
88	Sistem pencatatan investasi di kota Surabaya harus di upgrade dan jelas datanya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya saat ini untuk pencatatan investasi menggunakan aplikasi atau sistem secara nasional yaitu Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) serta melakukan monitoring dan rekapitulasi setiap hari terkait data penanaman modal/realisasi investasi yang telah disetujui. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya juga melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dengan Kementerian Investasi/BKPM RI agar data tarikan investasi pelaku usaha secara keseluruhan dapat dimunculkan pada menu Pelaporan LKPM.	Pencatatan investasi yang up-to-date dan valid digunakan menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui pertumbuhan investasi di tiap wilayah (kecamatan).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
89	Peningkatan kualitas SDM guru untuk menunjang pemerataan dan kekurangan tenaga pendidik	1. Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pemberian beasiswa sarjana kepada guru secara bertahap, pelatihan-pelatihan berupa pemanfaatan google for education, pembuatan Karya Tulis Ilmiah, dan pembuatan inovasi pembelajaran. 2. Pemenuhan kebutuhan guru dilakukan dengan rekrutmen guru melalui mekanisme PPPK. 3. Pemerataan kualitas guru dilakukan melalui Program Pengimbasan Penggerak Merdeka Belajar (Pendekar) ke komunitas guru di sekolah-sekolah secara merata. Selain itu, dalam rangka menunjang pemerataan kualitas guru telah dilakukan Program Surabaya Mengajar, dengan melibatkan mahasiswa semester 5 yang berlatar belakang program studi kependidikan untuk menerapkan ilmu praktik mengajar di sekolah-sekolah.	Pemenuhan kebutuhan, peningkatan dan pemerataan kualitas guru.
90	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kepastian penyediaan gedung dan sarana prasarana sekolah jenjang SMA / SMK	1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait pemenuhan kebutuhan SMA/SMK di Surabaya, pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam kegiatan koordinasi pemenuhan data kajian RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman). 2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Jawa Timur, disampaikan bahwa terdapat pembatasan pendirian SMA.	Pemenuhan kebutuhan gedung dan sarana prasarana sekolah jenjang SMA/SMK.
91	Perlu adanya penambahan guru untuk tenaga pendidik inklusif	Dinas Pendidikan telah mengusulkan formasi jabatan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam rekrutmen PPPK ke MenPAN-RB dan Dirjen GTK, melalui surat nomor 800.1.1.1/14618/436.7.1/2023, tanggal 29 Mei 2023, tentang Permohonan Formasi PPPK 2023.	Pemenuhan kebutuhan guru pendamping khusus (GPK).
92	Pengawasan secara intensif untuk parkir tepi jalan umum	1. Melakukan pendataan pada lokasi potensi parkir Tepi Jalan Umum baru dan peningkatan retribusi pada lokasi yang ada; 2. Melakukan patroli gabungan bersama jajaran samping TNI- POLRI terkait Pengawasan, pemantauan, penertiban dan penindakan parkir liar, dengan sasaran tempat2 hiburan malam.	1. Peningkatan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum di titik lokasi potensi yang menjadi sasaran; 2. Pengurusan ijin parkir baru milik swasta dengan kesanggupan melakukan pembayaran pajak parkir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
93	Pengawasan potensi pendapatan parkir agar tidak terjadi kebocoran	Upaya yang dilakukan untuk peningkatan realisasi pendapatan retribusi parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya : a. Melakukan koordinasi dengan PT. Intiland Group dan PT. Citraland Group dalam rangka percepatan penyelenggaraan parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Jalan Mayjend Yono Soewoyo dan Kawasan G-Walk serta pemanfaatan lahan BBWS sebagai lokasi parkir; b. Melakukan penerapan digitalisasi pembayaran parkir secara non tunai dalam bentuk penambahan fitur QRIS di 6 lokasi Parkir tempat khusus (PTK)	Peningkatan pendapatan dari retribusi parkir dengan dilakukan penambahan titik lokasi potensi baru sebagai obyek retribusi parkir
94	Pemanfaatan jalan harus sesuai dengan kelas jalan, antara pengguna jalan umum dengan truk, trailer dan kendaraan besar lainnya	Dinas Perhubungan pada tahun 2023 telah melakukan pemasangan rambu kelas jalan pada 500 ruas jalan sesuai dengan kriteria kelas jalan yang direkomendasikan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Sedangkan pengawasan dan penindakan pelanggaran penggunaan kelas jalan dilakukan dengan berkolaborasi bersama pihak TNI dan Polri.	Pemanfaatan jalan sesuai dengan kelas jalan
95	Ketersediaan PJU di wilayah yang minim pencahayaan untuk menghindari tindak pidana kejahatan	Dinas Perhubungan pada tahun 2023 telah melakukan pemasangan PJU baru pada 10.171 titik sehingga total PJU tersebar di Kota Surabaya pada 106.423 titik	Kerawanan kejahatan pada wilayah yang minim pencahayaan
96	Melakukan pembinaan kepada sopir suroboyo bus, agar tertib lalu lintas	Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pembinaan sopir angkutan umum, salah satunya sopir Suroboyo Bus melalui kegiatan Abdi Yasa Teladan yakni pembinaan yang dilakukan untuk menciptakan kesadaran bagi para sopir tentang pentingnya keselamatan berkendara.	Peningkatan kapasitas keselamatan dan wawasan berlalu lintas bagi sopir Suroboyo Bus
97	Validasi terhadap Angka pengangguran terbuka	Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan melakukan integrasi data terhadap angkatan kerja yang bersumber dari data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui aplikasi check-in, pelaporan perusahaan terkait tenaga kerja, permohonan pencatatan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan intervensi Pemerintah Kota melalui aplikasi Sayang Warga dan Padat Karya.	Validasi terhadap data pengangguran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
98	Pemetaan efisiensi intervensi terhadap pengentasan pengangguran	Pelatihan dan sertifikasi yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan pada pasar kerja dengan mempertimbangkan usulan masyarakat yang bersumber dari Musrenbang, Saran dan Pokok Pikiran DPRD, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi Pengusaha, dan informasi lowongan dari perusahaan yang diinformasikan pada aplikasi ASSIK.	Kesesuaian intervensi untuk penyerapan tenaga kerja
99	Monitoring pengurangan pengangguran yang berasal dari program padat karya secara berkelanjutan	Monitoring intervensi Padat Karya dilakukan secara berkala setiap bulan baik melalui aplikasi Padat Karya maupun pemantauan dari Kecamatan dan/atau Kelurahan serta dilakukan analisa dan evaluasi oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Kesesuaian intervensi Padat Karya untuk mengurangi pengangguran
100	Penambahan program padat karya berbasis kebutuhan warga di tingkat kelurahan	Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk mendapatkan informasi warga yang menginginkan pekerjaan di sektor informal melalui Program Padat Karya dan selanjutnya diberikan bimbingan teknis atau pelatihan yang sesuai.	Kesesuaian Program Padat Karya dengan kebutuhan warga sesuai dengan potensi wilayah masing-masing
101	Menyediakan BLK untuk memenuhi kebutuhan anak-anak lulusan SMA/SMK serta di usia produktif yang ingin bekerja	Telah dilakukan pelatihan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Surabaya serta pelaksanaan sertifikasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menambah keunggulan kompetitif tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja, termasuk tenaga kerja lulusan SMA/SMK.	Kesesuaian kompetensi lulusan SMA/SMK dan usia kerja dengan kebutuhan pasar kerja

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
102	Memastikan perusahaan di wilayah Kota Surabaya untuk merekrut tenaga kerja di wilayah sekitar	1. Pemerintah Kota Surabaya telah membuat Nota Kesepakatan dengan Hotel, dan pengelola pusat perbelanjaan (mall) di Surabaya diantaranya berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan; 2. Dalam pemberian pelayanan bidang ketenagakerjaan di SSWAlfa, perusahaan dipersyaratkan melaporkan Daftar Seluruh pekerja/buruh di Perusahaan dengan proporsi jumlah pekerja penduduk surabaya paling sedikit 50% dari total seluruh pekerja di perusahaan dengan mencantumkan nama, alamat, dan NIK pekerja; 3. Mengundang perusahaan di Kawasan SIER, Margomulyo dan sekitarnya, serta perusahaan alih daya untuk diberikan himbauan agar memprioritaskan penduduk Surabaya pada saat pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja; 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyampaikan Surat Edaran kepada perusahaan-perusahaan yang berisi himbauan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja penduduk Surabaya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan perusahaan.	Keterserapan tenaga kerja pada perusahaan yang berada di wilayah Kota Surabaya
103	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan buku di TBM	1. Pada tahun 2023, telah dilakukan penambahan koleksi pustaka berupa buku fisik sebanyak 1.792 eksemplar, dan eBook sebanyak 5 judul. 2. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi bagi 250 petugas layanan baca sekolah dan 250 petugas TBM berupa in-house training, antara lain terkait standar pelayanan, softskill dan kompetensi literasi. 3. Telah dilaksanakan 245 event literasi sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan minat literasi dan belajar masyarakat.	Peningkatkan kualitas pelayanan dan koleksi buku di TBM
104	Perlu adanya inovasi teknologi di bidang perpustakaan, misalnya E-book	Sampai dengan tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah memiliki 1.650 judul eBook, yang 225 judul di antaranya merupakan karya GENDIS SEWU, yakni kumpulan karya yang ditulis oleh bibit-bibit penulis yang dibina. Seluruh eBook tersebut dapat diakses melalui SIPUS (Sistem Informasi Perpustakaan).	Inovasi di bidang perpustakaan berupa eBook untuk memberikan kemudahan pelayanan literasi.
105	Melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, terkait rumah jurnal untuk karya ilmiah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berkolaborasi dengan para guru di jenjang pendidikan SD dan SMP negeri maupun swasta untuk memanfaatkan Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) sebagai salah satu media publikasi jurnal para guru tersebut.	Kolaborasi dengan guru untuk fasilitasi publikasi jurnal karya ilmiah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
106	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan penguatan literasi di sekolah-sekolah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal: 1. Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling; 2. Mengadakan Lomba Perpustakaan; 3. Mengadakan Lomba Mendongeng; 4. Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Sekolah; 5. Pelatihan Petugas Pengelolaan Perpustakaan.	Penguatan literasi siswa di sekolah
107	Melakukan kajian terhadap penuntasan pemenuhan layanan permukiman layak huni bagi warga tidak mampu	Telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat kebijakan dan strategi pemenuhan pemukiman layak huni dan saat ini sedang dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.	Peningkatan permukiman layak huni
108	Melaksanakan rekomendasi Pansus perubahan nama jalan	Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan : 1). Koordinasi dengan Perangkat Daerah, Kelurahan, Kecamatan dan Kepolisian serta 2). Pendataan jumlah KK dan KTP Warga terdampak serta identifikasi potensi dampak antara lain perubahan alamat pada KTP , IMB, surat tanah, dan dokumen lainnya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan SK Walikota tentang pemberian dan perubahan nama jalan dan proses lainnya sesuai ketentuan	1. Perwujudan identitas Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan melalui perubahan nama jalan dengan menggunakan nama-nama pahlawan 2. Meminimalisasi dampak perubahan nama jalan terhadap warga sekitar, khususnya yang berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan dan perizinan
109	Perlunya pengawasan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait pemenuhan SLF termasuk bangunan apartemen	Telah dilakukan pendataan dan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran bangunan yang masuk dalam kriteria wajib SLF sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 82 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.	Pemenuhan aspek keandalan bangunan sesuai dengan ketentuan
110	Melakukan evaluasi pengelolaan rumah susun terkait penghuni yang bermasalah	Telah dilakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni rumah susun sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun.	Pengelolaan rumah susun yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
111	Ketersediaan seluruh data kemiskinan, terutama keluarga ektrim miskin dan pra miskin yang konkret	Telah dilakukan musyawarah kelurahan atau muskel secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi dan pemutakhiran data Keluarga Miskin	Data Keluarga Miskin yang tervalidasi dan mutakhir
112	Melakukan sosialisasi berkaitan dengan prosedur perolehan SKM melalui E-Pelayanan Dinsos, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan SKM dalam kondisi urgent	Telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial terkait E-pelayanan yang memuat prosedur dan alur perolehan SKM	Kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kota Surabaya yang memerlukan SKM
113	Perlu adanya inovasi pelaksanaan kegiatan pekan pameran hasil kemajuan atau hasil karya PMKS guna meningkatkan program pemberdayaan	Pameran hasil karya PMKS telah diikutsertakan dalam acara gelar pameran baik skala Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan pihak swasta dan komunitas untuk menampilkan hasil karya PMKS.	Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian PMKS
114	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan kerjasama dengan pihak swasta berkaitan dengan pengelolaan griya werdha agar dapat menampung tidak hanya dari keluarga miskin	Telah dilakukan koordinasi dengan panti lansia berbayar swasta yang ada di Kota Surabaya untuk menampung lansia dari keluarga yang mampu.	Menghindari adanya lansia terlantar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
115	Evaluasi terhadap Pemetaan warga miskin di Kota Surabaya supaya lebih akurat dan tepat sasaran	Telah dilakukan musyawarah kelurahan (Muskel) secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi dan pemutakhiran data Keluarga Miskin. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penggunaan data hasil registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK).	Data keluarga miskin yang akurat sehingga intervensi dapat sesuai sasaran.
116	Memastikan semua warga mendapatkan bantuan yang terdata sebagai keluarga miskin untuk mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota	Telah dilakukan musyawarah kelurahan (Muskel) secara berkala setiap bulan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi dan pemutakhiran data Keluarga Miskin. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penggunaan data hasil registrasi sosial ekonomi (REGSOSEK). Sehingga, intervensi Pemerintah Kota dapat dilakukan dengan tepat sasaran.	Intervensi Pemerintah Kota yang tepat sasaran.
117	Penyusunan rencana induk sistem drainase lingkungan di perkotaan	Penyusunan rencana induk sistem drainase lingkungan pada tahap inventarisasi dan digitalisasi prasarana di masing-masing sistem drainase pada masing-masing rayon yang akan diintegrasikan melalui SAMID (Sistem Aplikasi Manajemen Infrastruktur Drainase)	Pemenuhan data dukung dalam penyusunan rencana induk sistem drainase lingkungan di perkotaan
118	Perlunya memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas di sarana pedestrian	Pemerintah Kota Surabaya telah melengkapi pedestrian dengan lajur pemandu berupa batu granit tipe strip line dan tipe dot, serta lajur yang landai sehingga ramah terhadap disabilitas.	Infrastruktur yang ramah dan nyaman terhadap disabilitas
119	Perlu adanya koordinasi berkaitan dengan pemasangan utilitas di daerah permukiman	Pemerintah Kota Surabaya telah berkoordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan selaku pemangku wilayah saat pelaksanaan survey pengajuan permohonan pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya untuk utilitas, serta mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya.	Pemasangan jaringan utilitas yang tertib

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
120	Pengembalian kondisi jalan seperti semula setelah adanya penggalian utilitas sehingga tidak merugikan masyarakat	Telah dilaksanakan upaya untuk menjamin pelaksana pekerjaan agar melakukan rekondisi jalan melalui penjaminan berupa bank garansi. Selain itu dilakukan survei pengawasan bagi pekerjaan utilitas yang telah selesai. Pemohon yang tidak melaksanakan pekerjaan rekondisi sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya diterbitkan surat peringatan.	Kondisi jalan tetap dalam kondisi baik pasca pembangunan utilitas
121	Perlu adanya konektivitas pembangunan jalan, paving dan saluran di area pemukiman baru di seluruh wilayah Surabaya	Telah dilaksanakan pembangunan jalan paving dan saluran secara bersamaan sehingga elevasi jalan paving dan saluran terkoneksi untuk menghindari genangan.	Pembangunan jalan paving dan saluran yang terkoneksi
122	Menyiapkan alat dengan spesifikasi khusus agar dapat menjangkau pembersihan saluran-saluran di daerah pemukiman padat penduduk	Pemerintah Kota Surabaya secara bertahap akan menambah dan terus melakukan pemeliharaan terhadap alat berat yang digunakan sebagai alat pembersihan di daerah pemukiman padat penduduk.	Tersedianya alat yang dapat mendukung pembersihan saluran di pemukiman padat penduduk
123	Monitoring ketersediaan dan fungsi sanitasi umum untuk masyarakat luas	Telah dilaksanakan pembangunan tangki septik komunal dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditahun 2023, pada 3 (tiga) Kelurahan yaitu : Kel. Darmo, Kel. Simokerto, dan Kel. Genting Kalianak, telah dilaksanakan pembangunan tangki septik komunal di Kel. Wonokusumo, serta melakukan pemeliharaan SPALD-T di Kawasan Tertentu (Rusunawa)	Ketersediaan sanitasi umum untuk masyarakat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
124	Upaya preventif agar ASN terhindar dari pelanggaran kasus pidana seperti halnya psikotropika, korupsi dan penyalahgunaan perizinan	Upaya preventif yang dilakukan Inspektorat Kota Surabaya untuk mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pelanggaran kasus pidana, seperti penyalahgunaan psikotropika, korupsi, dan penyalahgunaan perizinan dengan mengimplementasikan whistleblowing system dan WA pengaduan. Aplikasi Whistleblowing System (WBS) disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. WA pengaduan juga disediakan untuk menerima dan menanggapi pengaduan warga Surabaya jika menemui atau mendapati ASN yang melakukan pelanggaran KKN. Keunggulan implementasi Whistleblowing System dan WA Pengaduan selama tahun 2023 pelaporan tidak perlu tatap muka di kantor, namun dapat dilakukan dimana saja. Data dukung dan bukti yang dimiliki pelapor dapat dikirim ke Inspektorat Kota Surabaya untuk selanjutnya dapat diproses.	Kemudahan Pengaduan melalui Whistleblowing System dan WA Pengaduan sebagai upaya preventif agar ASN terhindar dari perbuatan pelanggaran.
125	Penertiban terhadap ASN yang indiscipliner dan menyalahgunakan kewenangan, dan disosialisasikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik	1. Penertiban terhadap ASN yang indiscipliner dan penyalahgunaan wewenang dilakukan berdasarkan adanya pengaduan melalui Whistleblowing System dan WA Pengaduan. Pengaduan tersebut diproses oleh Inspektorat dan jika terbukti melanggar akan dilaporkan kepada Walikota Surabaya. 2. Sosialisasi terkait media pengaduan (Whistleblowing System dan WA Pengaduan) kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial, situs web Pemerintah Kota Surabaya dan media informasi lainnya. Keterbukaan informasi publik terkait pengaduan pada Whistleblowing System dapat diakses melalui https://wbs.surabaya.go.id/	Implementasi media pengaduan melalui Whistleblowing System dan WA Pengaduan yang telah diinformasikan kepada masyarakat sebagai upaya penertiban ASN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
126	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia ASN di Kecamatan dan Kelurahan dalam Melayani Masyarakat	Telah dilaksanakan peningkatan Kapasitas SDM di Kelurahan dan Kecamatan dilakukan dengan: 1) In House Training Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kasie pembangunan dan ketertiban kecamatan dan kelurahan; 2) Diklat Pertanahan dan tertib administrasi pertanahan untuk Lurah; 3) Pemberian materi komunikasi efektif untuk pelayanan di kelurahan dan kecamatan dengan peserta camat, lurah, LPMK dan perwakilan RT dan RW; 4) Sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi berbasis data kewilayahan untuk pendataan bangunan dengan peserta dari sekretaris kecamatan dan staf kelurahan.	Peningkatan Kapasitas SDM di Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
127	Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Kelurahan	Telah dilaksanakan pemetaan usulan dan penentuan skala prioritas melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan dengan melibatkan RT, RW, LPMK, KSH, Karang Taruna dan Forum Anak dengan mempertimbangkan permasalahan dan potensi wilayah. Selain itu telah dilakukan pendampingan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan pelaksanaan dana kelurahan sesuai ketentuan.	Efektifitas pelaksanaan dana kelurahan
128	Penguatan Peran SDM Kesra dalam Pengentasan Kemiskinan di wilayahnya	Telah dilaksanakan bimbingan teknis untuk pengoperasian Sistem Informasi Keluarga Miskin (SIGAKIN) sehingga mempermudah SDM Kesra untuk melakukan pemantauan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain itu dilakukan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait implementasi program Padat Karya.	Peningkatan kapasitas SDM Kesra
129	Revisi Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014	Telah dilakukan penyusunan rancangan perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dan disampaikan kepada DPRD Kota Surabaya untuk dilakukan pembahasan	Penyusunan Rancangan Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
130	Meningkatkan respon pelayanan kepada konsumen	1. Penyediaan call center dan penetapan waktu tanggap keluhan maksimal 1 x 24 jam untuk pengaduan kebocoran atau air tidak keluar 2. Pembagian shift petugas untuk penyelesaian pengaduan 3. Pengembangan aplikasi Customer Information System (CIS) untuk kemudahan pelayanan pembayaran, pengaduan, histori pemakaian, pelaporan pencatatan dan informasi meter air yang juga dapat dilakukan secara mandiri, dan keluhan terkait layanan PDAM lainnya 4. PDAM Surya Sembada telah bergabung dalam aplikasi WargaKU sebagai bentuk partisipasi dalam layanan terpadu	Peningkatan respon pelayanan kepada konsumen
131	Adanya inovasi untuk pengecekan meteran	PDAM Surya Sembada telah mengembangkan aplikasi Customer Information System (CIS) untuk kemudahan pelayanan pembayaran, pengaduan, histori pemakaian, pelaporan pencatatan dan informasi meter air yang juga dapat dilakukan secara mandiri, dan keluhan terkait layanan PDAM lainnya	Pengembangan inovasi pelayanan pencatatan dan informasi meter air
132	Menginisiasi Ketersediaan air minum dalam kemasan yang berkualitas	PDAM Surya Sembada telah melakukan kerjasama dengan ITS Surabaya Hebat untuk menginisiasi usaha produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek He2O (dibaca : HERO) dan dalam proses sertifikasi SNI, Halal, dan BPOM	Penyediaan air minum dalam kemasan
133	Revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana pasar tradisional	1. Telah dilakukan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar di Pasar Simo, Pasar Simomulyo dan Pasar Simo Gunung bersama dengan DPRKPP 2. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar juga dilakukan melalui CSR antara lain dengan digitalisasi pasar tradisional dengan pemberian komputer di Pasar Pabean dan Pasar Kapasan, pemasangan mesin ATM di Pasar Kapasan dan Pasar Tambak Rejo, serta perbaikan prasarana di Pasar Pegirian 3. PD Pasar Surya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional	Revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana pasar tradisional dengan mengoptimalkan kolaborasi dengan stakeholder
134	Pembenahan Manajemen PD Pasar Surya agar nilai hasil audit wajar tanpa pengecualian	1. PD Pasar Surya menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam proses penyusunan laporan keuangan dan Chart Of Account (COA) sesuai aturan di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2. PD Pasar Surya melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit perpajakan secara khusus untuk kebenaran perhitungan dan penyeteroran perpajakan	Penyusunan laporan keuangan sesuai aturan di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk peningkatan nilai hasil audit menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
135	Memastikan kebersihan pasar di kota surabaya untuk kenyamanan pengunjung	Upaya yang telah dilakukan untuk memastikan kebersihan pasar di Kota Surabaya : 1. Melakukan pembersihan rutin oleh petugas kebersihan di tiap unit pasar 2. Sosialisasi dan pemberian himbauan kepada pedagang di pasar untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan 3. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengangkutan sampah dari pasar ke TPA dan petugas kebersihan 4. Dilakukan penilaian bulanan terkait kebersihan area pasar, fasilitas umum dan sarana prasarana pasar oleh kepala pasar 5. Melakukan pengecatan lantai lorong di Pasar Wisata Bratang 6. Melakukan kerja bakti terutama pada pasar dengan nilai kebersihan rendah dan safari pembersihan saluran pasar	Peningkatan kebersihan pasar di Kota Surabaya untuk kenyamanan pengunjung
136	Pembenahan Manajemen PD RPH agar nilai hasil audit wajar tanpa pengecualian	1. Untuk peningkatan tertib tata kearsipan telah dilakukan penyusunan SOP keuangan dan non keuangan 2. Untuk peningkatan tertib pencatatan aset sebagai salah satu aspek audit Kantor Akuntan Publik (KAP), PD Rumah Potong Hewan mengajukan pengembalian aset ke Pemerintah Kota Surabaya	Penyusunan SOP dan pencatatan aset untuk peningkatan nilai hasil audit menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
137	Diversifikasi usaha sebagai upaya peningkatan pendapatan PD RPH	1. Meningkatkan jumlah pemotongan sapi dengan melayani jasa pemotongan sapi dengan penanganan khusus (sapi tanpa tali keluh) 2. Sosialisasi kepada mitra jagal RPH terkait rencana simulasi jasa timbang sapi hidup untuk memberikan kepastian pasokan daging 3. Sosialisasi kepada mitra jagal RPH dan masyarakat umum terkait rencana layanan jasa pemotongan iga dan buntut sapi	Diversifikasi usaha untuk peningkatan pendapatan PD RPH
138	Memberdayakan UMKM pada stan KBS	1. Menyediakan lokasi di area parkir bagi UMKM warga sekitar dengan gratis tanpa dipungut biaya sewa 2. Menyediakan lahan/stand dengan harga khusus untuk bagi UMKM 3. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan terkait higienitas makanan, bagi UMKM yang berjualan makanan dan minuman 4. Menyediakan sarana tempat berjualan untuk UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tarif sangat murah dibandingkan tenant reguler	Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui pemberdayaan UMKM di Taman Satwa KBS

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
139	Efisiensi bahan pangan untuk binatang	1. PD Taman Satwa KBS telah mencari substitusi pakan satwa dengan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kandungan nutrisinya 2. Pengembangan program edukasi konservasi dalam kegiatan feeding time dengan skema penjualan kepada pengunjung untuk paket pakan satwa. Upaya ini bertujuan untuk peningkatan pendapatan dan efisiensi bahan pakan satwa 3. Membuat formulasi perhitungan pakan untuk menentukan standar gizi yang dibutuhkan masing-masing jenis satwa	Efisiensi beban pakan untuk satwa tanpa mengurangi kandungan nutrisi yang diperlukan oleh satwa
140	Inovasi dan strategi baru untuk meningkatkan minat pengunjung	1. Pengembangan wahana yang bersifat edukasi konservasi 2. Pembuatan dan pengembangan film pendek tentang edukasi satwa yang sebagai sarana promosi di media sosial 3. Pembuatan dan pengembangan produk-produk cinderamata dengan tema satwa di KBS 4. Kerjasama dengan sekolah melalui kunjungan dari tim marketing ke sekolah-sekolah dengan menawarkan proposal paket-paket wisata edukasi rombongan 5. Kerjasama dengan asosiasi travel dengan memberikan tarif diskon rombongan 6. Inovasi baru wisata malam "Surabaya Night Zoo"	Peningkatan minat kunjungan melalui pengembangan dan inovasi
141	Penyediaan rumah tapak murah dan terjangkau bagi masyarakat	1. PT. Surya Karsa Utama melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemasaran dan pembangunan unit-unit perumahan 2. Penjualan unit rumah tinggal bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat yang berminat 3. Manajemen juga melakukan upaya untuk kemudahan fasilitas pembayaran unit yang akan dijual dengan lebih fleksibel, memberikan kemudahan dan fasilitas untuk melakukan skema pembayaran melalui KPR Bank dan juga memberikan diskon untuk unit yang akan dijual 4. PT. Surya Karsa Utama melakukan pembangunan jalan paving dan saluran serta pemeliharaan lingkungan dilakukan bersama dengan warga perumahan	Penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat
142	Pembenahan Manajemen PT Surya Karsa Utama agar nilai hasil audit wajar tanpa pengecualian	Pembenahan manajemen utamanya manajemen keuangan pada PT. Surya Karsa Utama dilakukan dengan melakukan koreksi piutang pada laporan tahun 2023 dengan mencadangkan piutang yang menjadi koreksi oleh pihak auditor dan akan memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan agar hasil opini audit wajar tanpa pengecualian	Perbaikan pengelolaan keuangan pada PT. Surya Karsa Utama untuk peningkatan nilai hasil audit menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
143	Optimalisasi semua lahan dan aset untuk pelayanan kesehatan	Telah dilakukan Rehabilitasi Eksisting gedung, penambahan unit mesin hemodialisa, Ruang Rawat Inap VIP/VVIP, kamar operasi, penambahan pelayanan kemoterapi, Medical Check Up, bedah onkologi, perluasan IGD, pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan pemenuhan RS Pendidikan Satelit	Optimalisasi aset Rumah Sakit
144	Perluasan RSUD Bhakti Dharma Husada guna meningkatkan layanan	Telah dilakukan penyusunan Master Plan RSUD Bhakti Dharma Husada, Peningkatan layanan RSUD Bhakti Dharma Husada dengan penambahan layanan kemoterapi, Medical Check Up, Bedah Onkologi, Perluasan IGD, Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan pemenuhan RS Pendidikan Satelit	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah Surabaya Barat melalui pengembangan rumah sakit
145	Perlu koordinasi dengan TAPD yang berkaitan dengan perhitungan rasionalisasi target pendapatan	Telah dilaksanakan koordinasi bersama TAPD dalam penentuan target pendapatan berdasarkan potensi pada RSUD dr. M. Soewandhie.	Peningkatan pendapatan RSUD dr. M. Soewandhie telah sesuai dengan potensi pendapatan yang ada.
146	Pemenuhan SDM tenaga kesehatan untuk memenuhi ketersediaan alat kesehatan	Upaya pemenuhan SDM pada RSUD dr. M. Soewandhie dilakukan melalui rekrutmen PPPK dan pelatihan serta bimbingan bagi tenaga kesehatan agar dapat mengoperasikan alat kesehatan dengan efektif	Peningkatan kualitas SDM Kesehatan.
147	Inovasi digitalisasi rekam medis untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit	Telah dibangun rekam medis elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan dalam proses integrasi dengan Satu Sehat yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan	Digitalisasi pelayanan kesehatan.
148	Peningkatan kualitas SDM, maka juga ada peningkatan sebagai pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat	RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat, di antaranya klinik sore untuk penyakit dalam, Onkologi Center, serta adanya pelayanan Radioterapi.	Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
149	Adanya inovasi digitalisasi rekam medis harus segera diterapkan	Telah dibangun rekam medis elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan dalam proses integrasi dengan Satu Sehat yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan	Digitalisasi pelayanan kesehatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
150	Peningkatan pendapatan RSUD dari sektor pengelolaan parkir	1. RSUD dr. M. Soewandhie telah menyediakan lahan parkir di gedung baru dan telah berkoordinasi dengan Dishub, Kecamatan/Kelurahan, serta dengan RW terkait untuk mengurangi parkir liar di sekitar lingkungan. 2. RSUD dr. M. Soewandhie juga telah meningkatkan pendapatan parkir dengan pengelolaan parkir umum (basement) yang dikelola oleh penyedia.	Peningkatan pengelolaan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan rumah sakit.
151	Melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah kebangsaan	Telah dilaksanakan sekolah kebangsaan di Lanudal Juanda dengan diikuti oleh 47 siswa setingkat SMA dan 1 orang siswa setingkat SMP, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya lainnya. Setelah pelaksanaan sekolah kebangsaan dilanjutkan dengan melibatkan dalam kegiatan kepemudaan tingkat kota untuk memastikan peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya.	Peningkatan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta mencetak kader pemimpin.
152	Mengevaluasi ketentuan mengenai jam operasional terkait pariwisata dalam Peraturan Daerah	Telah dilakukan pengawasan jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Penegakan ketentuan terkait jam operasional tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU).
153	Konsistensi petugas Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban perjudian atau tindak pidana lainnya di kawasan perkampungan	Telah dilaksanakan kegiatan patroli Asuhan Rembulan setiap malam dalam rangka pengawasan kegiatan masyarakat yang dibagi menjadi 5 tim gabungan yang bergerak pada 5 wilayah Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan.	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Surabaya
154	Perlu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengawasan dan penertiban untuk daerah perkampungan dan jalan raya yang rawan	Telah dilaksanakan kegiatan rutin Patroli Asuhan Rembulan setiap malam bekerjasama dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Kogartap III Surabaya	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan / masalah yang di selesaikan
155	Evaluasi barang hasil sitaan agar tidak disalahgunakan oleh oknum	Telah dilaksanakan SOP penanganan barang di gudang SATPOL PP di Tanjungsari. SOP tersebut mengatur tentang mekanisme penyerahan barang dari pasukan pada petugas, mekanisme penyimpanan barang hasil penertiban, dan mekanisme pengambilan barang hasil penertiban.	Pencegahan penyalahgunaan barang hasil penertiban.
156	Mengevaluasi penentuan target, pencapaian realisasi indeks ketentraman, ketertiban dan bencana dengan memperhatikan kondisi di lapangan / masyarakat	Penetapan target dan pencapaian realisasi pada indikator "Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan", telah berdasarkan data dan kondisi yang terjadi di masyarakat.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya
157	Adanya digitalisasi SPJ dan berkas-berkas untuk kegiatan alat kelengkapan DPRD	Digitalisasi SPJ kegiatan alat kelengkapan DPRD telah dilaksanakan sesuai ketentuan, melalui aplikasi GRMS (Government Resource Management System) Pemerintah Kota Surabaya. Dokumentasi dan publikasi berita terkait kegiatan alat kelengkapan DPRD telah dikoordinasikan dan dilaksanakan melalui media sosial dan media resmi lainnya.	Digitalisasi dokumen kegiatan alat kelengkapan DPRD untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.
158	Memperhatikan terkait kelengkapan sarana dan prasarana serta perawatan gedung	Untuk pemeliharaan gedung DPRD telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Untuk pemeliharaan sarana di dalam gedung sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.	Peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana gedung kantor untuk pimpinan dan anggota DPRD.

3.4 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dilakukan melalui kerjasama baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri. Kerjasama yang dilakukan merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pemerintah kota lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam mendukung terwujudnya Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya baik dengan lembaga/instansi di dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan
	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Surabaya Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelayanan Laboratorium Penunjang Rujuk Balik dan Pelayanan Penapisan Atau Skrining Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Surabaya
	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Surabaya Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Surabaya Dalam Rangka Universal Health Coverage
2	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Surabaya
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Nota Kesepakatan Antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Invensi dan Inovasi di Kota Surabaya
4	CV Bintang Palapa	Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Halaman Kantor CV Bintang Palapa Antara CV Bintang Palapa Dengan Pemerintah Kota Surabaya
5	Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tentang Magang Bersertifikat Angkatan V
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Sinergitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dengan Program Padat Karya di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
7	Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
8	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Pembelajaran dan Pembimbing Komunitas Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Surabaya
9	Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Akultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Sinergitas Pembangunan Kota Surabaya
10	Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
11	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
12	Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bidang Ekonomi Kreatif
13	Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tentang Wahana Pendidikan Kedokteran Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
14	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Ciputra Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Ciputra Surabaya Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
15	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
16	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI) Pengurus Daerah Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI) Pengurus Daerah Jawa Timur Tentang Pemberian Layanan Kesehatan Gigi Bagi Anak Individu Berkebutuhan Khusus di Kota Surabaya
17	Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tentang Dukungan Pengembangan Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
18	Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tentang Wahana Pendidikan Klinik Kedokteran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19	Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR)	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
20	Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
21	Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Wahana Pembelajaran dan Pembimbing Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya
22	Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Mendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Kegiatan Pertanian Perkotaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Psikologi dan Kesehatan di Kota Surabaya
24	Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
25	Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
26	Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
27	Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Vokasi Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
28	Fakultas Vokasi Universitas Airlangga	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
29	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Institut Teknologi Bandung Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
30	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Peningkatan Kualitas Usaha Mikro dan Revitalisasi Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya
31	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
32	Hotel Bisanta Bidakara Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Hotel Bisanta Bidakara Surabaya Tentang Penggunaan Produk Umkm dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
33	Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Wilayah Jawa Timur	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pengurus Wilayah Jawa Timur Tentang Sinergi Potensi Dalam Pembangunan Kota Surabaya
34	Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI) Pengurus Daerah Jawa Timur	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (Idgai) Pengurus Daerah Jawa Timur Tentang Pemberian Layanan Kesehatan Gigi Bagi Anak di Kota Surabaya
35	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kota Surabaya
36	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penerapan Tarif Layanan Transportasi Umum Pada Hari Korpri di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
37	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Surabaya Tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan/Kelurahan Mitra Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
38	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Surabaya Tentang Penyelenggaraan Publikasi di Kota Surabaya
39	Liverpool	MoU Kerja Sama Sister City antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Liverpool Raya
40	Kochi	Pertukaran budaya secara online antara SD Laboratorium UNESA dengan SD Haruno Higashi Kochi
41	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan
42	Pemerintah Kabupaten Gresik	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kabupaten Gresik Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
43	Pemerintah Kabupaten Kediri	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Kediri Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
44	Pemerintah Kabupaten Malang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
45	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
46	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
47	Pemerintah Kabupaten Sampang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
48	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dan Pelayanan Masyarakat
49	Pemerintah Kota Bitung	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan
50	Pemerintah Kota Bitung	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Replikasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik
51	Pemerintah Kota Jambi	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penggunaan Sistem Aplikasi E-Performance
52	Pemerintah Kota Mojokerto	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah
53	Pemerintah Kota Padang	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan
54	Pemerintah Kota Padang	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Peningkatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan Melalui Aplikasi Eaudit
55	Pemerintah Kota Samarinda	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
56	Pemerintah Kota Surakarta	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pengembangan Pemasaran Produk Potensial Daerah dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
57	Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA	Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas Ia Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya
58	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum/Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
59	Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya dan PT Paskomnas Indonesia Tentang Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi inklusif di Kota Surabaya
60	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tentang Penyelenggaraan Kelurahan/Wilayah Binaan Berkelanjutan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
61	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta	Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
62	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
63	PT Agrinesia Raya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Agrinesia Raya Tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Surabaya
64	PT Airlanggatama Nusantaraakti	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Airlanggatama Nusantaraakti Tentang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Dupak Surabaya
65	PT Aneka Kimia Inti	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Aneka Kimia Inti Tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari Keluarga Miskin di Kota Surabaya
66	PT Bank Central Asia Tbk	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Dengan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya Tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Penyediaan Pembayaran dan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Fasilitas Perbankan
67	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Penyediaan Layanan Perbankan Dalam Pembayaran Pajak Daerah
68	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tentang Revitalisasi Sentra Kuliner di Jalan Karang Bulak Surabaya
69	PT Bayu Beringin Lestari (Plaza Surabaya)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bayu Beringin Lestari (Plaza Surabaya) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
70	PT Citra Agung Tirtajatim (ITC Mega Grosir)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Citra Agung Tirtajatim (ITC Mega Grosir) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
71	PT Disway Rumah Berita	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Disway Rumah Berita Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Sentra Wisata Kuliner (SWK), Hotel, dan Objek Wisata di Kota Surabaya
72	PT Dwijaya Manunggal (Royal Plaza)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Dwijaya Manunggal (Royal Plaza) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
73	PT Gala Bumiperkasa (Pasar Turi Baru Surabaya)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Gala Bumiperkasa (Pasar Turi Baru Surabaya) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
74	PT Gitanusa Sarana Niaga (Kaza City Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Gitanusa Sarana Niaga (Kaza City Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
75	PT Hardayawidya Graha (Grand City Mall & Convex)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Hardayawidya Graha (Grand City Mall & Convex) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
76	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari Keluarga Miskin di Kota Surabaya
77	PT Jasamitra Propertindo (Jembatan Merah Plaza)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Jasamitra Propertindo (Jembatan Merah Plaza) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
78	PT Jasamitra Propertindo (Pusat Grosir Surabaya)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Jasamitra Propertindo (Pusat Grosir Surabaya) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
79	PT Jawa Pos Koran	Perjanjian Kerja Sama Dukungan Publikasi Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Jawa Pos Koran
80	PT Kalista Nusa Armada	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Kalista Nusa Armada Tentang Penyelenggaraan Uji coba Bus Listrik di Kota Surabaya
81	PT Karya Niaga Abadi (J&T)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Karya Niaga Abadi (J&T) Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
82	PT Maspion (Maspion Square)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Maspion (Maspion Square) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
83	PT Pakuwon Jati, Tbk (Food Junction Grand Pakuwon)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pakuwon Jati, Tbk (Foodjunction Grand Pakuwon) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
84	PT Pakuwon Jati, Tbk (Pakuwon City Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pakuwon Jati, Tbk (Pakuwon City Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
85	PT Pakuwon Jati, Tbk (Tunjungan Plaza I, II, III, IV, V DAN VI)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pakuwon Jati, Tbk (Tunjungan Plaza I, II, III, IV, V dan VI) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
86	PT Pakuwon Permai (Pakuwon Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pakuwon Permai (Pakuwon Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
87	PT Pakuwon Permai (Pakuwon Trade Center)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pakuwon Permai (Pakuwon Trade Center) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
88	PT Pelindo Husada Citra (Rumah Sakit PHC Surabaya)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Pelindo Husada Citra (Rumah Sakit PHC Surabaya) Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
89	PT Pelindo Husada Citra (Rumah Sakit PHC Surabaya)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Pelindo Husada Citra (Rumah Sakit PHC Surabaya) Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
90	PT Penta Persada Pertiwi (Tunjungan Elektronik Center)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Penta Persada Pertiwi (Tunjungan Elektronik Center) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
91	PT Pos Indonesia (Persero)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
92	PT PP Properti (Lagoon Avenue)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT PP Properti (Lagoon Avenue) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
93	PT Primasentosa Ganda (Praxis Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Primasentosa Ganda (Praxis Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
94	PT Prosam Plano (Pasar Atom)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Prosam Plano (Pasar Atom) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
95	PT Puri Pariwara (WTC e-Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Puri Pariwara (WTC e-Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
96	PT Radar Media Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Dukungan Publikasi Kegiatan di Bidang Lingkungan Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Radar Media Surabaya
97	PT Senopati Perkasa (Pasar Atom Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Senopati Perkasa (Pasar Atom Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
98	PT Sentral Supel Perkasa (BG Junction Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Sentral Supel Perkasa (BG Junction Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
99	PT Sinar Galaxy (Galaxy Mall I, II dan III)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Sinar Galaxy (Galaxy Mall I, II dan III) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
100	PT Starlight Nusa Property (Spazio)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Starlight Nusa Property (Spazio) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
101	PT Tridjaya Kartika (Plasa Marina)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Tridjaya Kartika (Plasa Marina) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
102	PT United Tractors Tbk	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan PT. United Tractors Tbk Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
103	PT Usaha Bersama Sejati	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Usaha Bersama Sejati Tentang Pemberian Layanan Kesehatan Bagi Karyawan PT Usaha Bersama Sejati
104	PT Warna Warni Investama (The Central Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Warna Warni Investama (The Central Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
105	PT Win Win Realty Centre (Ciputra World Mall)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Win Win Realty Centre (Ciputra World Mall) Tentang Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Percepatan Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya
106	Pusat Koperasi Angkatan Laut Komando Armada II Surabaya	Addendum Kesepakatan Bersama Pengembangan Pariwisata di Kota Surabaya Nomor : 415.4/9223/436.1.2/2022 dan Nomor : Perja/53/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pusat Koperasi Angkatan Laut Komando Armada II Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
107	Mayapada Hospital Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Mayapada Hospital Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
108	Klinik Utama Rawat Inap Usada Buana	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Klinik Utama Rawat Inap Usada Buana Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
109	Konsil Kedokteran Indonesia	Nota Kesepakatan Antara Konsil Kedokteran Indonesia dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kota Surabaya
110	Rumah Sakit Adi Husada Kapasari	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
111	Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Bhayangkara Tk II HS. Samsoeri Mertojoso Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Dlkota Surabaya
112	Rumah Sakit Bunda	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Bunda Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
113	Rumah Sakit Gotong Royong	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Gotong Royong Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
114	Rumah Sakit Husada Utama	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Husada Utama Surabaya Tentang Pelayanan Rujukan dan Promosi Kesehatan Serta Program Pembangunan di Kota Surabaya
115	Rumah Sakit Ibu dan Anak Adi Guna	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Adi Guna Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
116	Rumah Sakit Ibu dan Anak Bantuan 05.08.05 Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bantuan 05.08.05 Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis di Kota Surabaya
117	Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
118	Rumah Sakit Ibu dan Anak Lombok Dua Dua Lontar	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Lombok Dua Dua Lontar Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
119	Rumah Sakit Ibu dan Anak Nur Ummi Numbi	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Nur Ummi Numbi Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
120	Rumah Sakit Ibu dan Anak Perdana Medica	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Perdana Medica Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
121	Rumah Sakit Ibu dan Anak Pura Raharja	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pura Raharja Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
122	Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
123	Rumah Sakit Islam Darus Syifa	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Islam Darus Syifa Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
124	Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
125	Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Islam Surabaya Jemursari Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
126	Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pendampingan dan Jejaring Rujukan Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya
127	Rumah Sakit Manyar Medical Centre	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Manyar Medical Centre Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
128	Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Gunungsari	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Gunungsari Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek di Kota Surabaya
129	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Mata di Kota Surabaya
130	Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
131	Rumah Sakit Muji Rahayu	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Muji Rahayu Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
132	Rumah Sakit National Hospital	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit National Hospital Tentang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit National Hospital
133	Rumah Sakit Onkologi Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Rumah Sakit Onkologi Surabaya Tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Sinergitas Pembangunan di Kota Surabaya
134	Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
135	Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan (RSPAL dr. Ramelan)	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek di Kota Surabaya
136	Rumah Sakit Royal Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Royal Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
137	Rumah Sakit TNI AU Soemitro	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit TNI AU Soemitro Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Kota Surabaya
138	Rumah Sakit Ubaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Ubaya Tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
139	Rumah Sakit Umum Al-Irsyad Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Al-Irsyad Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
140	Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
141	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek di Kota Surabaya
142	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek di Kota Surabaya
143	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek di Kota Surabaya dan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Dengan Dr. Soetomo Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mojo Surabaya serta Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Dengan Dr. Soetomo Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sewu Surabaya
144	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek di Kota Surabaya
145	Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima Provinsi Jawa Timur	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima Provinsi Jawa Timur Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Program Nasional di Kota Surabaya
146	Rumah Sakit Umum Siloam Hospitals Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Siloam Hospitals Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
147	Rumah Sakit Umum Surabaya Medical Service	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Surabaya Medical Service Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
148	Rumah Sakit Umum Tk. III Brawijaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Umum Tk. III Brawijaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Dlkota Surabaya
149	Rumah Sakit Universitas Airlangga	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Program Nasional di Kota Surabaya
150	Rumah Sakit Wijaya Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Wijaya Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
151	Rumah Sakit William Booth Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit William Booth Surabaya Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
152	Rumah Sakit Wiyung Sejahtera	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembinaan Teknis Ponek Serta Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
153	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo
154	SMA Kertajaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Sma Kertajaya Tentang Kerjasama Sinergi Pembangunan di Kota Surabaya

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Mitra Terkait	Nama Kerjasama
155	Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Berbasis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang Disinergikan Dengan Program Surabaya Mengajar
156	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Surabaya Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Surabaya
157	Universitas Terbuka	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Universitas Terbuka Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
158	Yayasan Bina Bhakti Lingkungan	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Yayasan Bina Bhakti Lingkungan Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
159	Yayasan Cahaya Harapan Bangsa	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Yayasan Cahaya Harapan Bangsa Tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari Keluarga Miskin di Kota Surabaya
160	Yayasan Edukasi dan Akselerasi Ekspor Indonesia Digital	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Yayasan Edukasi dan Akselerasi Ekspor Indonesia Digital
161	Yayasan Gugah Nurani Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Yayasan Gugah Nurani Indonesia Tentang Penanganan Stunting dan Pengembangan Produk Kampung Unggulan di Kota Surabaya
162	Yayasan Kebun Raya Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Yayasan Kebun Raya Indonesia Dengan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
163	Yayasan Pendidikan Kristen Gloria	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari Keluarga Miskin di Kota Surabaya
164	Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia Tentang Sinergi Pembangunan di Kota Surabaya
165	Yayasan Quali International Surabaya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dan Yayasan Qualiinternational Surabaya Tentang Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak di Kota Surabaya

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama, Tahun 2024

3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2023

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.35
Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2023**

No	Tanggal	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	02/02/2023	Juara 2 Kota Surabaya "Kategori Penghargaan Kinerja Investasi Terbaik Tahun 2022"	Provinsi Jawa Timur
2	21/02/2023	Memperingati Hari Neglected Tropical Diseases Sedunia, Bebas Frambuasi	Kemenkes
3	25/02/2023	Awarding TV One - Inspirasi Untuk Negeri Kategori Inovasi Pelayanan Digital	TV One
4	28/02/2023	Adipura Kencana 2022	Kementerian LHK

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Tanggal	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
5	14/03/2023	Universal Health Coverage "Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat"	BPJS Kesehatan
6	16/03/2023	Open Defecation Free (ODF) Masyarakat Sudah Terbebas Dari Perilaku Buang Air Besar Sembarangan	Dinas Kesehatan Prov Jatim
7	17/03/2023	Awarding The 8Th PR Indonesia Awards (PRIA) 2023	Public Relation (PR) Indonesia
8	20/03/2023	PPKM Award "Terbaik II Kategori Pengendalian Pandemi Covid 19 Wilayah Jawa Bali	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
9	20/03/2023	Digital Government Award (Anugrah Pemerintahan Digital)	Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
10	29/05/2023	E-Purchasing Award 2023 Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
11	08/06/2023	BKN Award 2023 Pemerintah Kota Tipe Besar Atas Capaian Dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja	BKN
12	27/06/2023	Terbaik 2 Nasional GDPK Award	BKKBN RI
13	16/07/2023	Pelaksanaan Gorong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur 2023, Terbaik I Kategori Kelurahan	Provinsi Jatim
14	22/07/2023	Penganugrahan Apresiasi Kota Layak Anak Tahun 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	26/07/2023	Pertama Penghargaan Terbaik 1 Intervensi Spesifik Stunting Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kedua Penghargaan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Terbaik II Se-Jawa Timur	Pemprov Jatim
16	28/07/2023	Penganugrahan Satu Data Jawa Timur	Provinsi Jatim
17	28/07/2023	Terbaik 1 Tingkat Nasional dalam Skrining Hepatitis B pada Ibu Hamil dalam rangkaian Peringatan Hepatitis Sedunia Tahun 2023	Kementerian Kesehatan RI
18	01/08/2023	Peringkat Ke II Kota Paling Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Bidang Tata Kelola Air Dan Tata Pamong (Governance)	UI Green City Metric
19	29/08/2023	Penganugrahan Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Entitas Pemerintahan Kategori Kota Besar Terbaik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2022	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
20	29/08/2023	Tokoh Yang Berkontribusi Pada Daerah Masing - Masing Kategori Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pendidikan	Tempo
21	30/08/2023	Penghargaan Program Reformasi Birokrasi	Merdeka.com
22	31/08/2023	Piagam Penghargaan atas dukungan Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Kementerian Kesehatan RI

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023**

No	Tanggal	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
23	14/09/2023	Penghargaan Kelurahan Bebas Stunting Award 2023 untuk Kelurahan Jambangan	BKKBN RI
24	27/09/2023	Peringkat 1 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kemendagri	BKKBN Jatim
25	09/10/2023	Puncak Penganugerahan Inotek Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	Provinsi Jawa Timur
26	18/10/2023	Penganugerahan Jatim Bangkit Awards 2023	JTV
27	26/10/2023	Akselerator Entaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	Media Nasional Di Jakarta (Kompas)
28	29/10/2023	Dukcapil Prima Award kategori Kota Dengan Jumlah Penduduk Besar	Ditjen Dukcapil Kemendagri
29	30/10/2023	Terbaik 1 JPRA 2023 Kategori Pers Rilis, Terbaik 1 JPRA 2023 Kategori Media Sosial, Terbaik 2 JPRA 2023 Kategori Website dan Terbaik 2 JPRA 2023 Program Komunikasi Publik.	JPRA 2023
30	30/10/2023	Terbaik 1 Kategori Media Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Anugerah Media Humas (AMH) 2023 Kemenkominfo
31	09/11/2023	Kategori Daerah Dengan Angka Kemiskinan Terendah, Daerah Dengan Penurunan Tingkat Stunting Tertinggi, Dan Daerah Dengan Angka Stunting Terendah.	Media Nasional Tribun News
32	14/11/2023	Child Friendly City Initiatives (CFCI) / Kota Layak Anak Tingkat Dunia	UNICEF dan BAPPENAS RI
33	20/11/2023	Keberhasilannya Dalam Memenuhi Standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak Dengan Nilai Tertinggi Pada Jenjang SMP Pada Tahun 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	20/11/2023	Standarisasi PUSPAGA peringkat Utama "PUSPAGA Semanggi Kota Surabaya"	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
35	27/11/2023	Detik Jatim Awards 2023 Kategori Membuka Lapangan Kerja Keluarga Miskin	Kantor Berita Detik
36	28/11/2023	Kategori Wistara Swasti Saba dan Kategori Pratama Terbaik 1 STBM 2023	Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Swasti Saba dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2023
37	28/11/2023	Perpustakaan Umum Kota Surabaya memenuhi Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan Kategori Madya Tahun 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38	02/12/2023	Percepatan Penurunan Stunting dan Aplikasi Sayang Warga	Indonesia Healthcare Innovation Award

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

No	Tanggal	Judul Penghargaan	Pemberi Penghargaan
39	13/12/2023	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Mentor	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40	15/12/2023	Anugerah Antara Jatim 2023	Kantor Berita Antara
41	18/12/2023	POTAS Award Kategori Tokoh Inspiratif Dalam Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya	Potas (Pokja Wartawan Taman Surya)
42	20/12/2023	Anugerah Revolusi Mental 2023	Wakil Presiden RI
43	20/12/2023	Pemenang Pertama Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan Kategori Pemerintah Kota Surabaya	Kementerian PUPR
44	22/12/2023	Penghargaan Daerah Ramah Perempuan Dan Layak Anak (DPRLA) Tahun 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, lalu dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota/Kabupaten, serta dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2023 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan di bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan dan tidak memiliki Desa, sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan dibawahnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan bahwa Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2023 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan di bawahnya.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2023 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya selama satu tahun anggaran. LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2023 merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya serta rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sepanjang Tahun Anggaran 2023 pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya tetap dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan capaian nilai Indikator Kinerja Utama antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,7%; Indeks Gini sebesar 0,423; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,76%; Persentase Penduduk Miskin sebesar 4,65%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,99 dengan kategori “**sangat tinggi**”; Indeks Harmoni Sosial sebesar 82,7; Indeks Infrastruktur sebesar 0,75; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebesar 70,35; Indeks Reformasi Birokrasi mendapatkan huruf A dengan nilai 95,12; Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota sebesar 0,93. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diraih tidak terlepas dari daya upaya dan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Pencapaian pembangunan yang telah disampaikan menunjukkan pemulihan dan peningkatan produktivitas penduduk Kota Surabaya pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar Pembangunan dapat berkelanjutan, adil, dan inklusif. Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, maka catatan-catatan strategis,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota
Akhir Tahun Anggaran 2023

saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Surabaya, 13 Maret 2024
Walikota Surabaya

ERI CAHYADI, ST, MT